



BUKU I

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah selesai disusun dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD Kota Sukabumi Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun kelima perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023. Selanjutnya, dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2022 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 ini, kami ucapkan terima kasih.

Sukabumi, Juli 2022

WALI KOTA SUKABUMI

ttd

ACHMAD FAHMI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	11
1.3 Hubungan Antar Dokumen	15
1.4 Maksud dan Tujuan	18
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	19
BAB II GAMBAR UMUM KONDISI DAERAH	21
2.1 Kondisi Umum Daerah	21
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi	21
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	22
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	24
2.1.1.3 Topografi dan Kemiringan Lahan	24
2.1.1.4 Struktur Geologi	27
2.1.1.5 Hidrologi	29
2.1.1.6 Klimatologi	31
2.1.1.7 Pola Penggunaan Lahan	32
2.1.1.8 Daerah Rawan Bencana	33
2.1.1.9 Demografi	35
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	37
2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB	37
2.1.2.2 PDRB per Kapita	42
2.1.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	44
2.1.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	46
2.1.2.5 Persentase Penduduk Miskin ...	48
2.1.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	53
2.1.2.7 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ..	55
2.1.2.8 Harapan Lama Sekolah (HLS) ...	56
2.1.2.9 Angka Harapan Hidup (AHH)	57
2.1.2.10 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	59
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	59
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	60
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan	74
2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan	88



2.1.3.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	93
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	97
2.1.4.1	Indikator Kinerja Utama	97
2.1.4.2	Inovasi	101
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	109
2.2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021	109
2.2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2022 Triwulan I dan Realisasi RPJMD	118
2.3	Kondisi Masa Pandemi COVID-19 di Kota Sukabumi	131
2.3.1	Kondisi Kesehatan Masa Pandemi COVID-19	132
2.3.2	Kondisi Ekonomi Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2021	133
2.3.3	Kondisi Sosial Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2021	133
2.3.4	Kondisi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.....	134
2.4	Permasalahan Pembangunan Daerah	134
2.4.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	135
2.4.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	135
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	144
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	144
3.1.1	Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Nasional	147
3.1.2	Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Provinsi Jawa Barat	149
3.1.3	Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Kota Sukabumi	152
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	159
3.2.1	Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	161
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	163
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	170
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	175
3.3	Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah ..	180



BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	185
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	188
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	188
4.1.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	201
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Sukabumi 2023	207
4.1.4	Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	218
4.2.2	Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	266
4.2.3	Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD	275
4.2.4	Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi	281
4.2.5	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023	302
4.2.6	Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2023	402
4.2.7	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan ..	485
4.2.7.1	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kota	485
4.2.7.2	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota	486
4.2.7.3	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah Kota	486
4.2.8	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	488
4.3	Inovasi Daerah	497
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022	524
5.1	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	524
5.2	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	537
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	538
6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	541



6.2	Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK)	543
BAB VII	PENUTUP	557



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Dataran Masing-masing Kecamatan di Kota Sukabumi	22
Tabel 2.2	Luas Potensi Gerakan Tanah di Kota Sukabumi	26
Tabel 2.3	Luas dan Jenis Batuan di DAS Cimandiri	28
Tabel 2.4	Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kota Sukabumi ...	30
Tabel 2.5	Curah Hujan Harian (mm) di Kota Sukabumi Pada Stasiun Ciaul	32
Tabel 2.6	Potensi Gempa di Kota Sukabumi	34
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2017 – 2021.....	36
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi, 2021	36
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Sukabumi (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021	38
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016–2021 (Persen)	39
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sukabumi menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2021	41
Tabel 2.12	Capaian dan Target Pertumbuhan Ekonomi 2019-2021	41
Tabel 2.13	PDRB Per Kapita Kota Sukabumi Tahun 2017–2021	42
Tabel 2.14	Capaian dan Target Gini Ratio 2019-2021	44
Tabel 2.15	Capaian dan Target Indeks Pembangunan Manusia 2019-2021 (Poin)	48
Tabel 2.16	Capaian dan Target Persentase Penduduk Miskin 2019-2021 (Persen)	49
Tabel 2.17	Capaian dan Target Jumlah Penduduk Miskin 2019-2021 (Ribu Jiwa)	50
Tabel 2.18	Capaian Kedalaman (P1) Kemiskinan 2019-2021(poin)	50
Tabel 2.19	Capaian Keparahan (P2) Kemiskinan 2019-2021(poin)	51
Tabel 2.20	Capaian dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2019-2021(Persen)	54
Tabel 2.21	Capaian dan Target Jumlah Pengangguran 2019-2021(Orang)	54
Tabel 2.22	Capaian dan Target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2019-2021(Tahun)	56
Tabel 2.23	Capaian dan Target Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 2019-2021(Tahun)	57



Tabel 2.24	Capaian dan Target Angka Harapan Hidup (AHH) 2019-2021(Tahun)	58
Tabel 2.25	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019 – 2021	60
Tabel 2.26	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2021	61
Tabel 2.27	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2019 – 2021	62
Tabel 2.28	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2021	64
Tabel 2.29	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 - 2021	65
Tabel 2.30	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021	68
Tabel 2.31	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 - 2021	68
Tabel 2.32	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021	70
Tabel 2.33	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 - 2021	70
Tabel 2.34	Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	72
Tabel 2.35	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019 – 2021	72
Tabel 2.36	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2021	73
Tabel 2.37	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019 - 2021	74
Tabel 2.38	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 - 2021	75
Tabel 2.39	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2019 - 2021	76
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019 - 2021	77
Tabel 2.41	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2021	77
Tabel 2.42	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 - 2021	78
Tabel 2.43	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 – 2021	79
Tabel 2.44	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019 – 2021	80



Tabel 2.45	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 - 2021	81
Tabel 2.46	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2019 - 2021	82
Tabel 2.47	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2019 - 2021	83
Tabel 2.48	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 - 2021	83
Tabel 2.49	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019 - 2021	84
Tabel 2.50	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019 - 2021	85
Tabel 2.51	Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2019 - 2021	86
Tabel 2.52	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2019 - 2021	86
Tabel 2.53	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2019 - 2021	87
Tabel 2.54	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 - 2021	88
Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019 - 2021	89
Tabel 2.56	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019 - 2021	90
Tabel 2.57	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2019 - 2021	91
Tabel 2.58	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2019 - 2021	92
Tabel 2.59	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019 - 2021	93
Tabel 2.60	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengadaan Tahun 2019 - 2021	94
Tabel 2.61	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2019 - 2021	95
Tabel 2.62	Capaian Indikator Kinerja Urusan Manajemen Keuangan Tahun 2019 - 2021	96
Tabel 2.63	Capaian Indikator Kinerja Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Tahun 2019 - 2021	97
Tabel 2.64	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	99
Tabel 2.65	Capaian Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	110
Tabel 2.66	Skala Nilai Peringkat Kinerja	116
Tabel 2.67	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2022 Triwulan I	119
Tabel 2.68	Rekapitulasi Permasalahan Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan	136
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023	152



Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Sukabumi disandingkan dengan Provinsi dan Nasional	154
Tabel 3.3	Pendapatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2023	165
Tabel 3.4	Proyeksi Belanja Daerah pada RKPD Tahun 2023 ..	173
Tabel 3.5	Alokasi Anggaran Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Pada RKPD Tahun 2023	175
Tabel 3.6	Proyeksi Pembiayaan Daerah dalam RKPD Tahun 2023	178
Tabel 4.1	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Tahun 2021 s/d 2023	213
Tabel 4.2	Arah Kebijakan Pembangunan Sesuai Urusan Pemerintahan Daerah	226
Tabel 4.3	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan	269
Tabel 4.4	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis	272
Tabel 4.5	Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023	283
Tabel 4.6	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023	291
Tabel 4.7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Isu Strategi	305
Tabel 4.8	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023 per tahun	307
Tabel 4.9	Keterkaitan Priotas pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023	318
Tabel 4.10	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	323
Tabel 4.11	Keterkaitan Misi, dengan Prioritas Pembangunan, Program Pembangunan dan Program Unggulan/Janji Tahunan	329
Tabel 4.12	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 1, Peningkatan Sumber Daya Manusia atau SDM Yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia	345
Tabel 4.13	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 2, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Implementasi Reformasi Birokrasi yang Inovatif Berbasis Teknologi Informasi.....	351
Tabel 4.14	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 3,	



	Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar untuk Kesejahteraan Masyarakat.....	359
Tabel 4.15	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 4, Peningkatan Dukungan Infrastruktur untuk Pembangunan.....	364
Tabel 4.16	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 5, Pengembangan Ekonomi yang Berkelanjutan	369
Tabel 4.17	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 6, Penanganan dan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19	377
Tabel 4.18	Penjabaran Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Kedalam Program Prioritas, Kegiatan Pembangunan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah	381
Tabel 4.19	Proyek Strategis Kota Sukabumi Tahun 2023.....	402
Tabel 4.20	Sinergitas Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Sukabumi Tahun 2023.....	403
Tabel 4.21	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi Tahun 2023	404
Tabel 4.22	Persandingan Keselarasan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 dengan Sasaran Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi Tahun 2023.....	405
Tabel 4.23	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Kota Sukabumi, Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	410
Tabel 4.24	Perbandingan Program Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Nasional Tahun 2023	425
Tabel 4.25	Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023	435
Tabel 4.26	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 s.d 2023	490
Tabel 4.27	Inovasi Daerah Kota Sukabumi.....	500
Tabel 5.1	Pagu Perangkat Daerah Berdasarkan APBD dan Proyeksi RPJMD Tahun 2023	525
Tabel 5.2	Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Anggaran Per Urusan Pada RKPD Tahun 2023	527



Tabel 5.3	Rekapitulasi Anggaran Pada RKPD Tahun 2023 Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Pencapaian IKU Daerah.....	529
Tabel 5.4	Rekapitulasi Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang Yang Diakomodir Perangkat Daerah...	534
Tabel 5.5	Rekapitulasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Yang diakomodir Perangkat Daerah.....	536
Tabel 6.1	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023	540
Tabel 6.2	Proyeksi Indikator Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023	540
Table 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Sukabumi Tahun 2021-2023	541
Tabel 6.4	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2021-2023	544



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur dan Tahapan Proses Penyusunan Substansi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2022	10
Gambar 1.2	Jadwal Penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023	10
Gambar 1.3	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	17
Gambar 2.1	Persentase Luas Wilayah Kota Sukabumi Menurut Kecamatan	23
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kota Sukabumi	23
Gambar 2.3	Peta Topografi Kota Sukabumi	25
Gambar 2.4	Peta Kemiringan Lereng Kota Sukabumi	25
Gambar 2.5	Peta Rawan Gerakan Tanah di Kota Sukabumi ...	27
Gambar 2.6	Peta Geologi Kota Sukabumi	29
Gambar 2.7	Peta Daerah Aliran Sungai Kota Sukabumi	31
Gambar 2.8	Peta Tutupan Lahan Kota Sukabumi	33
Gambar 2.9	Peta Rawan Gunung Api Kota Sukabumi	34
Gambar 2.10	Peta Rawan Gempa Kota Sukabumi	35
Gambar 2.11	Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Dengan Provinsi dan Nasional 2021	42
Gambar 2.12	Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Sukabumi	44
Gambar 2.13	Perbandingan Capaian Gini Ratio dengan Provinsi dan Nasional 2019-2021	45
Gambar 2.14	Grafik Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat	47
Gambar 2.15	Perbandingan Capaian IPM dengan Provinsi dan Nasional 2021	48
Gambar 2.16	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin	49
Gambar 2.17	Perbandingan capaian Persentase Penduduk Miskin dengan Provinsi dan Nasional 2019-2021	50
Gambar 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021	53
Gambar 2.19	Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Dengan Provinsi dan Nasional 2019-2021	54
Gambar 2.20	Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Daerah Tahun 2016-2021	55
Gambar 2.21	Perkembangan Angka HLS Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021	56
Gambar 2.22	Perkembangan AHH Daerah Tahun 2016-2021 ...	57
Gambar 2.23	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2016-2020	59
Gambar 2.24	Jumlah Perangkat Daerah berdasarkan Kriteria Capaian Anggaran dan Kinerja tahun 2021	117
Gambar 2.25	Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2021	118



Gambar 3.1	Perkembangan Pendanaan APBN Melalui Tugas Pembantuan di Daerah Tahun 2013 – 2019	181
Gambar 4.1	Pendekatan perencanaan berbasis T-H-I-S	185
Gambar 4.2	Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Program Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023	187
Gambar 4.3	Prioritas Pembangunan dan Misi dalam Pencapaian	211
Gambar 4.4	Tema Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD	302
Gambar 4.5	Tema atau Fokus Pembangunan Tahunan Periode 2018-2023	303
Gambar 4.6	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis	306
Gambar 4.7	Peta Rencana Kawasan Strategis	488



**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2023**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022 - 2042 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.

Pasal 3

Dalam hal RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbeda dengan RAPBD hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menggunakan RAPBD Tahun 2023 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
pada tanggal : J U L I 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal ... Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : JULI 2022

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai sebuah siklus dan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 2005-2025 periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, dan sebagai dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Kota Sukabumi sebagai salah satu bagian



pemerintah daerah senantiasa menyusun RKPD sesuai dengan tahapan dan alur yang diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara umum, dokumen RKPD mempunyai nilai penting, antara lain:

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, dan sebagai dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara umum, dokumen RKPD mempunyai nilai penting, antara lain:

1. merupakan instrumen pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018–2023;
2. menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023;
4. menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan RAPBD Kota Sukabumi Tahun 2023; dan
5. menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD dengan berpedoman kepada sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, Rancangan Awal RKP Tahun 2023, hasil evaluasi RPJMD 2018-2023, evaluasi RKPD Tahun 2021 dan evaluasi RKPD Tahun 2022 Triwulan I



2. Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari tahapan awal yang terdiri dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD, Forum Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau hasil reses DPRD serta Musrenbang Tingkat Kota.
3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, melalui tahapan pembahasan prioritas bidang urusan oleh Bappeda, Perangkat Daerah, memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, serta pendapat dari kalangan akademisi, dunia usaha dan komunitas.
4. Penetapan RKPD, berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, hasil Rapat Koordinasi Teknis dan Pra Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Jawa Barat serta verifikasi akhir untuk program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023.

Penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 dilaksanakan melalui pendekatan:

1. *Top down* yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat provinsi dan kota.
2. *Bottom-up* yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Perangkat Daerah (FPD), dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan berupa matrik program/kegiatan prioritas sampai dengan Acara Puncak Musrenbang RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023.
3. Teknokratik yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan hasil kajian dan evaluasi periode sebelumnya berbasis pengetahuan, ilmu, dan teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.



4. Politik yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodasinya Pokok-pokok Pikiran atau hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi.
5. Partisipatif yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
6. Kompetitif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan metode seleksi proposal usulan program dan kegiatan dengan kriteria tertentu dan melalui beberapa tahapan seleksi.
7. Sosio-kultural, yaitu pendekatan yang memperhatikan aspek budaya daerah di Kota Sukabumi dan nilai-nilai kearifan lokal.
8. Pendekatan Perencanaan Tematik, yaitu melalui penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, misalnya setiap satu tahun sekali.
9. Pendekatan Perencanaan Holistik pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi multi kementerian dan antar Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/Lembaga dan antar Perangkat Daerah di tingkat provinsi/kabupaten.
10. Pendekatan integratif dalam perencanaan pembangunan, lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu Perangkat Daerah dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada Perangkat Daerah lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas.



11. Pendekatan spasial dalam tahapan perencanaan pembangunan, digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa PD untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan dari kabupaten/kota.

Selain pendekatan di atas, penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 juga menerapkan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, yaitu:

- 1) Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*).

Dalam proses ini *Academic* terdiri dari unsur perguruan tinggi dan peneliti yang bisa berperan sebagai konseptor dengan memberikan ide-ide dan masukan terbaik bagi pembangunan daerah. Hal yang dapat dilakukan diantaranya melakukan identifikasi potensi daerah serta berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan bisa mendorong inovasi-inovasi terbaru dalam proses pembangunan daerah. *Business* meliputi unsur pengusaha/pihak swasta yang berperan sebagai *enabler* atau fasilitator. Disini sektor swasta sangat berperan dalam menciptakan nilai tambah dan sebagai unsur penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu sektor swasta diharapkan juga dapat berperan dalam mendukung hadirnya infrastruktur teknologi dan modal usaha khususnya bagi kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Community* merupakan unsur masyarakat yang berperan sebagai akselerator dan penerima manfaat. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang selama ini dijalankan, masyarakat senantiasa dilibatkan sejak proses awal yaitu melalui Musrenbang di tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kota serta dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. *Government* atau pemerintah mempunyai fungsi sebagai regulator yaitu menetapkan kebijakan, peraturan perundang-undangan serta dalam proses pengawasannya. Pemerintah berperan dari mulai sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi, serta dalam proses perizinan dan pelayanan publik. Selain itu pemerintah harus juga



berperan sebagai koordinator dan pengatur irama dalam menyatukan berbagai kepentingan demi pengembangan potensi dan pendapatan daerah serta pembangunan daerah secara keseluruhan. *Media* berperan dalam menjalankan fungsi publikasi dan promosi serta membuat *brand image* bagi suatu tujuan atau prospek tertentu. Selanjutnya media juga bisa berperan sebagai perantara desiminasi informasi di antara pemangku kepentingan dalam konsep *pentahelix*.

- 2) Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dana masyarakat/umat, Pinjaman Daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Obligasi Daerah.

Dalam proses ini tentu Pemerintah Daerah Kota Sukabumi sangat membutuhkan *support* anggaran dari berbagai sumber dalam menjalankan pelayanan publik serta melaksanakan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu dukungan anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, swasta dan lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan diolah sedemikian rupa supaya tepat sasaran dan tepat guna.

- 3) Penerapan *Dynamic Government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui *Dynamic Government* maka pilihan-pilihan kebijakan yang ditetapkan dapat diadaptasikan dengan perkembangan terkini dalam lingkungan yang sering mengalami perubahan sehingga lembaga pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya serta senantiasa menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

- 4) Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data

Pada era digitalisasi seperti sekarang ini, maka sistem informasi menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan agar kita tidak ketinggalan dan tentunya dapat membantu memudahkan pekerjaan. Namun demikian sebuah sistem informasi yang baik adalah yang terintegrasi dengan sistem lainnya sehingga akan semakin memudahkan para penggunanya. Sinkronisasi aplikasi yang dilakukan di Kota Sukabumi adalah melalui:



- a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
 - b. Sistem perencanaan dan penganggaran terintegrasi dengan pemerintah Daerah Provinsi
 - c. Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - d. Portal Satu Data Indonesia untuk Kota Sukabumi
- 5) Digitalisasi sistem perencanaan:
- Proses digitalisasi sistem perencanaan terutama melalui pemanfaatan secara maksimal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam menu perencanaan yang diintegrasikan dengan menu lainnya, meliputi:
- a. Sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah Provinsi dengan dan Pemerintah Pusat Pusat (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah / SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (3), bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis e-planning.
 - b. Usulan Masyarakat merupakan menu yang diperuntukkan dalam mengusulkan usulan masyarakat hasil rembuk warga yang selanjutnya dibahas di Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan terakhir di Musrenbang Tingkat Kota.
 - c. Pengusulan Hibah Bansos merupakan menu dalam menampung usulan kebutuhan individu ataupun lembaga masyarakat yang membutuhkan bantuan anggaran untuk individu atau lembaganya.
 - d. Pengusulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan menu untuk menampung aspirasi para anggota DPRD Kota Sukabumi berdasarkan hasil reses anggota DPRD yang selanjutnya di entrikan dalam SIPD.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi masih dihadapkan pada tantangan dalam pemulihan pasca Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pandemi *Covid-19* tahun ini sudah cukup terkendali penyebarannya, diharapkan tahun ini juga status pandemi bisa dijadikan endemi sehingga proses pemulihan pasca Pandemi *Covid-*



19 bisa semakin optimal. Tahun 2023 merupakan kunci untuk memperkuat pemulihan ekonomi, karena itu dalam RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 perlu dicantumkan pokok-pokok penting yang akan dilakukan dalam proses pemulihan ekonomi tersebut.

Pandemi *Covid-19* telah memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan. Selain itu pandemi ini juga telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi, namun demikian harus disadari bahwa pandemi ini menghasilkan peluang baru bagi proses kehidupan terutama dari sisi ekonomi. Terdapat 10 (sepuluh) tren yang bisa menjadi peluang pengembangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2022, yaitu: 1. Industri 4.0; 2. Digital dan Data; 3. Kebangkitan Disrupsi Digital; 4. Perangkat Pintar dan Infra; 5. Mengubah Keseimbangan Kekuatan Ekonomi; 6. Revitalisasi Energi; 7. Kesehatan; 8. Tempat Tinggal; 9. Globalisasi dan 10. Perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan 10 (sepuluh) tren diatas, maka beberapa asumsi yang bisa menjadi peluang bagi Kota Sukabumi sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat hidup mandiri dengan meningkatkan kegiatan ekonomi setelah mengalami krisis pandemi *Covid-19*, sejalan dengan proses vaksinasi yang sedang massif dilakukan
2. Angka dan data menjadi acuan masyarakat untuk menggunakan perangkat dan infrastruktur pintar untuk transaksi perdagangan
3. Dimulainya kegiatan (kapasitas dan tenaga kerja) di bidang manufaktur, investasi, dan pariwisata terkait dengan pemulihan kemandirian kehidupan masyarakat
4. Menciptakan dan menjadi pusat inovasi digital dengan memproduksi sesuai dengan permintaan
5. Menciptakan peluang dalam berinvestasi maupun berusaha di bidang pariwisata

Dalam upaya mendukung proses penanganan pandemi *Covid-19* tersebut, dilakukan perubahan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 sebagai



berikut: 1) peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berakhlak mulia, 2) peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi, 3) peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat, 4) peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan, 5) pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan 6) penanganan dan pemulihan dampak pandemi *Covid-19*.

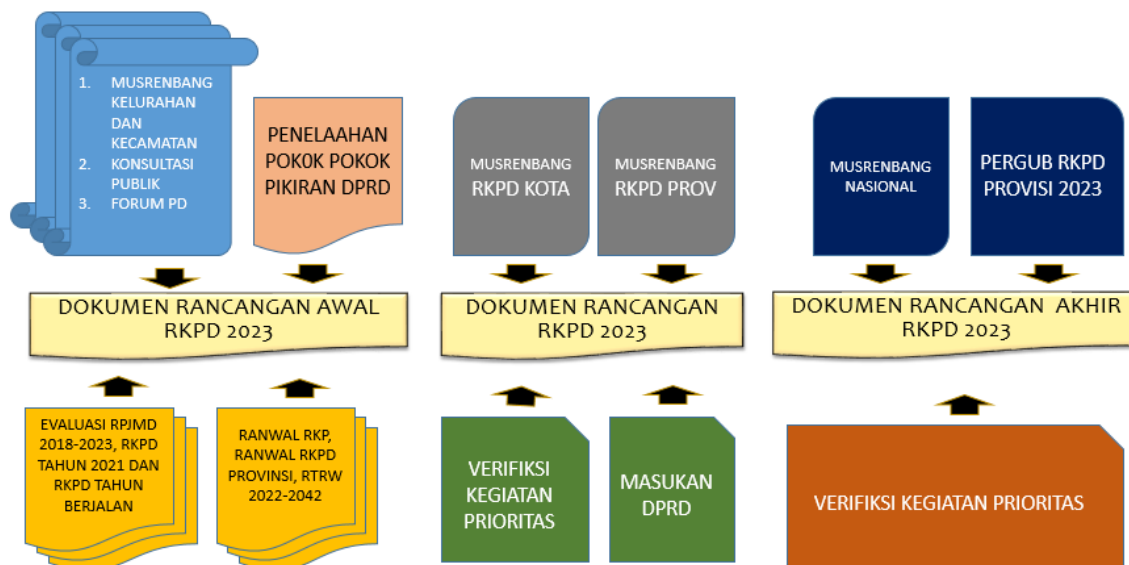
Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023. Adapun tema pembangunan yang diambil pada penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah **Mencapai Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera**. Dengan demikian maka penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 akan ditujukan secara maksimal dalam mewujudkan tema tersebut. Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu **Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat** serta telah selaras juga dengan tema RKP yaitu **Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Pada prinsip ketiga tema tersebut bertujuan untuk mencapai masyarakat yang mandiri, unggul dan sejahtera terutama melalui pembangunan ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh unsur masyarakat.

Penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, baik untuk sistematika ataupun alur proses pelaksanaannya. Selanjutnya telah dilakukan berbagai rangkaian kegiatan dalam mendukung proses penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 yaitu: *Kick Off Meeting* Perencanaan Tahun 2023, Rembug RW, Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, Forum Perangkat Daerah dan diakhiri dengan Musrenbang tingkat Kota Sukabumi. Setelah itu dilakukan tahapan penyusunan Rancangan akhir yang didalamnya dilengkapi dengan proses Reviu Inspektorat dan Fasilitasi Provinsi serta terakhir adalah proses penetapan RKPD Tahun 2023 melalui Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023.

Penyusunan dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 dilaksanakan melalui tahapan dan alur di bawah ini.



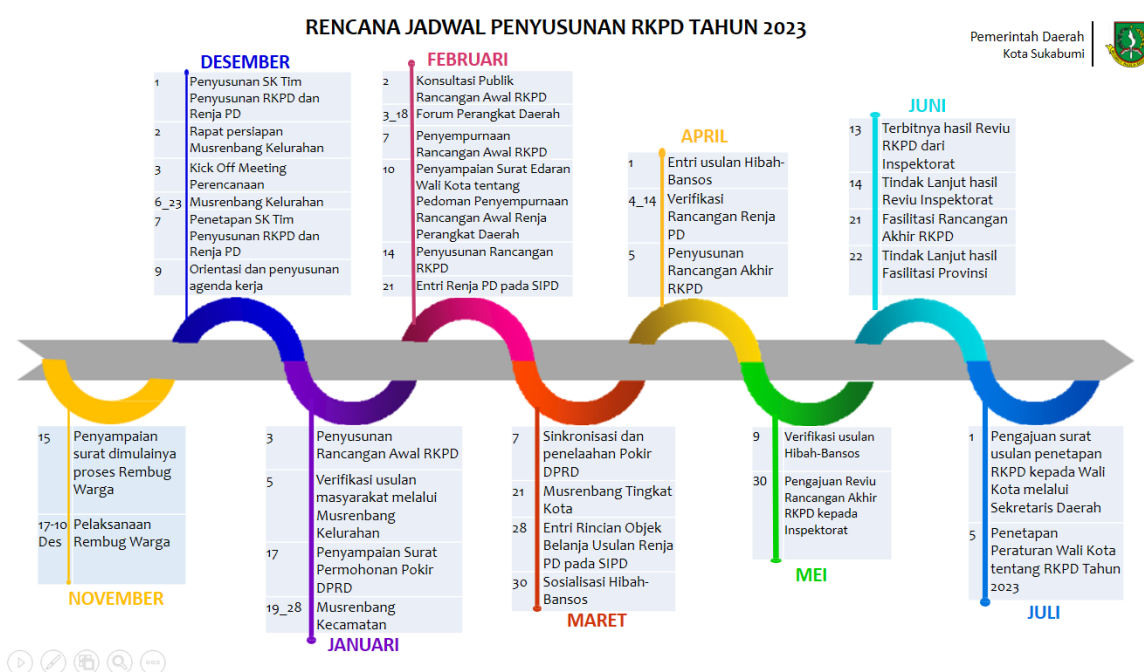
Gambar 1.1
Alur dan Tahapan Proses Penyusunan Substansi RKPD
Kota Sukabumi Tahun 2023



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2022

Berdasarkan alur dan tahapan proses penyusunan RKPD diatas, maka telah disusun jadwal tentative pelaksanaan perencanaan Tahun 2023 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Jadwal Penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023





1.2 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
22. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 35. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



37. Agar ditambahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
38. Agar ditambahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, Nomor 22 Seri E);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
40. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64).
43. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022 – 2042 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di



tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan jangka panjang yaitu RPJPD, jangka menengah yaitu RPJMD dan jangka pendek yaitu RKPD.

RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berisi visi, misi, arah kebijakan, strategi dan target-target kinerja untuk jangka panjang sebagai acuan penyusunan RPJMD. Selanjutnya RPJMD disusun dari rangkaian proses penjabaran atas visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Secara struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Adapun yang termasuk dalam dokumen perencanaan berskala daerah adalah:

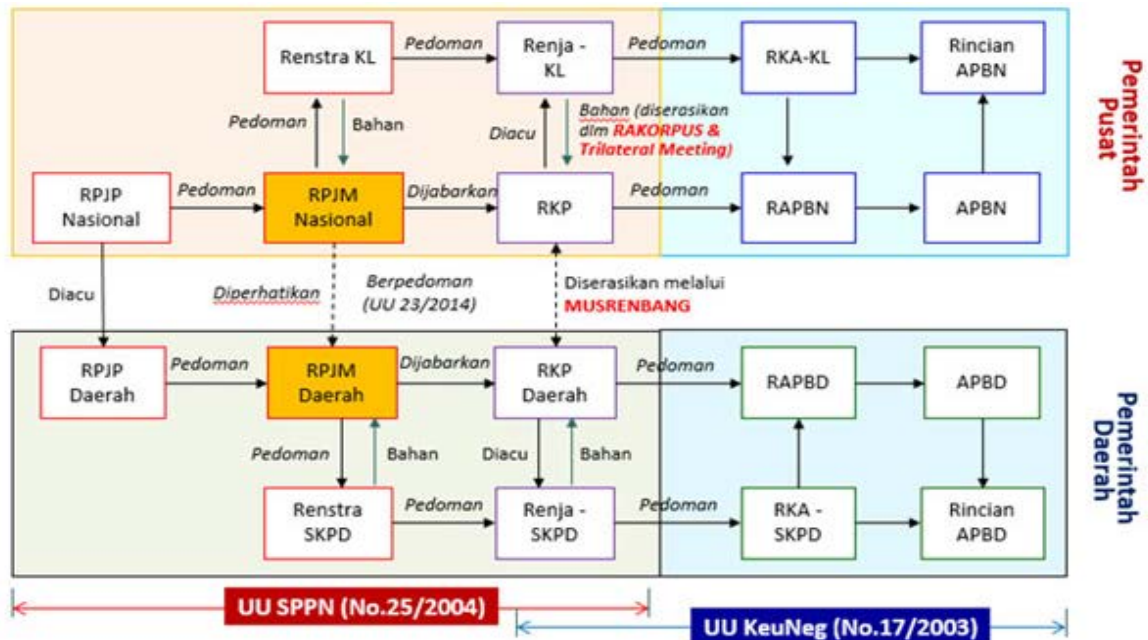
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan RKPD diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka



hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.3
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Sumber Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas RPJMN dan RPJMD merupakan 2 (dua) dokumen perencanaan yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selain itu juga memuat program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan program pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023; tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2023; serta RTRW Kota Sukabumi Tahun 2011–2031.

Dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan



tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD akan dijadikan penganggaran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD Kota Sukabumi Tahun 2023, yang terdiri atas KUA-PPAS yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perangkat Daerah).

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD merupakan rencana pembangunan tahunan yang bersifat aspiratif dan terpadu yang bersumber dari berbagai pelaku pembangunan agar tercipta pembangunan yang sinergi dan efisien. Penyusunan RKPD disesuaikan dengan alokasi sumber daya pembangunan yang dimiliki dan diharapkan akan memberi arah rencana kerja pembangunan di Tahun 2023 bagi Perangkat Daerah agar sesuai dengan sasaran RPJMD dan renstra Perangkat Daerah terkait. RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 telah mempertimbangkan isu strategis yang diperkirakan akan mempengaruhi proses pembangunan di Tahun 2023, serta telah mempertimbangkan arah kebijakan dan target indikator kinerja pembangunan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kota Sukabumi Tahun 2023.

Maksud dari penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 sebagai acuan dan pedoman penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 serta pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi tahun 2023. Tujuan yang akan dicapai dari penyusunan RKPD, yaitu:

1. Tercapainya sasaran pembangunan Kota Sukabumi;
2. Terlaksananya prioritas pembangunan Kota Sukabumi yang selaras dengan prioritas nasional tahun 2023 dan Prioritas Provinsi Jawa Barat
3. Terlaksananya program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah;



4. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan;
5. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas; dan
6. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Fungsi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 merupakan dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan untuk:

- 1) Perangkat Daerah Kota Sukabumi dalam menyusun Renja PD;
- 2) Penyusunan RAPBD Kota Sukabumi Tahun 2023; dan
- 3) Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya para pemangku kepentingan pembangunan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Penyusunan dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, terdiri dari:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Hubungan antar Dokumen;
- 1.4 Maksud dan Tujuan;
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bagian ini menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan, terdiri dari:

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah,
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Tahun 2021
- 2.3. Kondisi Masa Pandemi COVID-19 di Kota Sukabumi



- 2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah
- 2.5. Inovasi

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pada bagian ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, terdiri dari:

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- 3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada Bab ini dijelaskan tentang:

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023
- 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023
- 4.3 Inovasi Daerah.

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2023.

Menjelaskan tentang Sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, Program Unggulan dan kegiatan prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023, serta rencana program dan kegiatan Tahun 2023.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan tentang realisasi dan proyeksi indikator makro Kota Sukabumi, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2023 serta kaidah pelaksanaan RKPD.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi, merupakan data dan informasi yang menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD Tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

Kondisi dari aspek geografi dan demografi Kota Sukabumi dapat dijelaskan sebagai berikut:



2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kota Sukabumi terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Wilayah Kota Sukabumi berbatasan dengan beberapa Kecamatan di kabupaten Sukabumi, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Wilayah administrasi Kota Sukabumi terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu dan Kecamatan Cibeureum. Jarak terjauh dari Balaikota Sukabumi adalah Kecamatan Lembursitu, yakni sejauh 7 km. Luas dataran masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 2.1 sedangkan persentase luas wilayah Kota Sukabumi per Kecamatan disajikan pada Gambar 2.1 berikut ini:

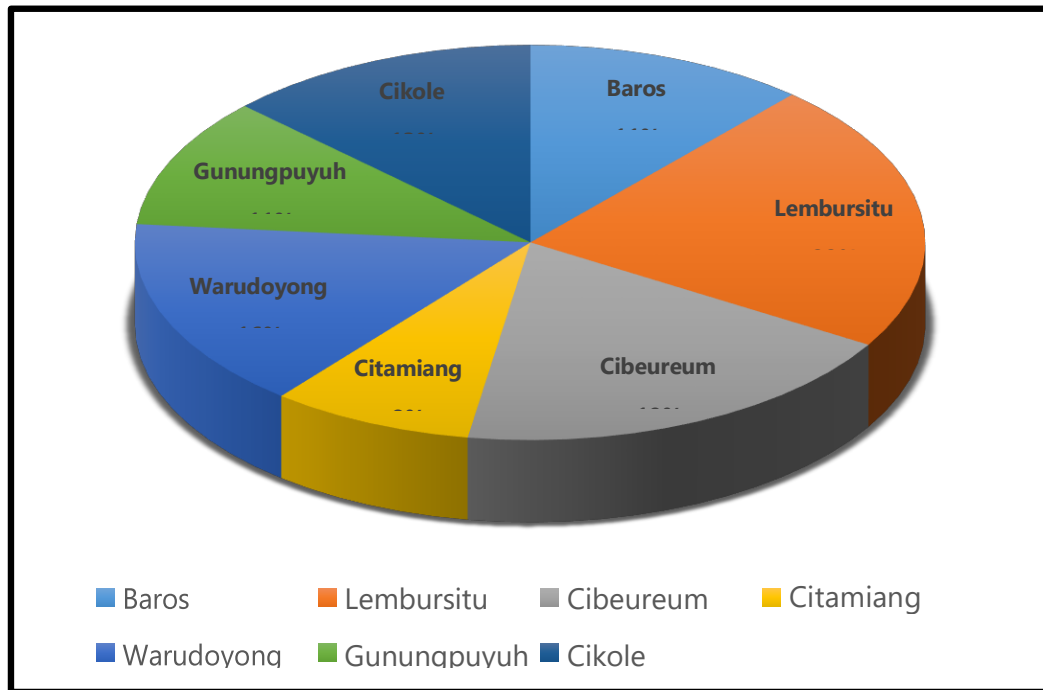
Tabel 2.1.
Luas Dataran Masing-masing Kecamatan di Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Luas (Km²)
1	Baros	5,58
2	Lembursitu	10,69
3	Cibeureum	9,12
4	Citamiang	4,01
5	Warudoyong	7,56
6	Gunungpuyuh	5,15
7	Cikole	6,22
Luas Total		48,33

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2022



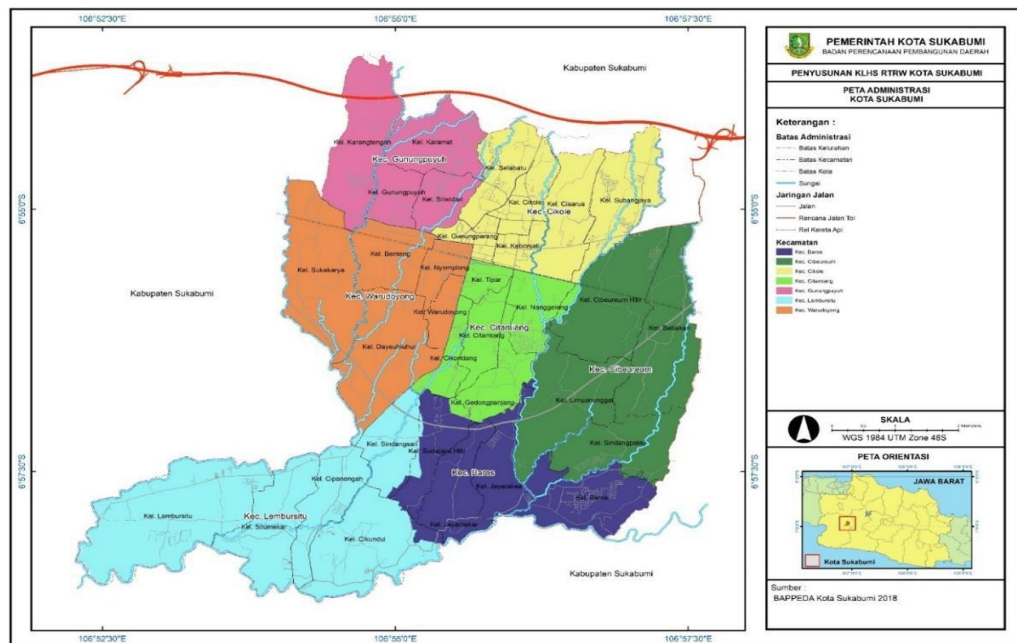
Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Kota Sukabumi Menurut Kecamatan



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2022

Peta wilayah administrasi Kota Sukabumi tercantum dalam Gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kota Sukabumi



Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023



2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Provinsi Jawa Barat pada titik koordinat 106° 45' 50" BT - 106° 45' 10" BT sampai dengan 6° 49' 29" LS - 6° 50' 44" LS, secara geografis Kota Sukabumi terletak di antara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) ± 92 Km dan Jarak dari Ibukota Negara (Jakarta) ± 120 Km. Cukup dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut. Letak Kota Sukabumi yang strategis yaitu berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dengan Ibukota Negara (Jakarta) serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

Secara ekonomis hal tersebut menguntungkan Kota Sukabumi, karena dapat menciptakan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan pendapatan baik dari sektor jasa, perdagangan dan sektor lainnya.

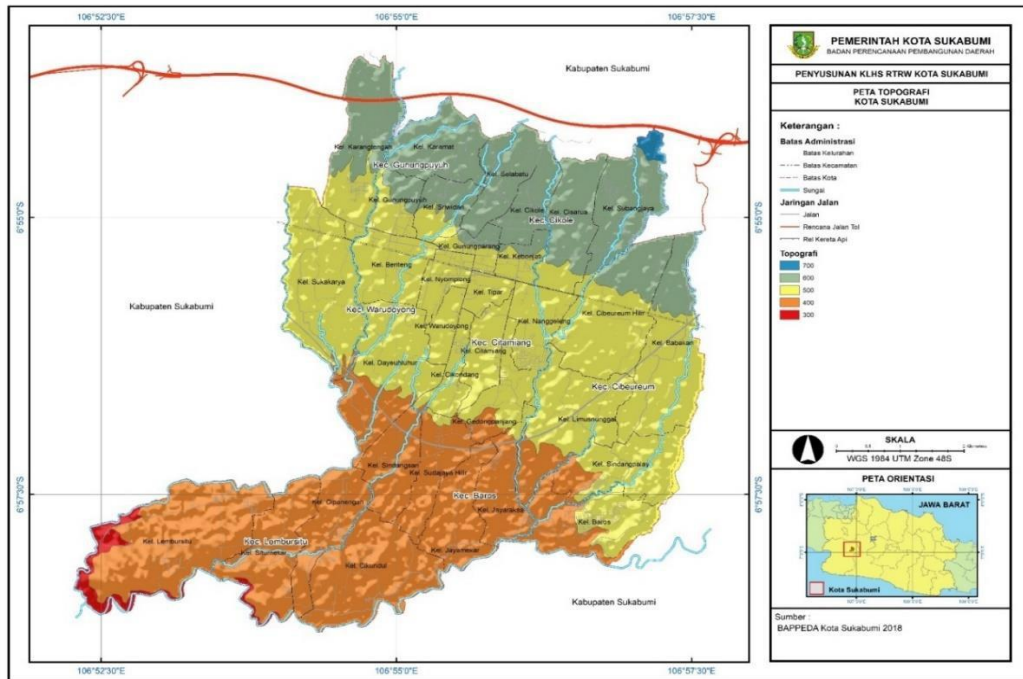
2.1.1.3 Topografi dan Kemiringan Lahan

Wilayah Kota Sukabumi merupakan lereng selatan dari Gunung Gede dan gunung Pangrango, yang berada pada ketinggian 584 meter di atas permukaan laut dan pada bagian selatan 770 meter di atas permukaan laut bagian utara.

Sedangkan di bagian tengah mempunyai ketinggian rata-rata 650 meter dari permukaan laut. Bentuk bentangan alam Kota Sukabumi berupa perbukitan bergelombang dengan sudut lereng beragam. Wilayah Kota Sukabumi didominasi oleh kemiringan lereng 0-2% dan 2-15%. Peta kondisi topografi Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini.



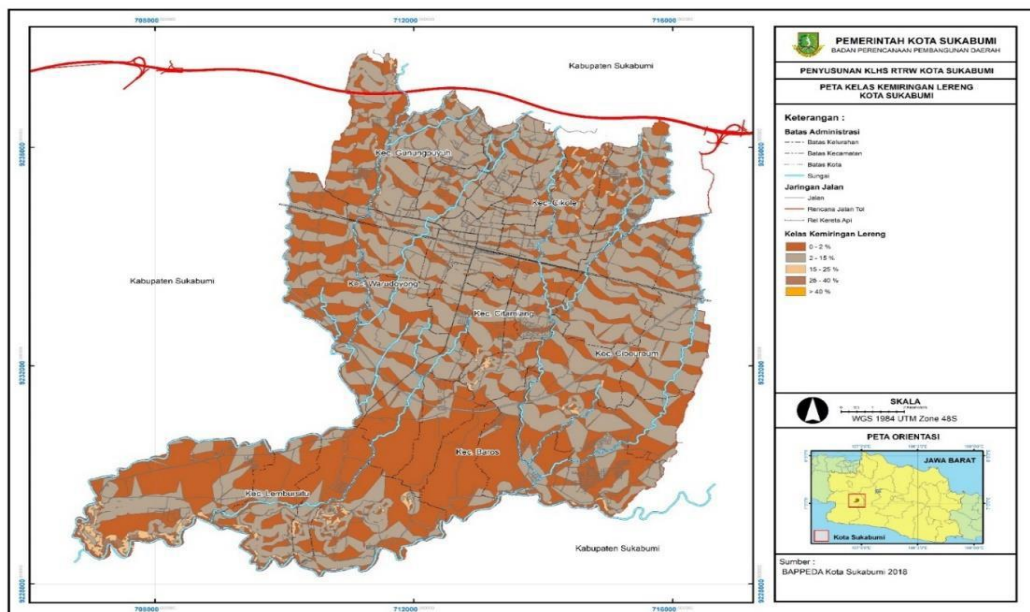
Gambar 2.3 Peta Topografi Kota Sukabumi



Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 - 2023

Luas Daerah Kota Sukabumi dengan kemiringan lereng 0-2% mencapai 2.228,795 Ha atau sekitar 45,59% dari total luas kota, dan kemiringan lereng 2-15% mencapai 2553.219 Ha atau sekitar 52,22% dari total luas kota. Adapun kondisi kemiringan lereng di wilayah Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut:

Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng Kota Sukabumi



Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 - 2023



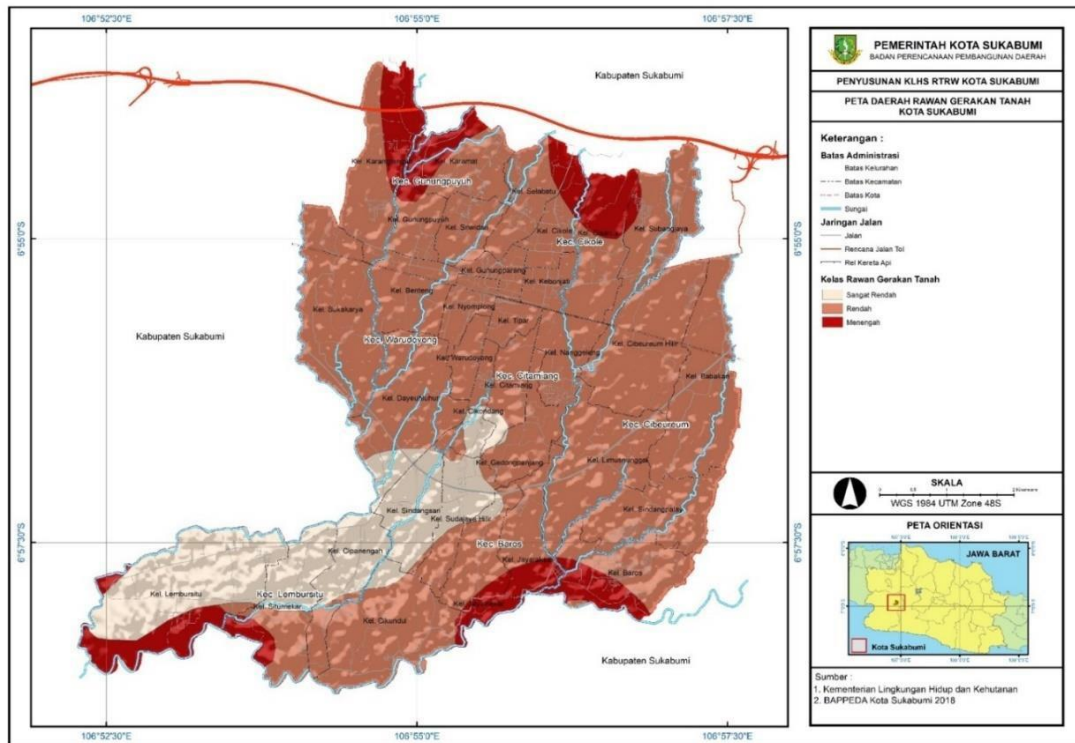
Berdasarkan peta kerentanan gerakan tanah, Kota Sukabumi termasuk kepada zona kerentanan gerakan tanah menengah, rendah dan sangat rendah. Kerentanan gerakan tanah pada tiga kelas ini masih mungkin terjadi adanya longsor terutama pada lereng-lereng terjal dan pada saat curah hujan yang tinggi. Zona gerakan tanah sedang merupakan daerah yang secara umum mempunyai kerentanan gerakan tanah menengah untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah besar maupun kecil dapat terjadi terutama di daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan dan pada lereng yang mengalami gangguan. Gerakan tanah lama masih mungkin dapat aktif kembali terutama oleh curah hujan yang tinggi dan aktivitas manusia. Adapun Luas Gerakan Tanah di Kota Sukabumi Berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.5 berikut:

Tabel 2.2
Luas Potensi Gerakan Tanah di Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Potensi Rawan Gerakan Tanah	Luas (Ha)
1	Baros	Menengah	137,97
		Rendah	345,31
		Sangat Rendah	77,20
2	Cibeureum	Rendah	932,21
3	Cikole	Menengah	140,05
		Rendah	504,32
4	Citamiang	Rendah	343,29
		Sangat Rendah	39,67
5	Gunungpuyuh	Menengah	145,73
		Rendah	368,50
6	Lembursitu	Menengah	135,26
		Rendah	351,54
		Sangat Rendah	608,55
7	Warudoyong	Rendah	722,65
		Sangat Rendah	36,99

Sumber : RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023

Gambar 2.5
Peta Rawan Gerakan Tanah di Kota Sukabumi



Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023

2.1.1.4 Struktur Geologi

Berdasarkan peta geologi susunan litologi batuan di wilayah Kota Sukabumi dan daerah sekitarnya didominasi oleh singkapan batuan vulkanik yaitu produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango berumur Holosen. Secara regional, stratigrafi wilayah ini ditandai oleh batuan sedimen dari Formasi Walat berumur Oligosen Awal yang merupakan satuan yang tertua dijumpai di daerah ini. Formasi Walat ditutupi oleh batuan sedimen dari Formasi Rajamandala dengan kisaran umur dari Oligosen Akhir sampai Miosen Awal. Satuan ini selanjutnya ditutupi oleh Formasi Jampang yang berumur Miosen Awal. Satuan batuan sedimen ini tersingkap di bagian selatan-tenggara dan barat-barat daya dari wilayah Kota Sukabumi.

Formasi batuan sedimen di atas ditutupi oleh endapan vulkanik berumur Holosen yaitu batuan produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Satuan batuan vulkanik ini tersebar secara luas sehingga sebagian besar dari wilayah Kota Sukabumi didominasi oleh singkapan batuan vulkanik. Endapan vulkanik Gunung Gede (Qvg) terdiri dari breksi tufan dan lahar,



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

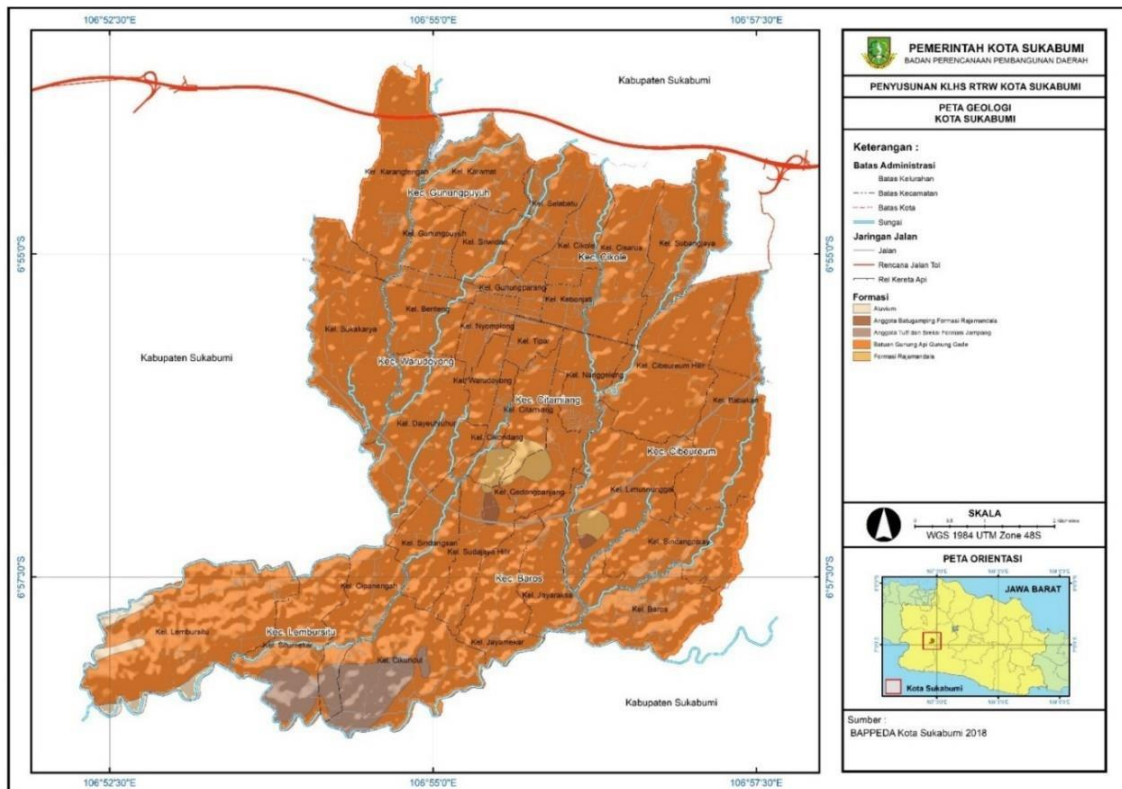
andesit dengan oligoklas-andesin, piroksen dan banyak sekali hornblenda, tekstur seperti trachit, umumnya lapuk sekali. Batuan ini tersebar pada wilayah yang cukup luas mulai dari bagian timur sampai bagian tengah dan mulai dari bagian utara sampai bagian selatan Kota Sukabumi. Sedangkan endapan vulkanik Gunung Pangrango (Qvpo) merupakan endapan yang lebih tua yang tersusun dari lahar dan lava, basal-andesit dengan oligoklas-andesin, labradorit, olivin, piroksen, dan hornblenda. Posisi stratigrafi satuan batuan ini relatif lebih tua daripada endapan vulkanik Gunung Gede dan penyebaran satuan ini terbatas di bagian barat dan barat laut wilayah Kota Sukabumi. Adapun batuan dasar yang menyusun wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Kecamatannya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan gambar 2.6.

Tabel 2.3
Luas dan Jenis Batuan di DAS Cimandiri

No	Kecamatan	Simbol	Formasi	Luas (Ha)
1	Baros	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	550,52
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	8,66
		Tmor	Formasi Rajamandala	1,31
2	Cibeureum	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	913,46
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	3,65
		Tmor	Formasi Rajamandala	15,09
3	Cikole	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	644,37
4	Citamiang	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	333,51
		Tmor	Formasi Rajamandala	49,45
5	Gunungpuyuh	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	514,23
6	Lembursitu	Qa	Aluvium	43,42
		Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	894,87
		Tmjt	Anggota Tuff dan Breksi Formasi	157,06
7	Warudoyong	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	759,64

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023

Gambar 2.6
Peta Geologi Kota Sukabumi



Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi air tanah di wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari secara umum cukup tersedia. Sumbernya berasal dari air tanah, mata air dan air tanah tertekan, sebaran akuifer dengan produktivitas tinggi terdapat di sekitar Kota Sukabumi dengan sebaran paling dominan mulai dari barat hingga timur. Di bagian utara merupakan zona air tanah dengan akuifer berproduktifitas sedang dan berpenyebaran luas. Bagian selatan merupakan zona akuifer yang produktivitasnya rendah hingga langka. Kondisi air permukaan maupun air tanah (*groundwater*) baik dari sisi pergerakan, distribusi maupun kualitasnya di Kota Sukabumi sangat erat kaitannya dengan sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kota Sukabumi. Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sungai-sungai yang melewati Kota Sukabumi dijelaskan Tabel 2.4 dan Gambar 2.7 berikut ini.

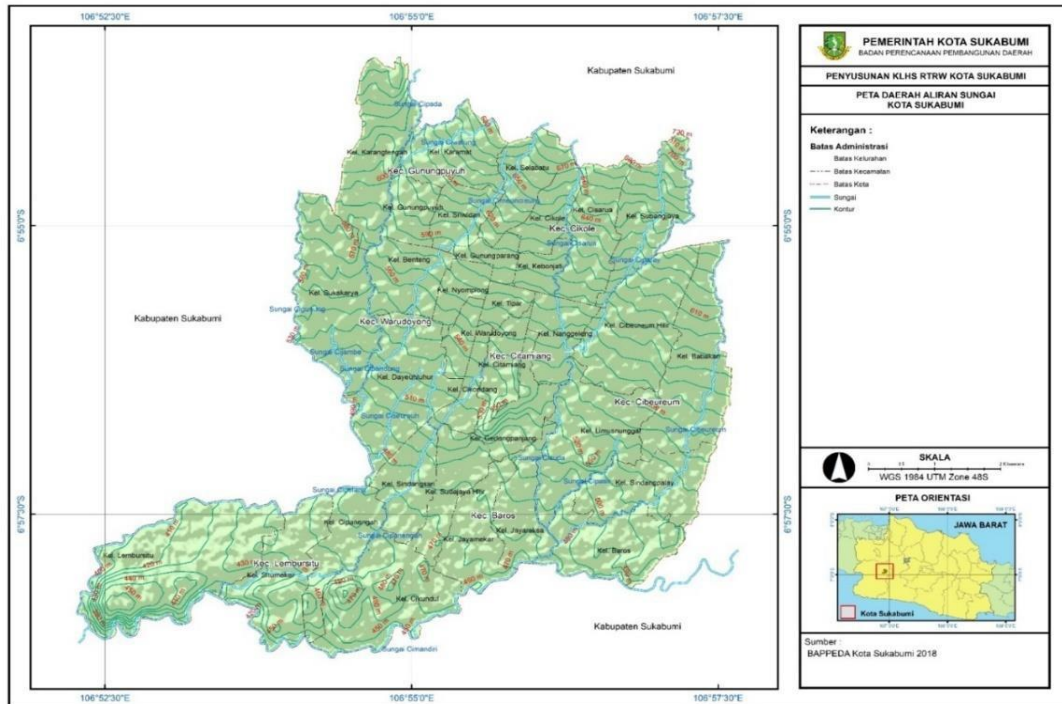


**Tabel 2.4
Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kota Sukabumi**

No	Nama Sungai	Luas DAS (Ha)	Panjang (km)	Debit (m³/dtk)
1	Ceger	0,004129	4,129	-
2	Cibeureum	0,0076	7,600	-
3	Salakaso	0,003244	3,244	-
4	Cibitung	0,006125	6,125	-
5	Cisuda	0,009659	9,659	0,40
6	Tonjong	0,004625	4,625	-
7	Cimandiri	0,012705	12,705	4,60
8	Cikapek	0,001851	1,851	0,01
9	Cipelang Leutik	0,003727	3,727	0,08
10	Cipelang	0,01508	15,080	1,26
11	Ciseureuh	0,004827	4,827	0,07
12	Cijambe	0,002252	2,252	0,20
13	Cigunung	0,004252	4,252	0,27
14	Bantarpanjang	0,001908	1,908	-
15	Gunungpuyuh	0,001068	1,068	-
16	Cikujang	0,001359	1,359	-
17	Cipanengah	0,005592	5,592	0,54
18	Ciseupan	0,003583	3,583	-
19	Ciparigi	0,001629	1,629	-
20	Cipada	0,001164	1,164	2,13
21	Ciwalung	0,001773	1,773	0,02
22	Cibandung	0,002847	2,847	0,06
23	Ciharempoy	0,004776	4,776	-
24	Cisarua	0,004127	4,127	0,36
25	Ciaul	0,003420	3,420	-
26	Cipicung	0,001503	1,503	-
27	Cisaray	0,002429	2,429	0,2
28	Tipar	0,003926	3,926	-
29	Cipasir	0,001948	1,948	-

Sumber : Masterplan Drainase Kota Sukabumi, 2014

**Gambar 2.7
Peta Daerah Aliran Sungai Kota Sukabumi**



Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023

2.1.1.6 Klimatologi

Pemantauan curah hujan di Kota Sukabumi menggunakan data dari 4 (empat) stasiun pengamatan, yaitu Cimandiri, Ciaul, Situmekar dan Cisalada. Keempat stasiun pengamatan tersebut mencatat jumlah curah hujan yang turun di Kota Sukabumi sepanjang Tahun 2019 dengan hari hujan terbanyak pada bulan Januari sebanyak 21 hari dalam setahun. Hasil pengamatan dari stasiun Ciaul, mencatat bahwa pada bulan Februari 2019 adalah bulan dengan curah hujan tertinggi dengan curah hujan sebanyak 514 mm dan sebaliknya curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus 2019 dengan curah hujan sebanyak 5 mm.



Tabel 2.5
Curah Hujan Harian (mm) di Kota Sukabumi Pada Stasiun Ciaul
Daily Rainfall (mm) of Sukabumi City at Ciaul Rainfall
Monitoring Station.

Hujan / Rain	Bulan / Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
Curah Hujan Maksimum / <i>Maximum Rainfall</i>	18	48	38	38	48	84	18	18	38	38	138	48
Jumlah Curah Hujan / <i>Amount of</i> <i>Rainfall</i>	166	188	194	174	165	322	82	14	225	286	713	326
Jumlah Hari Hujan / <i>Number of</i> <i>Rainy Days</i>	17	15	16	13	12	16	8	12	17	17	26	20

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka 2022 (BPS)

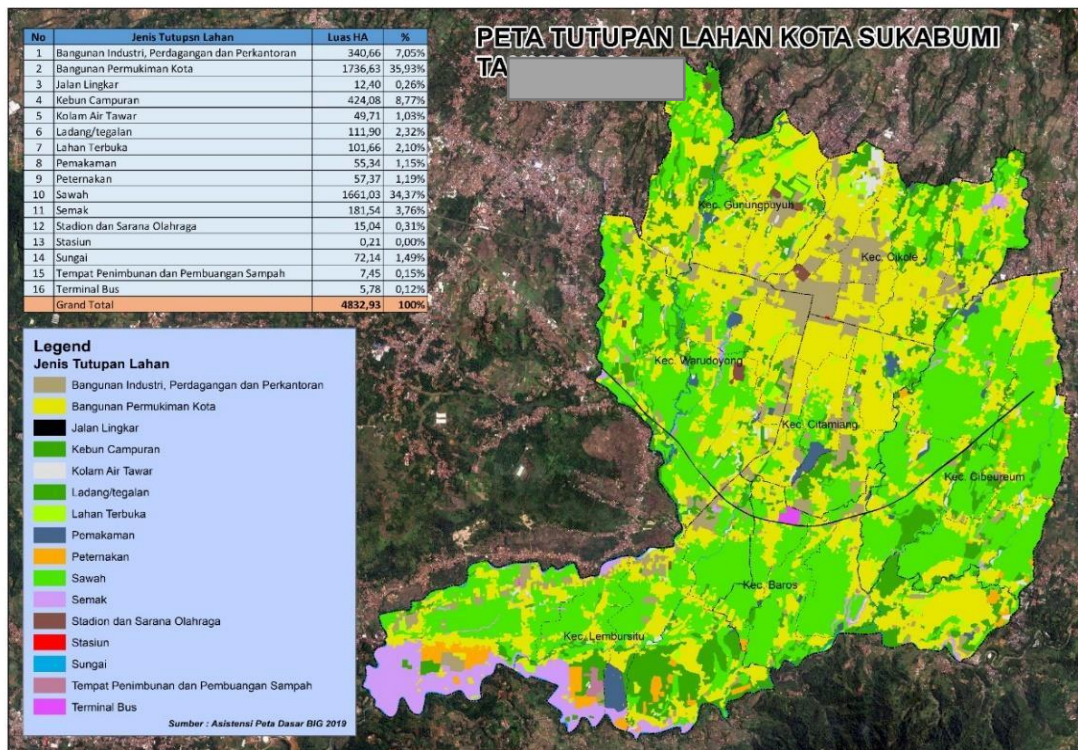
Keadaan iklim di Kota Sukabumi cenderung basah. Berdasarkan hasil pemantauan dari empat stasiun pemantau, salahsatu diantaranya yakni Stasiun Ciaul mencatat bahwa setiap bulan di Kota Sukabumi terjadi hujan dengan intensitas tertentu. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yakni sebanyak 713 mm dengan jumlah hari hujan 26 hari.

2.1.1.7 Pola Penggunaan Lahan

Potensi Pengembangan wilayah di Kota Sukabumi, sesuai dengan Visi Pembangunan Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berdasarkan Iman dan Takwa. Kota Sukabumi juga dirancang dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota dan/atau regional, sesuai dengan arahan dalam dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan juga dokumen RTRW Kota Sukabumi Tahun 2011-2031. Potensi pengembangan wilayah Kota Sukabumi pada masa-masa mendatang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.8
Peta Tutupan Lahan Kota Sukabumi



Sumber data: Bappeda Kota Sukabumi

2.1.1.8 Daerah Rawan Bencana

Daerah rawan bencana yang berada di wilayah Kota Sukabumi, meliputi daerah-daerah sebagai berikut :

- 1 Daerah rawan letusan gunung berapi karena berlokasi relatif dekat dengan kawasan Gunung Gede Pangrango;
- 2 Daerah rawan gempa bumi di mana Kota Sukabumi terletak di jalur daerah rawan gempa Sukabumi-Padalarang-Bandung;
- 3 Daerah rawan banjir yang tersebar di beberapa titik wilayah kota. Di mana secara umum penyebab terjadinya genangan atau banjir di wilayah Kota Sukabumi lebih banyak diakibatkan oleh kondisi saluran yang sudah tidak terawat, tersumbat oleh sampah dan tingginya sedimentasi;
- 4 Daerah rawan gerakan tanah zona patahan aktif, yaitu patahan Cimandiri;
- 5 Daerah longsor di beberapa bagian daerah wilayah kota;



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

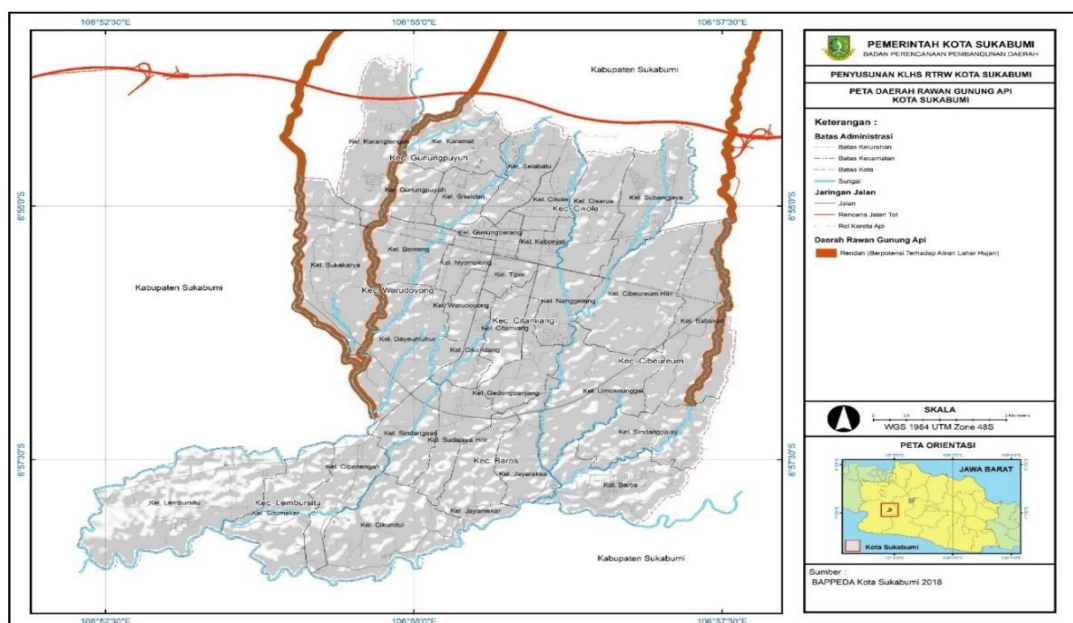
Daerah potensi gempa di Kota Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.6 sedangkan peta rawan letusan gunung berapi serta peta rawan gempa disajikan berturut-turut pada Gambar 2.9 dan Gambar 2.10.

Tabel 2.6
Potensi Gempa di Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Potensi gempa	Luas (Ha)
1	Baros	Daerah Aman	97,69
		Daerah Rawan Gempa	462,78
2	Cibeureum	Daerah Aman	835,26
		Daerah Rawan Gempa	96,94
3	Cikole	Daerah Aman	644,37
4	Citamiang	Daerah Aman	382,96
5	Gunungpuyuh	Daerah Aman	514,23
6	Lembursitu	Daerah Aman	49,10
		Daerah Rawan Gempa	1.046,25
7	Warudoyong	Daerah Aman	758,23
		Daerah Rawan Gempa	1,41

Sumber : Hasil Analisis Peta, 2017

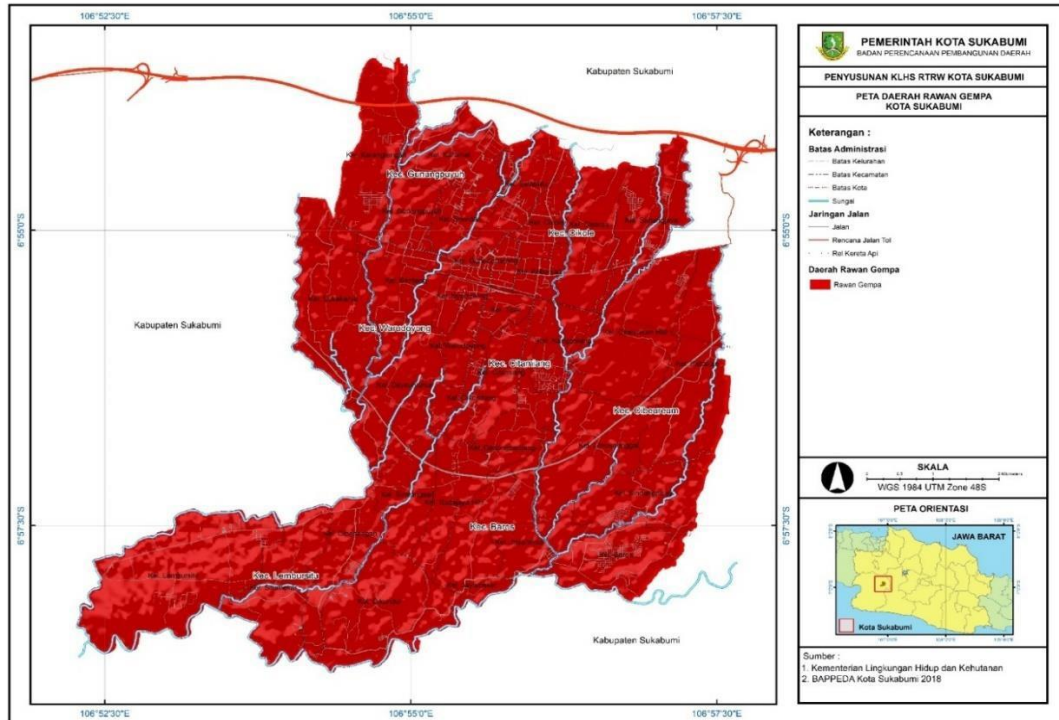
Gambar 2.9
Peta Rawan Gunung Api Kota Sukabumi



Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023

Gambar 2.10

Peta Rawan Gempa Kota Sukabumi



Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023

2.1.1.9 Demografi

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografi Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Sedangkan penduduk menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah orang yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan/atau mempunyai Kartu Keluarga (beridentitas).

Letak Kota Sukabumi yang strategis yaitu berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat dengan Ibukota Negara, serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

Kota Sukabumi dianugerahi wilayah yang sejuk dengan infrastruktur kota yang sudah berdiri sejak dahulu kala. Namun, seperti karakteristik daerah perkotaan pada umumnya, Kota Sukabumi memiliki wilayah dengan luas yang terbatas, yakni 48,33



km², serta jumlah penduduk Tahun 2020 sebanyak 346.325 jiwa, kepadatan penduduk 7.166 jiwa/Km², dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,44%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Sukabumi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sukabumi
Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk perTahun (%)
1	2017	323.788	0,84
2	2018	326.282	0,77
3	2019	328.680	0,73
4	2020	346.325	1,44
5	2021	350.804	1,73

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka 2022

Tingkat kepadatan penduduk Kota Sukabumi tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi penduduk adalah sebesar 7.259 jiwa/km². Jika dirinci menurut kecamatan, Citamiang adalah kecamatan terpadat dan Cibereum menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah. Di sisi lain rasio jenis kelamin penduduk Kota Sukabumi tahun 2021 berada di kisaran angka 101 yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Adapun rincian jumlah penduduk masing-masing kecamatan dapat di lihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi, 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2021	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis kelamin
Baros	38.576	2.99	11.00	6.913	103
Lembursitu	2.196	2.47	12.03	3.947	99
Cibereum	46.025	3.17	13.12	5.047	102
Citamiang	53.517	1.18	15.26	13.346	101



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2021	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2	Rasio Jenis kelamin
Warudoyong	59.511	1.22	16.96	7.872	103
Gunung Puyuh	48.685	1.09	1.88	9.453	103
Cikole	62.294	0.88	17.76	10.015	98
Kota Sukabumi	350.804	1.73	100.00	7.259	101

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka 2022

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, untuk mengetahui struktur perekonomian, untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, dan untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dengan tujuan untuk melihat struktur (distribusi) perekonomian. Berdasarkan penghitungan PDRB dengan tahun dasar 2010, PDRB Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar Rp 12,40 triliun, sementara di tahun 2021 nilai tersebut meningkat menjadi Rp 13,05 triliun. Perkembangan PDRB ADHB Daerah Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut ini.



Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha di Kota Sukabumi (Miliar Rupiah)
Tahun 2017-2021

No	Tahun	PDRB ADHB
1	2017	10 549,22
2	2018	11 472,89
3	2019	12 387,69
4	2020	12 401,54
5	2021	13 052,99

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, BPS 2022

Tabel diatas menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun mengalami peningkatan.

Struktur ekonomi yang ditunjukkan dari PDRB Daerah pada tahun 2021, didominasi oleh sektor tersier, sektor perdagangan merupakan sektor yang paling dominan dan memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Daerah, mencapai 37,86% (tiga puluh tujuh koma delapan puluh enam persen). Hal tersebut mengindikasikan bahwa corak perekonomian yang ada di daerah lebih mengarah pada sektor jasa dan perdagangan besar, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,66% (sepuluh koma enam puluh enam persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,66% (sebelas koma enam puluh enam persen), Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan sektor tersier jauh mengungguli sedangkan sektor primer dan sekunder Pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah sektor yang terus mengalami pelambatan pada enam tahun terakhir.

Selain itu, sejak tahun 2017 terdapat pola penurunan kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Daerah dari rata-rata 3,60% (tiga koma enam puluh persen) menjadi hanya sekitar 3,43% (tiga empat tiga persen). Penurunan kontribusi sektor primer pada perekonomian Daerah sepenuhnya disumbangkan oleh penurunan persentase sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada sektor sekunder, yang mengalami penurunan secara persisten sejak tahun 2017 adalah sektor industri pengolahan dari awalnya sebesar 5,11% (lima koma sebelas persen) pada tahun 2017 menjadi sebesar 5,04% (lima koma nol empat persen) pada tahun 2021. Pada sektor tersier, sektor yang secara



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

signifikan mengalami penurunan adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Pada tahun 2017, sektor tersebut memberikan kontribusi di atas 39,12% (tiga puluh sembilan koma dua belas persen) menjadi 37,86% (tiga puluh tujuh koma delapan puluh enam persen) pada tahun 2021. Walaupun sektor tersebut merupakan sektor dengan kontribusi terbesar di daerah namun kontribusinya dari tahun ke tahun terus menurun dan dibandingkan sector lainnya sector ini penurunannya sangat signifikan yaitu sebesar 1,26 % (satu koma dua puluh enam persen)

Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan secara persisten sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 adalah sektor jasa keuangan dan asuransi dari 10,94% (sepuluh koma sembilan puluh empat persen) menjadi 11,66% (sebelas koma enam puluh enam persen) pada tahun 2021 atau naik sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen), Jasa pendidikan dari 4,00% (empat persen) pada tahun 2017 menjadi 4,48% (empat koma empat puluh delapan persen) pada tahun 2021. Pertumbuhan masing-masing lapangan usaha di Daerah pada kurun waktu tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016–2021 (Persen).

KELOMPOK SEKTOR	2017	2018	2019	2020	2021
1. SEKTOR PRIMER	3,60	3,51	3,43	3,52	3,43
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,60	3,51	3,43	3,51	3,43
B. Pertambangan dan Penggalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. SEKTOR SEKUNDER	12,23	12,36	12,49	12,19	12,22
C. Industri Pengolahan	5,11	5,11	5,10	5,04	5,04
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,22	0,21	0,20	0,21
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,13	0,13	0,12	0,13	0,14
F. Konstruksi	6,77	6,90	7,05	6,80	6,83
3. SEKTOR TERSIER	84,17	84,14	84,06	84,29	84,32
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	39,12	38,92	38,65	38,02	37,86
H. Transportasi dan Pergudangan	10,60	10,83	10,77	10,51	10,66



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

KELOMPOK SEKTOR	2017	2018	2019	2020	2021
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,90	2,93	3,02	2,93	2,95
J. Informasi dan Komunikasi	3,79	3,75	3,77	4,18	4,26
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10,94	10,94	10,95	11,43	11,66
L. Real Estat	1,12	1,13	1,14	1,14	1,17
M, N. Jasa Perusahaan	1,70	1,65	1,79	1,70	1,75
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	5,13	4,87	4,76	4,47
P. Jasa Pendidikan	4,00	3,99	4,11	4,50	4,48
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,77	1,76	1,82	1,89	1,96
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,99	3,11	3,22	3,25	3,10

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, BPS, tahun 2022

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar 1,48 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,49 persen. Kontraksi tersebut merupakan dampak dari pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Akan tetapi di Tahun 2021 Laju Pertumbuhan ekonomi kembali naik di angka 3,71%. Keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 8,98 persen. Dari 17 lapangan usaha, sebanyak 16 (enam belas) lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. 13 (tiga belas) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas dua persen. Sementara 2 (tiga) lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari dua persen. Sementara 1 (satu) lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi pada 2021 yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 2,76%. Tidak teridentifikasi kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan di Kota Sukabumi.



Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sukabumi menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2021

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,98	1,92	1,73	0,92	0,76
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	4,35	5,25	5,30	-1,93	2,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,76	2,57	2,95	2,99	8,98
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,10	3,83	5,60	6,85	8,02
F	Konstruksi	7,52	7,70	7,09	-4,06	4,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	4,70	4,94	4,69	-2,68	3,64
H	Transportasi dan Pergudangan	4,75	5,74	7,17	-6,98	3,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,28	7,39	7,01	-3,41	2,74
J	Informasi & Komunikasi	10,35	9,62	8,75	10,78	8,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,56	5,21	5,58	2,81	4,79
L	Real Estate	7,99	7,74	8,16	-0,86	7,76
M	Jasa Perusahaan	7,88	7,23	7,37	-7,67	7,87
N	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,20	0,51	0,21	-3,93	-2,76
O	Jasa Pendidikan	8,73	6,04	6,34	4,39	2,88
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,74	8,01	7,49	1,82	7,82
Q	Jasa Lainnya	9,88	8,80	9,15	-0,82	1,42
	PDRB ADHK (%)	5,43	5,52	5,49	-1,48	3,71

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2022

Tabel 2.12
Capaian dan Target Pertumbuhan Ekonomi 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Target	5,65	-1,50	4,45
Capaian	5,49	-1,48	3,71

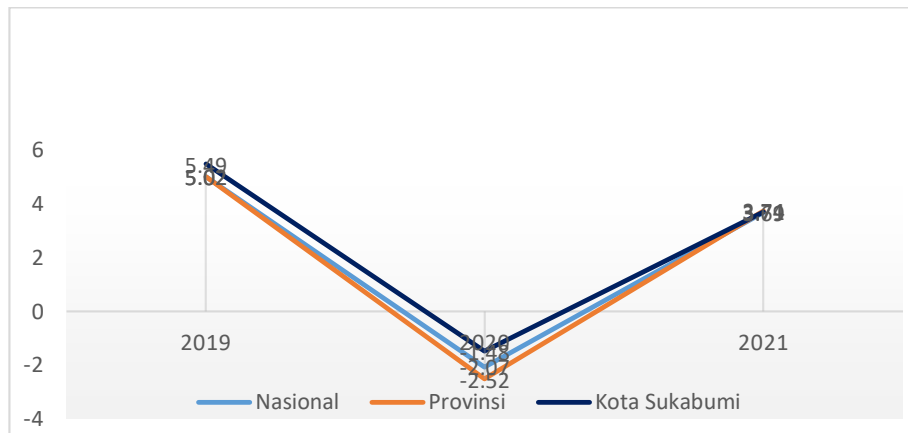
Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2022

RPJMD 2018-2023 Kota Sukabumi, RPJMDP 2018-2023 Kota Sukabumi

Dari tabel diatas untuk capaian target Laju pertumbuhan Ekonomi dalam kurun waktu 2019 - 2021 hanya di tahun 2020 yang mencapai target itu pun mengalami kontraksi.



Gambar 2.11
Perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi dengan provinsi dan nasional 2021



Berdasarkan gambar diatas didapatkan informasi bahwa capaian pertumbuhan ekonomi kota sukabumi masih diatas provinsi dan nasional.

2.1.2.2 PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran makro rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk selama satu tahun dalam suatu wilayah tertentu dan biasanya digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sementara PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suau wilayah. Angka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Berikut menunjukkan perkembangan PDRB perkapita dari Tahun 2016 hingga 2020 atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

Tabel 2.13
PDRB Per Kapita Kota Sukabumi Tahun 2017-2021

No	PDRB Per Kapita (Milyar Rupiah)	2017	2018	2019	2020*	2021
1	Atas Dasar Harga Berlaku	32,58	35,16	37,68	37, 50	37,21
2	Atas Dasar Harga Konstan	24,03	25,16	26,35	25,80	25,23

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2022



PDRB per kapita Kota Sukabumi baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 menunjukkan kenaikan, tetapi antara tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi penurunan yaitu sebesar 2,22% untuk ADHK dan 0,79% untuk ADHB. Persentase Pertumbuhan PDRB per Kapita terbesar ada pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,72% untuk ADHK dan tahun 2018 sebesar 7,92% untuk ADHB.

Dari data Indikator-indikator ekonomi diatas menunjukkan bahwa banyak target yang telah ditetapkan tidak tercapai walaupun data menunjukkan peningkatan. Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara/daerah ialah laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu.

Menurut Sukirno, 2011, 429 faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) Tanah dan kekayaan alam lainnya (2) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja (3) Barang-barang modal dan tingkat teknologi (4) Sistem sosial dan sikap masyarakat.

Faktor penghambat yang dominan di Kota Sukabumi adalah point (1), (2) dan (4), seperti:

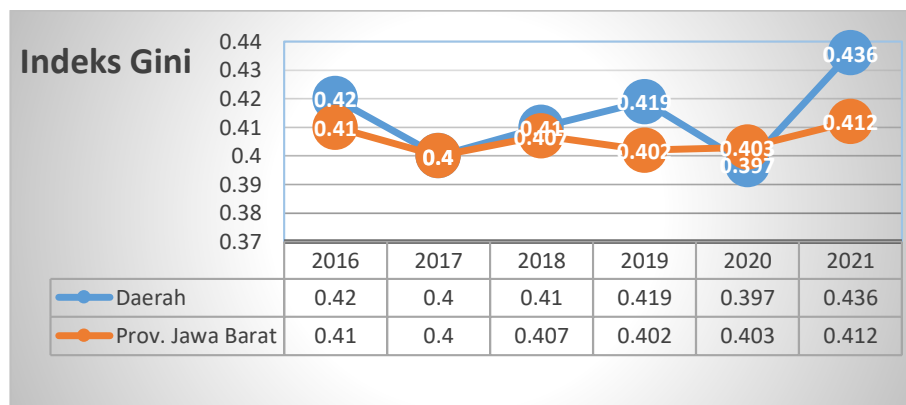
1. Luas wilayah yang kecil dan tidak memiliki kekayaan alam lainnya
2. Jumlah lapangan kerja yang terbatas
3. Kualitas tenaga kerja relatif rendah
4. Dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran.
5. Belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja
6. Potensi pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi investasi dan perdagangan terhadap mekanisme pasar, selain potensi positifnya;



2.1.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Pada tahun 2016-2021, indeks Gini Daerah menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Indeks Gini tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai angka 0,43 (nol koma empat puluh tiga). Angka ini relevan dengan kondisi kemiskinan yang mengalami kenaikan di tahun yang sama. Pada tahun 2016 Indeks Gini Daerah berada angka pada 0,42 (nol koma empat puluh dua) dan masih berada di atas Indeks Gini Provinsi Jawa Barat tetapi di tahun 2021 angkanya lebih tinggi dari provinsi yang hanya 0,41 (nol koma empat satu). Meskipun masih masuk dalam ketimpangan moderat, namun hal ini harus menjadi perhatian khusus. Ketimpangan yang tinggi akan menyebabkan lebih rawan terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh. Perkembangan Indeks Gini Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021 disajikan pada gambar berikut ini.

**Gambar 2.12
Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Sukabumi**



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2022

**Tabel 2.13
Capaian dan Target Gini Ratio 2019-2021**

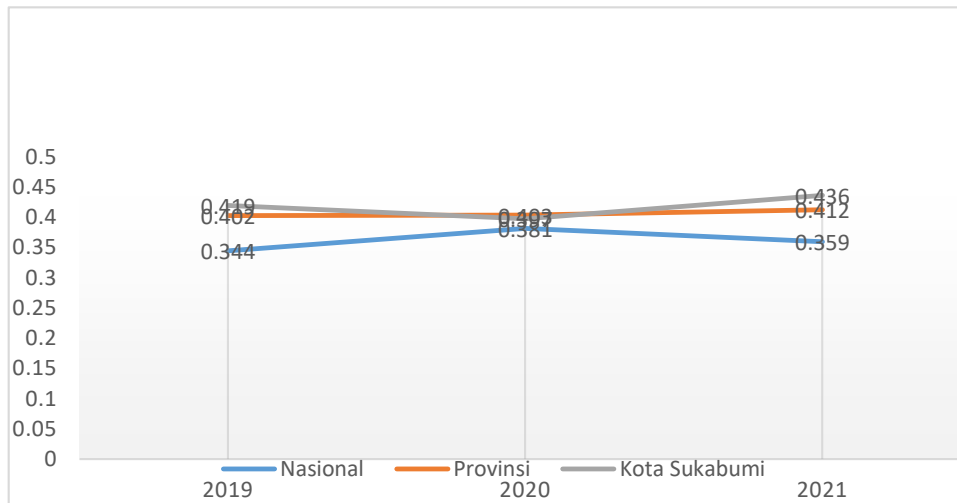
Uraian	2019	2020	2021
Target	0,39	0,412	0,410
Capaian	0,419	0,397	0,436

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2022
RPJMD 2018-2023 Kota Sukabumi, RPJMDP 2018-2023 Kota Sukabumi



Selama kurun waktu 2019-2021 hanya tahun 2020 capaian Gini Rasio mencapai target malah lebih kecil dari target yang ditetapkan

Gambar 2.14
Perbandingan Capaian Gini Ratio dengan Provinsi dan Nasional 2019-2021



Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2022

Data Indek Gini Kota Sukabumi selama kurun waktu tersebut walaupun dibawah provinsi dan nasional akan tetapi nilainya ada pada kategori ketidakmerataan sedang (0,40 s/d 0,50) artinya pendapatan masyarakat kota sukabumi tidak merata dengan nilai ketimpangan 0,436 pada tahun 2021. Berdasarkan analisis dari Bank Dunia ada 4 (empat) penyebab kenapa terjadi ketimpangan:

1. Ketimpangan peluang, yang tercermin pada nasib anak-anak dari keluarga miskin, yang terpengaruh oleh tempat mereka dilahirkan atau pendidikan orang tua mereka. Menurut Bank Dunia, awal yang tidak adil dapat menentukan kurangnya peluang bagi mereka selanjutnya.
2. Ketimpangan pasar tenaga kerja, dimana pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, dan tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini mengakibatkan mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pemasukan yang kecil.
3. Konsentrasi kekayaan, dimana kaum elit memiliki aset keuangan seperti properti atau saham, yang ikut mendorong ketimpangan saat ini dan masa depan.



4. Ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Hal ini terlihat saat terjadi guncangan, dimana masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak. Guncangan akan menurunkan kemampuan mereka untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

Jika dilihat dari ke empat penyebab diatas masyarakat kota sukabumi memiliki kemungkinan disetiap penyebab tersebut, terutama dalam hal ketimpangan ketika menghadapi guncangan misalkan dengan adanya Pandemi Covid-19.

2.1.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tingkat kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pembangunan manusia yang dilakukan. Keberhasilan pembangunan manusia terindikasikan oleh beberapa indikator kinerja, yang paling banyak dipakai adalah penggunaan indikator indeks pembangunan manusia atau IPM atau disebut juga *Human development index* atau HDI yang diperkenalkan oleh *United Nation Developmen Programme* (UNDP). UNDP mengukur pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar yaitu :

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. pengetahuan (*knowledge*); dan
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

Nilai capaian IPM dapat digunakan untuk membandingkan keberhasilan dalam upaya pembangunan manusia antar daerah atau negara.

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan metodologi dalam perhitungan IPM, ada beberapa alasan yang melandasi perubahan metodologi perhitungan yaitu:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik;
2. Produk domestik bruto atau PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; dan

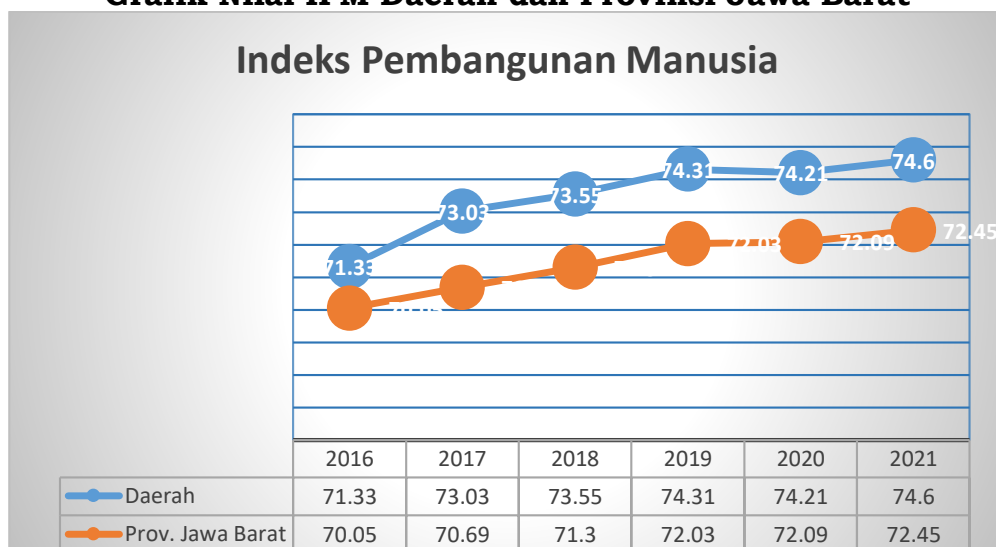


3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Dua perubahan yang dilakukan yaitu perubahan indikator dan perubahan metode perhitungan. Perubahan indikator yang dilakukan yaitu: Angka Melek Huruf atau AMH pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah atau HLS dan Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto atau PNB per kapita. Sedangkan metode perhitungan berubah dari metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Nilai IPM Daerah pada kurun waktu Tahun 2016-2021 terus menunjukkan peningkatan dan berada di atas nilai IPM Provinsi Jawa Barat. IPM Daerah sudah berhasil masuk dalam kategori tinggi pada tahun 2016 dengan angka 71,33 (tujuh puluh satu koma tiga puluh tiga), sedangkan Provinsi Jawa Barat ditahun yang sama berada pada angka 70,05 (Tujuh puluh koma nol lima), IPM Daerah sudah mencapai angka 74,60 (tujuh puluh empat koma enam puluh) pada tahun 2021. Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016-2021 disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.14
Grafik Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat



(Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2020)



Tabel 2.15
Capaian dan Target Indeks Pembangunan Manusia 2019-2021
(Poin)

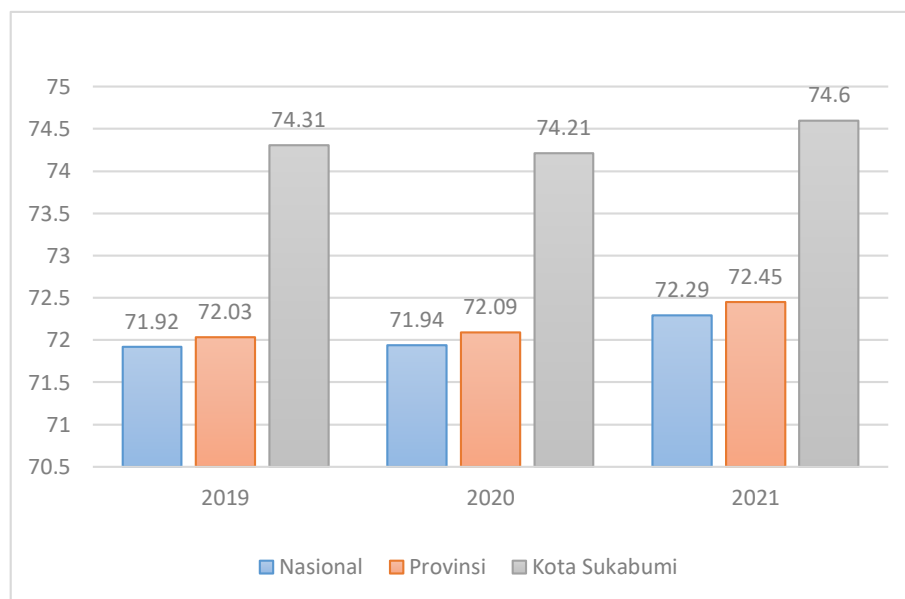
Uraian	2019	2020	2021
Target	74,17	74,20	74,45
Capaian	74,31	74,21	74,60

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2022

RPJMD 2018-2023 Kota Sukabumi, RPJMDP 2018-2023 Kota Sukabumi

Selama kurun waktu 2019-2021 capaian IPM kota sukabumi selalu mencapai target dan bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Gambar 2.15
Perbandingan capaian IPM dengan provinsi dan nasional 2021



Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2022

Untuk Capaian IPM dari data yang ditampilkan diatas memberikan informasi yang menggembirakan, artinya masyarakat kota sukabumi dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan yang layak, kesehatan dan pendidikan yang baik. Kriteria IPM yang dicapai adalah kategori tinggi (0,70 – 0,79).

2.1.2.5 Persentase Penduduk Miskin

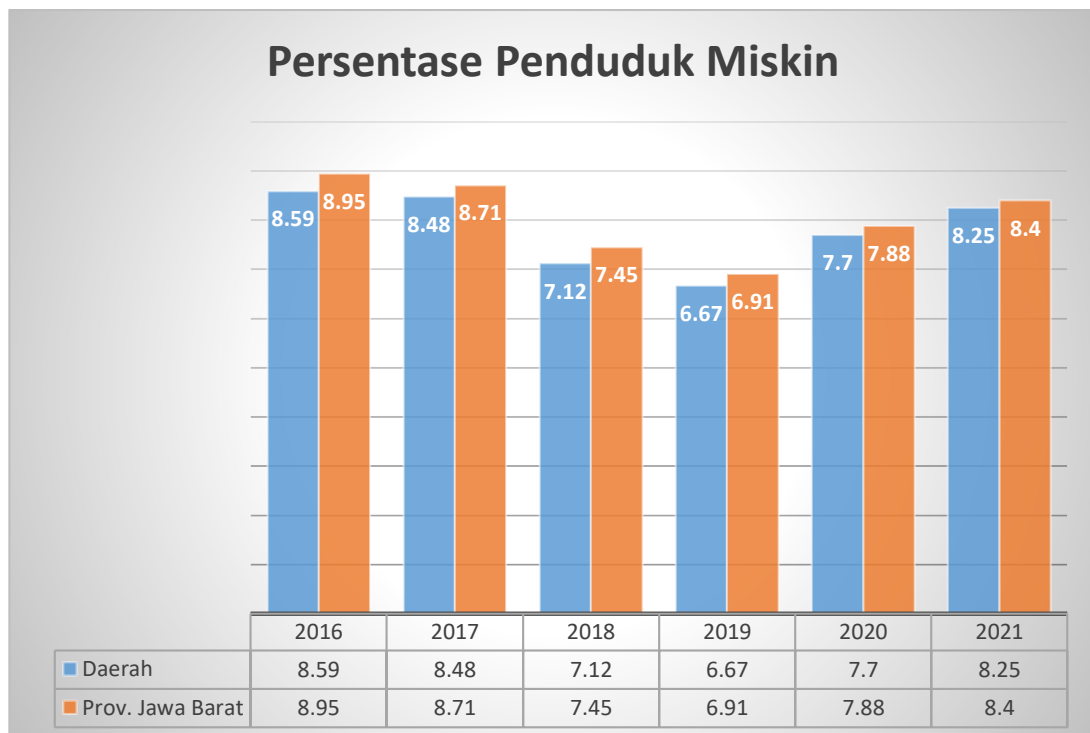
Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 mencapai 27.510 (dua puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh) jiwa, menurun menjadi 27.200 (dua puluh tujuh ribu dua ratus) jiwa pada tahun 2021. Dalam Kurun waktu 2016 – 2021 terjadi fluktuasi



jumlah penduduk miskin. Pemerintah Daerah dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari 8,59% (delapan koma lima sembilan persen) pada tahun 2016 menjadi 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) pada tahun 2021.

Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat, daerah memiliki tingkat kemiskinan di bawah Provinsi Jawa Barat. Persentase penduduk miskin di daerah dan Provinsi Jawa Barat serta perbandingan persentase penduduk miskin daerah dengan Provinsi Jawa Barat disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.16
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin



(Sumber : BPS Kota Sukabumi,2022)

Tabel 2.16
Capaian dan Target Persentase Penduduk Miskin 2019-2021 (Persen)

Uraian	2019	2020	2021
Target	8,14	7,90	7,80
Capaian	6,67	7,70	8,25

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2022

RPJMD 2018-2023 Kota Sukabumi, RPJMDP 2018-2023 Kota Sukabumi

Dari tabel diatas persentase penduduk miskin tahun 2021 jauh dari target yang ditetapkan, dan terjadi peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,55 % dari tahun sebelumnya

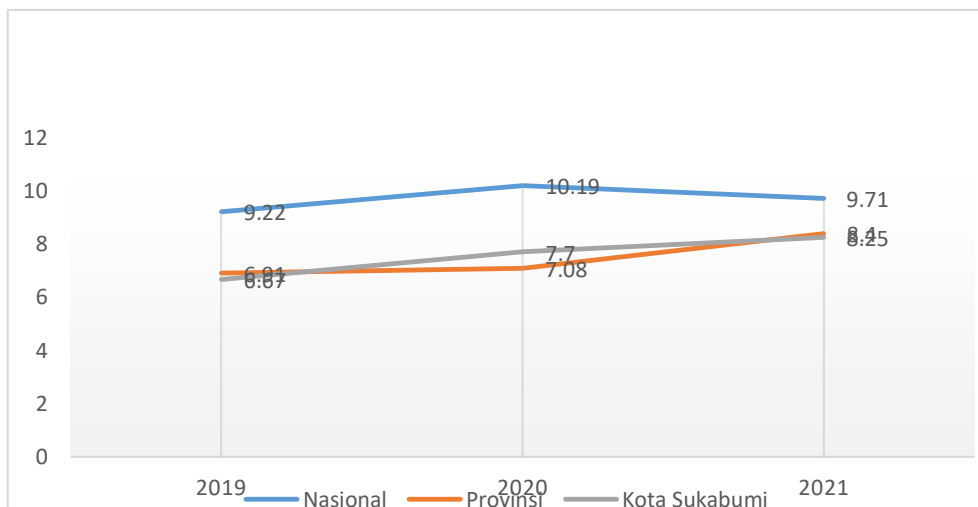


Tabel 2.17
Capaian dan Target Jumlah Penduduk Miskin 2019-2021
(Ribu Jiwa)

Uraian	2019	2020	2021
Target	26,8	27,4	27,6
Capaian	21,87	25,42	27,19

Berdasarkan tabel diatas selama kurun waktu 2019 - 2021 capaian jumlah penduduk miskin di Kota Sakabumi kurang dari target yang ditetapkan, tetapi secara persentase di tahun 2021 jauh diatas target yang ditetapkan da nada peningkatan sebesar 1,77 Ribu Jiwa penduduk miskin dari tahun sebelumnya

Gambar 2.17
Perbandingan capaian Persentase Penduduk Miskin dengan provinsi dan nasional 2019-2021



Tabel 2.18
Capaian Kedalaman (P1) Kemiskinan 2019-2021(poin)

Uraian	2019	2020	2021
Capaian	1.08	1.17	1.39

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dari tabel diatas nilai kedalaman semakin tinggi artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin jauh dari garis kemiskinan dan ini menyebabkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin tinggi.



**Tabel 2.19
Capaian Keparahan (P2) Kemiskinan 2019-2021(poin)**

Uraian	2019	2020	2021
Capaian	0.32	0.22	0.36

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dari table diatas terjadi kenaikan angka dari 2020 ke 2021 sebesar 0,14 poin artinya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin tinggi.

Program penanggulangan kemiskinan yang tepat harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan penduduk miskin. Pendekatan berdasarkan kluster yaitu:

Kluster I : Bantuan Sosial Terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi.

Permasalahan yang ada di tahun 2021:

1. Belum meratanya akses pendidikan karena belum meratanya distribusi guru
2. Belum optimalnya mutu pendidikan
3. Masih rendahnya minat baca masyarakat
4. Angka harapan hidup (ahh) masih di bawah capaian provinsi jawa barat
5. Meningkatnya angka penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, kanker, dan asma yang bisa menjadi *comorbid* bagi penderita penyakit menular.
6. Masih rendahnya angka jaman sehat,
7. Belum optimalnya pencapaian spm bidang kesehatan, dimana dari 12 (dua belas) indikator spm baru 5 (lima) yang sudah memenuhi target
8. Masih rendahnya keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga sehat.



Kluster II : Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip

Permasalahan yang ada di tahun 2021:

1. Belum terdatanya jumlah PPKS secara menyeluruh
2. Belum tersosialisasi dan teradaptasinya proses pemberian pelayanan sosial
3. Belum terfasilitasinya pelayanan sosial dasar maupun lanjutan secara komprehensif
4. Belum terkoordinasinya pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan sosial dalam penanganan kemiskinan

Kluster III : Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Permasalahan yang ada di tahun 2021:

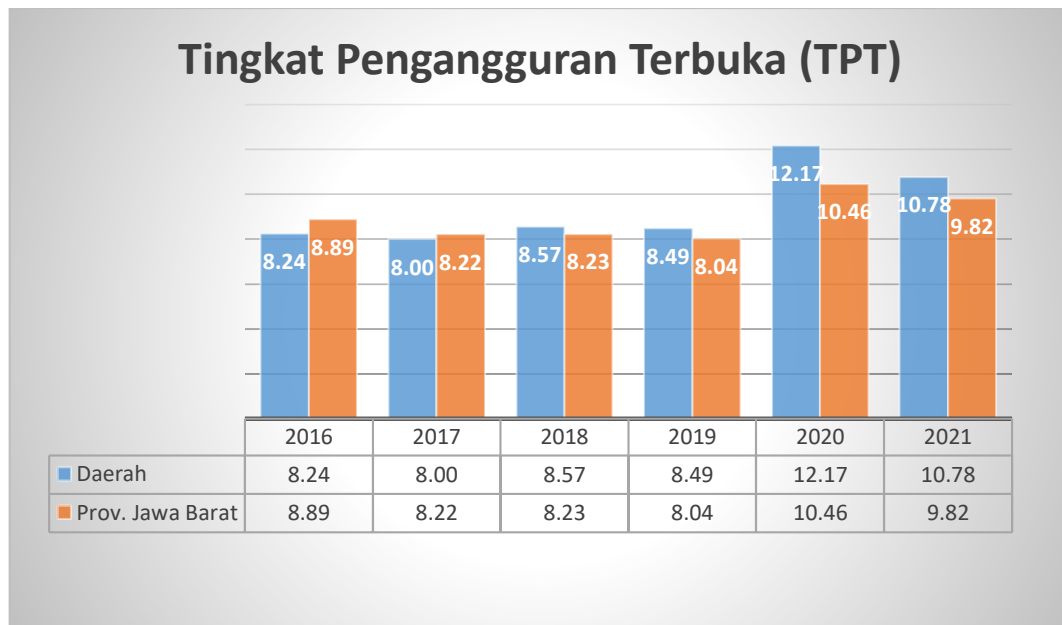
1. Kondisi usaha mikro dan kecil (UMK) belum optimal, dimana belum seluruhnya memiliki legalitas usaha;
2. Pengelolaan koperasi pada umumnya belum dilaksanakan secara profesional, dimana sebagian besar dikelola secara paruh waktu, manajemen organisasi kurang berjalan, dan manajemen bisnis belum maksimal;
3. Pola kemitraan atau kerjasama antara koperasi dan UMK, dengan pengusaha besar belum optimal baik di bidang permodalan maupun pemasaran;
4. Perlunya peningkatan dukungan pendanaan untuk promosi produk usaha mikro;
5. Belum tersedianya sistem database koperasi dan usaha mikro
6. Masih rendahnya frekuensi dan tingkat promosi produk Usaha Mikro Kecil sehingga sulit menembus pangsa pasar, baik di dalam maupun luar negeri/ekspor;
7. pola kemitraan di bidang pemasaran antara pedagang kecil, menengah dengan pengusaha besar belum optimal;



2.1.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran. Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat pengangguran di Daerah dalam kurun waktu 2016-2021 meningkat sebesar 2,54% (dua koma lima puluh empat persen) dari 8,24% (delapan koma dua puluh empat persen) pada tahun 2016 menjadi 10,78% (sepuluh koma tujuh puluh delapan persen) pada tahun 2021. Walaupun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 TPT Daerah berada di atas Provinsi Jawa Barat, tetapi Daerah mengalami kenaikan kembali di empat tahun berikutnya. Tahun 2020 merupakan angka tertinggi capaian TPT di kota Sukabumi, hal ini mudah dipahami karena dampak dari pandemi covid 19 yang luar biasa . Capaian TPT Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021 di sajikan pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.20
Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2021

Gambar diatas memberikan informasi bahwa TPT Kota Sukabumi dari tahun 2018 sampai 2021 menunjukkan angka yang lebih besar dari angka provinsi.



Tabel 2.21
Capaian dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2019-2021(Persen)

Uraian	2019	2020	2021
Target	7,68	10,25	9,81
Capaian	8,49	12,17	10,78

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2022

RPJMD 2018-2023 Kota Sukabumi, RPJMDP 2018-2023 Kota Sukabumi

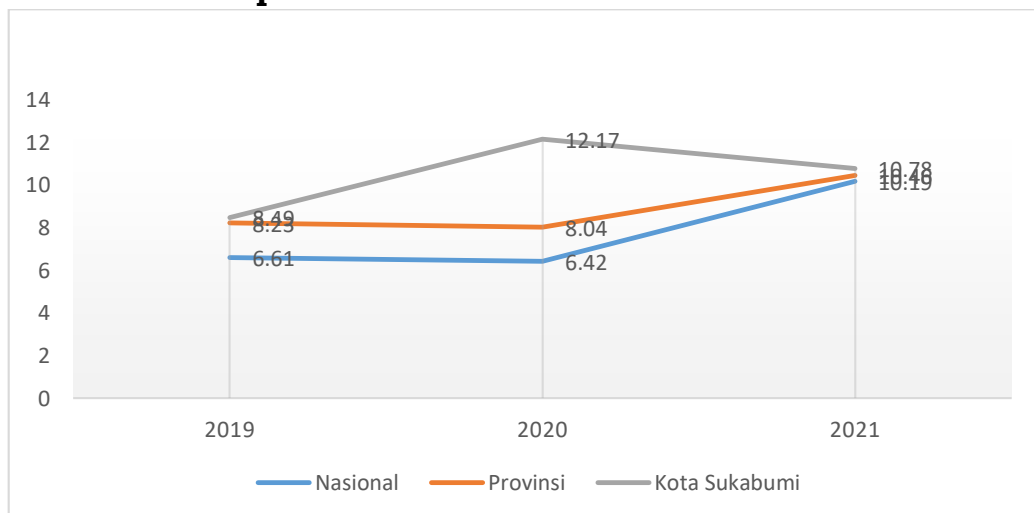
Tabel 2.21
Capaian dan Target Jumlah Pengangguran
2019-2021(Orang)

Uraian	2019	2020	2021
Target	11.812	14.315	14.118
Capaian	13.058	16.996	15.514

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi (diolah), 2022

Berdasarkan 2 (dua) tabel diatas baik TPT maupun Jumlah Pengangguran selama kurun waktu 2019-2021 tidak ada yang mencapai target.

Gambar 2.19
Perbandingan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dengan provinsi dan nasional 2019-2021



Sementara itu dibandingkan dengan TPT nasional pun TPT Kota Sukabumi masih berada dibawah, atau TPT nya lebih tinggi.

Pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Kota Sukabumi untuk dapat menekan Tingkat pengangguran terbuka dan Jumlah pengangguran yang selama kurun waktu 4 tahun terakhir tidak menunjukkan



penurunan yang berarti. Permasalahan terkait pengangguran dan dunia kerja antara lain:

1. Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja;
2. Belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja

2.1.2.7 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah atau RLS merupakan ukuran untuk menghitung jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Pencapaian RLS Daerah cenderung terus mengalami peningkatan pada Tahun 2016 hingga Tahun 2021. Pada Tahun 2016, RLS Kota Sukabumi sebesar 9,28 (sembilan koma dua puluh delapan) Tahun. Pada Tahun 2021 RLS Kota Sukabumi mencapai 9,81 (sembilan koma delapan puluh satu) Tahun berarti selama rentang 6 tahun terjadi peningkatan sebesar 0,53 (nol koma lima puluh tiga). Nilai RLS Kota Sukabumi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat Capaian RLS di Daerah disajikan pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.20
Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Daerah Tahun 2016-2021



Sumber : Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2022

Kota Sukabumi pada tahun 2021 capaian rata-rata lama sekolahnya adalah 9,81 lebih tinggi dibandingkan capaian RLS Jawa Barat. Artinya rata-rata masyarakat Kota Sukabumi pendidikan



terakhirnya adalah setara dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 2.22
Capaian dan Target Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
2019-2021(Tahun)

Uraian	2019	2020	2021
Target	9,75	9,58	10,34
Capaian	9,58	9,59	9,81

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2022

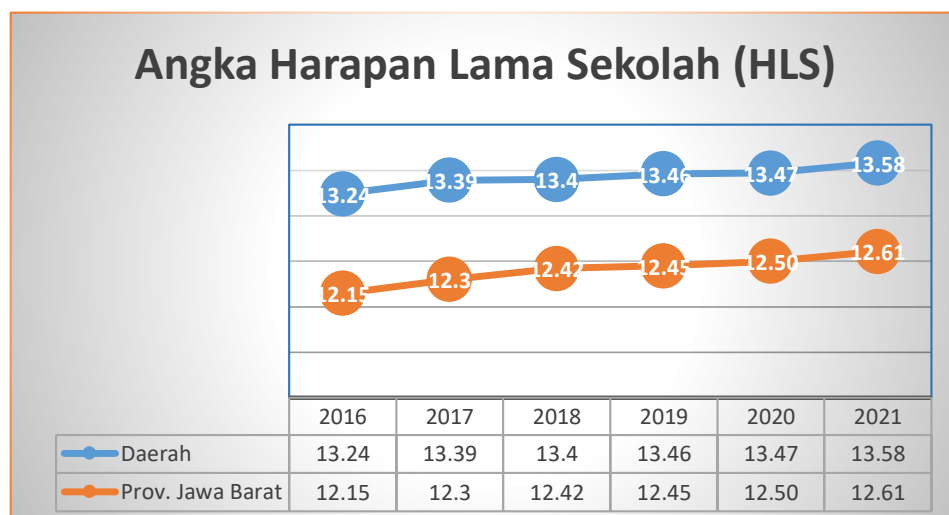
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Tabel diatas memberikan informasi bahwa capaian RLS tahun 2021 tidak mencapai target, sehingga hal ini harus menjadi perhatian semua pihak untuk menyelesaikan persoalan pendidikan diantaranya yaitu belum mertanya akses pendidikan di masyarakat.

2.1.2.8 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan HLS Daerah dan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.21
Perkembangan Angka HLS Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2022

Harapan lama sekolah atau HLS Daerah pada tahun 2021 mencapai 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) tahun, meningkat 0,34% (nol koma tiga puluh empat)) dari angka HLS tahun 2016 yaitu



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

13,24 (tiga belas koma dua puluh empat) tahun. Angka HLS sebesar 13,58 (tiga belas koma lima puluh delapan) tahun menunjukkan bahwa harapan lama sekolah anak di Daerah sudah masuk pada jenjang pendidikan tinggi dan sudah melampaui angka HLS Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2016-2021.

Tabel 2.23

**Capaian dan Target Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
2019-2021(Tahun)**

Uraian	2019	2020	2021
Target	13,55	13,64	13,47
Capaian	13,46	13,47	13,58

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2022

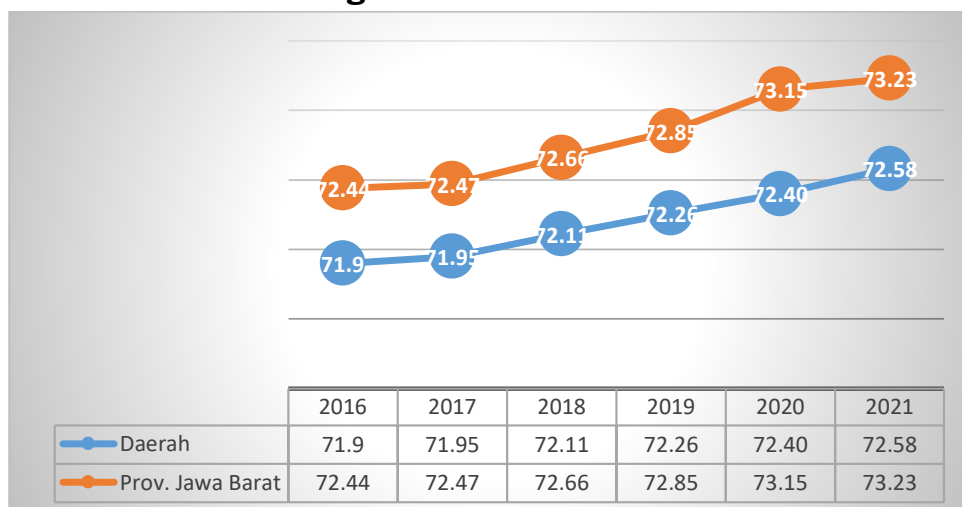
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Berdasarkan tabel diatas selama kurun waktu 2019-2020 Capaian HLS Kota Sukabumi tidak mencapai target, dan tahun 2021 target tercapai dengan baik.

2.1.2.9 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Nilai AHH Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021 disajikan serta grafik perkembangan nilai AHH Daerah tahun 2016-2021 disajikan pada Gambar berikut ini:

**Gambar 2.22
Perkembangan AHH Daerah Tahun 2016-2021**



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2022



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Angka harapan hidup atau AHH dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, nilai AHH Daerah terus mengalami peningkatan dari 71,9 (tujuh puluh satu koma sembilan) pada tahun 2016 menjadi 72,58 (tujuh puluh dua koma lima puluh delapan) pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 0,68% (nol koma enam puluh delapan persen). Namun demikian, AHH Daerah dalam kurun waktu tahun 2016-2021 masih berada di bawah AHH Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.24
Capaian dan Target Angka Harapan Hidup (AHH)
2019-2021(Tahun)

Uraian	2019	2020	2021
Target	72,05	72,10	72,15
Capaian	72,26	72,40	72,58

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2022

Renstra Dinas Kesehatan Kota Sukabumi

Dilihat dari target yang ditetapkan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir Angka Harapan Hidup yang merupakan cerminan tingkat derajat Kesehatan masyarakat Kota Sukabumi tingkat realisasi/capaiannya selalu diatas target yang ditetapkan.

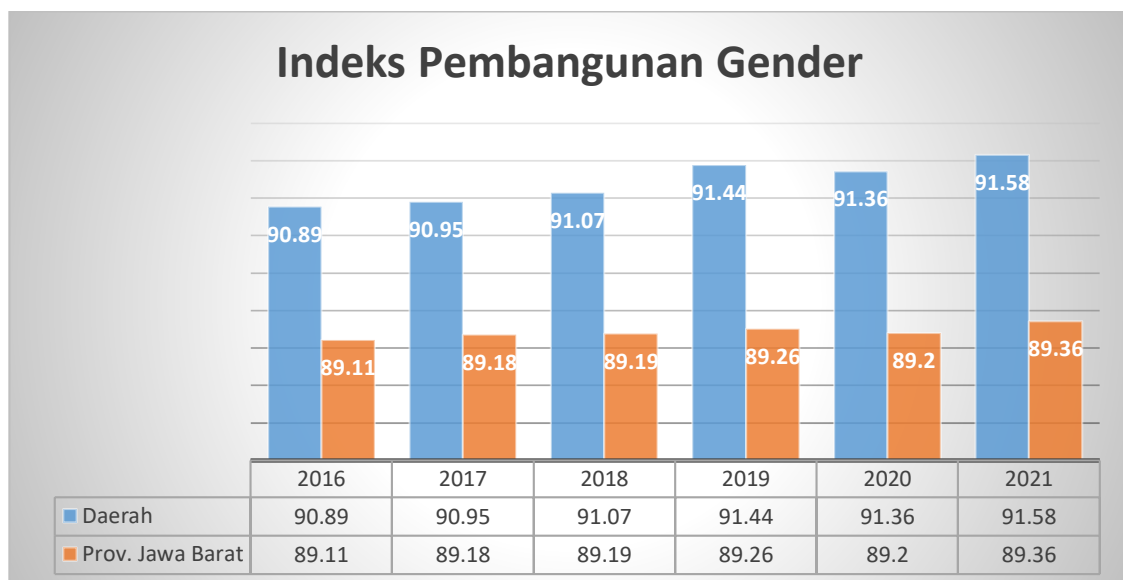
Untuk meningkatkan AHH masyarakat kota sukabumi, walaupun target tiga tahun terakhir tercapai akan tetapi untuk dapat melebihi capaian provinsi jawa barat maka penyelesaian permasalahan pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan, seperti:

1. Meningkatnya angka penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, kanker, dan asma yang bisa menjadi *Comorbid* bagi penderita penyakit menular.
2. Masih rendahnya angka jamban sehat,
3. Belum optimalnya pencapaian SPM bidang kesehatan, dimana dari 12 (dua belas) indikator SPM baru 5 (lima) yang sudah memenuhi target
4. Masih rendahnya keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga sehat.
5. Masih terdapatnya pemukiman kumuh
6. Angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih cukup tinggi
7. Masih tinggi nya angka rumah tidak layak huni

2.1.2.10 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dalam mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender dapat digunakan beberapa indikator, diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki.

Gambar 2.23
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2016-2020



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2022

Data IPG Kota Sukabumi periode 2016 – 2021 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, IPG Kota Sukabumi sebesar 90.89, tahun 2021 sebesar 91.58, ada peningkatan sebesar 0,69 (nol koma enam puluh sembilan). Capaian IPG Kota Sukabumi selalu diatas capaian provinsi Jawa Barat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran aspek pelayanan umum Kota Sukabumi menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kunci.



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan di Kota Sukabumi mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sementara untuk Tahun 2019 yang dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Tabel 2.25

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Pendidikan				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	68,7	80,7	70,17
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,5	101,83	98,30
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	97	108,34	92,79
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	-	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator urusan Pendidikan di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dasar sembilan Tahun, meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, dan meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

1. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 37238. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 37882.
2. Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 16936. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 18252;
3. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 2635. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan = 2.63.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.26
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan
Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/Mts)	100%	96,51%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100%	70,17%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Tahun 2021

Capaian SPM Pendidikan di Kota Sukabumi untuk jenis layanan dasar pada jenjang Pendidikan Dasar adalah 96,51% dan sisanya sebanyak 3,49% sudah ada pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA sederajat), jenjang kesetaraan capaiannya adalah 100% dan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini adalah 70.17%, untuk PAUD capaiannya belum optimal dikarenakan pada jenjang ini belum masuk



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

dalam kategori Program Wajib Belajar, namun demikian capaiannya sudah dapat dikategorikan “Baik”.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Tabel 2.27

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Kesehatan				
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Angka	0,017	0,4	0,45
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	75	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	83	100	101,91
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	103,83
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	108,69
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	73,97	99,15
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	24,07	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	26,6	90,16
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	72,45	75,00
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	12,46	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	13,03	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	91,93	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	94,56	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator urusan Kesehatan di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan



kesehatan lingkungan, meningkatkan kualitas dan pemerataan sdm kesehatan, dan menurunkan angka kematian.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 1.602. Jumlah Penduduk di Kota Sukabumi= 353.631;
2. Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 6. Jumlah RS di Kota Sukabumi = 6;
3. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 5.915. Jumlah ibu hamil di Kota Sukabumi = 5.804;
4. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 5.752. Jumlah ibu bersalin di Kota Sukabumi = 5.540;
5. Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 5.653. Jumlah bayi baru lahir di Kota Sukabumi = 5.201;
6. Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 24.787. Jumlah balita di Kota Sukabumi = 25.000;
7. Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 46.008. Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Sukabumi = 46.008;
8. Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 204.258. Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kota Sukabumi = 226.561;
9. Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 38.863. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kota Sukabumi = 51.818;
10. Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 70.857. Jumlah penderita hipertensi di Kota Sukabumi = 70.857;
11. Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 16.086. Jumlah penderita DM di Kota Sukabumi = 16.086;
12. Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 493. Jumlah penderita ODGJ di Kota Sukabumi = 493;



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

13. Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 4.001. Jumlah penderita TBC di Kota Sukabumi = 4.001;
14. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 10.421. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota Sukabumi = 10.421;

Capaian indikator kinerja di atas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan
Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	101,91%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	103,83%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	108,69%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	9915%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	90,16%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	75%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i>	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Tahun 2021

Capaian SPM Urusan Kesehatan di Kota Sukabumi untuk jenis layanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah 75% dikarenakan Kondisi kemampuan sumber dana APBD sangat terbatas untuk ketersediaan BMHP (Belanja Medis Habis Pakai) untuk belanja stik kolesterol yang dibutuhkan untuk pemeriksaan belum semuanya terpenuhi. Penyebaran Pos Binaan Terpadu (Posbindu) belum merata disetiap Rukun Warga (RW) yang ada di wilayah Kota Sukabumi, dimana jumlah Posbindu masih sedikit yaitu sebanyak 204 Posbindu dari 452 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada dengan persentase sebesar 45.03%, sehingga masih cukup banyak kelompok lansia yang tidak tersentuh dalam skrining kesehatan. Selain itu, belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan tentang pelayanan lansia yang menggunakan akses pelayanan di rumah sakit atau klinik swasta.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.29

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	-	478,95	-
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	1.500	165,25	57,57



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	68,77	100	100
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	87,57	71,54	91,20
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	-	3,43	100
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	84,19	84,81	81,08
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	-	5,36	100
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	-	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan, terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan, dan terwujudnya kawasan permukiman yang layak dan Meningkatnya disiplin, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan sarana dan prasarana jalan, mengembangkan penataan ruang wilayah, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, meningkatkan penataan kawasan kumuh, meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana (KRB), dan Meningkatkan kesiagaan, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran, Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda, Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, dan Meningkatkan pendidikan politik yang berkualitas.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

- Sukabumi (ha) = 0. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota Sukabumi (ha) = 0;
2. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Sukabumi (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota Sukabumi (m) = 0;
 3. Luas irigasi kewenangan Kota Sukabumi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 755. luas daerah irigasi kewenangan Kota Sukabumi = 1.311,5;
 4. Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kota Sukabumi = 114.368. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Sukabumi = 114.368;
 5. Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 94.212. Jumlah rumah di Kota Sukabumi = 103.303;
 6. Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = 88.442. Jumlah IMB yang berlaku = 88.442;
 7. Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 93.84. Jumlah total panjang jalan Kota Sukabumi = 115.744;
 8. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota Sukabumi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 14. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota Sukabumi = 14;
- Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 395. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 395.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:



Tabel 2.30

**Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-sehari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	48,66%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi, Tahun 2021

Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Sukabumi untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik adalah 48,66%, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Sementara pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal atau IPAL Kawasan Pembangunan IPAL membutuhkan dana yang cukup besar dan lahan dengan luas tertentu yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

2.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.31

**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2019 - 2021**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persen			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	-	24,49	100
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	0,17	12,87	89,30
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	96,41	3,01	1,87
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	-	0	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Capaian Indikator urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 terealisasi dengan baik walaupun banyaknya anggaran yang di *refocusing*. Namun dalam pelaksanaannya tetap diprioritaskan kegiatan yang mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu terwujudnya terwujudnya kawasan permukiman yang layak. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, meningkatkan penataan kawasan kumuh, meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun $n = 10$. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun $n = 10$;
2. Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 0;
3. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 124.15. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 139.02;
4. Jumlah unit rumah tidak layak huni = 1.928. Jumlah total unit rumah Kota Sukabumi = 103.303;
5. Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 2.691. Jumlah unit rumah Kota Sukabumi = 2.691.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :



Tabel 2.32
**Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Tahun 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	- %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi,

Capaian SPM Perumahan Rakyat di Kota Sukabumi untuk jenis pelayanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah nol persen dikarenakan terdapat kebijakan refocusing anggaran.

2.1.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.33

Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	80	100	100
3	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	-	100	100
4	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	-	100	100
5	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	-	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	-	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	-	15	8,5

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah



Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya disiplin, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda, meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, dan meningkatkan pendidikan politik yang berkualitas.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pengaduan yang ditangani = 20. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 20;
2. Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 6. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 6;
3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 353.631;
4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 353.631;
5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 194. Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan = 0;
6. Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Sukabumi dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota Sukabumi = 35. Jumlah kejadian kebakaran di Kota Sukabumi = 35;
7. Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 8,5 menit;

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

Jenis Pelayanan, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.34

**Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi,

2.1.3.1.6 Sosial

Tabel 2.35

Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Sosial				
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	55	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Sosial di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

dicapai melalui strategi Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, Meningkatkan pelayanan dasar dan penghidupan penduduk miskin dan rentan miskin.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 85. Populasi korban bencana alam dan sosial di Kota Sukabumi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kota Sukabumi = 85;
2. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 7. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi = 7.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.36

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM
	bagi korban bencana kab/kota			

Sumber : Dinas Sosial Kota Sukabumi, Tahun 2021

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tabel 2.37

Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	-	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	Persen	3	100	1,91
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	-	100	100
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	-	40,33	29,33
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	-	41,16	41,10

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator urusan Urusan tenaga kerja di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi menyusun kebijakan terkait tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan optimalisasi program peningkatan kesempatan kerja.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 7. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi = 7;



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

2. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 380.
Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 19.846;
3. PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 8.851.051.490.000. Jumlah tenaga kerja = 19.846;
4. Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 210. Jumlah Perusahaan = 716;
5. Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan = 1.716.
Jumlah pencari kerja yang terdaftar = 4.175;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.38

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	45,46	63,92	77,369
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,005	0,04	0,036
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,0005	0,01	11,464

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan anak. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan Meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan.



Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah ARG pada belanja langsung APBD = 533.969.842.432. Jumlah seluruh belanja langsung APBD = 690.158.890.311;
2. Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kota Sukabumi yang didampingi = 37. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 103.143;
3. Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 20. Jumlah penduduk perempuan = 174.460;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.3 Pangan

Tabel 2.39

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Pangan				
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	86	116,59	133,081

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Pangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA), dan Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi memiliki cadangan pangan yang cukup yaitu sebanyak = 59.804 dari jumlah kebutuhan pangan = 44.938.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan



2.1.3.2.4 Pertanian

Tabel 2.40

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Pertanian				
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	-	26,65	n/a
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	-	0	n/a
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	-	26,65	n/a

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator urusan Urusan Pertanian di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 belum terealisasi dengan baik, dan belum mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD. Hal ini disebabkan belum adanya perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menerbitkan ijin lokasi pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Tabel 2.41

Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	74,64	59,58	60,30
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kot	Persen	80	88,63	85,94
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	20	0	0

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pengendalian pencemaran tanah, air, dan udara, Meningkatkan peran



serta masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan, Meningkatkan pengendalian kerusakan lingkungan, Meningkatkan kerjasama pengelolaan persampahan, Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Sukabumi 60,3;
2. Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 56.541. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan Kota Sukabumi = 65.795;
3. Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota Sukabumi = 0. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 37.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.42

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	100	98,19	99,45
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	-	28,44	49,75
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100	97,69	98,02
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas



pelayanan publik yang berdasarkan pada standar pelayanan serta standar operasional prosedur (SOP), dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman = 249.013. Jumlah penduduk wajib KTP-el = 250.400;
2. Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 51.354. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 103.231;
3. Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 110.728. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 112.961;
4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 31. Jumlah OPD = 31;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.43

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,21	0	2,03
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67,8	75,52	74,64
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	-	8,11	9,33

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyusun kebijakan terkait pengendalian pertumbuhan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

penduduk, Optimalisasi program keluarga berencana, reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi, dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. TFR (Angka Kelahiran Total) 2,03;
2. Jumlah peserta KB Aktif Modern = 44.152. Jumlah Pasangan Usia Subur = 59.155;
3. Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 5.520. Jumlah Pasangan Usia Subur = 59.155;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Tabel 2.44

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Perhubungan				
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	angka	-	80,8	100
2	V/C Ratio di J alan Kabupaten/Kota	angka	-	0,48 (arteri sekunder) 0,32 (kolektor sekunder) 0,23 (local sekunder)	0,38

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021

Tahun 2021 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan sarana dan prasarana jalan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Rasio konektivitas Kota Sukabumi 100;
2. Kinerja lalu lintas Kota Sukabumi 0,38.



Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.45

**Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019 - 2021**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	-	71,87	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	-	100	75,76
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	-	75,27	76,93

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan *smart city*. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 31. Jumlah OPD = 31
2. Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 75. Jumlah Layanan Publik = 99;
3. Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

dan pemerintah Kota Sukabumi = 272.064. Jumlah penduduk = 353.631;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tabel 2.46

Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	-	13,16	14,83
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	-	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 51. Jumlah seluruh koperasi = 344;
2. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 3.108. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 3.108;
3. (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di Kota Sukabumi = 2.792.150.724.537. Jumlah investasi tahun n-1 di Kota Sukabumi = 618.886.992.677.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.



2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Tabel 2.47

Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Penanaman Modal				
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	100	50,05	451,16

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi sangat baik dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu meningkatkan investasi dengan jumlah investasi tahun 2021 - jumlah investasi tahun 2020 di Kota Sukabumi = 2.792.150.724.537. Jumlah investasi tahun 2020 di Kota Sukabumi = 618.886.992.677.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.48

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Kepemudaan dan Olahraga				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	5	17,6	25,59
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	25	22,6	23,87
3	Peningkatan prestasi olahraga	jenis	27	9	15,00

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi cukup baik karena adanya pandemi Covid-19, namun tetap mampu mendukung



tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga, dan prestasi olah raga Daerah, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kota Sukabumi = 21.225. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Sukabumi = 82.954;
2. Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Sukabumi = 19.800. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Sukabumi = 82.954;
3. Peningkatan prestasi olahraga dengan perolehan 15 medali.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.13 Kebudayaan

Tabel 2.49

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Kebudayaan				
1	Terlestariannya Cagar Budaya	Persen	8	73	73,33

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Kebudayaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa kinerja Kota Sukabumi mampu melestarikan cagar budaya sejumlah = 55, dari jumlah cagar budaya yang terdata = 75.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.14 Statistik

Tabel 2.50

Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Statistik				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	60	71,87	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	60	78,12	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Statistik di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 31. jumlah OPD = 31;
2. Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 31. jumlah OPD = 31;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.



2.1.3.2.15 Persandian

Tabel 2.51

Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Persandian				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	40	0	62,95

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Persandian di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 belum terealisasi dengan baik, namun tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, mengelola 25 sistem elektronik yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik, dan mengamankan 25 titik system komunikasi. Adapun jumlah nilai per area keamanan informasi = 406 dengan jumlah area penilaian = 645.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Tabel 2.52

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Perpustakaan				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	15,416	61,49	65,34
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	55,06	39,68

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah



Capaian Indikator Urusan Perpustakaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, dan Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, memiliki 84.104 koleksi buku yang tersebar di berbagai perpustakaan, dikunjungi oleh 33.072 orang baik secara *online* maupun *onsite*, memiliki 280 tenaga perpustakaan, mengelola 8 perpustakaan berstandar nasional, melaksanakan 8 kegiatan sosialisasi gemar membaca, dan memiliki 148 judul dan 740 eksemplar budaya etnis.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.17 Kearsipan

Tabel 2.53

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Kearsipan				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	-	55,03	56,03
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	-	50	51,67

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Kearsipan di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 terealisasi cukup baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publi, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada standar pelayanan



serta standar operasional prosedur (SOP), dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, memiliki 42.000 arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, 210.000 arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip, 615 arsip statis, dan 500 arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.54

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Kelautan dan Perikanan				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	jumlah (ton)	24,71	1.243,83	1.388,07

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 terealisasi dengan baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA).

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, melaksanakan pemberdayaan terhadap 162 orang pembudidaya ikan, memproduksi benih budidaya air tawar sebanyak 24.485.680 ekor, dan mengelola 4 destinasi entitas pengelolaan.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.



2.1.3.3.2 Pariwisata

Tabel 2.55

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Pariwisata				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-	7	1,999
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	-	27	21,74
3	Tingkat hunian akomodasi	hari	2	4.475	36.000
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	-	2,92	2,95
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	-	13.419.712.356	46.861.100.000

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Pariwisata di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 terealisasi cukup baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan ekonomi kreatif, Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Mengembangkan disain Daerah sebagai objek wisata *heritage*.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah membina pengelolaan 4 destinasi wisata, melengkapi infrastruktur dasar untuk 6 destinasi wisat, dan mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2021– Jumlah wisatawan tahun 2020 = 69. Jumlah wisatawan tahun 2020 = 3451;
2. Jumlah wisatawan nusantara tahun 2021– Jumlah wisatawan tahun 2020 = 64594. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 297070;
3. Jumlah kamar yang terjual = 108.360. Jumlah kamar yang tersedia = 301;
4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD adalah 3,77%



Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.3.3 Pertanian

Tabel 2.56

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Pertanian				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton	6,16	24.480	664,65
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-	26,87	0

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian indikator Urusan Pertanian di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 terealisasi cukup baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA), dan Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 21.734. luas panen = 3.270;
2. Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2021 - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2020 = 0. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2020= 0.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.



2.1.3.3.4 Perdagangan

Tabel 2.57

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Perdagangan				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	-	6,19	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	-	91,95	53,78
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	-	23,6	89,33

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Perdagangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 3.108. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kota Sukabumi = 3.108;
2. Realisasi = 1.154.97. RDKK = 2.147.55;
3. Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 268. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kota Sukabumi = 300.

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.



2.1.3.3.5 Perindustrian

Tabel 2.58

**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2019 -
2021**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Perindustrian				
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	0,2	3,88	0,42
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	-	10	0
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	-	16,27	0
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	-	0	0
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Buku	-	85	85

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Perindustrian di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2021 – Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020 = 11. Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020 = 2.625;
2. Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.



2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.59

**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan dan Keuangan
Tahun 2019 - 2021**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Perencanaan dan Keuangan				
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	-	18,19	n/a
2	Rasio PAD	Persen	-	29,77	2,78
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	-	3	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	-	2	2
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	-	1	82,40
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	-	WTP	n/a

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian IKK urusan Urusan Perencanaan dan Keuangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah PAD = 344.060.591.430. Jumlah APBD non migas = 123.67.405.480.000;
2. Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 989.695.213.737. jumlah belanja APBD = 1.201.047.392.056

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.



2.1.3.4.2 Pengadaan

Tabel 2.60

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengadaan Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan				
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	-	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	-	19,6	6,55
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	-	74,1	96,51

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Pengadaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Meningkatkan pengordinasian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2021 = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun 2021 = 54;
2. jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 54. Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif = 825;
3. Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan = 1.033.281.106.123. total belanja langsung = 1.070.655.282.207;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.



2.1.3.4.3 Kepegawaian

Tabel 2.61

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Kepegawaian				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	-	210	283,76
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	-	3,6	9,86
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	-	3,09	84,75

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Kepegawaian di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan manajemen pegawai ASN dan Meningkatkan pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, dan Meningkatkan evaluasi dan pembinaan kinerja penyelenggaraan pemerintah .

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1328. Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah = 468;
2. Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 177. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1.796 ;
3. Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 150. seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 177.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.



2.1.3.4.4 Manajemen Keuangan

Tabel 2.62

**Capaian Indikator Kinerja Urusan Manajemen Keuangan Tahun
2019 - 2021**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Manajemen Keuangan				
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-	1	2,80
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	-	1	14,71
3	Manajemen Aset	Persen	-	50	2
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	-	6,06	10,02

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Manajemen Keuangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi = 1.274.940.452.677. total belanja APBD dikurangi satu = 1.240.179.599.870;
2. Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi = 344.060.591.430. dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu = 299.928.385.053;
3. Nilai realisasi SiLPA = 120.504.108.331. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 1.202.503.376.576.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.



2.1.3.4.5 Transparansi dan Partisipasi Publik

Tabel 2.63

**Capaian Indikator Kinerja Urusan Transparansi dan Partisipasi
Publik Tahun 2019 - 2021**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Transparansi dan Partisipasi Publik				
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	-	110,96	0
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	-	83,33	41,67

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda. Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda;
2. Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 5. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama atau IKU Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci atau IKK pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator



kinerja outcomes atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran. Selain itu, ditetapkan juga target pencapaiannya sebagai patokan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan pemerintahan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4. Dalam Perda tersebut ditetapkan jumlah indikator sasaran atau indikator kinerja utama sebanyak 19 (sembilan belas), indikator kinerja tersebut terdiri dari 6 (enam) indikator untuk Misi I, 4 (empat) indikator untuk Misi II, 4 (empat) indikator untuk Misi III, dan 5 (lima) indikator untuk Misi IV.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPJMD dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk mempermudah interpretasi atas penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, digunakan interpretasi pencapaian IKU sebagaimana ditampilkan pada Tabel dibawah ini.



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

**Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN 2021			KETERANGAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA									
1.1	MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERKUALITAS YANG BERAKHLAK MULIA	a .	Indeks rasa aman	Persen	85,35	64,3	75,31	100	Sangat Tinggi
		b .	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,21	74,45	74,6	100	Sangat Tinggi
1.1 .1.	MENINGKATNYA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA, PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	a .	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	74,83	74,08	74,9	100	Sangat Tinggi
1.1 .2.	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	a .	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,221	0,287	0,29	100	Sangat Tinggi
1.1 .3.	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN MERATA	a .	Indeks Pendidikan	Angka	88,49	69,82	70,4	100	Sangat Tinggi
1.1 .4.	TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA	a .	Indeks Kota Kreatif (IKK)	Angka	n/a	27,2	27,93	100	Sangat Tinggi
1.1 .5.	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK	a .	Indeks pembangunan gender	Angka	91,36	91,19	91,58	100	Sangat Tinggi
1.1 .6.	MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	a .	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	76,23	67,91	79,5	100	Sangat Tinggi
MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN									
2.1 .	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	a .	Indeks kenyamanan	Angka	23,45	24,4	22,91	93,89	Sangat Tinggi
2.1 .1.	TERWUJUDNYA PEMERATAAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKELANJUTAN	a .	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Angka	77	78	86,2	100	Sangat Tinggi
		b .	Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	30	35	36	100	Sangat Tinggi
2.1 .2.	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS	a .	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	43,3	58,21	60,3	100	Sangat Tinggi
2.1 .3.	TERWUJUDNYA KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA	a .	Indeks Kapasitas	Point	0,51	0,51	0,49	96,08	Sangat Tinggi



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN 2021			KETERANGAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Bencana Daerah								
MISI 3 : MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR									
3.1	MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG KREATIF DAN BERKELANJUTAN	a	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	-1,48	4,45	3,71	83,37	Tinggi
3.1.1	MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI	a	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	2074,46	1.851,46	2.030,69*	100	Sangat Tinggi
3.1.2	MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN, DAN DAERAH SEKITAR	a	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	persen	-2,68	1	3,64*	100	Sangat Tinggi
3.1.3	MENINGKATNYA SEKTOR PARIWISATA KREATIF MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN, DAN DAERAH SEKITAR	a	kontribusi pariwisata terhadap PDRB	persen	2,93	1 – 1,14	2,95*	100	Sangat Tinggi
3.1.4	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN USAHA DAN KETERSEDIAAN PANGAN MASYARAKAT	a	Skor Pola Pangan Harapan	persen	86	79,5	84,8	100	Sangat Tinggi
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF									
4.1	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	a	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	68,25	68,93	67,91	98,52	Sangat Tinggi
4.1.1	TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a	Nilai SAKIP	Skor	76,51	78,00	76,35	97,88	Sangat Tinggi
		b	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
4.1.2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	a	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,93	2,81	3,28	100	Sangat Tinggi
4.1.3	MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	a	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,72	2,3	2,98	100	Sangat Tinggi
4.2	MENINGKATKAN INOVASI DAERAH	a	Skor Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Terinovatif (4675)	Terinovatif (≥ 1001)	Inovatif		Tinggi



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN 2021			KETERANGAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
4.2 .1.	MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	a .	Indeks Daya Saing Daerah	Predikat	6,84	Tinggi	sangat tinggi	100	Sangat Tinggi

Sumber : Evaluasi RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh IKU termasuk dalam kriteria capaian sangat tinggi. Walaupun nilai capaiannya tidak sampai 100% namun dengan nilai diatas 91% maka termasuk dalam kriteria sangat tinggi dan secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian IKU sudah berhasil.

Kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi di tahun 2021 mengakibatkan beberapa anggaran kegiatan di-*refocussing*. Namun anggaran yang terbatas tidak menghambat perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan mendorong pencapaian realisasi IKU. Bentuk tanggung jawab perangkat daerah dalam menyukseskan visi misi kepala daerah dan meningkatkan daya saing di Kota Sukabumi dapat terlihat dari pencapaian nilai IKU yang masuk dalam kriteria sangat tinggi.

2.1.4.2. Inovasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun sasaran inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan publik;
2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
3. Peningkatan daya saing daerah.

Pembaharuan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dapat berbentuk:



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

1. Inovasi tata kelola publik, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;
2. Inovasi pelayanan publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik;
3. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai visi Kota Sukabumi yaitu terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera, maka diperlukan adanya beberapa inovasi daerah dalam rangka mengakselerasi pencapaian sesuai dengan yang ditargetkan. Adapun inovasi daerah Kota Sukabumi yang dilaksanakan pada periode 2018-2023 dituangkan dalam 15 (lima belas) program unggulan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD 2018-2023.

Hingga akhir tahun 2021, Kota Sukabumi telah berhasil mencetak berbagai prestasi baik dari sisi perencanaan maupun pembangunan Kota Sukabumi. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari inovasi-inovasi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dan mendukung percepatan pembangunan.

Adapun inovasi daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama;

Untuk mencapai pilar religius yaitu mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga, maka dilaksanakan program inovasi ini melalui:

- a) Program peningkatan kualitas lembaga keagamaan;
- b) Program gerakan magrib mengaji;
- c) Program gerakan subuh berjamaah;



- d) Program pembiasaan akhlakul karimah;
- e) Program peningkatan toleransi;
- f) Program family straightening (pelatihan pranikah, pelatihan parenting, konseling keluarga);
- g) Program promosi kota halal *friendly*.

Adapun hasil kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 diantaranya:

- a) Magrib Mengaji
 - Insentif Guru Mengaji (200 orang x @ Rp. 200.000).
 - b) Bantuan Sarana Pengajian
 - Jumlah Mesjid yang mendapatkan Bantuan Paket Sarana Pengajian yaitu 35 mesjid;
 - Isi Paket : Al Qur'an, Buku Iqro (1,2,3), Hambalan Qur'an.
 - c) Fasilitasi Pembinaan
 - Insentif Marbot: 478 orang x Rp. 150.000;
 - Insentif Kordinator Marbot: 7 orang x Rp. 250.000;
 - Insentif Tenaga Pendidik Guru Agama (MD, MI, RA, TPQ, dan Pontran): 1.322 orang x Rp. 150.000;
 - Insentif Kordinator Tenaga Pendidik Guru Agama (MD, MI, RA, TPQ, dan Pontran): 11 orang x Rp. 250.000.
- 2) Program Peningkatan Literasi;
- Program ini merupakan salah satu inovasi untuk mengembangkan budaya literasi, mengajak warga untuk semakin gemar membaca dengan mengadakan acara-acara menarik di Daerah yang dilaksanakan oleh penggerak perpustakaan keliling.
- Kegiatan-kegiatan literasi yang dilaksanakan pada tahun 2021 diantaranya adalah terbangunnya 1 (satu) unit Media Center Literasi dan 2 (dua) buah sarana pojok baca yang mampu meningkatkan pengunjung perpustakaan rujukan sebanyak 43.272 orang.
- 3) Udunan Online di dukung oleh Forum Silih Asih Silih Asuh;
- Forum Silih Asih Silih Asuh atau Udunan Online, merupakan program inovasi untuk mendorong kesetiakawanan warga kota untuk saling membantu, silih asih silih asuh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan



secara kewenangan maupun secara anggaran sehingga masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi untuk berkontribusi secara langsung.

Pemerintah mendorong secara optimal kepedulian masyarakat serta kesetiakawanan sosial. Hal ini penting dilakukan karena dengan dua prinsip tersebut masyarakat diajak untuk terbiasa dengan model partisipatif dalam bermasyarakat. Partisipasi jelas diperlukan dalam menumbuh kembangkan kemajuan kota tempat tinggalnya.

Mekanisme online digunakan dalam program ini adalah untuk mendorong prinsip transparansi serta kecepatan dalam pelaksanaannya. Selain itu melalui program ini, masyarakat perkotaan yang telah relatif terbiasa dengan iklim digitalisasi akan mendapatkan kemudahan dalam berpartisipasi serta ikut peduli dengan anggota masyarakat kota lainnya yang tengah dalam kondisi kesulitan.

Pada tahun 2021 kegiatan ini telah mampu menghasilkan transaksi sebanyak 1.591 (seribu lima ratus sembilan puluh satu) transaksi, yaitu sebesar Rp. 362.309.013,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah tiga belas rupiah). Jumlah tersebut disalurkan untuk 15 (lima belas) kasus, diantaranya bantuan untuk orang sakit, renovasi rumah roboh/ tidak layak huni, isolasi mandiri Covid-19, dan donasi palestina.

4) Program Students Camp;

Program Students Camp, merupakan program pendidikan holistik yang bertujuan melakukan pembentukan karakter bagi siswa SMP, SMA dan SMK sederajat. Program ini diharapkan akan melahirkan pelajar-pelajar yang dapat berperan sebagai agen-agen perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungannya. Program ini dirancang untuk memperkaya para peserta dengan pelatihan-pelatihan yang merangsang pertumbuhan jiwa kepemimpinan dan wawasan pengetahuan lingkungan para peserta.

Perlu kiranya diketahui bahwa program ini titik tolaknya ada pada bagaimana melakukan pelatihan pada siswa-siswa pilihan yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyebarkan nilai-nilai yang baik bagi siswa-siswa lainnya dari hasil pelatihan.



Pelatihan ini diharapkan untuk membangun rasa persaudaraan antar para pelajar di Daerah, sehingga diharapkan mampu menekan dan meredusir masalah-masalah kenakalan pelajar serta berbagai perilaku negatif lainnya.

Untuk melaksanakan inovasi tersebut, maka pada tahun 2021 telah disusun Buku Panduan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

5) Program Optimalisasi Puskesmas;

Program Optimalisasi Puskesmas, merupakan program untuk peningkatan mutu dan layanan Puskesmas di setiap kecamatan dengan menyediakan dokter spesialis, peralatan medis, layanan peserta BPJS nonstop 24 jam, dan ambulan SIGAP. Dengan tambahan satu perawat di setiap kelurahan atau home care sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi pelayanan warga yang memerlukan pengobatan, pertolongan medis di setiap kecamatan agar terhindar dari penumpukan pasien di RSUD sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih optimal.

Program ini turut mengimbangi pertumbuhan Daerah yang cukup signifikan. Kebutuhan penduduk perkotaan yang terus bertambah dari sisi kuantitas penduduk menuntut perimbangan dari sisi kualitas dan fasilitas sebuah kota. Khusus di bidang kesehatan, program ini diupayakan pemerintah untuk mendorong perimbangan itu terjadi serta upaya optimalisasi.

Program ini dirancang dengan basis puskesmas di setiap kewilayahan, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan diharapkan dapat mengalami peningkatan. Daerah memiliki harapan bahwa peningkatan ini tidak hanya berdampak bagi peningkatan pelayanan kesehatan saja namun juga berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Daerah secara lebih menyeluruh.

Pada tahun 2021 capaian yang dihasilkan adalah:

- a) Ambulan Sigap: Pelayanan 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) Kasus;
- b) Home Care: Pelayanan 8.288 (delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan) kasus;



- c) Klinik Sore : Pelayanan 4.413 (empat ribu empat ratus tiga belas) kunjungan ;
- 6) Program Rumah Singgah;
Program rumah singgah merupakan program untuk menyediakan rumah singgah dan tenaga administrasinya bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memeriksakan kesehatan, pengobatan dan perawatan medis setelah dirujuk ke Rumah Sakit di sekitar Kota Bandung.
Program ini dirancang dengan tujuan untuk mengurangi beban dan memudahkan masyarakat Daerah ketika harus memenuhi kebutuhan pengobatan ke rumah sakit rujukan di Kota Bandung khususnya RS Hasan Sadikin. Kesulitan-kesulitan yang sering timbul akibat lokasi pengobatan jauh dari tempat tinggalnya dan tidak mampu untuk membiayainya.
Dengan adanya rumah singgah yang disertai tenaga administrasi maka fungsi fasilitas ini tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara saja bagi pasien yang hendak merujuk namun hal-hal yang biasanya menjadi kesulitan khususnya persoalan administratif pada rumah sakit rujukan dapat ditanggulangi dengan baik.
Alamat Rumah Singgah yaitu di Jl. Turangga No. 33, Bandung.
Pada tahun 2021, kegiatan ini mampu membantu masyarakat yang membutuhkan dengan penerima manfaat sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang, pendamping 90 (sembilan puluh) orang, dan total jumlah adalah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang. Selain itu juga dilaporkan penerima manfaat layanan ambulan sebanyak 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) kali.
- 7) Kelurahan *Sport Center*;
Inovasi ini merupakan program penyediaan ruang terbuka publik dan fasilitas olahraga yang berkualitas di setiap kelurahan.
Pada tahun 2021 hasil pembangunan *Sport Center* telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 8 (delapan) lokasi.
Hingga akhir tahun 2021 terhitung 25 (dua puluh lima) lokasi sudah terbangun *Sport Center*, dan masih menyisakan 8 (delapan) lokasi yang akan diselesaikan pada tahun 2022.
- 8) Program Revitalisasi Pedestrian;



Program ini merupakan konsep penataan integrasi kawasan lapang merdeka sehingga dapat menjadi ruang terbuka publik yang lebih nyaman serta dapat menjadi salah satu *landmark* kota; selain kawasan terintegrasi lapang merdeka dan alun-alun juga diprioritaskan untuk revitalisasi pedestrian lainnya yang dapat merubah wajah Daerah atau dilokasi-lokasi pintuk masuk Daerah. Pada tahun 2021 kawasan terintegrasi lapang merdeka dan alun-alun telah terbangun dan menjadi salah satu fasilitas publik yang kebanggan warga Kota Sukabumi.

Selain itu pembangunan pedestrian yang berlokasi di Jl. A. Yani mampu dibangun dengan total panjang jalan yaitu \pm 800 m2.

9) Program Sukabumi KECE;

Program ini merupakan program pemberdayaan anak muda melalui pelatihan dan pendampingan wirausaha baru, sehingga terbentuk wira usaha baru dengan jenis bidang usaha tertentu.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Pendidikan dan pelatihan bagi 60 orang calon wirausaha muda baru yang siap bersaing.

10) Program Kredit Anyelir;

Program ini merupakan program bantuan permodalan yang terintegrasi dengan program Sukabumi Kece, diberikan kepada wirausaha baru atau WUB yang telah dinyatakan lulus pelatihan.

Pada tahun 2021 telah terfasilitasi permodalan melalui Bantuan Sosial sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

11) Program *Little* Sukabumi;

Program *Little* Sukabumi merupakan program pusat layanan informasi, promosi, pusat belanja, dan display produk unggulan Daerah yang bersinergi dengan daerah lain yang berfungsi sebagai potensi pasar bagi produk unggulan Daerah.

Pada tahun 2021 Kota Sukabumi sudah melakukan Kerjasama (penandatanganan MoU) dengan Kota Depok dan Kota Tangerang sebagai pasar produk unggulan daerah.

12) Program Sukabumi *Creative Hub*;

Program Sukabumi *Creative Hub* merupakan program pembangunan ruang kreasi bagi warga dengan menyediakan studio foto, televisi, fashion, ruang ICT, galeri seni, serta bioskop



mini untuk pemutaran film karya anak bangsa, ruang belajar, kafetaria, radio komunitas anak muda, studio rekaman, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2021 rencana pembangunan Gedung SCH tidak dapat dilaksanakan karena mengandalkan anggaran dari bantuan keuangan provinsi. Namun ketiadaan Gedung tidak menghambat kreatifitas anak-anak muda dalam menghasilkan karya. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan telah menghasilkan:

- 16 Subsektor Ekonomi Kreatif;
- 9 Event;
- 10 orang terdaftar HKI;
- kegiatan kreatif Edux;
- 200 Buku Creative Aset;
- M O U;
- 1 Data Updating Pelaku Ekraf.

13) Program Pendidikan Vokasi;

Program Pendidikan Vokasi, merupakan program pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan keahlian tertentu atau vokasi yang relevan dengan dunia kerja dan usaha.

Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa salah satu kualifikasi penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia adalah pendidikan vokasi, dimana kualifikasi pendidikan ini menekankan pada penguasaan keahlian terapan tertentu.

Dalam program ini dirancang untuk lebih dapat menyalurkan para calon tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi untuk dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang dipelajarinya di masa sekolah. Titik beratnya ada pada upaya pemerintah untuk mempertemukan para lulusan pendidikan vokasi dengan dunia kerja. Daya serap bagi para lulusan pendidikan vokasi ini didorong dengan mengadakan dan menciptakan ruang komunikasi yang lebih intens berupa kegiatan-kegiatan bursa kerja.

Diharapkan dengan upaya dan banyaknya ruang komunikasi yang diciptakan maka para lulusan pendidikan vokasi lebih memiliki peluang untuk menemukan lapangan pekerjaannya. Serta di sisi lain perusahaan-perusahaan di Daerah ataupun di luar itu



mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan SDM sesuai bidang yang mereka butuhkan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 diantaranya:

- Melaksanakan pelatihan kompetensi dengan jumlah peserta yang berkompentensi dan ditempatkan sebanyak 60 orang;
- MoU dengan Dunia usaha/ Dunia pendidikan/ LPK/ Perusahaan sebanyak 3 MoU.

14) Program Sukabumi *Artist Association*;

Program Sukabumi *Artist Association* merupakan program yang menjembatani seniman dengan pihak-pihak perusahaan agar karya-karya para seniman di Daerah bisa terpublikasikan, dikenali, dan dinikmati masyarakat yang tidak saja memiliki nilai estetis namun juga memiliki nilai bisnis.

Program ini bersinergi dengan program Sukabumi Creative Hub dalam memfasilitasi para kreator untuk menghasilkan karyanya dan mempublikasikan kepada masyarakat.

15) Program Sukabumi Participatory Responder atau SUPER

Program ini merupakan sebuah aplikasi resmi milik Pemerintah Daerah yang terintegrasi langsung dengan e-LAPOR yang menawarkan kemudahan bagi warga untuk berinteraksi dengan Pemerintah Daerah baik untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, pengaduan atas pelayanan publik, pertanyaan, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2021 tercatat ada 195 pengaduan dan seluruhnya (100%) telah ditindaklanjuti.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021

Pendekatan *Gap Analysis* (analisis kesenjangan) dan Analisis Deskriptif dapat digunakan sebagai metode evaluasi RKPD. *Gap Analysis* dipergunakan untuk membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

ditetapkan dalam APBD. Sementara Analisis Deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Dalam Analisis Deskriptif, data-data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain untuk mempermudah memahami data dan penyampaian informasi sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Kedua metode diatas dipergunakan untuk menilai capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan yang akan datang. Adapun hasil evaluasi capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah tahun 2021 ditampilkan dalam table di bawah ini.

Tabel 2.65

Capaian Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran			Kinerja	
		Jumlah	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.469.976.113	184.544.458.908	97,40	100	99,52
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	89.879.940.100	84.340.418.632	93,84	100	93,01
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	15.792.000	15.792.000	100,00	100	100,00
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	17.807.660	17.807.660	100,00	100	100,00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	212.107.400	188.882.875	89,05	100	100,00
	Jumlah	279.595.623.273	269.107.360.075	96,25		98,51
	DINAS KESEHATAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	335.878.746.439	323.997.584.707	96,46	100	37,41
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90.166.703.715	80.849.844.966	89,67	100	92,87
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.735.954.619	2.595.450.979	94,86	100	88,89
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	217.012.500	200.720.000	92,49	100	89,54
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.612.165.500	1.609.243.450	99,82	100	100,00
	Jumlah	430.610.582.773	409.252.844.102	95,04		81,74
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.249.851.478	12.170.480.098	99,35	100	98,57
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.442.948.749	6.712.585.244	90,19	100	94,65
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.998.952.000	3.667.320.202	73,36	100	73,36
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.160.934.200	1.992.658.200	92,21	100	100,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.622.432.600	2.598.534.500	99,09	100	99,09
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	8.509.466.650	8.427.976.315	99,04	100	99,04
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.431.720.000	7.256.370.067	97,64	100	97,64
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	27.057.825.500	24.390.251.826	90,14	100	90,14
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	32.549.663.326	28.945.436.680	88,93	100	88,93
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	21.075.000	19.475.000	92,41	100	92,41



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran			Kinerja	
		Jumlah	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	191.503.800	189.662.400	99,04	100	99,33
12	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	53.684.626	53.684.626	100,00	100	100,00
13	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.427.733.200	2.302.152.600	94,83	100	97,10
14	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	157.600.000	157.555.000	99,97	100	83,50
	Jumlah	107.875.391.129	98.884.142.758	91,67		93,84
	DINAS PERHUBUNGAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.325.154.336	24.631.208.458	93,57	100	90,11
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.433.535.426	4.298.991.968	96,97	100	98,73
	Jumlah	30.758.689.762	28.930.200.426	94,06		94,42
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.271.769.573	5.199.717.916	98,63	100	99,83
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	157.076.151	155.438.651	98,96	100	100,00
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	168.536.000	167.996.000	99,68	100	100,00
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	82.300.000	82.300.000	100,00	100	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	58.250.000	58.150.000	99,83	100	100,00
	Jumlah	5.737.931.724	5.663.602.567	98,70		99,97
	DINAS SOSIAL					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.408.496.092	4.367.129.835	99,06	100	100,00
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.285.624.600	1.283.082.600	99,80	100	100,00
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	974.535.000	934.581.000	95,90	100	95,90
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	212.939.950	206.833.289	97,13	100	87,50
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	132.625.000	98.875.000	74,55	100	100,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	20.000.000	20.000.000	100,00	100	100,00
	Jumlah	7.034.220.642	6.910.501.724	98,24		97,23
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.954.850.460	5.862.836.268	98,45	100	99,00
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	791.179.882	750.836.062	94,90	100	99,33
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.433.130.919	1.402.147.068	97,84	100	100,00
	Jumlah	8.179.161.261	8.015.819.398	98,00		99,44
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.055.108.205	5.044.243.002	99,79	100	100,00
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	190.646.000	171.920.107	90,18	100	100,00
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	133.599.700	8.341.800	6,24	100	100,00
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	464.942.717	458.132.613	98,54	100	95,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	27.970.000	25.720.000	91,96	100	100,00
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	21.826.000	21.826.000	100,00	100	100,00
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	40.498.000	40.456.000	99,90	100	100,00
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	99.328.000	99.328.000	100,00	100	100,00
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.601.284.300	2.868.562.900	79,65	100	100,00
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	72.522.500	72.522.500	100,00	100	80,00
	Jumlah	9.707.725.422	8.811.052.922	90,76		97,50
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran			Kinerja	
		Jumlah	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.744.845.861	8.661.955.882	99,05	100	98,09
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	390.304.000	389.584.000	99,82	100	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	51.600.000	50.695.000	98,25	100	100,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.120.674.050	2.853.969.850	91,45	100	100,00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	40.492.900	40.492.900	100,00	100	100,00
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	12.954.408.000	9.737.791.902	75,17	100	36,37
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.640.000	3.640.000	100,00	100	100,00
8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	89.074.500	87.242.000	97,94	100	89,33
9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	679.565.000	529.085.000	77,86	100	100,00
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	25.050.000	24.345.000	97,19	100	100,00
	Jumlah	26.099.654.311	22.378.801.534	85,74		92,38
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.889.736.535	10.280.792.533	94,41	100	99,59
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.310.000	2.310.000	100,00	100	100,00
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	676.740.600	676.740.600	100,00	100	97,17
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	26.899.200	26.899.200	100,00	100	85,00
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	4.785.000	4.785.000	100,00	100	100,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.049.635.950	944.851.250	90,02	100	100,00
7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	31.582.500	31.582.500	100,00	100	80,00
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	307.682.750	307.244.650	99,86	100	94,50
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.977.480.250	1.919.198.250	97,05	100	100,00
10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	94.308.000	94.308.000	100,00	100	100,00
11	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	17.325.000	17.325.000	100,00	100	100,00
12	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	120.910.000	120.910.000	100,00	100	100,00
	Jumlah	15.199.395.785	14.426.946.983	94,92		96,35
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	25.052.509.123	24.757.931.743	98,82	100	99,88
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	128.602.000	128.451.000	99,88	100	100,00
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	401.812.600	401.063.200	99,81	100	100,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	519.176.000	513.577.059	98,92	100	100,00
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	23.322.000	23.322.000	100,00	100	100,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	128.060.000	128.060.000	100,00	100	85,50
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	7.668.500	7.668.500	100,00	100	97,44
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	115.040.000	114.657.460	99,67	100	100,00



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran			Kinerja	
		Jumlah	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.955.514.460	2.945.721.403	99,67	100	100,00
	Jumlah	29.331.704.683	29.020.452.365	98,94		98,09
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.679.195.013	10.405.128.373	97,43	100	100,00
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.546.600.000	932.513.200	60,29	100	98,75
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	402.374.100	399.693.000	99,33	100	100,00
	Jumlah	12.628.169.113	11.737.334.573	92,95		99,58
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.728.172.281	4.653.533.180	98,42	100	95,06
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	799.532.500	775.337.100	96,97	100	84,17
3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	163.463.000	163.463.000	100,00	100	90,00
	Jumlah	5.691.167.781	5.592.333.280	98,26		89,74
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.421.942.028	2.380.707.688	98,30	100	100,00
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	878.170.475	877.492.925	99,92	100	100,00
	Jumlah	3.300.112.503	3.258.200.613	98,73		100,00
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.114.361.813	29.571.860.646	92,08	100	99,71
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.097.991.450	2.059.305.453	98,16	100	100,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.046.587.350	846.965.833	80,93	100	87,54
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.427.660.200	4.377.386.693	98,86	100	95,00
	Jumlah	39.686.600.813	36.855.518.625	92,87		95,56
	SEKRETARIAT DEWAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.477.031.704	33.585.377.440	97,41	100	91,75
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.360.653.400	15.704.318.624	95,99	100	96,71
	Jumlah	50.837.685.104	49.289.696.064	96,96		94,23
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.342.949.045	4.100.475.060	94,42	100	90,30
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	884.216.500	832.354.520	94,13	100	96,33
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.900.000	2.900.000	100,00	100	100,00
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	56.503.200	55.087.200	97,49	100	97,49
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	372.462.000	250.932.200	67,37	100	67,37
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	12.000.000	12.000.000	100,00	100	100,00
	Jumlah	5.671.030.745	5.253.748.980	92,64		91,92
	SEKRETARIAT DAERAH					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.278.477.380	33.840.023.955	90,78	100	82,34
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.565.585.170	8.361.671.512	72,30	100	67,32
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	665.496.900	603.860.532	90,74	100	87,81
	Jumlah	49.509.559.450	42.805.555.999	86,46		79,16



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran			Kinerja	
		Jumlah	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.445.915.054	8.264.319.828	97,85	100	100,00
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	940.333.500	937.349.530	99,68	100	100,00
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.330.314.450	2.310.380.255	99,14	100	100,00
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	676.945.800	673.478.800	99,49	100	100,00
	Jumlah	12.393.508.804	12.185.528.413	98,32		100,00
	DINAS TENAGA KERJA					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.342.167.863	3.206.076.406	95,93	100	100,00
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	164.100.000	163.900.000	99,88	100	81,25
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	62.150.000	61.950.000	99,68	100	100,00
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	71.880.000	71.880.000	100,00	100	100,00
	Jumlah	3.640.297.863	3.503.806.406	96,25		95,31
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.283.717.627	5.120.266.768	96,91	100	98,83
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.159.559.026	1.098.173.025	94,71	100	95,38
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.482.699.425	4.347.363.689	96,98	100	98,00
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	706.201.800	691.011.810	97,85	100	97,85
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	141.756.000	141.751.000	100,00	100	100,00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	135.595.000	134.595.091	99,26	100	99,26
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	869.676.200	859.486.200	98,83	100	98,83
	Jumlah	12.779.205.078	12.392.647.583	96,98		98,31
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.459.053.148	6.319.501.600	97,84	100	98,19
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	104.077.500	104.077.500	100,00	100	100,00
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	85.199.000	85.183.000	99,98	100	100,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	69.180.000	69.010.000	99,75	100	100,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	22.030.000	22.030.000	100,00	100	100,00
	Jumlah	6.739.539.648	6.599.802.100	97,93		99,64
	INSPEKTORAT					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.221.341.123	7.188.088.019	99,54	100	98,85
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	466.668.500	438.837.895	94,04	100	90,14
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	158.728.500	153.621.400	96,78	100	96,72
	Jumlah	7.846.738.123	7.780.547.314	99,16		95,24
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.025.246.854	3.779.145.724	93,89	100	100,00
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	159.097.200	145.447.200	91,42	100	100,00
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	2.253.989.039	2.251.087.519	99,87	100	100,00



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran			Kinerja	
		Jumlah	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	654.519.900	639.300.000	97,67	100	100,00
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	307.920.800	301.307.800	97,85	100	100,00
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	310.708.475	307.430.975	98,95	100	100,00
	Jumlah	7.711.482.268	7.423.719.218	96,27		100,00
	KECAMATAN GUNUNGPUYUH					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.053.749.461	6.877.727.504	97,50	100	94,46
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.542.588.500	1.515.660.487	98,25	100	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	636.788.000	632.490.000	99,33	100	83,56
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	178.960.000	178.960.000	100,00	100	100,00
	Jumlah	9.412.085.961	9.204.837.991	97,80		94,50
	KECAMATAN BAROS					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.826.582.767	5.479.205.227	94,04	100	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.154.202.200	1.129.170.765	97,83	100	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	610.376.130	597.889.427	97,95	100	100,00
	Jumlah	7.591.161.097	7.206.265.419	94,93		100,00
	KECAMATAN CIKOLE					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.357.629.688	9.324.095.118	99,64	100	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.008.409.000	1.999.804.607	99,57	100	87,50
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	870.352.000	859.157.000	98,71	100	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.575.000	10.575.000	100,00	100	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100	
	Jumlah	12.246.965.688	12.193.631.725	99,56		96,88
	KECAMATAN CITAMIANG					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.358.054.169	7.338.443.350	99,73	100	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.319.493.000	1.313.844.340	99,57	100	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	716.394.300	715.196.000	99,83	100	87,50
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.250.000	2.250.000	100,00	100	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.600.000	1.600.000	100,00	100	100,00
	Jumlah	9.397.791.469	9.371.333.690	99,72		97,50
	KECAMATAN CIBEUREUM					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.748.299.727	6.701.595.712	99,31	100	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.226.091.000	1.220.204.736	99,52	100	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	611.070.800	610.974.200	99,98	100	100,00



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran			Kinerja	
		Jumlah	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.350.000	2.350.000	100,00	100	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.860.000	13.860.000	100,00	100	100,00
	Jumlah	8.601.671.527	8.548.984.648	99,39		100,00
	KECAMATAN WARUDOYONG					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.478.525.404	7.280.273.409	97,35	100	95,63
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.684.077.000	1.676.551.291	99,55	100	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	751.613.200	728.453.660	96,92	100	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.950.000	3.950.000	100,00	100	100,00
	Jumlah	9.918.165.604	9.689.228.360	97,69		98,91
	KECAMATAN LEMBURSITU					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.271.249.759	7.252.032.014	99,74	100	99,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.448.727.500	1.447.038.657	99,88	100	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	795.631.300	793.970.800	99,79	100	100,00
	Jumlah	9.515.608.559	9.493.041.471	99,76		99,67

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Penilaian rata-rata capaian kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 diklasifikasikan pada kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.66
Skala Nilai Peringkat Kinerja

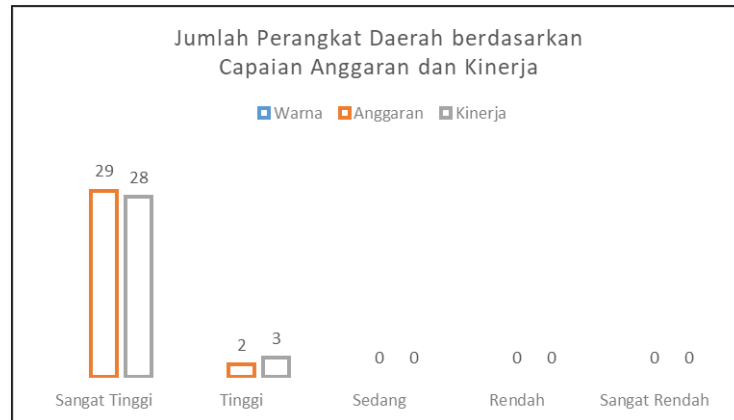
No	Interval Nilai	Kriteria
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Secara umum capaian realisasi anggaran dan kinerja masing-masing perangkat daerah di Kota Sukabumi pada tahun 2021 sangat baik. Rata-rata perangkat daerah masuk dalam kriteria sangat tinggi dalam hal penyerapan anggaran maupun kinerjanya, dan tidak ada perangkat daerah yang masuk dalam kriteria sedang atau lebih rendah dari itu. Jumlah perangkat daerah di Kota Sukabumi berdasarkan kriteria capaian anggaran dan kinerja pada tahun 2021 dijelaskan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2.24

Jumlah Perangkat Daerah berdasarkan Kriteria Capaian Anggaran dan Kinerja tahun 2021



Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Dari gambar diatas dapat diketahui untuk penyerapan anggaran, dari 31 perangkat daerah ada 29 yang mencapai kriteria sangat tinggi dan hanya 2 yang memperoleh kriteria tinggi. Ada 5 perangkat daerah yang mampu menyerap anggaran diatas 99%, sementara perangkat daerah yang melakukan penyerapan terendah adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Hal tersebut disebabkan oleh efektifitas anggaran dari pelaksanaan lelang pembangunan Gedung Pasar Lembursitu, dimana hasil pelelangan mampu menekan biaya pembangunan fisik dan berimbang pada nilai serapan anggaran. Walaupun nilai serapan anggarannya lebih rendah namun hasil kinerjanya sangat tinggi.

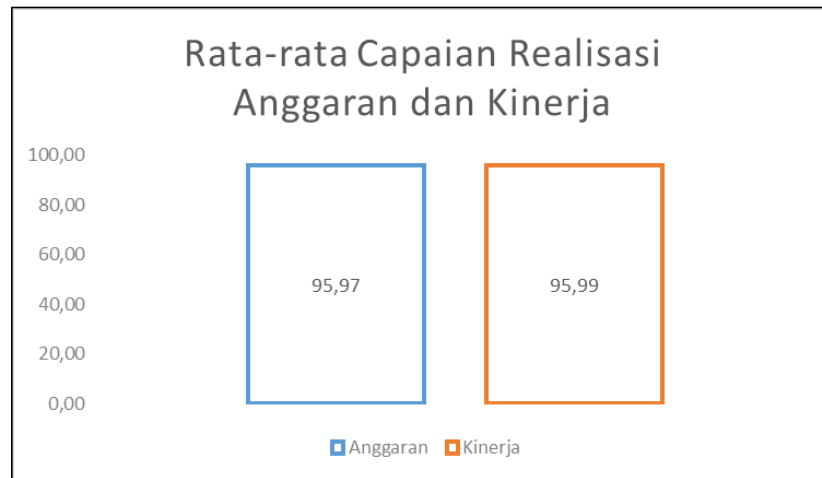
Untuk pencapaian kinerjanya, dari 31 perangkat daerah ada 28 yang masuk dalam kriteria kinerja sangat tinggi, dan hanya 3 yang masuk dalam kriteria kinerja tinggi. Capaian kinerja terendah adalah Sekretariat Daerah, hal ini disebabkan oleh banyaknya output yang direncanakan tidak sesuai dengan pelaksanaan dilapangan. Seperti diketahui bahwa Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang kegiatannya berhubungan dengan kegiatan kepala daerah dan pada realisasi dilapangan banyak kegiatan-kegiatan kepala daerah yang tidak dapat diprediksi dan bersifat strategis. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian hasil kinerja dengan yang sudah direncanakan. Sementara itu ada 5 perangkat daerah yang mampu menghasilkan kinerja 100%, artinya bahwa seluruh output yang direncanakan mampu terealisasi dengan baik.



Rata-rata capaian realisasi anggaran dan kinerja seluruh perangkat daerah di Kota Sukabumi pada tahun 2021 dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.25

Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2021



Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Realisasi penyerapan anggaran (95,97%) bisa dikatakan berbanding lurus dengan capaian realisasi kinerjanya (95,99%), ini membuktikan bahwa perencanaan kegiatan di Kota Sukabumi sangat baik karena dapat mengalokasikan penganggaran kegiatan sesuai dengan kinerja yang direncanakan. Kota Sukabumi dalam hal ini adalah Bappeda Kota Sukabumi telah mampu melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan dengan sangat baik sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah mampu berjalan sesuai dengan perencanaan.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2022 Triwulan I dan Realisasi RPJMD

Pada tahap penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD tahun 2022 triwulan I. Pada Tahun 2022 dilaksanakan 88 (delapan puluh delapan) program dan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.244.092.050.478,- (satu trilyun dua ratus empat puluh empat milyar sembilan puluh dua juta lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

Berdasarkan hasil evaluasi hingga triwulan I diketahui bahwa realisasi anggaran menacapai Rp. 192.775.583.973 (seratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Adapun hasil realisasi RKPD yang disandingkan dengan RPJMD hingga triwulan I ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.67
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2022
Triwulan I

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tw.I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				815.456.680.415	16	129.030.058.339		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				277.742.296.731	7	36.440.289.157		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				277.742.296.731	7	36.440.289.157		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	184.544.458.908	100	194.113.211.031	20	25.009.102.435	80,11	13,55
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	93,01	84.340.418.632	100	83.577.395.700	-	11.424.340.072	50,00	13,55
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100,00	15.792.000	0,2	51.690.000	-	6.846.650	50,00	43,36
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				434.615.564.112	2	82.272.944.045		
	Dinas Kesehatan				434.615.564.112	2	82.272.944.045		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	323.997.584.707	100	378.715.354.725	8	75.943.505.737	67,89	23,44
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	92,87	80.849.844.966	100	52.650.551.062	-	6.305.063.308	50,00	7,80
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	88,89	2.595.450.979		1.907.263.750	-	-	90,91	0,00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	89,54	200.720.000	100	0	-	-	50,00	0,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100,00	1.609.243.450	100	1.342.394.575	-	24.375.000	50,00	1,51
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				63.030.388.418	22	4.283.824.440		
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				63.030.388.418	22	4.283.824.440		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98,57	12.170.480.098		12.254.189.226	45	2.769.908.092	12,58	22,76



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tw.I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	94,65	6.712.585.244	9	1.428.876.004	194	673.808.000	35,743	10,04
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	73,36	3.667.320.202	100	3.822.499.800	-	12.869.000	50,00	0,35
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	100,00	1.992.658.200	73,20	3.390.056.000	-	29.134.000	90,91	1,46
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	99,09	2.598.534.500		0	-	-	1,11	0,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	99,04	8.427.976.315	46,00	3.920.390.150	-	11.315.800	10,417	0,13
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	97,60	7.253.482.384		7.383.203.350	-	16.190.350	25,00	0,22
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	90,14	24.390.251.826		1.644.072.000	-	559.130.161	57,98	2,29
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	88,93	28.945.406.680		28.818.931.888	-	190.431.837	60,09	0,66
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	92,41	19.475.000		50.000.000	-	15.700.000	40,00	80,62
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	99,33	189.662.400		318.170.000	-	5.337.200	50,00	2,81
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				16.080.331.595	-	112.846.070		
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				16.080.331.595	-	112.846.070		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100,00	53.684.626	98,61	140.285.970	-	19.786.770	50,00	36,86
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	97,10	2.302.152.600	0,07	15.791.210.000	-	85.953.800	50,56	3,73
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		0	98,61	60.035.625	-	7.105.500	#D IV/0!	#DI V/0!
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	83,50	157.555.000	100	88.800.000	-	-	50,00	0,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				17.056.009.641	35	4.614.895.414		
	Satuan Polisi Pamongpraaja dan Pemadam Kebakaran				13.363.957.665	24	3.707.611.156		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99,84	10.405.128.373	100	10.495.456.065	31	2.139.586.356	96,23	20,56
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	98,75	932.513.200	100	2.810.031.600	42	1.549.272.800	11,417	16,614
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100,00	399.693.000	307560	58.470.000	-	18.752.000	50,00	4,69
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				3.692.051.976	45	907.284.258		



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tw.I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	2.380.707.688		3.340.013.676	53	815.452.258	12,9,07	34,25
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100,00	877.492.925		352.038.300	38	91.832.000	11,1,29	10,47
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.932.089.918	32	1.305.259.213		
	Dinas Sosial				6.932.089.918	32	1.305.259.213		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	4.367.129.835	100	4.676.868.343	54	934.498.712	13,1,48	21,40
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100,00	1.283.082.600	100	1.003.877.200	66	252.627.500	14,9,00	19,69
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			100	1.500.000	-	-	#D IV/0!	#DI V/0!
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	95,00	934.581.000	100	421.617.500	33	69.876.151	10,1,43	7,48
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	87,50	206.833.289	100	718.955.000	-	11.496.850	50,00	5,56
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100,00	98.875.000	100	94.656.250	39	29.545.000	10,8,50	29,88
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100,00	20.000.000	91	14.615.625	-	7.215.000	50,00	36,08
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				127.699.660.556	19	23.247.745.616		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				3.699.676.820	22	671.289.507		
	Dinas Tenaga Kerja				3.699.676.820	22	671.289.507		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	3.206.076.406	100	3.376.526.920	39	649.489.507	10,9,15	20,26
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	100,00	164.100.000	80	205.000.000	-	-	50,00	0,00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100,00	71.880.000	90	68.149.900	-	-	50,00	0,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.560.679.600	5	116.066.193		
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak				1.560.679.600	5	116.066.193		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	-	-	#D IV/0!	#DI V/0!
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	100,00	171.920.107	30	426.769.700	3	23.770.195	13,2,50	13,83
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100,00	8.341.800	85	296.131.300	30	30.017.000	94,43	35,9,84



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tw.I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	95,00	458.132.613		355.235.100	-	61.638.998	58,82	13,45
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		25.720.000	5	0	-	-	#D IV/0!	0,00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100,00	21.826.000	madya	20.940.000	-	640.000	50,00	2,93
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100,00	40.456.000	85	461.603.500	-	-	58,82	0,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				11.361.171.530	23	2.163.644.163		
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan				11.361.171.530	23	2.163.644.163		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99,59	10.280.792.533	100	10.506.20.530	32	1.941.056.013	98,71	18,88
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	100,00	2.310.000	8	37.274.750	-	23.125.000	50,00	10,0108
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	97,17	676.740.600	40	799.121.750	-	184.846.050	12,50	27,31
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	85,00	26.899.200	100	11.805.000	33	11.055.000	11,65	41,106
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100,00	4.785.000	88	6.749.500	50	3.562.100	13,33	74,443
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				28.486.302.077	23	5.701.580.571		
	Dinas Lingkungan Hidup				28.486.302.077	23	5.701.580.571		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99,88	24.757.891.743	100	24.626.347.746	55	5.371.431.491	13,26	21,700
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100,00	128.451.000	100	167.286.800	-	6.574.000	50,00	5,12
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100,00	401.063.200	10	174.489.900	-	80.958.730	50,00	20,19
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	100,00	513.577.059	100	210.479.600	-	10.693.000	50,00	#VALUE!
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100,00	23.322.000	10	8.745.000	20	7.200.000	80,00	30,87
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	85,50	128.060.000	100	64.167.700	23	18.922.200	89,47	14,78
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	0	-	-	-	-	#D IV/0!	#DIV/0!
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	97,44	7.668.500	12	22.875.000	41	21.375.000	11,35	27,874



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tw.I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100,00	114.657.460	100	82.430.500	86	36.626.400	17,8,25	31,94
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	99,33	2.945.721.403	26	3.129.479.831	10	147.799.750	84,44	5,02
	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan				0	-	-		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.967.839.047	6	1.346.512.862		
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				6.967.839.047	6	1.346.512.862		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98,19	6.319.501.600	100	5.953.634.205	28	1.248.890.362	92,44	19,76
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	100,00	104.077.500		34.673.700	-	13.972.500	50,00	13,43
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	99,98	85.183.000		44.491.200	-	44.025.000	50,00	51,68
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	99,66	69.010.000		30.250.000	-	30.250.000	50,00	43,83
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100,00	22.030.000		9.375.000	-	9.375.000	50,00	42,56
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				0	-	-		
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak				0	-	-		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				10.538.430.310	8	647.836.543		
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak				10.538.430.310	8	647.836.543		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	5.044.243.002	100	5.717.078.835	32	609.764.043	98,60	#DI V/0!
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	100,00	99.328.000	80	91.052.000	-	19.506.400	58,82	19,64
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	100,00	2.868.562.900	67,87;	3.020.459.975	-	2.700.000	73,64	0,09
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	80,00	72.522.500	75	1.709.839.500	-	15.866.100	65,79	21,88
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				25.144.787.440	-	4.096.430.556		
	Dinas Perhubungan				25.144.787.440	-	4.096.430.556		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90,11	24.631.208.458		14.562.303.695	-	3.763.112.526	50,00	15,28
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	98,73	4.298.991.968		4.781.507.700	-	333.318.030	50,00	7,75



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tw.I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.446.88 4.759	53	1.172.67 2.881		
	Dinas Komunikasi dan Informatika				5.446.88 4.759	53	1.172.67 2.881		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99,8 3	5.199.71 7.916	80	4.810.08 1.809	49	1.038.35 9.931	14 2,2 2	19, 97
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100, 00	155.438. 651	90	515.563. 250	62	94.728.2 50	16 2,9 5	60, 94
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		167.996. 000		121.239. 700	47	39.584.7 00	#D IV/ 0!	23, 56
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				12.409.0 34.470	13	1.762.12 8.059		
	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan				12.409.0 34.470	13	1.762.12 8.059		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98,0 9	8.661.95 5.882	100	9.090.25 9.970	47	1.678.98 8.959	12 1,6 4	19, 38
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			62	4.429.12 5	-	-	#D IV/ 0!	#V AL UE !
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			62	6.852.17 5	50	3.768.60 0	#D IV/ 0!	#DI V/ 0!
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100, 00	389.584. 000	62	404.200. 000	17	63.794.0 00	10 8,4 1	16, 37
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100, 00	50.695.0 00	15	80.000.0 00	-	-	26 3,1 6	0,0 0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	100, 00	2853969 850		2.652.80 0.500	-	15.576.5 00	50, 00	0,5 5
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100, 00	40.492.9 00	600	170.492. 700	-	-	3,0 0	0,0 0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.448.76 8.888	1	1.008.17 5.563		
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				5.448.76 8.888	1	1.008.17 5.563		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90,3 0	4.100.47 5.060	80	4.419.56 9.238	7	929.664. 963	67, 40	22, 67
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	96,3 3	832.354. 520	189	558.000. 000	-	2.847.10 0	8,8 2	0,3 4
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100, 00	2.900.00 0		72.741.2 50	-	57.799.5 00	25, 64	19, 93, 09
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	97,4 9	55.087.2 00	1.000	19.314.0 00	-	16.014.0 00	1,6 7	29, 07
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	67,3 7	250.932. 200	210	369.694. 400	-	-	7,7 5	0,0 0
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100, 00	12.000.0 00	400	9.450.00 0	-	1.850.00 0	4,1 7	15, 42



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tw.I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				11.285.436.260	1	3.464.810.660		
					11.285.436.260	1	3.464.810.660		
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				11.285.436.260	1	3.464.810.660		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98,83	5.120.266.768	100	5.403.502.236	4	1.529.228.836	56,80	29,87
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	95,38	1.098.173.025	81,000	1.429.273.524	-	723.597.824	50,00	65,89
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	98,00	4.347.363.689		4.452.660.500	-	1.211.984.000	23,26	27,88
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				29.658.000	-	7.408.000		
	Dinas Komunikasi dan Informatika				29.658.000	50	7.408.000		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100,00	82.300.000	60	29.658.000	50	7.408.000	143,75	9,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				25.041.450	65	12.974.400		
	Dinas Komunikasi dan Informatika				25.041.450	65	12.974.400		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100,00	58.150.000	60	25.041.450	65	12.974.400	146,94	22,31
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				202.401.300	-	21.166.000		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				202.401.300	-	21.166.000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	100,00	17.807.660	15	53.349.700	-	9.059.000	166,67	50,87
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	100,00	188.882.875	50	122.599.800	-	12.107.000	72,46	6,41
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			50	26.451.800	-	-	#D IV/ 0!	#DI V/ 0!
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				-	-	-		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4.980.345.805	18	976.023.158		
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah				4.980.345.805	18	976.023.158		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95,06	4.653.533.180	100	4.602.839.805	35	876.798.558	105,52	18,84
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	84,17	775.337.100	58	377.506.000	-	99.224.600	84,75	12,80
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				113.202.800	80	79.026.500		
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah				113.202.800	80	79.026.500		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	90,00	163.463.000	77	113.202.800	80	79.026.500	207,03	48,35
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.697.128.275	-	857.302.750		



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tw.I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				357.691.150	25	72.714.750		
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan				357.691.150	25	72.714.750		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	100,00	944.851.250	24,83	332.536.250	50	69.431.250	35,06	7,35
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	80,00	31.582.500	42,31	25.154.900	-	3.283.500	50,00	10,40
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.565.238.400	-	342.868.400		
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				1.565.238.400	-	342.868.400		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	98,46	691.011.810		231.902.000	-	-	50,00	0,00
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	100,00	141.751.000		136.835.500	-	111.715.500	50,00	78,81
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	99,26	134.595.091		66.947.500	-	8.947.500	4,76	6,65
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	98,83	859.486.200	11	1.129.553.400	-	222.205.400	50,00	25,85
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				918.000.350	0	352.111.500		
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan				918.000.350	0	352.111.500		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	### ### ##	307.244.650	20156	195.077.300	-	79.625.000	0,55	25,92
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	44,30	1.919.198.250	32	492.470.250	-	227.800.000	11,36	11,87
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	100,00	94.308.000	100	87.648.000	-	29.847.000	50,00	31,65
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100,00	17.325.000	70	8.662.500	-	8.512.500	50,00	49,13
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	100,00	120.910.000		134.142.300	2	6.327.000	53,00	5,23
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.208.844.775	1	84.928.000		
	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan				1.208.844.775	1	84.928.000		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	36,37	9.737.791.902	1	1.105.311.250	3	31.803.500	54,03	0,33
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		3.640.000	100	4.263.750	-	4.000.500	#D IV/ 0!	10,99
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			2.298.925,80	11.250.000	-	1.599.000	#D IV/ 0!	#DI V/ 0!
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	89,33	87.242.000	25	88.019.775	35	47.525.000	10,86	54,47
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			10	-	-	-	#D IV/ 0!	#DI V/ 0!



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tw.I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				614.353.600	-	4.680.100		
	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan				614.353.600	-	4.680.100		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	100,00	529.085.000	0,50	539.525.000	-	2.630.500	50,00	0,50
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			100	41.250.000	-	1.351.000	#D IV/0!	#DI V/0!
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100,00	24.345.000	1	33.578.600	-	698.600	50,00	2,87
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				33.000.000	-	-		
	Dinas Tenaga Kerja				33.000.000	-	-		
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			90	-	-	-	#D IV/0!	#DI V/0!
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			90	33.000.000	-	-	#D IV/0!	#DI V/0!
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				104.043.623.039	1	14.513.545.949		
4	SEKRETARIAT DAERAH				52.321.273.993	-	1.630.405.645		
	Sekretariat Daerah				52.321.273.993	-	1.630.405.645		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82,34	33.840.023.955		6.674.834.984	-	1.630.405.645	50,00	4,82
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	67,32	8.361.671.512	100	0	-	-	50,00	0,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	87,81	603.860.532		0	-	-	50,00	0,00
	SEKRETARIAT DPRD				51.722.349.046	2	12.883.140.304		
	Sekretariat DPRD				51.722.349.046	2	12.883.140.304		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91,75	33.585.377.440	100	33.512.323.646	3	7.929.286.098	55,28	23,61
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	96,71	15.704.318.624	100	18.210.025.400	-	4.953.854.206	50,00	31,54
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				68.785.342.433	19,43	12.193.646.999		
5	PERENCANAAN				12.864.416.512	4	2.300.813.504		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				12.864.416.512	4	2.300.813.504		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	8.267.249.158	80	9.413.263.875	11	1.810.562.604	67,22	21,90
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	937.349.530	1.100	985.910.650	-	388.869.900	50,00	41,49



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tw.I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	2.302.363.255	100	1.629.377.900	-	101.381.000	50,00	4,40
	KEUANGAN				46.775.023.302	32	8.595.645.546		
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				46.775.023.302	32	8.595.645.546		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99,71	29.571.860.646	90	32.312.401.074	37	3.820.509.826	105,90	12,92
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100,00	2.059.305.453		10.880.423.928	31	3.547.434.851	101,85	17,22
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	87,54	846.965.833	90	1.053.301.800	15	165.880.840	81,32	19,59
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	95,00	4.377.386.693	100	2.528.896.500	44	1.061.820.029	119,84	24,26
	KEPEGAWAIAN				7.002.449.469	28,21	1.175.395.263		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				7.002.449.469	28,21	1.175.395.263		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99,22	5.862.836.268	100	6.502.916.469	28,63	1.127.696.005	93,28	19,23
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	99,33	750.836.062	90	499.533.000	28	47.699.258	99,09	6,35
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.593.542.650	33	87.991.760		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				1.593.542.650	33	87.991.760		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100,00	1.402.147.068	90	1.593.542.650	33	87.991.760	107,41	6,28
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				549.910.500	-	33.800.926		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				549.910.500	-	33.800.926		
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100,00	483.648.200	35	549.910.500	-	33.800.926	111,11	6,99
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				6.891.284.920	6,61	1.728.905.384		
	INSPEKTORAT DAERAH				7.556.521.678	6,61	1.728.905.384		
	Inspektorat Daerah				7.556.521.678	6,61	1.728.905.384		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98,85	7.188.088.019	65	7.028.963.678	19,84	1.623.722.284	105,83	22,59
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	90,14	438.837.895	100	320.957.000	-	60.946.100	25,00	13,89
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	96,72	153.621.400	70	206.601.000	-	44.237.000	0,00	28,80
7	UNSUR KEWILAYAHAN				70.815.138.720	26	10.591.978.220		
	KECAMATAN				12.932.567.841	35	2.236.600.736		



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tw.I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6	
	Kecamatan Cikole				12.932.567.841	35	2.236.600.736		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	9.324.095.118	100	8.893.969.941	42	1.680.021.827	11,250	18,02
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87,50	1.999.804.607	100	3.190.607.400	38	353.371.409	12,050	17,67
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100,00	859.157.000	100	835.990.500	45	201.207.500	45,12	23,42
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100,00	10.575.000	100	12.000.000	50	2.000.000	50,00	18,91
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100	0	-	-	#D IV/0!	#DI V/0!
	Kecamatan Gunung Puyuh				9.665.553.022	23	1.702.833.747		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	94,46	6.877.727.504	100	6.782.271.522	52	1.370.913.472	55,41	19,93
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,00	1.515.660.487	85	2.290.593.600	33	234.820.275	11,133	15,49
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	83,56	632.490.000	100	583.987.900	10	97.100.000	18,794	15,35
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100	-	-	-	#D IV/0!	#DI V/0!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100,00	29.999.900	100	8.700.000	17	-	74,75	0,00
	Kecamatan Citamiang				10.087.728.621	29	1.019.481.965		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	7.338.443.350	100	7.349.986.721	54	914.404.083	13,031	12,46
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,00	1.313.844.340	79	2.062.076.000	54	47.187.882	14,677	3,59
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100,00	715.196.000	30	670.061.100	37	57.890.000	15,249	8,09
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100,00	2.250.000	75	4.370.000	-	-	62,50	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100,00	1.600.000	100	1.234.800	-	-	50,00	0,00
	Kecamatan Warudoyong				11.039.699.782	3	1.751.216.711		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95,63	7.280.273.409	85	7.670.954.293	10	1.387.244.602	71,98	19,05
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,00	1.676.551.291	83	2.622.190.600	-	290.222.109	57,47	17,31
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100,00	728.453.660	87	701.759.889	6	72.775.000	13,738	9,99
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			60	4.905.000	-	-	#D IV/0!	#DI V/0!



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tw.I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100,00	3.950.000	100	39.890.000	-	975.000	50,00	24,68
	Kecamatan Baros				8.184.646.197	15	1.297.038.574		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	5.479.205.227	100	5.832.198.897	31	1.072.507.828	96,33	19,57
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,00	1.129.170.765		1.785.309.400	31	200.242.746	10,14	17,73
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100,00	597.889.427		560.823.500	14	23.448.000	16,73	3,92
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.212.400	-	-	#D IV/0!	#DI V/0!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				4.102.000	-	840.000	#D IV/0!	#DI V/0!
	Kecamatan Lembur Situ				10.056.910.721	47	1.120.897.382		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99,55	7.252.032.014	90	7.139.891.621	64	987.583.921	14,64	13,62
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	99,88	1.447.038.657	84	2.223.676.400	0	6.489.461	58,60	0,45
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	99,87	793.970.800	30	677.042.700	31	116.524.000	23,64	14,68
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			75	10.000.000	40	4.000.000	#D IV/0!	#DI V/0!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100	6.300.000	100	6.300.000	#D IV/0!	#DI V/0!
	Kecamatan Cibeureum				8.848.032.536	27	1.463.909.105		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	6.701.595.712	100	6.387.576.361	46	1.240.305.237	11,82	18,51
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,00	1.220.204.736	79	1.872.581.675	67	200.439.868	16,95	16,43
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100,00	610.974.200	30	554.918.000	8	19.739.000	18,30	3,23
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		2.350.000	76	17.944.000	-	-	#D IV/0!	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		13.860.000	100	15.012.500	17	3.425.000	#D IV/0!	24,71
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				7.204.626.040	7	612.400.716		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				7.204.626.040	7	612.400.716		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				7.204.626.040	7	612.400.716		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	3.779.145.724	100	3.549.284.601	29	545.643.216	92,98	14,44



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2022 (Tw.I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6	
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100,00	145.447.200	100	199.104.500	6	10.947.500	58,30	7,53
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100,00	2.251.087.519	100	825.458.039	-	-	50,00	0,00
	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00	639.300.000	100	563.279.100	-	2.000.000	50,00	0,31
	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100,00	301.307.800	100	346.800.000	-	9.900.000	50,00	3,29
	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100,00	307.430.975	100	1.720.699.800	6	43.910.000	59,00	14,28

Sumber: Evaluasi RKPD Triwulan I tahun 2022, Bappeda 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dan kinerja hingga triwulan I tahun 2022 belum ada yang mencapai target karena masih banyak kegiatan belum dapat dilaksanakan karena beberapa faktor. Dalam kerangka acuan kerja masing-masing subkegiatan di perangkat daerah rata-rata capaian kinerja baru dapat terlihat di awal triwulan III.

Sementara itu untuk capaian realisasi RPJMD hingga akhir tahun 2021 rata-rata berada di kriteria sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa target-target yang ditetapkan dalam RPJMD dapat dilaksanakan dengan baik oleh perangkat daerah. Walaupun kondisi masih pandemi Covid-19 dan ada beberapa anggaran kegiatan yang *refocusing* namun beberapa kegiatan yang berfokus pada pencapaian target RPJMD tetap menjadi prioritas.

2.3 Kondisi Masa Pandemi COVID-19 di Kota Sukabumi

Bencana pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal Tahun 2020 memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Termasuk juga di Kota Sukabumi, dampak pandemic ini terasa pada aspek perekonomian dan kesehatan sehingga



berimplikasi negatif pada kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif pada perekonomian masyarakat sangat dirasakan dengan terganggunya aktivitas dunia usaha terutama menurunnya aktivitas perdagangan pada sektor UMKM, penurunan produktivitas sektor industri yang mengakibatkan terjadinya gelombang PHK yang begitu besar, dan terhambatnya proyek-proyek infrastruktur yang mengakibatkan perlambatan pembentukan modal/investasi. Selain pada aspek perekonomian, dengan penyebarannya yang begitu masif, wabah ini tentunya berdampak buruk pada kondisi Kesehatan masyarakat dan semuanya berujung pada kondisi kerentanan social masyarakat yang meningkat.

2.3.1 Kondisi Kesehatan Masa Pandemi COVID-19

Dampak pandemi Covid-19 di sektor kesehatan yang paling banyak adalah meningkatnya angka kesakitan dan yang lebih fatal adalah meningkatnya angka kematian. Terdapat juga dampak penyerta lainnya terkait dengan pengendalian dan penanganan pasien yang terkonfirmasi positif diantaranya proses karantina atau isolasi dan penyembuhan pasien dengan gejala berat akibat efek infeksi Covid-19. Karena itu strategi penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor kesehatan terdiri dari 2 (dua) hal besar, yaitu pencegahan dan yang kedua adalah penyembuhan untuk pasien yang terkonfirmasi positif.

Untuk penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor kesehatan Pemerintah Daerah sudah menyiapkan program dan kegiatan yang diharapkan mampu menangani permasalahan pandemi covid19 di Daerah. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan, kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dan kegiatan pengadaan bahan habis pakai. Rencana anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar Rp. 49.011.383.495 (empat puluh sembilan milyar sebelas



juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah).

2.3.2 Kondisi Ekonomi Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2021

Untuk penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor ekonomi Pemerintah Daerah sudah menyiapkan program yang diharapkan mampu menangani permasalahan pandemi covid19 di Daerah. Adapun program tersebut adalah program pelayanan izin usaha simpan pinjaman, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), program pengembangan UMKM, program perizinan dan pendaftaran perusahaan, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program pengembangan ekspor, program standarisasi dan perlindungan konsumen, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional. Rencana anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar Rp. 62.324.774.000 (Enam puluh dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

2.3.3 Kondisi Sosial Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2021

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemulihan dampak pandemi covid 19 di sektor sosial adalah dengan memberikan bantuan sosial dan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat. Aliran bantuan ini akan disalurkan melalui program-program pemerintah seperti program keluarga harapan, kredit usaha rakyat, kredit ultra mikro, kartu sembako, hingga program bantuan pangan non tunai. Diharapkan bansos dan stimulus akan meningkatkan daya beli dan memberikan bantuan modal kerja bagi masyarakat untuk memulai kembali usahanya sehingga ekonomi bertahap akan bangkit. Untuk penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor sosial Pemerintah Daerah sudah menyiapkan program yang diharapkan



mampu menangani permasalahan pandemi covid19 di Daerah. Adapun program tersebut adalah program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan sosial dan program penanganan bencana. Rencana anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar Rp. 7.894.750.000 (Tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2.3.4 Kondisi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

Dampak pandemi Covid-19 sangat luas termasuk pada aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga bisa terimbas dampak tersebut. Kondisi tersebut juga terjadi di Kota Sukabumi, dimana sektor penerimaan pendapatan daerah khususnya dari retribusi, maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah. Hasil pendapatan daerah Kota Sukabumi pada Tahun 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan dan secara keseluruhan mengalami penurunan dari realisasi pendapatan Tahun 2019. Pendapatan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1,193,519,827,108,- menurun bila dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1,338,381,236,989,-. Dilihat dari sisi anggaran belanja, Tahun 2020 Kota Sukabumi telah berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1,202,030,934,576,- dari target sebesar Rp. 1.307.678.604.051,- atau sebesar 91,92 persen.

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang



tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan berbagai isu pembangunan maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama/ permasalahan daerah yang harus diselesaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh Perangkat Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memperhatikan janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan dan fenomena pandemi Covid-19, maka terdapat penambahan isu strategis dari 5 (lima) menjadi 6 (enam) isu strategis Daerah yang teridentifikasi, sebagai berikut:

- 1) kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan sosial kemasyarakatan;
- 2) infrastruktur dan tata kota;
- 3) daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) kualitas lingkungan hidup;
- 5) penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- 6) dampak pandemi Covid-19.

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan pada Tahun 2021, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.68
Rekapitulasi Permasalahan Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	PRIORI TAS PEMBANGU NAN	SASARAN
1	2	3	4
1) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar			
a) Pendidikan	1. Belum meratanya kases pendidikan karena distribusi guru yang kurang	3	Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata
	2. Belum Optimalnya mutu pendidikan	3	Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata
b) Kesehatan	1. adanya pandemi <i>Covid-19</i>	6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	2. meningkatnya angka penyakit tidak menular	3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	3. banyaknya fasilitas sanitasi yang tidak layak/tidak sehat	3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. adanya disparitas pembangunan infrastruktur	4	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan
	2. rendahnya fasilitas RTH publik	3	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan
	3. kurangnya pedestrian yang nyaman	3	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan
	4. belum terdistribusinya PDAM secara luas	4	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan
	5. masih banyaknya alih fungsi lahan	4	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan
	6. belum memiliki RDTR	4	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan
d) Perumahan Rakyat	1. luasan pemukiman kumuh sebesar 17%	4	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan
	2. rendahnya tingkat serah terima aset PSU	4	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan
e) Ketenteraman Ketertiban Umum	1. termasuk dalam IRB tinggi	3	Terwujudnya ketangguhan terhadap bencana



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	PRIORI TAS PEMBANGU NAN	SASARAN
1	2	3	4
dan Perlindungan Masyarakat			
	2. belum adanya alat dateksi bencana	4	Terwujudnya ketangguhan terhadap bencana
	3. belum berjalannya mekanisme pendirian bangunan melalui assesment dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) serta belum adanya sertifikat layak fungsi bangunan	4	Terwujudnya ketangguhan terhadap bencana
f) Sosial	1. belum optimalnya pemberian pelayanan sosial	2	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial
	2. belum optimalnya peran serta dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial
2) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar			
a) Tenaga Kerja	1. jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja	5	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
	2. kualitas tenaga kerja relatif rendah	1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
	3. meningkatnya pengangguran akibat pandemi Covid-19	6	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
	2. kurangnya anggaran untuk perencanaan berbasis gender	1	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
	3. rendahnya peran serta perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	1	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
c) Pangan	1. peningkatan produksi dan produktivitas	5	Meningkatnya pengembangan usaha



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	PRIORI TAS PEMBANGU NAN	SASARAN
1	2	3	4
	pangan yaitu beras belum optimal		dan ketersediaan pangan masyarakat
	2. pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah belum optimal	5	Meningkatnya pengembangan usaha dan ketersediaan pangan masyarakat
	3. volume cadangan pangan tingkat pemerintah belum memenuhi target SPM	5	Meningkatnya pengembangan usaha dan ketersediaan pangan masyarakat
d) Pertanian	-		
e) Lingkungan Hidup	1. kurangnya luasan RTH	4	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
	2. menurunnya kualitas lingkungan	4	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
	3. belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan sampah	4	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. masih terdapat penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan	2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	2. masih banyak Perangkat Daerah yang belum melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	2	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
	3. masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	4. masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai informasi teknologi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
g) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. belum optimalnya peran lembaga dan organisasi yang ada di masyarakat	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	2. keterbatasan SDM baik aparatur maupun kader di bidang pengendalian penduduk dan KB	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	PRIORI TAS PEMBANGU NAN	SASARAN
1	2	3	4
	3. peningkatan cakupan PUS peserta KB aktif belum diikuti dengan penurunan <i>unmet need</i> secara proporsional	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	4. belum optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE dan pemanfaatan kegiatan KB momentum	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
h) Perhubungan	1. kemacetan yang cukup tinggi	2	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan
	2. belum optimalnya pelayanan angkutan umum massal di Daerah	2	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan
	3. kurangnya lahan parkir	4	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan
	4. tingginya bangkitan kegiatan di pusat	1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan
i) Komunikasi dan Informatika	1. terbatasnya alokasi dana untuk pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	2	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	2. terbatasnya sumberdaya manusia bidang telematika	1	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	3. terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi	2	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
	4. masih mahalnya harga bandwidth internet yang berkualitas	2	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	5. belum tersedianya data center	4	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	PRIORI TAS PEMBANGU NAN	SASARAN
1	2	3	4
j) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. kondisi usaha mikro dan kecil (UMK) belum optimal	5	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
	2. pola kemitraan atau kerjasama antara koperasi dan UMK, dengan pengusaha besar belum optimal	5	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
	3. kurangnya dukungan pendanaan untuk promosi produk usaha mikro	5	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
	4. belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi usaha mikro	2	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
	5. belum tersedianya sistem database koperasi dan usaha mikro yang baik	2	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
	6. kurangnya SDM aparatur urusan koperasi dan UMK	1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
k) Penanaman Modal	1. kurangnya investor terutama sektor industri	5	Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar
	2. turunnya nilai investasi	5	Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar
l) Kepemudaan dan Olahraga	1. masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung urusan kepemudaan	4	Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Berbudaya
	2. belum optimalnya pemanfaatan Sarana Olah Raga (SOR)	1	Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Berbudaya
m) Statistik	1. belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan kebutuhan data statistik sektoral	2	Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel
	2. tingkat partisipasi dan distribusi data dari pengguna/ Perangkat Daerah terhadap kebutuhan pengguna data yang	2	Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	PRIORI TAS PEMBANGU NAN	SASARAN
1	2	3	4
	berkualitas sangat rendah		
	3. belum optimalnya sistem aplikasi yang memudahkan pengelolaan dan penyelenggaraan data statistik sektoral	2	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
n) Persandian	-		
o) Kebudayaan	1. belum adanya pembangunan museum kepurbakalaan dan jarahnitra	4	Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Berbudaya
	2. kurangnya perlindungan pemeliharaan dan penyelamatan warisan budaya tak benda dan hak kekayaan intelektual	2	Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Berbudaya
p) Perpustakaan	1. belum idealnya kondisi gedung perpustakaan umum daerah	4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	2. terbatasnya SDM (pustakawan)	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	3. rendahnya budaya literasi masyarakat	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
q) Kearsipan	1. kurangnya SDM (arsiparis)	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	2. gedung depo arsip kurang representatif	4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3) Urusan Pilihan			
a) Kelautan dan Perikanan	1. tingkat konsumsi ikan masih rendah	5	Meningkatnya pengembangan usaha dan ketersediaan pangan masyarakat
	2. belum optimalnya standarisasi budidaya perikanan	5	Meningkatnya pengembangan usaha dan ketersediaan pangan masyarakat
b) Pariwisata	1. belum maksimalnya pertumbuhan dan pengembangan Pariwisata Ekonomi Kreatif	5	Meningkatnya Sektor pariwisata kreatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar
	2. masih minimnya Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW)	5	Meningkatnya Sektor pariwisata kreatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	PRIORI TAS PEMBANGU NAN	SASARAN
1	2	3	4
	3. masih rendahnya sumber daya manusia pengelola destinasi pariwisata milik Daerah	1	Meningkatnya Sektor pariwisata kreatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar
	4. kurangnya promosi pariwisata	5	Meningkatnya Sektor pariwisata kreatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar
	5. Kurangnya sarana prasarana destinasi pariwisata unggulan milik Daerah	5	Meningkatnya Sektor pariwisata kreatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar
c) Pertanian	1. Tingginya alih fungsi lahan termasuk LP2B	3	Meningkatnya pengembangan usaha dan ketersediaan pangan masyarakat
d) Perdagangan	1. perlunya peningkatan ketersediaan pasar rakyat dan sarana distribusi	5	Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar
	2. perlunya sistem terpadu monitoring serta koordinasi ketersediaan dan harga bahan pokok	5	Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar
	3. perlunya peningkatan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)	5	Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar
e) Perindustrian	1. kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana	5	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
	2. rendahnya IKM Produktif	5	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
	3. adanya potensi pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi investasi dan perdagangan	5	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
	4. kurangnya dukungan alokasi anggaran	5	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	PRIORI TAS PEMBANGU NAN	SASARAN
1	2	3	4
	pembangunan bidang perindustrian		
	5. kurangnya inovasi pemasaran	5	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi Daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Sukabumi yang dipengaruhi faktor internal dan variabel eksternal yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun global serta tentunya kondisi perekonomian pada masa pasca pandemi *Covid-19*. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting. Memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Hasil kajian dan analisis berkenaan dengan rancangan kerangka ekonomi Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi acuan pada proses perencanaan hingga menjadi penganggaran sampai nanti dijadikan dasar dalam proses pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2023 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2021 dan awal Tahun 2022, prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2022 dan 2023. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan



berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Pada awal Tahun 2020, dunia dihadapkan pada kondisi terjadinya Pandemi *Covid-19* yang membuat kondisi ekonomi global memburuk hingga berdampak juga pada kondisi perekonomian Nasional, Regional Jawa Barat serta Kota Sukabumi. Pandemi *Covid-19* telah merenggut ribuan nyawa di Indonesia serta mengakibatkan kerugian material yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk penyelamatan baik dari sisi kesehatan, jaringan pengaman sosial serta penanganan dampak ekonomi yang didalamnya termasuk dunia usaha dan masyarakat lain yang terkena dampak.

Pada Tahun 2023, kondisi kesehatan masyarakat akibat adanya Pandemi *Covid-19* diprediksi akan semakin membaik sehingga perekonomian nasional dan global termasuk Kota Sukabumi diperkirakan mulai bangkit. Prediksi perbaikan kondisi ekonomi ini seiring dengan semakin menurunnya jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif *Covid-19* serta semakin massifnya pelaksanaan Vaksinasi oleh pemerintah dan sekarang sudah pada tahap vaksinasi ketiga (Booster) serta vaksinasi pada usia sekolah dasar. Selain itu optimisme didapatkan setelah melihat fakta bahwa semakin meningkatnya aktivitas di beberapa sektor usaha, dimulainya kembali pembangunan proyek-proyek infrastruktur berbasis padat karya dan digitalisasi perdagangan.

Kota Sukabumi dianugerahi wilayah yang sejuk dengan segenap infrastruktur kota yang sudah berdiri sejak dahulu kala. Namun, seperti karakteristik daerah perkotaan pada umumnya, Kota Sukabumi memiliki wilayah dengan luas yang terbatas, yakni 48 km², serta jumlah penduduk Tahun 2021 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 353.631 jiwa, dan berdasarkan Data BPS sebesar 350.804 jiwa. kepadatan penduduk 7.259 jiwa/Km², dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.73 persen. Luas wilayah yang terbatas dengan jumlah penduduk yang cukup padat menjadi masalah tersendiri dalam pengembangan potensi ekonomi di Kota Sukabumi.



Namun demikian, letak geografis Kota Sukabumi yang cukup strategis di antara dua pusat pertumbuhan ekonomi, yaitu wilayah Bandung Raya dan wilayah megapolitan Jakarta, menciptakan suatu peluang yang dapat dikembangkan sebagai modal dasar dalam menggerakkan roda perekonomian. Posisi geografis tersebut memberikan keunggulan potensial dalam segi arus lintas barang dan jasa. Seyogyanya pengembangan ekonomi di Kota Sukabumi mengarah pada pendayagunaan potensi sosio-geografis yang dimilikinya.

Berdasarkan kondisi di atas, maka pada Perubahan RPJMD 2018-2023, Arah Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 telah dirumuskan melalui 6 (enam) Prioritas Pembangunan, meliputi:

1. peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia;
2. peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi;
3. peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat;
4. peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan;
5. pengembangan ekonomi yang berkelanjutan; dan
6. penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19.

Dari 6 (enam) Prioritas Pembangunan tersebut, dua diantaranya, yaitu Prioritas 5 dan 6, berhubungan langsung dengan bidang ekonomi. Secara keseluruhan 6 (enam) prioritas pembangunan tersebut mendukung kepada upaya upaya mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta mewujudkan pengembangan sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi. Di sini jelas bahwa Kota Sukabumi telah menetapkan arah pengembangan bidang ekonominya ke sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, sektor perdagangan, sektor-sektor jasa lainnya yang memiliki daya saing tinggi, sebagaimana telah ditetapkan dalam arah perencanaan jangka panjang RPJPD Kota Sukabumi 2005-2025.



3.1.1 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Nasional

Kondisi ekonomi global pada tahun 2023 diperkirakan akan lebih lambat dibanding tahun 2022, sehingga memberikan risiko penurunan perekonomian secara tajam atau hard landing. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 yaitu 4,4 persen, sementara untuk tahun 2023 yaitu 3,8 persen. World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 yaitu 4,1 persen, sementara untuk tahun 2023 yaitu 3,2 persen. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 tumbuh 5,5 - 5,9 persen. Proyeksi tersebut menunjukkan trend penurunan ekonomi global pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Tantangan ekonomi global tahun 2023 yaitu gangguan rantai pasok, krisis energi, normalisasi suku bunga, perkembangan varian baru COVID19, China switching policy dan scarring effect. Isu perubahan kebijakan China terkait rencana beralih ke energi terbarukan atau ramah lingkungan menimbulkan peningkatan risiko dalam keuangan, dengan banyak perusahaan padat karbon menghadapi profitabilitas yang lemah dan kerentanan likuiditas. Kebijakan baru terkait dekarbonisasi dapat memberikan tekanan tambahan kepada peminjam dalam pasar keuangan yang ditandai dengan tren negatif terkait penerbitan obligasi di sektor padat karbon. Pandemi COVID-19 menyebabkan luka memar (scarring effect) terhadap kondisi korporasi dan menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan. Pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi menyebabkan penurunan pada aktivitas dunia usaha sehingga berdampak pada menurunnya tingkat penjualan, likuiditas, profitabilitas, dan permodalan korporasi. Tingkat keberhutangan (leverage) meningkat sejak pandemi. Beberapa kasus kegagalan korporasi juga terjadi di Amerika Serikat dan China. Scarring effect ini yang menjadi salah satu pemicu perlambatan ekonomi global terutama pada sektor tenaga kerja, industri pengolahan dan penurunan investasi.

Ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan dapat tumbuh tinggi meskipun ekonomi global diprediksi mengalami perlambatan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 6,0 persen, World Bank memproyeksikan



pada angka 5,1 persen dan OECD memproyeksikan juga pada angka 5,1 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dipengaruhi oleh penanganan COVID-19 serta keputusan pemerintah dalam mengurangi atau menghentikan stimulus.

Arah kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2023 yaitu: 1) mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan; 2) mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah; 3) mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah; dan 4) mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

Strategi nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2023 yaitu: 1) strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, kawasan transmigrasi serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara; 2) strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan serta kawasan rawan bencana.

Sasaran nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2023 yaitu: 1) mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah; 2) mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali, dan 3) meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Prioritas pengembangan wilayah nasional Tahun 2023 adalah investasi, industri pengolahan dan pariwisata. Arah kebijakan investasi yaitu: percepatan investasi industri, pariwisata dan infrastruktur; penyiapan peta potensi investasi daerah; fasilitasi relokasi investasi swasta dari luar negeri; penuntasan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko; dan deregulasi serta integrasi perijinan investasi. Arah kebijakan industri manufaktur



yaitu: re-skilling dan up-skilling industri pengolahan; pengamanan pasokan bahan baku dan peningkatan penggunaan produksi lokal; substitusi impor dan TKDN; peningkatan ekspor hasil industri; percepatan operasionalisasi Kawasan Industri dan KEK; serta inovasi dan adaptasi teknologi. Arah kebijakan industri pariwisata yaitu: reaktivasi pasar wisatawan domestik dan mancanegara; reorientasi pada pariwisata berkualitas dan massal; penerapan standar kebersihan dan keselamatan; serta re-skilling dan up-skilling pariwisata.

3.1.2 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2021, awal tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 menggambarkan perkembangan kinerja indikator ekonomi daerah Jawa Barat yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan.

Seiring dengan tercapainya herd immunity pada masyarakat, perekonomian Jawa Barat pada tahun 2022 diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2023, perekonomian Jawa Barat diharapkan telah dapat memasuki fase penormalan, dimana perekonomian Jawa Barat tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi, serta dampak percepatan pembangunan khususnya Kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian Selatan telah mulai dapat dirasakan terhadap perekonomian. Perkembangan perekonomian Jawa Barat tahun 2021 menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2020, namun belum pulih seperti periode sebelum pandemi, ditandai dengan:

- a. Perkembangan output produksi LPE secara triwulanan tahun 2021 terus tumbuh positif;
- b. Kinerja sektor-sektor ekonomi sisi pengeluaran seperti investasi, ekspor, dan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menunjukkan kecenderungan fase pemulihan menuju tahap penormalan;



- c. Tahun 2021 masih diwarnai kebijakan PPKM yang berdampak pada pengetatan pergerakan masyarakat, sehingga berdampak pada kehilangan sebagian potensi pertumbuhan pada sektor konsumsi.

Berdasarkan perkembangan sektor-sektor lapangan usaha perekonomian Jawa Barat tahun 2021, terdapat empat sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian, yaitu Real Estate sebesar 11,75 persen. Diikuti oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,66 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,63 persen; Jasa Perusahaan sebesar 8,54 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,55 persen

Tantangan perekonomian yang dihadapi Jawa Barat pada tahun 2023 meliputi:

1. Penormalan perekonomian
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Jawa Barat
3. Digitalisasi ekonomi dan industri yang berbasis *high tech*
4. Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi Jawa Barat Utara dan Selatan

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
 - a. Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) pada seluruh sektor perizinan
 - b. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi
 - c. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, business matching, market sounding, dsb
 - d. Realisasi investasi Rp....triliun
2. Tantangan pada sektor industri:
 - a. Mendorong perwujudan industri dan kawasan industri pada KPI
 - b. Substitusi bahan baku impor
 - c. Kemitraan industri besar dan IKM
3. Tantangan pada sektor UMKM:
 - a. Memantapkan ekosistem digital UMKM
 - b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Jawa Barat melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas
4. Tantangan pada sektor pariwisata:
 - a. Operasionalisasi destinasi wisata yang telah dibangun
 - b. Promosi destinasi pariwisata baru



- c. Pengembangan Desa wisata
- d. Percepatan Sertifikasi CHSE
5. Tantangan pada sektor perdagangan:
 - a. Meningkatkan volume perdagangan berorientasi ekspor
 - b. Standarisasi pasar ber-SNI
 - c. Stabilisasi ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok melalui Pusat Distribusi Provinsi
 - d. Market intelligent untuk penetrasi pasar regional dan ekspor
6. Tantangan pada sektor pangan:
 - a. Ketersediaan pangan yang terjangkau
 - b. Perlindungan harga di tingkat produsen
 - c. Pangan berkualitas
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
 - a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
 - b. Penempatan calon tenaga kerja Jawa Barat
 - c. Memperluas pelayanan balai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Prospek perekonomian pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 dan peningkatan persentase vaksinasi dosis kedua. Pada triwulan I-2022, vaksin COVID-19 dosis 1 diperkirakan sudah terdistribusi untuk 70 persen penduduk Jawa Barat dan 50 persen untuk vaksin dosis 2. Kinerja ekspor mulai membaik seiring dengan semakin banyaknya negara yang membuka perbatasan dan mengizinkan kembali proses ekspor-impor terjadi, pengembangan pasar tujuan ekspor, peluang penetrasi pasar non tradisional, serta adanya reformasi regulasi. Impor barang produksi atau bahan baku juga mulai membaik. Perdagangan dalam negeri didorong oleh penggunaan digitalisasi pemasaran, juga QRcode dalam pembayaran. Secara umum kinerja perdagangan luar negeri maupun dalam negeri pada tahun 2022 membaik. Proyeksi perekonomian Jawa Barat tahun 2023 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2023

No	Indikator	Realisasi 2021	Target	
			2022	2023
1	Nilai PDRB-ADHB (triliun rupiah)	2.209,82	2.391,6- 2.405,66	2.641,42- 2.706,48
2	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)	3,74	3,92	4,35
3	Inflasi (persen)	1,75	3,00	3,00
4	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	N/A	46,48	49,29
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	9,82	9,70	9,69
6	Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,97	7,67	7,54
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (triliun rupiah)	547,93	515,31	531,87

Sumber: Realisasi BPS Provinsi Jawa Barat 2021 (c to c), Proyeksi Tim KEMD Bappeda Jabar

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 masih dalam fase pemantapan ekonomi setelah dampak pandemi COVID-19. Tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertanian, serta Kehutanan dan Perikanan diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi global dan nasional. Selain tiga sektor tersebut, sektor Informasi dan Komunikasi, Real Estate dan Jasa Perusahaan juga diperkirakan menjadi sektor yang tumbuh positif pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang semakin berkembang akibat adanya pandemi COVID-19 dan tuntutan Industry 4.0.

3.1.3 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Kota Sukabumi

Pada awal tahun 2020, dunia termasuk Indonesia terkena pandemi *Covid-19* dengan penyebaran yang sangat cepat. Hal ini berdampak pada banyak aspek lain yaitu sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga bisa terimbas dampak tersebut. Kondisi tersebut juga terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi, di mana sektor penerimaan



pendapatan daerah khususnya dari retribusi, maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Kondisi ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,71 persen dibandingkan Tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 1,48 persen. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 masih belum didapatkan hasilnya dari Badan Pusat Statistik. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi selama Tahun 2021-2023 berdasarkan target Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018- 2023 menunjukkan tren yang meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 ditargetkan sebesar 5,23 persen dan Tahun 2023 sebesar 5,54 persen. Proyeksi ini cukup berat, mengingatkan kondisi akhir Tahun 2020 adalah sebesar -1,48 persen, dan pada Tahun 2021 ini ditargetkan mencapai 4,45 persen.

Prospek ekonomi makro Kota Sukabumi pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari semakin menggeliatnya perekonomian masyarakat dan ditambah lagi dengan telah dimulainya program vaksinasi oleh Kementerian Kesehatan. Setelah melakukan analisis kondisi perekonomian Tahun 2021 dan awal 2022, maka berikutnya perlu dilakukan proyeksi capaian indikator makro bidang ekonomi sebagai dasar dan bahan bagi perencanaan Tahun 2023. Proyeksi indikator makro tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023. Berikut target ekonomi makro Kota Sukabumi Tahun 2022 dan 2023 dibandingkan dengan target Provinsi dan Nasional:



Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Sukabumi disandingkan
dengan Provinsi dan Nasional

NO	INDIKATOR	Nasional	Provinsi	Kota Sukabumi
		2023	2023	2023 (RPJMD)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	N/A	73,32	74,75
2	Pendapatan per Kapita	N/A	49,29	28,430
3	Persentase Penduduk Miskin	N/A	7,54	7,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	N/A	9,69	9,59
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,2-5,8	4,35	5,54
6	Indeks Gini/ Gini Rasio	N/A	0,396	0,400

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan realisasi dan proyeksi ekonomi makro Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Proyeksi Nilai IPM Kota Sukabumi Tahun 2023 berdasarkan target Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 adalah sebesar 74,75. Target ini meningkat dari capaian Nilai IPM Tahun 2021 yang telah diterbitkan BPS yaitu sebesar 74,60 dan sama dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2022. Terdapat peningkatan target Nilai IPM Tahun 2023 sebesar 0,15 poin dibanding capaian Tahun 2021.

Target IPM Tahun 2023 sangat wajar dan bisa untuk tercapai, hal tersebut berkaca pada capaian IPM Tahun 2021 yang mencapai 74,60 dari target yang ditetapkan sebesar 74,45. Optimisme ini juga melihat kondisi yang terjadi saat ini, dimana pada Tahun 2020 terjadinya pandemi *Covid-19* dan target-target lain tidak tercapai, tapi IPM ini justru bisa tercapai dan melebihi target.



Namun demikian, tentu kewaspadaan harus terus ditingkatkan terutama untuk sektor yang terkait dengan pencapaian IPM seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dengan program vaksinasi *Covid-19* yang sekarang sedang massif dilakukan bisa menjadi salah satu faktor pendukung dari bidang kesehatan tentu dengan program lainnya yang tidak kalah penting terutama dalam penurunan angka kesakitan dan angka kematian. Dari sisi pendidikan, dengan rencana akan dimulainya kembali pendidikan dengan tatap muka semoga juga menjadi pendorong peningkatan IPM dan dari sisi ekonomi perlu terus didorong peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan UMKM. Semoga upaya-upaya yang telah direncanakan pemerintah dalam kerangka pemulihan ekonomi pasca *Covid-19* akan juga berhasil mendorong pencapaian target IPM Kota Sukabumi.

2) Proyeksi Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita atau PPK adalah suatu indikator kesejahteraan dan juga tingkat kemakmuran pada suatu negara karena nilainya diperoleh dari pendapatan rata-rata masyarakat di negara tersebut. Pendapatan rata-rata penduduk ini juga bisa dijadikan gambaran umum untuk mendapatkan nilai Produk Domestik Bruto atau PDB perkapita. Dalam dunia ekonomi, PDB adalah suatu nilai pasar pada semua barang dan jasa yang diterapkan pada suatu negara dalam periode waktu tertentu. Pendapatan perkapita secara umum adalah suatu parameter terkait tingkat kesejahteraan dan kemakmuran pada suatu negara, karena nilainya diperoleh dari pendapatan rata-rata masyarakat yang berada pada negara tersebut.

Target pendapatan per kapita Kota Sukabumi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 28.430.000. Pada Tahun 2021 pendapatan per kapita Kota Sukabumi adalah sebesar Rp. 25.230.000 sedangkan pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 27.314.000 dan belum terdapat capaian realisasi pada Tahun 2022 ini.

3) Proyeksi Persentase Penduduk Miskin

Salah satu permasalahan yang terus menjadi beban pemerintah dan menjadi salah satu faktor penghambat laju pembangunan manusia adalah kemiskinan. Dengan kemiskinan ini selalu dijadikan alasan sebagai penghambat masyarakat dalam



mengakses kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain, oleh sebab itu maka penanggulangan kemiskinan perlu aksi dan upaya dari berbagai sektor yang berkaitan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Target persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi pada Tahun 2023 berdasarkan dokumen perubahan RPJMD adalah sebesar 7,50 %. Apabila melihat target yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD, maka target tersebut cukup berat untuk tercapai sehubungan angka capaian persentase penduduk miskin tahun 2021 berdasarkan data BPS adalah sebesar 8,25 %, sedangkan target Tahun 2022 sebesar 7,70 %.

Berdasarkan hal tersebut, maka persentase penduduk miskin harus menjadi perhatian khusus untuk dilakukan berbagai upaya dan langkah dalam melakukan pencapaian target tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi pasca *pandemi Covid-19* harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ditambah dengan pelaksanaan jarring pengaman social dalam rangka mencegah meningkatnya angka kemiskinan.

4) Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Permasalahan ketenagakerjaan sangat berkorelasi erat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Dampak dari pandemi *Covid-19* pada sektor industri memengaruhi ketenagakerjaan (pekerja/buruh). Sektor usaha yang memberlakukan kebijakan untuk merumahkan pekerja/buruh selama pandemi *Covid-19* adalah sektor industri, sektor akomodasi/restoran dan sektor usaha manufaktur. Sektor usaha yang merumahkan paling sedikit pekerja/buruh adalah industri elektronik dan konstruksi.



Secara keseluruhan, jumlah pengangguran karena *Covid-19* di Jawa Barat sampai dengan Februari Tahun 2021 adalah sebesar 0,45 juta orang, sedangkan penduduk yang sementara tidak bekerja karena *Covid-19* adalah sebesar 0,26 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2021 sebesar 8,92 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar sembilan orang penganggur. Pada Februari 2021, TPT mengalami peningkatan sebesar 1,21 persen poin dibandingkan keadaan Februari 2020, namun mengalami penurunan sebesar 1,54 persen poin dibandingkan dengan keadaan Agustus 2020.

Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka Kota Sukabumi pada Tahun 2021 adalah sebesar 10,78 % menurun signifikan dari Tahun 2020 sebesar 12,17 %.

5) Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pada awal Tahun 2020 terjadi pandemic *Covid-19* yang berdampak pada sektor kesehatan dan sangat membatasi aktivitas ekonomi masyarakat. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilanjutkan dengan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu bentuk kekarantinaan kesehatan dalam pengendalian *Covid-19* di beberapa wilayah di Indonesia, sehingga berdampak pada menurunnya capaian PDRB Kota Sukabumi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi selama Tahun 2021-2023 berdasarkan target Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018- 2023 menunjukkan tren yang meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sebesar 5,54 persen. Proyeksi ini cukup berat, mengingatkan kondisi akhir Tahun 2020 adalah sebesar -1,48 persen, dan pada Tahun 2021 ini diperkirakan sebesar 3,71 persen.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai strategi pemulihan ekonomi yang efektif dalam mencapai proyeksi target tersebut. Fokus pada pelaksanaan program pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* merupakan salah satu langkah



rasional yang harus dilakukan, terutama pada sektor-sektor tertentu yang paling besar atau banyak terdampak seperti rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan.

6) Proyeksi Indeks Gini/ Gini Rasio

Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar terciptanya pemerataan pada tatanan pendapatan di masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.

Pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 - 2023, Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,400. Target ini cukup berat untuk dicapai mengingat capaian pada Tahun 2021 ini baru sebesar 0.43, untuk itu maka indikator ini perlu perhatian serius dari pihak yang terkait.

Selain mempertimbangkan proyeksi indikator di atas, beberapa asumsi-asumsi yang bisa dijadikan dasar bagi perencanaan Tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* yang cukup *massif* dilaksanakan;
2. Inflasi yang diperkirakan terjaga;
3. Nilai tukar rupiah diperkirakan kembali stabil;
4. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli dan sebagainya;
5. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal tetapi memerlukan dukungan stimulus modal;
6. Aktivitas industri manufaktur, investasi dan pariwisata mulai bergerak (kapasitas produksi dan tenaga kerja) terkait penerapan protokol kesehatan pada lini produksi;
7. Proyek-proyek infrastruktur yang tertunda mulai berjalan kembali; dan
8. Belanja pemerintah daerah diarahkan kepada pemulihan ekonomi dan penanganan pasca pandemi Covid-19.



3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat penyerahan urusan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

- a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.



- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Pinjaman Bank, Dana Umat, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Kota Sukabumi yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Pandemi *Covid-19* berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri, langkah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan pemulihan ekonomi akibat pandemi *Covid-19* akan berdampak terhadap alokasi dan transfer pusat dan provinsi untuk kota dan kabupaten di Indonesia.



Seperti diketahui dana perimbangan/dana transfer tersebut merupakan komponen terbesar dalam pendapatan daerah Kota Sukabumi. Pengurangan dana transfer pusat dan provinsi untuk Tahun 2022 akan berdampak pada penyesuaian belanja program dan kegiatan yang signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 khusus untuk belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah mengalami penyesuaian dari pagu APBD Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 sesuai yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2019 dan Tahun 2020, asumsi pendapatan Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Pada awal tahun 2020, dunia termasuk Indonesia terkena pandemi *Covid-19* dengan penyebaran yang sangat cepat. Hal ini berdampak pada banyak aspek lain yaitu sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga bisa terimbas dampak tersebut. Kondisi tersebut juga terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi, di mana sektor penerimaan pendapatan daerah khususnya dari retribusi, maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.



Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2023, strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah mengupayakan terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBD yang sehat. Untuk mendukung hal tersebut, reformasi struktural di bidang pengelolaan keuangan daerah di antaranya melalui reformasi administrasi dan kebijakan di bidang perpajakan daerah, belanja daerah, serta pengelolaan aset pemerintah. Dengan demikian, secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada:

1. Penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui:
 - (a) peningkatan penerimaan daerah dan efisiensi belanja daerah;
 - (b) merumuskan pembiayaan defisit anggaran;
2. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan daerah;
3. Revitalisasi pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah terutama ditempuh melalui penajaman alokasi anggaran antara lain dengan realokasi dan *refocusing* belanja daerah agar lebih terarah dan tepat sasaran;
5. Implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Adapun strategi yang ditempuh dalam perencanaan Tahun 2023 adalah:

1. Penetapan kebijakan belanja yang efektif, dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan dalam menghimpun pendapatan;
2. Pemantapan pelaksanaan anggaran terpadu (*unified budget*), penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance based budget*), dan penerapan alokasi belanja daerah dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure*)



framework);

3. Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan;
4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan daerah, dan penilaian kekayaan daerah untuk menentukan nilai ekonomi (*existing value*) serta nilai potensi (*potential value*) kekayaan daerah;
5. Optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat; serta;
6. Pengelolaan pembiayaan dan pengendalian defisit dengan resiko yang minimal;

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Kondisi ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2023 diprediksi masih akan dipengaruhi kondisi Pasca Pandemi *Covid-19* yang tentunya akan mempengaruhi pada tingkat pendapatan daerah, baik yang berupa Pendapatan Asli Daerah seperti pajak, retribusi pelayanan, deviden dari Bank ataupun yang berupa pendapatan transfer dari pemerintah provinsi ataupun pusat.



Hasil pendapatan daerah Kota Sukabumi pada Tahun 2021 sudah mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan, bahkan melebihi pendapatan pada Tahun 2020. Hasil tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2021, dimana dari target pendapatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.185.387.683.649,- realisasinya sebesar Rp 1.244.104.862.003,- atau realisasi sebesar 104,95 %. Dari tiga komponen pendapatan, dua komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer melebihi target yang ditetapkan sedangkan untuk lain-lain pendapatan yang sah belum mencapai target dimana realisasi baru mencapai 98,59%.

Secara umum penyusunan proyeksi pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2023 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang diproyeksikan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2022, walaupun peningkatannya tidak signifikan. Hal ini terkait dengan pandemi *Covid-19* yang diharapkan terus melandai bahkan bisa ditetapkan menjadi status *Endemi* pada tahun 2022 ini, pengaturan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, serta upaya intensifikasi yang akan dilakukan. Selain itu, di Kota Sukabumi diyakini masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Adapun proyeksi pendapatan pada tahun 2023, berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 serta estimasi yang dilakukan berdasarkan kondisi terkini terdapat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3.3
PENDAPATAN TAHUN 2021 - 2022 DAN PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2023**

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET APBD 2022 (MURNI)	PROYEKSI RPJMD 2023	PROYEKSI RKPD 2023
1	2		3	3		4
1	PENDAPATAN DAERAH	1,193,519,827,108	1,244,104,862,003	1,184,170,360,786	1,377,034,296,467	1,163,494,202,512
1.1	Pendapatan Asli Daerah	343,755,662,641	344,401,029,350	362,135,926,773	386,314,044,927	366,491,455,793
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	50,022,372,326	54,442,710,141	51,248,584,046	57,265,761,905	53,773,037,046
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7,041,582,511	6,604,301,840	7,968,631,300	9,696,480,900	7,742,901,300
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,284,853,811	4,346,251,729	4,037,833,800	4,537,833,800	4,823,095,967
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	282,406,853,993	279,007,765,640	298,880,877,627	314,813,968,322	300,152,421,480
1.2	Pendapatan Transfer	809,461,214,976	860,294,504,597	807,652,451,213	953,992,891,540	782,620,763,919
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat:	716,409,987,477	745,379,173,118	737,497,371,981	766,522,722,000	710,424,017,375
1.2.1.1	Dana Perimbangan	696,546,681,477	703,688,702,118	733,993,012,981	737,454,106,000	706,919,658,375
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	551,903,599,550	563,798,808,531	536,779,549,981	574,238,814,000	525,928,335,000
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	80,060,632,550	100,231,153,531	73,211,894,981	68,648,571,000	62,360,680,000
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	471,842,967,000	463,567,655,000	463,567,655,000	505,590,243,000	463,567,655,000
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	144,643,081,927	139,889,893,587	197,213,463,000	163,215,292,000	180,991,323,375



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET APBD 2022 (MURNI)	PROYEKSI RPJMD 2023	PROYEKSI RKPD 2023
1	2		3	3		4
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	144,643,081,927	63,381,741,757	74,444,388,000	85,118,197,000	58,804,148,375
1.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus non Fisik	-	76,508,151,830	122,769,075,000	78,097,095,000	122,187,175,000
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	19,863,306,000	41,690,471,000	3,504,359,000	29,068,616,000	3,504,359,000
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-
1.2.1.5	Dana Desa	-	-	-	-	-
1.2.2	Transfer Antar Daerah	93,051,227,499	114,915,331,479	70,155,079,232	187,470,169,540	72,196,746,544
1.2.2.1	Pendapatan bagi hasil;	65,094,068,451	67,707,680,435	70,155,079,232	71,559,629,954	72,196,746,544
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	27,957,159,048	47,207,651,044		115,910,539,586	0
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	40,302,949,491	39,409,328,056	14,381,982,800	36,727,360,000	14,381,982,800
1.3.1	Hibah (BOS Pusat)	40,302,949,491		0	36,727,360,000	0
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	39,409,328,056	14,381,982,800	-	14,381,982,800



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Target penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2023 adalah sebesar Rp1,163,494,202,512,- atau mengalami penurunan sebesar 1,75 persen dibanding target realisasi penerimaan pendapatan daerah Tahun 2022 sebesar Rp 1,184,170,360,786,-. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan proyeksi pendapatan yang bersumber transfer dari Pemerintah Pusat terutama pada Dana Perimbangan.
- 2) Target penerimaan pendapatan pada pos PAD Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 366,491,455,793,- atau naik sebesar Rp 4,355,529,020,- (1,20 %) dibanding target Tahun 2022 sebesar Rp 362,135,926,773,-. Penambahan proyeksi pendapatan ini berasal dari PAD hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu berupa Deviden dari Bank BJB serta berasal dari lain-lain PAD yang sah terutama atas hasil pemanfaatan BMD.
- 3) Pada pos Pendapatan Transfer Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 782,620,763,919,- mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 25,031,687,294,- atau sebesar 3,10 persen dibandingkan target APBD Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 807,652,451,213,-. Penurunan pendapatan tersebut terutama yang berasal dari transfer pemerintah pusat terutama berupa dana perimbangan yaitu dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dana transfer umum mengalami penurunan sebesar 2,02 persen yaitu berupa dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, sedang dana transfer khusus mengalami penurunan sebesar 8,23 persen baik dari dana alokasi khusus fisik maupun non fisik.
- 4) Penerimaan pendapatan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 14,381,982,800,- atau sama dibandingkan target Tahun 2022.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 antara lain:



- 1) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame;
 - Melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutahiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal;
 - Melakukan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemasangan *tapping box* dan alat bantu *software* rekam transaksi;
 - Pembenahan manajemen penerimaan PAD;
 - Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif;
 - mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - Meningkatkan kemampuan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan dan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah.
- 4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil BUMD juga dilakukan melalui dana bergulir dan optimalisasi peran BUMD *holding company*.
- 5) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- 6) Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

- 7) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Kebijakan untuk peningkatan pendapatan daerah Kota Sukabumi Tahun 2023, dilakukan dengan berbagai strategi sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, dilakukan melalui:
 - a. Penataan kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah
 - b. Penyederhanaan sistem dan prosedur layanan
 - c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai kemampuan
 - d. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah secara terpadu
 - e. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi dalam pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, salah satunya melalui pengembangan sistem informasi pajak daerah
 - f. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, ditempuh melalui:
 - a. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait, DPRD, DPR RI, DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana transfer
3. Strategi pencapaian anggaran lain-lain pendapatan yang sah dilakukan melalui:
 - a. Koordinasi dengan kementerian teknis
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat



3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi, belanja modal maupun belanja tidak terduga. Belanja operasi digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah. Belanja Modal digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib/pilihan maupun urusan pendukung yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, sedangkan Belanja Tidak Terduga digunakan untuk membiayai kejadian yang bersifat luar biasa dan bencana.

Belanja Daerah Tahun 2023 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah (belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga) yang dilaksanakan dengan pola yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib yang mengikat, seperti gaji, tunjangan, honorarium, belanja jasa kantor listrik, air, telepon, internet, belanja premi asuransi, belanja sewa gedung, perlengkapan dan peralatan.
- Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di Tahun 2023 belanja gaji ASN disusun dengan mengantisipasi rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, akses dan kenaikan tunjangan-tunjangan serta mempertimbangan gaji dan tunjangan tenaga P3K.
- Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2023 berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. TPP merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja PNS. TPP ini diberikan kepada PNS dengan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;

- Pemenuhan belanja prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 yaitu sebanyak 6 (enam) program prioritas pembangunan
- Pemenuhan pencapaian program unggulan dan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah
- Pemenuhan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kab/Kota yaitu sebanyak 29 jenis pelayanan dasar
- Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG`s);
- Pengalokasian untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD
- Pengalokasian anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD termasuk untuk penanganan pemulihan akibat pandemi *Covid-19*.
- Pengalokasian belanja untuk infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
- Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga masih difokuskan untuk penanganan dampak akibat pandemi *Covid-19* dari sisi kesehatan, sosial dan ekonomi dengan melihat asumsi kebutuhan Tahun 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya.
- Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

berdasarkan peraturan yang berlaku. Belanja hibah berupa tanah, barang atau lainnya dilakukan sesuai kebutuhan dan melihat sisi kemanfaatannya baik kepada individu ataupun lembaga tertentu. Penganggaran hibah dan bansos di Tahun 2023 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Belanja bantuan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan pilkada Tahun 2024, dimana dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kepada KPU dan Bawaslu.
- Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
- Belanja Daerah telah memperhatikan dan mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang serta hasil reses/pokok-pokok pikiran DPRD.

Sejak Tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2023.

Berdasarkan uraian diatas, maka proyeksi belanja daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebagai berikut:



Tabel 3.4
Proyeksi Belanja Daerah pada RKPD Tahun 2023

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET APBD 2022 (MURNI)	PROYEKSI RPJMD 2023	PROYEKSI RKPD 2023
2	BELANJA DAERAH	1,202,030,934,576	1,201,051,026,976	1,205,069,299,476	1,406,831,344,426	1,188,516,980,471
2.1	Belanja Operasi	1,051,154,311,275	1,033,284,744,043	1,095,734,939,387	1,104,803,423,477	1,095,775,932,359
2.1.1	Belanja Pegawai	527,957,586,086	526,183,814,534	549,067,945,830	495,975,267,187	558,880,547,000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa*	482,520,154,619	463,515,034,123	491,378,370,198	564,370,414,881	481,610,942,000
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	33,294,980,570	35,558,645,386	49,963,323,359	37,878,141,409	49,961,143,359
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7,381,590,000	8,027,250,000	5,325,300,000	6,579,600,000	5,323,300,000
2.2	Belanja Modal*	133,836,074,541	135,678,603,527	100,156,164,111	297,527,920,949	83,141,048,112
2.3	Belanja Tidak Terduga	17,040,548,760	32,087,679,406	9,178,195,978	4,500,000,000	9,600,000,000
2.4	Belanja transfer	-	-	-	-	-
2.4.1	belanja bagi hasil	-	-	-	-	-
2.4.2	belanja bantuan keuangan	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	1,202,030,934,576	1,201,051,026,976	1,205,069,299,476	1,406,831,344,426	1,188,516,980,471
	Surplus / (Defisit) Sebelum Pembiayaan	(8,511,107,468)	43,053,835,027	-20,898,938,690	-29,797,047,959	-25,022,777,959



Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa estimasi belanja daerah pada RKPD Tahun 2023 mengalami penurunan signifikan dibandingkan APBD Tahun 2022. Belanja daerah di estimasikan sebesar sebesar Rp 1,188,516,980,471, sedangkan Belanja APBD Tahun 2022 adalah sebesar 1,205,069,299,476,-. Penurunan belanja tersebut terutama terdapat pada komponen belanja modal, yaitu belanja modal untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional, berpedoman juga pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. ASB dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan tersebut di atas disebutkan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kota Sukabumi sudah mengembangkan e-ASB yang berbasis teknologi informasi dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 yang seluruhnya terintegrasi



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) baik dari proses perencanaan maupun penganggaran.

Dengan adanya kejadian Pandemi *Covid-19* maka hal tersebut sangat mempengaruhi penganggaran APBD Tahun 2021 dan 2022, dengan adanya kebijakan anggaran untuk stimulus penanganan *Covid-19* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dalam bentuk *refocusing* APBD Tahun 2020 dan 2021. Untuk Tahun 2023 maka Kota Sukabumi tetap menyiapkan anggaran untuk penanganan dampak pasca Pandemi *Covid-19* sebagaimana tertuang juga sebagai prioritas pembangunan keenam pada RPJMD Kota Sukabumi. Anggaran penanganan Pandemi *Covid-19* pada Tahun 2022 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Alokasi Anggaran Untuk Pencegahan dan Penanganan *Covid-19*
Pada RKPD Tahun 2023

No.	Uraian	Alokasi Anggaran
A	Bidang Kesehatan	Rp 7,040,820,712,-
1	Penanganan <i>Covid-19</i>	Rp 3,657,726,962,-
2	Dukungan vaksinasi:	Rp 2,183,093,750,-
3	Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi <i>Covid-19</i>	Rp 1,200,000,000,-
4	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan <i>Covid-19</i>	0
B	Dukungan Ekonomi	Rp 6,613,523,350,-
C	Jaring Pengaman Sosial	Rp 29,054,627,679,-
JUMLAH DUKUNGAN PENDANAAN		Rp 42,708,971,741

Sumber : Analisis Bappeda

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul



karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terjadi defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Maka dalam hal APBD diperkirakan mengalami defisit, maka pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditetapkan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal perusahaan daerah yaitu ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi dan PDAM Tirta Bumi Wibawa serta Bank Jabar Banten yang besaran penyertaan modal tersebut berpedoman pada peraturan daerah yang terkait.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah, maka proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul



karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terjadi defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Maka dalam hal APBD diperkirakan mengalami defisit, maka pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditetapkan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal perusahaan daerah yaitu ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi dan PDAM Tirta Bumi Wibawa serta Bank Jabar Banten yang besaran penyertaan modal tersebut berpedoman pada peraturan daerah yang terkait.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah, maka proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.6
Proyeksi Pembiayaan Daerah dalam RKPD Tahun 2023

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	APBD 2021 (MURNI)	APBD 2021 (MURNI)	APBD 2021 (MURNI)	PROYEKSI RPJMD 2023	PROYEKSI RKPD 2023
3	PEMBIAYAAN	88,298,183,772	77,787,076,304	20,898,938,690	29,797,047,959	25,022,777,959
3.1	Penerimaan Pembiayaan	90,298,183,772	79,787,076,304	27,022,777,959	31,797,047,959	27,022,777,959
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	90,298,183,772	79,787,076,304	27,022,777,959	31,797,047,959	27,022,777,959
3.1.2	pencairan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-
3.1.3	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	-	-	-	-	-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000	2,000,000,000	6,123,839,269	2,000,000,000	2,000,000,000
3.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000	2,000,000,000	6,123,839,269	2,000,000,000	2,000,000,000
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	APBD 2021 (MURNI)	APBD 2021 (MURNI)	APBD 2021 (MURNI)	PROYEKSI RPJMD 2023	PROYEKSI RKPD 2023
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto	88,298,183,772	77,787,076,304	20,898,938,690	29,797,047,959	25,022,777,959
	Surplus / (Defisit) Setelah Pembiayaan	79,787,076,304	120,840,911,331	0	0	0



Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan daerah pada dokumen RKPD Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 4,123,839,269,- atau sebesar 19.73 persen dari asalnya Rp 20,898,938,690,- pada APBD Tahun 2022 menjadi Rp 25,022,777,959,- pada proyeksi RKPD Tahun 2023. Peningkatan pembiayaan tersebut dikarenakan berkurangnya pengeluaran pembiayaan dari komponen penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah untuk Bank Jabar Banten (BJB) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung implementasi pembangunan daerah terutama pada program prioritas dan unggulan, maka diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Karena besarnya kebutuhan anggaran tersebut dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan, maka Kota Sukabumi dituntut untuk senantiasa terus mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam rangka pembangunan daerah.

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kota Sukabumi dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kota Sukabumi. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) APBD Provinsi; 3) Dana Masyarakat/Umat; 4) Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); dan 6) Hibah.

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

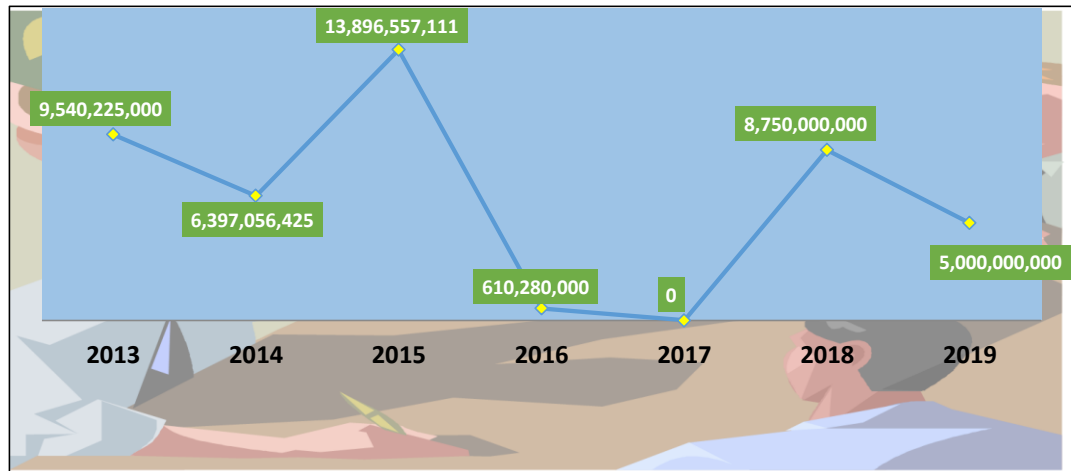
Pembangunan Daerah selain bersumber dari APBD Daerah, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN berupa dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah. Perkembangan realisasi pendanaan APBN



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

berupa tugas pembantuan di Daerah Tahun 2013-2019 disajikan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 3.1
Perkembangan Pendanaan APBN Melalui Tugas
Pembantuan di Daerah Tahun 2013 - 2019



Sumber : Perubahan RPJMD 2018-2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Kota Sukabumi mendapatkan pendanaan dari APBN berupa tugas pembantuan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 dengan perkembangan yang cukup fluktuatif. Jumlah dana tugas pembantuan yang diterima Daerah paling besar terdapat pada Tahun 2015 sebesar Rp. 13.896.557.111 (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah). Pada Tahun 2017 daerah tidak mendapatkan pendanaan melalui tugas pembantuan, hal tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan pemindahan pengalokasian pendanaan APBN dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke Dana Alokasi Khusus (DAK).



2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kota Sukabumi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

3) Dana Masyarakat/Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Kota Sukabumi adalah melalui dana masyarakat/umat, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar. tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Jawa



Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

- 4) Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Pendanaan pembangunan non APBD Daerah yang lainnya selain dari APBN adalah program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Sampai dengan saat ini sudah terdaftar sebanyak 2 (dua) mitra PKBL dan TJSL Daerah. Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini haruslah berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang berkesinambungan atau *sustainable* serta berdampak positif terhadap masyarakat. Penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang untuk memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat di prediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

- 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha. Saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang telah menyadari pentingnya kontribusi pihak swasta dalam mendorong pembangunan.



Pembiayaan daerah untuk infrastruktur masih banyak mengalami kendala karena adanya hambatan keterbatasan anggaran. APBD masih harus difokuskan pada pembiayaan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, penanganan bencana dan lain-lain. Pada konsisi ini maka skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) dapat menjadi salah satu solusi, di mana pemerintah, BUMD serta swasta bahu membahu untuk membiayai akselerasi pembangunan terus dengan prinsip gotong royong.

6) Hibah.

Hibah dimaksud adalah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan diberbagai sektor. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), diantaranya Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

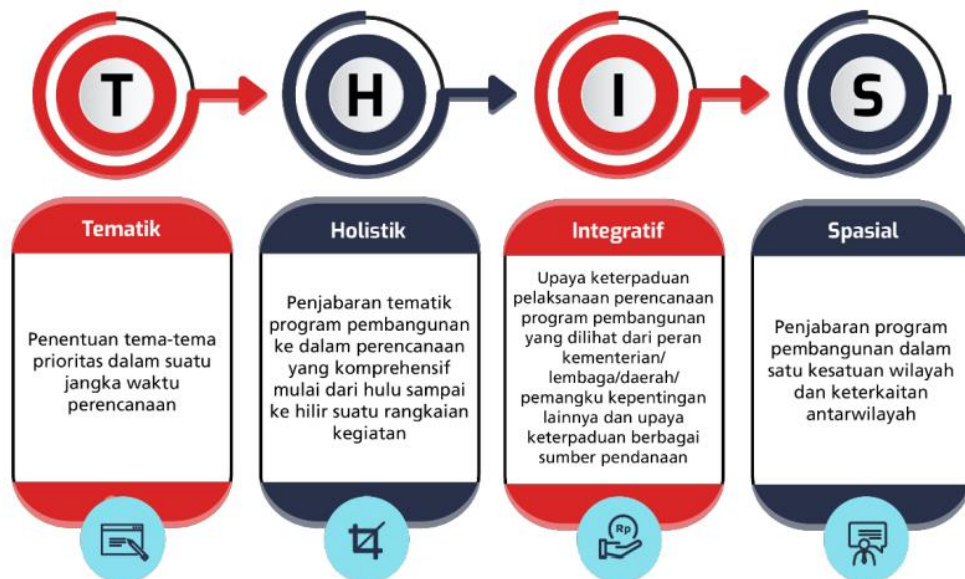
BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 merupakan tahap pembangunan tahun kelima dari RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023. Perencanaan pembangunan Kota Sukabumi menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (T-H-I-S) yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1

Pendekatan perencanaan berbasis T-H-I-S



Pendekatan T-H-I-S tersebut secara implementatif dilakukan melalui:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 6 (enam) prioritas pembangunan daerah dengan 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023.
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas serta sasaran prioritas pembangunan Kota Sukabumi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow output priority program*) serta program prioritas dan unggulan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.



3. Menjaga dan memastikan semua tahapan perencanaan dilalui dengan baik dan benar serta tepat waktu dengan mengimplementasikan Siste Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sistem digital lainnya yang terintegrasi.
4. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, baik dari pusat, provinsi, Kota Sukabumi, serta dari unsur pemerintah maupun swasta dan masyarakat.
5. Melibatkan peran aktif seluruh *stakeholder* baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah seperti masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, komunitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Selanjutnya rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 tersebut akan tetap mengacu dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042;
2. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023;
3. Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022 Triwulan 1;
4. Prioritas Provinsi dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
5. Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; dan
6. Kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2023.

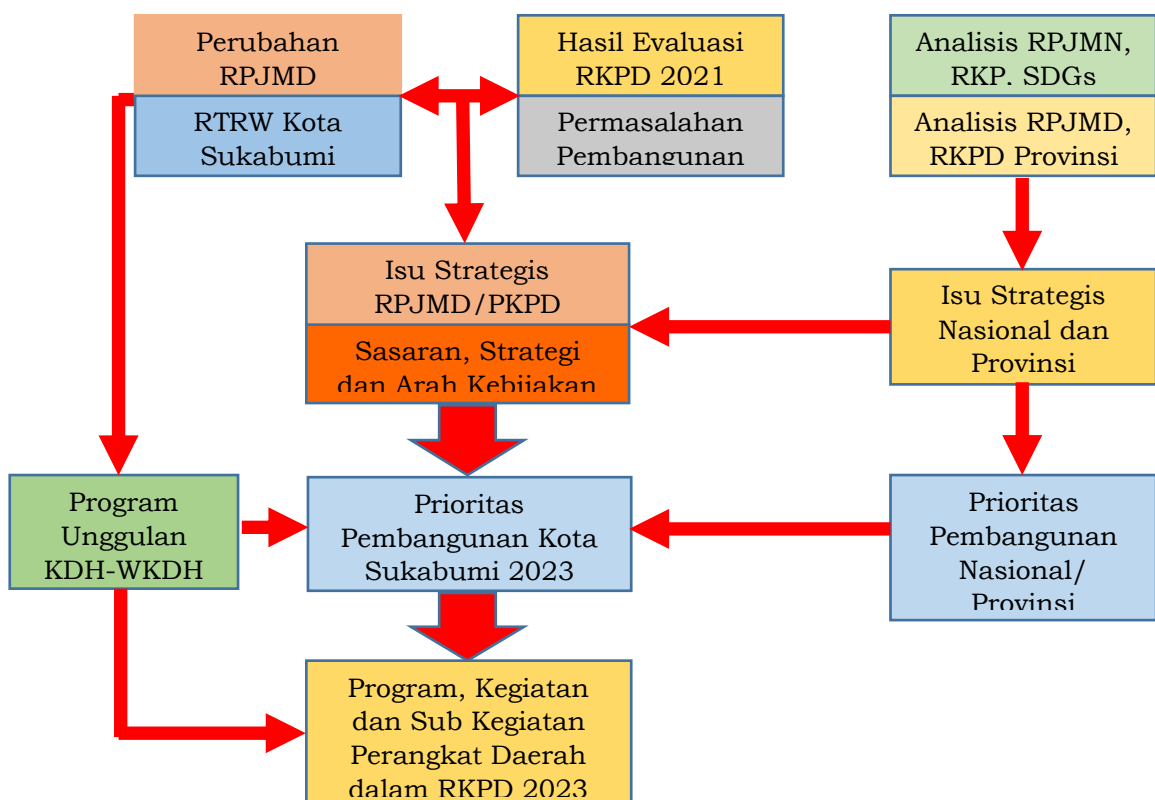
Dalam rangka mengukur keberhasilan pembangunan daerah Kota Sukabumi, maka ditetapkan sejumlah indikator makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah beserta targetnya yang nantinya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut akan menjadi gambaran riil mengenai kondisi dan perkembangan keberhasilan pembangunan daerah yang selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pemerintah daerah Kota Sukabumi. Selain itu capaian lainnya seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan tujuan pembangunan



berkelanjutan (TPB/SDGs), dokumen perencanaan strategis lainnya serta kondisi sosial dan ekonomi terutama akibat pandemi *Covid-19* tentunya akan tetap menjadi salah satu acuan bagi pengambilan keputusan pimpinan daerah.

Pada proses penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 dilakukan analisis dan kajian terhadap berbagai dokumen perencanaan baik tingkat Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Perubahan RPJMD termasuk isu strategis, sasaran, strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu acuan utama, selain itu hasil evaluasi RKPD Tahun 2021 dan triwulan 1 Tahun 2022 beserta permasalahan pembangunan yang dilengkapi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional serta provinsi menjadi acuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga pada akhirnya ditentukan prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tetap disandingkan bersama program unggulan kepala daerah untuk menjadi fokus dalam pelaksanaan pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023. Penjelasan di atas sebagaimana gambar Alur Kerangka Pikir di bawah ini :

Gambar 4.2
Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Program
Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023



Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kota Sukabumi, Tahun 2022



4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Daerah ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, kebijakan RPJMN dan RPJMD Provinsi serta isu-isu strategis pembangunan Daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil atau *outcome* program Perangkat Daerah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut dikolaborasikan dengan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sehingga dapat mencapai visi yang telah ditentukan.

Dalam proses penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, maka akan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, baik di tingkat nasional, provinsi ataupun Kota Sukabumi.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya sebagai berikut:

Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; *Pilar Kedua* Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; *Pilar Ketiga* Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan *Pilar Keempat* Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat



pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Visi pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut dilengkapi dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofisery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung EBT.



- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 3) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 4) peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 5) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 6) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;



- 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta *database* kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
 - 4) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha; dan
 - 5) peningkatan nilai tambah usaha sosial.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
 - 7) peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata;
 - 5) reformasi fiskal; dan
 - 6) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:



- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;



- 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
 - 3) perlindungan sosial adaptif; dan
 - 4) kesejahteraan sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas); dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan



- 3) kualitas pemuda.
 - f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) Keperantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) Reforma Agraria; dan
 - 4) Perhutanan sosial.
 - g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - 2) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - 3) Peningkatan kapabilitas IPTEK dan penciptaan inovasi;
 - 4) Prestasi olahraga.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
- b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
 - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis Teknologi Informasi Komputer (TIK);
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.



Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - 6) waduk *multipurpose* dan modernisasi irigasi.
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas kereta api;
 - 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara; dan
 - 5) konektivitas darat.
- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) transportasi perkotaan;
 - 2) infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan;
 - 3) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan; dan
 - 4) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.
- d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.



- e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penuntasan infrastruktur TIK;
 - 2) pemanfaatan infrastruktur TIK; dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c) pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan;
 - 3) pengelolaan limbah;
 - 4) pengembangan industri hijau; dan
 - 5) rendah karbon pesisir dan laut.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di Luar Negeri;



- 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional;
 - 3) peningkatan citra positif di dunia internasional; dan
 - 4) peningkatan peran indonesia di tingkat regional dan global.
- c) Penegakan Hukum Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penataan regulasi;
 - 2) perbaikan sistem hukum pidana dan perdata;
 - 3) penguatan sistem anti korupsi; dan
 - 4) peningkatan akses terhadap keadilan.
- d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan kemampuan pertahanan dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM);
 - 3) penguatan keamanan laut;
 - 4) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan penguatan ketahanan dan keamanan siber.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan RKPD tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan tahun ketiga pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 bersumber dari Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 disajikan sebagai berikut.



Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

**“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin
dengan Inovasi dan Kolaborasi”**

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jawa Barat Juara Lahir Batin: Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan 5 (lima) misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.

Konsep Jawa Barat Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Provinsi Jawa Barat. Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain Masjid, pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tenteram, dan bahagia.

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat, agar rakyat Provinsi Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan



kesehatan, perempuan Provinsi Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya serta dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Misi 3 dalam penjabaran Visi Provinsi Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, meningkatkan efisiensi distribusi logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten serta antar provinsi. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.

Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Jawa Barat. Ekonomi kerakyatan yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Provinsi Jawa Barat. Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.



5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam tata kelola pemerintahan, good governance atau tata kelola yang baik harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan 8 (delapan) pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merepresentasikan good governance melalui penerapan Provinsi Cerdas (Smart Province) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

Kelima misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
2. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional.
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal; dan (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;
4. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga



- hingga ke pelosok; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan.
5. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
 6. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri; (2) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; dan (4) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
 7. Terwujudnya good governance dan whole of government, dengan sasaran: (1) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel; dan (2) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada nilai-nilai sebagai prinsip pembangunan yang hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Nilai pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi:

Religius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jawa Barat Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Kerakyatan dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan



dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat didukung oleh pendayagunaan modal dasar pembangunan, yaitu:

1. Karakteristik masyarakat Provinsi Jawa Barat yang religius dan berbudaya adil yang mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;
2. Posisi geografis Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan ibukota negara menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai lintasan utama arus regional penumpang dan barang koridor Sumatera-Jawa-Bali;
3. Keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya buatan serta sumber daya manusia produktif menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
4. Keragaman budaya Provinsi Jawa Barat merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan; dan
5. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan.

Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran visi dan misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Indikasi pencapaian Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025, ditandai dengan:

1. Provinsi termaju dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel, dan berbasis ilmu pengetahuan.
2. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi (society development).
3. Provinsi termaju dalam bidang pengelolaan pertanian dan kelautan.
4. Provinsi termaju dalam bidang energi baru dan terbarukan.
5. Provinsi termaju dalam bidang industri manufaktur, industri jasa, dan industri kreatif.



6. Provinsi termaju dalam bidang infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan.
7. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Target indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami penyesuaian. Penyesuaian target, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional dan kemampuan Provinsi Jawa Barat dengan adanya pandemi COVID-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu, capaian pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan publikasi BPS.

Sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 pada periode yang sama. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa walaupun perodesasi kedua dokumen rencana ini berbeda dan penetapan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebelum RPJMN, namun seluruh sasaran RPJMD dapat mendukung seluruh sasaran RPJMN. Sebuah sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkupnya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Sukabumi 2023.

Visi pembangunan jangka menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Visi pembangunan jangka menengah Daerah menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun 2018-2023. Oleh



karena itu, visi pembangunan jangka menengah harus menjawab permasalahan pembangunan Daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Daerah, adalah:

**“Terwujudnya Kota Sukabumi
yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera”**

Visi tersebut diwujudkan menjadi visi Perubahan RPJMD dan diterjemahkan ke dalam pilar-pilar visi yang dirumuskan dan dijelaskan sebagai berikut:

Religius Pembangunan Daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Daerah yang memiliki sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain.

Nyaman Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Daerah menjadikan Daerah yang nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan publik yang berkualitas.

Sejahtera Suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara adil. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam mewujudkan visi Perubahan RPJMD, maka ditetapkan beberapa misi Perubahan RPJMD, yaitu:

- 1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.**

Pernyataan Misi 1 di atas secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:



- 1) membangun masyarakat yang berkarakter melalui pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
- 2) mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan lokal;
- 3) meningkatkan perlindungan sosial serta pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
- 4) meningkatkan peran keluarga dalam pembangunan manusia.

2. Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan tata ruang dan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di Daerah. Pernyataan Misi 2 tersebut secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:

- 1) membangun infrastruktur kota dan permukiman yang mengacu pada implementasi kebijakan dan perencanaan sesuai *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* serta tetap memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau;
- 2) mengendalikan pemanfaatan ruang; dan
- 3) menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar.

Pernyataan Misi 3 tersebut secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:

- 1) mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan melalui peningkatan iklim investasi dengan menghilangkan semua jenis hambatan atau kendala perijinan dan pengelolaan usaha yang selalu memperhatikan daya dukung potensi wilayah, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta mengutamakan keberpihakan terhadap upaya penumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar;
- 2) meningkatkan UMKM dan pariwisata kreatif melalui prinsip kemitraan; dan
- 3) meningkatkan ketahanan pangan.



Misi 4

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.

Pernyataan Misi 4 tersebut menunjukkan komitmen Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah untuk terwujudnya birokrasi bersih, transparan dan akuntabel dengan memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi, serta meningkatkan inovasi Daerah.

Berdasarkan proses perencanaan terintegrasi yang sudah dirumuskan untuk mencapai masing-masing misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dapat dilihat bahwa pembangunan Daerah sudah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

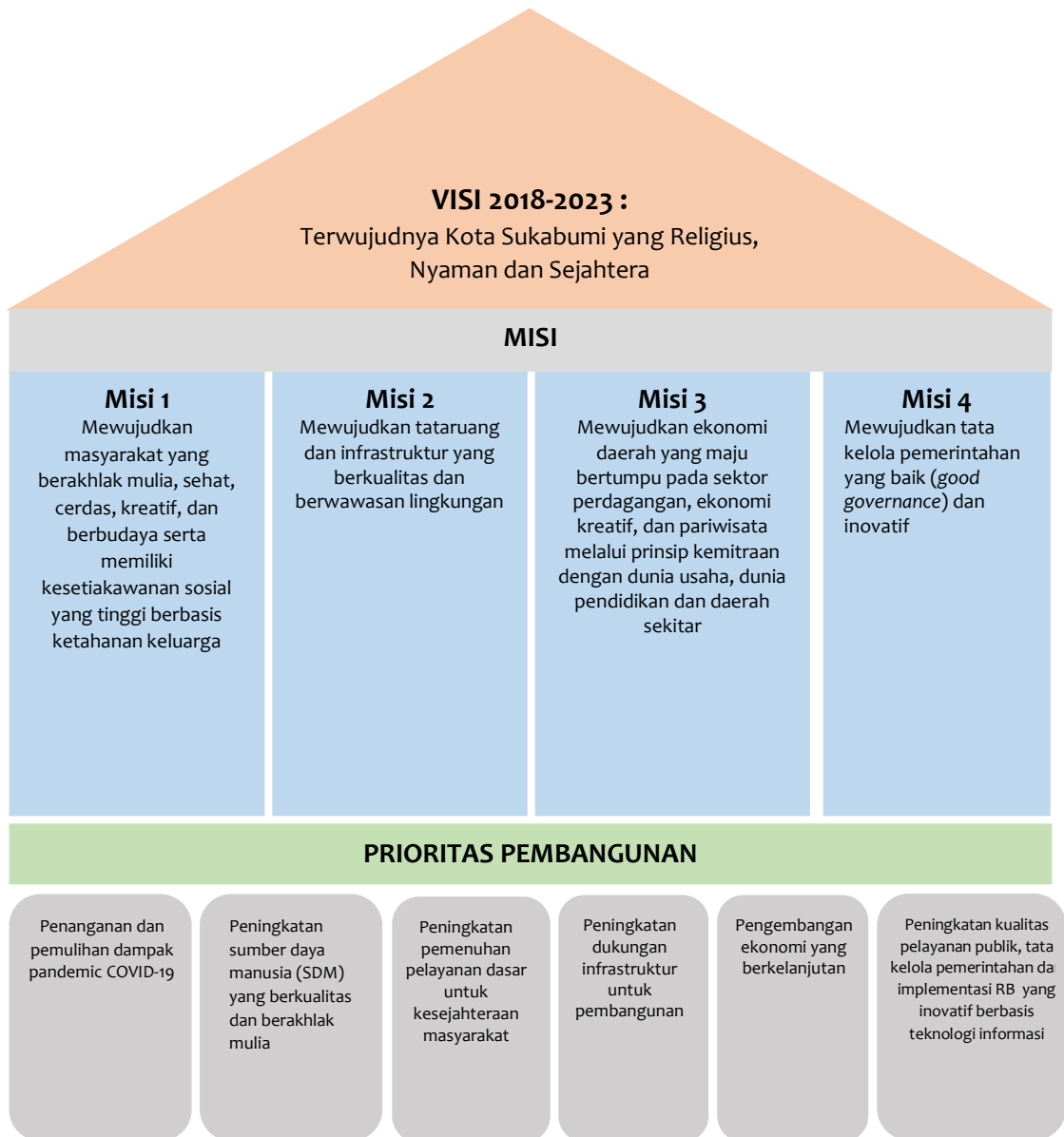
Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota diatas, Kota Sukabumi dan tentunya semua pemerintah daerah di Indonesia bahkan dunia dihadapkan pada tantangan masih berlangsungnya kondisi Pandemi *Covid-19* yang sejak Tahun 2020 ditetapkan dan sampai sekarang masih belum berakhir. Adanya pandemi *Covid-19* yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi ditandai antara lain dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Menyikapi hal tersebut maka bertepatan dengan Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023, Kota Sukabumi melakukan perubahan dalam penyusunan Prioritas Pembangunan



dimana menambahkan satu prioritas yaitu dalam rangka penanganan dan pemulihan *Covid-19*. Apabila kita gambarkan kondisi Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 akan terlihat seperti gambar di bawah ini.

Gambar 4.3
Prioritas Pembangunan dan Misi dalam Pencapaian



Sumber: Perubahan RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023

Dari Gambar di atas dapat dilihat alur perumusan visi sampai dengan prioritas pembangunan. Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Daerah ditopang oleh 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah yang kemudian diterjemahkan dalam 6 (enam) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengalami penambahan



yang sebelumnya 5 (lima) menjadi 6 (enam) yaitu penambahan prioritas penanganan dan pemulihan dampak pandemi *Covid-19*. Bagan alur tersebut berbentuk seperti bangunan rumah, dimana prioritas pembangunan menjadi pondasi bangunan dan misi pembangunan menjadi pilar-pilarnya yang menopang atap bangunan yaitu visi pembangunan jangka menengah. Hal ini menunjukkan keterkaitan satu sama lain dimana visi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan tidak akan tercapai apabila prioritas pembangunan tidak dilaksanakan dan misi pembangunan jangka menengah tidak tercapai.

Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu.

Rencana pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023. Indikator kinerja tujuan, sasaran, kondisi capaian tahun sebelumnya dan target Tahun 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel berikut ini:



**Tabel 4.1
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD
Tahun 2021 s/d 2023**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
			2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7		
VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA								
1	MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA							
1.1	MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERKUALITAS YANG BERAKHLAK MULIA	a.	Indeks rasa aman	Persen	64,30	64,60	64,90	64,90
		b.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74.45	74.60	74.75	74.75
1.1.1	MENINGKATNYA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA, PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	74,08	78,02	80,09	80,09
1.1.2	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	a.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.287	0.317	0.367	0.367



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)		SATUAN	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7
1.1.3	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN MERATA	a.	Indeks Pendidikan	Angka	69,82	69,83	69,83	69,83
1.1.4	TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA	a.	Indeks Kota Kreatif (IKK)	Angka	27,2	48,8	63,6	63,6
1.1.5	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK	a.	Indeks pembangunan gender	Angka	91,19	91,25	91,31	91,3
1.1.6	MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	a.	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	67,91	67,96	68,01	68,01
2	MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN							
2.1	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	a.	Indeks kenyamanan	Angka	24.4	24	23.5	23.5
2.1.1	TERWUJUDNYA PEMERATAAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKELANJUTAN	a.	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Angka	78	80	82	82



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)		SATUAN	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7
		b.	Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Dengan Rencana Tata Ruang	Angka	35	40	45	45
2.1.2	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	58,21	59,00	59,78	59,78
2.1.3	TERWUJUDNYA KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA	a.	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	Point	0,51	0,53	0,55	0,55
3	MISI 3 MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR							
3.1	MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG KREATIF DAN BERKELANJUTAN	a.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	4.45	5.23	5.54	5.54
3.1.1	MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	1.851,46	1.944,04	2.041,24	2.041,24



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)		SATUAN	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7
3.1.2	MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN, DAN DAERAH SEKITAR	a.	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	persen	1	2	3	3
3.1.3	MENINGKATNYA SEKTOR PARIWISATA KREATIF MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN, DAN DAERAH SEKITAR	a.	kontribusi pariwisata terhadap PDRB	persen	1 – 1,14	1,15-1,29	1,30 – 1,44	1,30 – 1,44
3.1.4	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN USAHA DAN KETERSEDIAAN PANGAN MASYARAKAT	a.	Skor Pola Pangan Harapan	persen	79,50	79,99	80,30	80,30
4	MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF							
4.1	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	68,93	68,98	69,48	69,48



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)		SATUAN	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7
4.1.1	TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a.	Nilai SAKIP	Skor	78,00	79,00	80,00	80,00
		b.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
4.1.2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	a.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,81	2,91	3,01	3,01
4.1.3	MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	a.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,30	2,40	2,50	2,50
4.2	MENINGKATKAN INOVASI DAERAH	a.	Skor Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Terinovatif (≥1001)	Terinovatif (≥1001)	Terinovatif (≥1001)	Terinovatif (≥1001)
4.2.1	MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	a.	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,60	4,70	4,80	4,80

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023



4.1.4 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2023, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu "**Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**", dengan 8 (delapan) arah kebijakan, yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.



Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
 - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
 - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.
 - MP reformasi sistem perlindungan sosial;
 - MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
 - MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
 - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - e. Persentase Sumber Daya Manusia IPTEK (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
 - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
 - g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

- MP reformasi kesehatan nasional; dan
 - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
 - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
 - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
 - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
 - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
 - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-



6,6,08%; dan

f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP kawasan industri prioritas dan smelter.

6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;

b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;

c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan

d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
- MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.

7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik;

b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);

c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;

d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan

e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem kesehatan nasional;
- MP transformasi digital;
- MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
- MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting

8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
- b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Perurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan undangundang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2023, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

A. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023, yaitu:

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.



- B. Sasaran Nasional (SN) Tahun 2023, yaitu:
1. SN 1, Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
 2. SN 2, Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
 3. SN 3, Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dengan Mendorong Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera;
 4. SN 4, Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
 5. SN 5, Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
 6. SN 6, Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
 7. SN 7, Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
 8. SN 8, Meningkatnya Aset Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin dan Rentan;
 9. SN 9, Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
 10. SN 10, Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;
 11. SN 11, Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;
 12. SN 12, Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
 13. SN 13, Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;
 14. SN 14, Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkokuh Karakter Bangsa;
 15. SN 15, Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
 16. SN 16, Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
 17. SN 17, Meningkatnya Konektivitas Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Akses Menuju Pelayanan Dasar;



18. SN 18, Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perkotaan;
19. SN 19, Meningkatnya Layanan Energi dan Ketenagalistrikan;
20. SN 20, Meningkatnya Layanan Infrastruktur TIK;
21. SN 21, Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
22. SN 22, Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
23. SN 23, Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
24. SN 24, Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, Dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal; dan
25. SN 25, Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut, sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada tahun 2022 yaitu masih belum berakhirnya pandemi COVID-19, maka pada tahun 2023 prioritas pembangunan nasional tahun 2023 ditekankan pada PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; PN-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan; PN-3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan PN- 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Risiko dari adanya pandemi COVID-19 yaitu terjadinya perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, serta perubahan dan pergeseran rencana, namun menjadi pemicu terjadinya optimalisasi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2022 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut:



Tabel 4. 2

Arah Kebijakan Pembangunan Sesuai Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	
		Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	
		Rata – rata kompetensi Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1.9	
		Rata – rata kompetensi Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1.8	
		Rata – rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1.9	
		Pertumbuhan Proporsi Jumlah Satuan PAUD terkreditasi B	63.4	
		Pertumbuhan proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	69	
		Ketersediaan Jumlah Pengawas dan Penilik	3.2	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

2. Urusan Kesehatan

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota	2023	
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi	95%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil kortegrenbang tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan Daerah
		Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio TT 1:4:1000 Penduduk (Sesuai Revisi Renstra Kemenkes)	
	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		
	2. Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan	100%		
	3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		
	4. Pelayanan Kesehatan Balita	100%		
	5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%		
	6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%		



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota	2023	
		7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia	100%	
		8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	
		9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	
		10. pelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	
		11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
		12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	100%	
3.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	90%	
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	16%	
			3,274	
			(Penurunan 22% dari baseline 2019)	
			Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) Baru Ditemukan yang Memulai Pengobatan ARV	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota	2023	
		Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita (persen)	7.30%	
		Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	94.60%	
		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	83%	
			(Berdasarkan transformasi sistem kesehatan)	
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	93%	
		Persentase Tatanan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	80%	
		Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Layanan UBM	40%	
		Annual Parasite Incidence (API) < 1/1000 Penduduk	<1/1000 penduduk	
		Persentase posyandu aktif	80%	
		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	94%	
		Persentase capaian 8 aksi konvergensi Penurunan Stunting	100%	
		Persentase FKTP terakreditasi	90%	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota	2023	
		Jumlah puskesmas yang dibangun di Kecamatan yang belum memiliki puskesmas	56 puskesmas (15 Kab/Kota)	
4.	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	79%	

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	14.22%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil kortegrenbang tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	28.01%	
		Presentase PDAM dengan kinerja sehat	91.80%	
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	1.49%	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	92.21% (77,64% penanganan 14,57% pengurangan)	
2.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	97.55%	
		Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	86,03% akses layak (termasuk 13% akses aman)	
3.	Terlaksananya Pengelolaan SDA Terpadu	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	110.672 Ha	
		Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	30.447 Ha	
			2,86 m3/detik	
4.	Terwujudnya konektivitas jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	73%	
5.	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian materi teknis RTRW	*Berdasarkan target Bimtek dan/atau usulan daerah	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
			**Target Bimtek RTRW 2023 : 43	
		Penyelesaian materi teknis RDTR	*Berdasarkan target Bimtek dan/atau usulan daerah	
			**Target Bimtek RDTR 2023 : 189	
		Penetapan RTRW	*Berdasarkan target Persub RTRW	
			**Target Persub RTRW 2023 : 43	
		Penetapan RDTR	*Berdasarkan target Persub RTRW	
**Target Persub RDTR 2023 : 132				
6.	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Pengendalian alih fungsi lahan sawah	6 Provinsi, 62 Kabupaten/Kota	
		Pelaksanaan fasilitasi alih fungsi lahan sawah	12 kasus	
		Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada DAS	6 Daerah Aliran Sungai pada 6 Provinsi, 12 kabupaten/Kota	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	15 Kasus	

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kinerja	Indikator	Target *)	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	
2.	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh < 10 Ha yang ditangani	1.459 Ha	
3.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH)	208.764 Unit	
4.	Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No.	Kinerja	Indikator	Target *)	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Jumlah SOP dalam penegakan perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	10 Dokumen	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil kortegrenbang tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah Satgas Linmas Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota	1 Dokumen	
		Persentase Satgas Linmas tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota	100%	
		Persentase anggota Satlinmas yg telah dikukuhkan melalui SK Bupati/Walikota	100%	
		Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani	100%	
		Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target *)	Keterangan
		Kab/Kota		
		Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	50%	
		Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	100%	
		Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat Kecamatan	20%	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	5 Orang/Provinsi;	
			7 Orang/ Kabupaten/Kota	
Persentase Perda danPerkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	80%			
2.	Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana	100%	
		Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan rawan bencana dan/atau kesiapsiagaan	20%	
		Jumlah personil TRC yang dikembangkan teknis manajerialnya	20%	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target *)	Keterangan
		Kab/Kota		
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana	20%	
		Persentase penanganan pasca bencana	100%	
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	
3.	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	50%	
		Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	50%	
		Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	25%	
		Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%	

6. Urusan Sosial



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah Lembaga di Bidang Kesos Yang mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan	850	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah SDM PKH yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	39351	
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	10,000,000	
		Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial	34	
		Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial	15000	
		Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	34	
		Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB)	34	
		Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	38,000	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan	200	
2	Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kab/kota	100	
		Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang Disediakan	133,000	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	514	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	133,000	
		Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Paket Permakanan	1000	
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	10,230	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	1000	
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	10	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	100	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar	3400	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di luar panti	50	
		Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di luar panti	100	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	1360	
		Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di luar panti	2	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	
		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	50000	
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	100	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	2720	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	100	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	100	
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	375	
		Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan		



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial di luar panti	100	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	25	
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di luar panti	100	
		Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	250	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	100	
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	3400	
		Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100	
		Jumlah alat bantu yang disediakan di luar panti	68	
		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di luar panti		



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
			50	
		Jumlah Anak Terlantar di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		
			1700	
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi		
			204,330	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
			100	
		Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di luar panti		
			136	
		Jumlah Anak Terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		
			340	
		Jumlah Anak terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga		
			680	
		Jumlah Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga		
			25	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100	
		Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di luar panti	100	
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar panti	136	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di luar panti	100	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	340	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	100	
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	25	
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar panti	1	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	2	
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan luar panti	1	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	
		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	1000	
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	3400	
4	Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	70	
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	100	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya	7230	
		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3000	

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	72%	
2.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	1.546.370 orang	Daerah menyesuaikan esaran target dengan hasil kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	45.000 orang	
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	227.500 orang	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
3.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak - haknya	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak - hak pekerja dan dialog sosial	7.056.010 orang	

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	Meningkat minimal 25% dari kondisi 2021	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkat minimal 0,1 poin dari kondisi 2021	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkat minimal 0,5 poin dari kondisi 2021	Sesuai target RPJMN dan Renstra Kementerian PPA
		Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	90%	
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Provinsi menyesuaikan dengan hasil proyeksi tahun 2023;	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
			Kab/Kota meningkat minimal 2 poin dari kondisi 2021	kemampuan keuangan daerah
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	75%	Sesuai target RPJMN dan Renstra Kementerian PPA

3. Urusan Pangan

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah daerah	29930 Ton	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase daerah rentan rawan pangan	12%	
		Skor Pola Pangan Harapan	94	
2.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85%	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

4. Urusan Pertanahan

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	355.157 Bidang	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	144.200 Kepala Keluarga	

5. Urusan Lingkungan Hidup

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,48 Poin	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
2.	Meningkatnya Penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75% (dari total izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan)	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Persentase ketaatan penanggungjawab usaha terhadap izin lingkungan izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	20%-30% (dari total usaha yang diawasi)	
3.	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Persentase pengurangan sampah	27%	
		Persentase sampah yang ditangani	72%	

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian dilaporkannya	100%	
		Pemanfaatan data kependudukan	80%	
		Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100%	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	98%	
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur/ pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	13.494 Orang	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	7.500 Desa	
		Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	7.500 Desa	
2.	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Berkembang	58.291 Desa	
		Jumlah Desa Mandiri	5.444 Desa	
		Jumlah Desa Tertinggal	11.652 Desa	
3.	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Berkembang	270 Bumdesma	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	9.000 BUM Desa	

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15 – 49 tahun	2.19%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern Contraceptive</i> (mCPR)	62.92%	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	7.70%	
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> 15-19)	20 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	
2.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59 Indeks	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

9. Urusan Perhubungan

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	88.4	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		<i>On Time Performance</i>	(Nilai)	
		Layanan Transportasi	80.26%	
2.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0,725 Rasio	
3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 10 ribu Keberangkatan	26.39	

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Persentase (%) masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	2%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah ASN Pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaann SPBE	10 Orang	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
2.	Terlaksanannya Layanan Pemerintah Secara Digital	Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	65%	
		Persentase (%) aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	100%	
3.	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase (%) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	80%	
		Persentase (%) khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional, (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	85%	
		Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	74%	
			100%	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Persentase (%) permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		
4.	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase (%) Perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang dan disediakan dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	80%	
5.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi	Persentase (%)perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan	100%	

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1	Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	18%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
2	Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	4%	
			70%	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Terfasilitasinya UKM yang Berpotensi Masuk ke Dalam Rantai Pasok dan Ekspor		
		Pertumbuhan Wirausaha	3,5%	

12. Urusan Penanaman Modal

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Tercapainya Target realisasi penanaman modal	Rp. 1.200 Triliun	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil kortekrenbang tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah Atlet yang berasal dari Kabupaten/Kota yang masuk Pelatda	10 orang	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
2.	Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan di tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di tingkat Kabupaten/Kota	100 orang	
		Persentase Wirausahawan Muda di tingkat Kabupaten/Kota	0,5 persen	
3.	Meningkatnya partisipasi organisasi Kepramukaan dalam pembangunan bangsa	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	300 orang	

14. Urusan Statistik

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	100%	kemampuan keuangan daerah
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	100%	
		Persentase Organisasi Perangkat daerah(OPD) yang menyampaikan metadara sektoral sesuai standar	100%	

15. Urusan Persandian

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1	Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Lulusan Sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	100 orang	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah Lulusan Peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	100 Orang	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada skor minimal 2,59	69,2%	
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	3 Daerah	

16. Urusan Kebudayaan

No	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kabupaten/Kota		
1	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.99	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.82	
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	58.86	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	36	
			12	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kabupaten/Kota		
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah		
2	Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.5	
		Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0.46	

17. Urusan Perpustakaan

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1	Pembangunan literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14 indeks	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
2	Peningkatan kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat	67.3 nilai	

18. Urusan Kearsipan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	411.095 Pengguna	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	8.051 Arsip	
2	Penerapan e-Arsip terintegrasi	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menerapkan e-arsip terintegrasi	165 Prov/Kab/ Kota	
3	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	32 Provinsi/Kab/Kota dengan nilai B ke atas	
4	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	123 Rekomendasi	

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi perikanan tangkap	8.735.580 ton	1. Perlu memperhatikan penguatan jaminan usaha korporasi nelayan. 2. Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah.
		Produksi perikanan budidaya	21.580 Ton	1. Indikator diarahkan untuk mendukung <i>Major Project</i> Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng yang berlokasi di wilayah Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
				2. Indikator diarahkan untuk mendukung salah satu program prioritas KKP yaitu pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.
				3. Agar memperhatikan pelestarian sumber daya laut dan penguatan ekonomi masyarakat melalui budidaya.
				4. Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah
2.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif O	Operasi kapal/speedboat pengawas	100 hari	1. Operasi kapal/speedboat pengawas dilakukan untuk pengawasan di wilayah kewenangan Provinsi (0-12 mil laut) dan Kabupaten/kota(Perairan Umum Daratan) 2. Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin kabupaten/kota yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	2.870 Pelaku Usaha	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2022, mempertimbangkan hasil Rakornas dan Rakernis KKP serta kemampuan keuangan daerah.

2. Urusan Periwisata

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp1.279.000.000.000	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	300.000.000 –	
			315.000.000 orang	
Kontribusi PDB Pariwisata	4,4%			

3. Urusan Pertanian

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai)	2,36%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	1,85%	serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada)	2,05%	
		Jumlah produksi daging	4.647.800 Ton	
		Jumlah produksi susu	986.370 Ton	
		Jumlah produksi telur	5.831.500 Ton	
2	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	71,87%	

4. Urusan Perdagangan

No	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	90	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
2	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	5.9%-7.86%	kondisi serta kemampuan keuangan daerah
3	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif	Tertib usaha	75-90	
4	Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang	Pertumbuhan implementasi SRG	*33%	
			**5-15%	
5	Meningkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	72%	
6	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5.9	
7	Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan	Inflasi Pangan Bergejolak	3-5%	

5. Urusan Perindustrian

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	18,40%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
2	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Rp. Triliun)	544,59 Triliun	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
3	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	7,70%	
4	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	21,34 Juta	
5	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	160,64 Miliar	

6. Urusan Transmigrasi

No.	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
		Kab/Kota		
1	Meningkatnya Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata – rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	55,31 Indeks	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Nilai rata – rata indeks perkembangan 100 kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	44,08 Indeks	



4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Tema RKPD Tahun 2023 bersumber dari arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023, yaitu:

“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat. Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Jabar Juara” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Bencana pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa Barat terutama pada aspek perekonomian dan kesehatan sehingga berimplikasi cenderung negatif pada kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif pada perekonomian masyarakat sangat dirasakan dengan terganggunya aktivitas dunia usaha terutama menurunnya aktivitas perdagangan pada sektor UMKM, penurunan produktivitas sektor industri yang mengakibatkan terjadinya gelombang PHK yang begitu besar, dan terhambatnya proyek-proyek infrastruktur yang mengakibatkan perlambatan pembentukan modal/investasi di Provinsi Jawa Barat. Selain pada aspek perekonomian, dengan penyebarannya yang begitu masif, wabah ini tentunya berdampak buruk pada kondisi kesehatan masyarakat dan semuanya berujung pada kondisi kerentanan sosial masyarakat yang meningkat. Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah perlu untuk mengakselerasi pemulihan kondisi Jawa Barat pasca pandemi COVID-19 dengan menitikberatkan pada pemantapan daya saing daerah menuju pada kemandirian melalui sistem pangan berkelanjutan, dengan 1) menjaga ketersediaan, yaitu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri; mendatangkan dari luar Jawa Barat (ekspor – impor); menyiapkan cadangan pangan (untuk pasca bencana ataupun sosial); 2) menyiapkan akses, dengan menjaga stabilitas pasokan dan



harga; meningkatkan daya beli masyarakat; menyederhanakan sistem logistik dan distribusi; meningkatkan akses petani terhadap pasar; penyediaan infrastruktur (akses jalan, gudang penyimpanan, dan sebagainya), dan 3) Mengoptimalkan pemanfaatan, melalui pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat; optimalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan; dan meningkatkan keamanan dan mutu pangan.

Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Berikut uraian singkat program pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 pada setiap misi, tujuan dan sasaran, serta kaitannya dengan prioritas pembangunan daerah dan program Jabar Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi 1, yaitu Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban, dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pembangunan dan mendukung prioritas pembangunan daerah Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara, serta 3 (tiga) Program Jabar Juara, terdiri dari: 1) Masjid Juara; 2) Pesantren Juara; dan 3) Ulama Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran Misi 2, yaitu Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif, dilaksanakan melalui 71 program pembangunan dan mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, meliputi 1) Reformasi sistem kesehatan daerah; 2) Reformasi sistem perlindungan sosial; 3) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi; 4) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan; dan 5) Gerakan membangun desa, serta 11 (sebelas) Program Jabar Juara, terdiri dari: 1) Kesehatan Juara; 2) Perempuan Juara; 3) Olahraga Juara; 4) Budaya Juara; 5) Sekolah Juara; 6) Guru Juara; 7) Ibu Juara; 8) Milenial Juara; 9) Perguruan Tinggi Juara; 10) Wirausaha Juara; dan 11) Tanggap Bencana Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi 3, yaitu Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan



Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah, dilaksanakan melalui 163 program pembangunan dan mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, meliputi: 1) Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan; 3) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata; 4) Gerakan Membangun Desa; dan 5) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi, serta 11 (sebelas) Program Jabar Juara, terdiri dari: 1) Energi Juara; 2) Transportasi Juara; 3) Lingkungan Juara; 4) Kelola Sampah Juara; 5) Kota Juara; 6) Pantura Juara; 7) Pansela Juara; 8) Tanggap Bencana Juara; 9) Pariwisata Juara; 10) BUMD Juara; dan 11) Birokrasi Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi 4, yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan, dilaksanakan melalui 73 Program pembangunan dan mendukung 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, meliputi: 1) Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi; 2) Pengembangan Infratsruktur, Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) Reformasi sistem kesehatan daerah; 4) Gerakan Membangun Desa; 5) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata; dan 6) Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara, serta 14 (empat belas) Program Jabar Juara, terdiri dari: 1) Pariwisata Juara; 2) Nelayan Juara; 3) Ekonomi Kreatif Juara; 4) One Village One Company; 5) Petani Juara; 6) Pantura Juara; 7) Logistik Juara; 8) Pasar Juara; 9) UMKM Juara; 10) Wirausaha Juara; 11) Lingkungan Juara; 12) BUMD Juara; 13) Birokrasi Juara; dan 14) Gerbang Desa Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi 5, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui 37 program pembangunan dan mendukung 1 (satu) prioritas pembangunan daerah, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, serta 3 (tiga) Program Jabar Juara, terdiri dari: 1) Birokrasi Juara; 2) ASN Juara; dan 3) APBD Juara.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Tahun 2021 dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023 sangat erat. Terdapat 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Pada tahun 2020 terdapat kejadian luar biasa yang melanda Provinsi Jawa Barat yaitu pandemi COVID19 yang diprediksi akan terus berdampak sampai tahun 2023. Berdasarkan isu strategis tahun 2023, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat fokus menangani pandemi COVID-19 dan memasukkan ke dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, isu strategis, dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan
Arah Kebijakan

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
1	2	3
1	Reformasi sistem kesehatan daerah	a. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing melalui penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai standar WHO



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
1	2	3
2	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan industry unggulan Jawa Barat, perwilayah industry, sumber daya industry, sarana dan prasarana industry serta meningkatkan pemberdayaan industri b. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang; menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok; meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan, revitalisasi atau membangun pasar rakyat; serta perlindungan konsumen c. Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (<i>off taker & promosi</i>) d. Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing e. Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok; f. Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial; g. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar
3	Penguatan Ketahanan Sistem Pangan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat Jawa Barat serta memperbaiki system informasi pangan b. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia c. Pengembangan kawasan klaster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan d. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi
4	Reformasi sistem perlindungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan/atau terdampak Covid-19



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
1	2	3
5	Reformasi pendidikan dan pemajuan kebudayaan sistem dan	<p>a. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah melalui pembentukan <i>center of excellence</i> di setiap kabupaten/kota dan pengembangan SMK yang relevan di kawasan metropolitan</p> <p>b. Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi</p> <p>c. Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan jarak jauh, penyediaan <i>e-book</i> gratis di portal pemerintah dengan ditopang kehandalan infrastruktur jaringan TI</p> <p>d. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital</p>
6	Reformasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Sistem Risiko	<p>a. Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana</p>
7	Inovasi pelayanan Publik dan Penataan Daerah	<p>a. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i></p>
8	Gerakan membangun desa	<p>a. Memperkuat pemerintahan desa</p>
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	<p>a. Meningkatkan fasilitas penguatan sumber daya dan lembaga keagamaan serta ekonomi umat</p>



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
1	2	3
10	Pengembangan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok b. Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial c. Membangun sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau dan antar moda d. Mengembangkan prasarana transportasi darat, laut, udara dan asdp serta mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut, udara dan kereta api yang berkeselamatan dan menghunungkan wilayah strategis e. Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara f. Meningkatkan kualitasutupan lahan g. Meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman h. Meningkatkan kualitas operasional instalasi tenaga listrik
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif b. Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital

Tabel 4.4

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis

No	Isu Strategis RKPD 2023	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023
1	2	3
1	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> 1. PD1 - Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 2. PD5 - Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan 3. PD9 - Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Isu Strategis RKPD 2023	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023
1	2	3
2	Kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan	1. PD1 - Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 2. PD2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 3. PD3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 4. PD4 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
3	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. PD8 Gerakan Membangun Desa 2. PD10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	1. PD2 - Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 2. PD3 - Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 3. PD8 - Gerakan Membangun Desa 4. PD10 - Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. PD11 Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
5	Reformasi birokrasi	1. PD7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Arah pengembangan wilayah Kota Sukabumi Tahun 2023 termasuk dalam Tema Wilayah Pengembangan: Mendorong perkembangan koridor Sukabumi Cianjur dan PKW Palabuhanratu, serta membatasi perkembangan di bagian selatan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur. Fokus Pengembangan untuk Kota Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan pusat agroindustri, peternakan, agropolitan, wisata agro, industri nonpolutif dan tidak mengganggu resapan air, serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Sukabumi;

Adapun arah pengembangan wilayah untuk Kota Sukabumi yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat meliputi:

a. Aspek Sosial

1. Penurunan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial;
2. Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

3. Peningkatan fasilitas sarana prasarana layanan kesehatan dan perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu;
 4. Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
 6. Percepatan penurunan stunting;
 7. Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan
 8. Pemberdayaan perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Aspek Ekonomi
1. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
 3. Pengembangan akses pemasaran dan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi; dan
 4. Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani.
- c. Aspek Infrastruktur
1. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 2. Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan;
 3. Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
 4. Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
 5. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Pembangunan embung/situ untuk pengendalian banjir;
 6. Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
 7. Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman;
 8. Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan Rel di Kawasan Perkotaan;
 9. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan transportasi; dan
 10. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.



4.2.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, saran dan masukan tersebut antara lain:

A. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Bidang Pendidikan
 - Pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran sesuai dengan kriteria / Aturan yang berlaku.
- 2) Kesehatan
 - Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus tepat sasaran sesuai dengan Kriteria / Aturan yang berlaku.
- 3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Untuk segera membuat *Master plan Drainase* sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka menanggulangi banjir.
 - Meningkatkan pemeliharaan jalan kota dan jalan lingkungan secara merata, baik berupa pavingisasi, betonisasi dan pengaspalan.
 - Dalam pelaksanaan kegiatan yang besumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota harus bersinergi.
- 4) Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
 - Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara membangun rusunami, Rusunawa, Rumah murah bersubsidi.
- 5) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Meningkatkan peran dan fungsi Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) yang ada di setiap RW.
- 6) Bidang Sosial
 - Mengadakan Pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacat Berbasis potensi / kebutuhan.



- Menyediakan rumah singgah bagi para Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

- Menginformasikan setiap ada Lowongan Pekerjaan (Loker) kepada Masyarakat.
- Melakukan Koordinasi dengan pihak Perusahaan dalam penentuan Hak-hak dan kewajiban pekerja terhadap perusahaan.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Melakukan Bimbingan dan Konsultasi terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Melibatkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

3) Bidang Ketahanan Pangan

- Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, khususnya olahan pangan masyarakat.
- Peningkatan pemantauan harga sembako untuk menjamin tersedianya kebutuhan makanan pokok.

4) Bidang Pertanahan

- Melakukan Pendataan dan Mentertibkan Hak Kepemilikan Tanah yang belum Bersertifikat.
- Mengamankan aset-aset milik Pemerintah Kota.

5) Bidang Lingkungan Hidup

- Meningkatkan dan memfasilitasi pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
- Segera merealisasikan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan dengan pola *typing fee*.

6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Kelurahan)

- Memberikan Bantuan Operasional kepada para Petugas Pos Yandu Balita dan Lansia.

7) Bidang Koperasi Dan UMKM

- Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM.
- Pengawasan dan pembinaan bagi pelaku koperasi dan UMKM.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

- Hubungan kesinambungan antara Dinas Koperasi dan UMKM pasca selesainya pembinaan.
- 8) Bidang Penanaman Modal
 - Mempermudah regulasi/aturan untuk menarik investor di Kota Sukabumi.
 - Menyediakan Mall pelayanan perijinan 1 (satu) pintu di DPMPTSP.
- 9) Bidang Kebudayaan
 - Dalam rangka melestarikan, Mengelola dan mengembangkan Gedung / Tempat peninggalan Sejarah / Cagar Budaya perlu adanya penambahan Anggaran.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Bidang Pariwisata

- Pemberdayaan potensi pariwisata lokal khususnya di kelurahan-kelurahan.
- Meningkatkan kultur pariwisata di masyarakat khususnya pelaku wisata.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri.
- Program destinasi wisata khususnya paket wisata unggulan melalui Sukabumi *Great sale*.
- Promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri
- Pengembangan SDM dan profesionalisme pariwisata.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.

2) Bidang Pertanian

- Pemantauan kesehatan hewan yang dikonsumsi masyarakat.
- Peningkatan keanekaragaman industri tanaman pertanian.
- Monitoring peredaran daging di pasar-pasar tradisional secara rutin dan terjadwal.
- Pemantauan higienes dan halal makanan yang berbahan daging di Hotel, Rumah Makan, dan Warung Makan di Kota Sukabumi.



3) Bidang Perdagangan

- Monitoring dan antisipasi terhadap kenaikan harga, mutu, dan penyediaan sembilan bahan pokok.
- Membuka dan memperluas akses pemasaran baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.
- Peningkatan pengawasan dan pembinaan pasar tradisional.
- Perlindungan bagi pelaku pasar tradisional agar terjaga eksistensinya terhadap persaingan pasar modern.
- Penataan dan penertiban pasar yang beralih fungsi.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar tradisional secara optimal, terutama terkait jaringan instalasi listrik di Pasar-Pasar tradisional secara keseluruhan.
- Mengoptimalkan Pendapatan pasar tradisional.
- Pemantauan perkembangan pasar Kreatif sehingga diharapkan ada dampak yang positif terhadap pasar Tradisional.

4) Bidang Perindustrian

- Menumbuhkembangkan minat masyarakat untuk berwirausaha.
- Proteksi terhadap keberadaan industri kecil dan menengah yang ada di Kota Sukabumi serta evaluasi dan memperketat kontrol terhadap produk-produk impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pembangunan tempat pameran yang memadai untuk usaha-usaha yang ada di Kota Sukabumi maupun di Luar Kota Sukabumi.

5) Bidang Transmigrasi

- Peningkatan kerja sama daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah daerah tujuan transmigrasi yang secara infrastruktur memadai.
- Peningkatan pembekalan Calon Transmigran yang akan dikirim dengan pelatihan yang memadai.



6) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Bidang Perencanaan

- Mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah agar dalam perencanaan pembangunan lebih akurat/tidak berubah-ubah, dan dapat terintegrasi antara Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- Dalam melakukan perencanaan memperhatikan prinsip partisipasi, kesinambungan dan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah.
- Untuk perencanaan pembangunan Kota Sukabumi agar memperhatikan keseimbangan wilayah.

b. Bidang Keuangan (Peningkatan PAD)

- Melaksanakan evaluasi dan monitoring di sektor PAD.
- Kajian potensi riil PAD dan peningkatan implementasi dari hasil kajian tersebut secara transparan yang dilakukan oleh tim independen.
- Sistem Pendapatan dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran diupayakan secara *online*.
- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi apabila regulasi tentang penghapusan PBB dan BPHTB jadi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- Evaluasi dan laporan hasil PAD dan penggunaan secara periodik (per Triwulan) kepada DPRD.

c. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- Perlunya ada penambahan Formasi / Pengangkatan Guru Agama baik melalui Seleksi P3K maupun seleksi CPNS .
- Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan Tunjangan Kinerja
- Terselenggaranya pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas PNS



d. Bidang Pemerintahan

- Meningkatkan peran kelembagaan kelurahan dan kecamatan dalam rangka partisipasi pembangunan.
- Mengusulkan peningkatan anggaran bantuan ke kelurahan dan kecamatan.
- Tersedianya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

e. Bidang Hukum dan HAM

- Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah
- Tersedianya *database* tentang Produk-produk Hukum baik peraturan daerah dan peraturan wali kota (Perwali)nya.
- Memverifikasi peraturan daerah yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan atau peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

f. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

- Tersedianya sarana dan prasarana yang representative.
- Meningkatkan kerukunan hidup beragama.
- Meningkatkan peran lembaga/*stake holders* dalam rangka mengantisipasi/mengatasi gejolak dalam kehidupan kerukunan umat beragama.
- Menjaga kondisifitas antar partai politik di Kota Sukabumi.

g. Penanggulangan Bencana

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana.
- Menciptakan sistem proteksi dalam bencana kebakaran.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam setiap pembangunan gedung di Kota Sukabumi.
- Perlunya standarisasi gedung/bangunan untuk mengantisipasi bencana/kebakaran.



h. Kebijakan BUMD

a. Perusahaan Daerah Air Minum

- Peningkatan mutu dan layanan air bersih yang layak pakai untuk masyarakat.
- Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan air yang layak bagi masyarakat kota Sukabumi.
- Menekan tingkat kebocoran air.
- PDAM diharapkan memberikan kebutuhan air bersih yang maksimal kepada masyarakat Sukabumi.

i. Lain-lain

- Penanganan *Covid-19* termasuk penyediaan APD, tempat tidur, pembangunan sarana prasarana kesehatan dan pengadaan mobil siaga desa;
- Penyelesaian pembayaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bagi warga yang tidak mampu;
- Peningkatan pelayanan bidang pendidikan termasuk penambahan ruang kelas baru, penambahan kuota bantuan bagi pelajar SMA/SMK, beasiswa bagi mahasiswa, peningkatan sarana prasarana SLB dan pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU);
- Pembangunan sarana prasarana pencegah banjir;
- Pembangunan jalan baru, perbaikan/perawatan jalan yang ada dan pembangunan jalan untuk lokasi perbatasan yang sulit dijangkau;

4.2.4 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan



menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Perumusan isu strategis Kota Sukabumi Tahun 2023 dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah Tahun 2021;
2. Kondisi terkini Tahun 2022;
3. Arah kebijakan Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023;
4. Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat pusat;
5. Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023; dan
6. Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka proses penyusunan isu strategis pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.5

Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2018 - 2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2021	Isu Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023
<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan; 3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job; 4. Mendorong pemulihan dunia usaha; 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 6. Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia • Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial 	<p>kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan sosial kemasyarakatan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. belum meratanya akses pendidikan karena belum meratanya distribusi guru 2. belum optimalnya mutu pendidikan 3. masih rendahnya minat baca masyarakat 4. Angka Harapan Hidup (AHH) masih di bawah capaian Provinsi Jawa Barat 5. meningkatnya angka penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, kanker, dan asma yang bisa menjadi <i>Comorbid</i> bagi penderita penyakit menular. 6. masih rendahnya angka jamban sehat, 7. belum optimalnya pencapaian SPM bidang kesehatan, dimana dari 12 (dua belas) indikator SPM baru 5 (lima) yang sudah memenuhi target 8. masih rendahnya keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga sehat. 9. Indeks Rawan Bencana (IRB) tinggi 10. Daerah belum memiliki sistem atau alat deteksi dini terjadinya bencana 11. belum berjalannya mekanisme pendirian bangunan melalui assesment dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) serta belum adanya sertifikat layak fungsi bangunan 	<p>kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan sosial kemasyarakatan;</p>



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2018 - 2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2021	Isu Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023
<p>rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);</p> <p>7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan</p> <p>8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara</p>			<p>12.belum terdatanya jumlah PPKS secara menyeluruh</p> <p>13.belum tersosialisasi dan teradaptasinya proses pemberian pelayanan sosial</p> <p>14.belum terfasilitasinya pelayanan sosial dasar maupun lanjutan secara komprehensif</p> <p>15.belum terkoordinasinya pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan sosial dalam penanganan kemiskinan</p> <p>16.masih ditemukannya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ;</p> <p>17.masih rendahnya pemenuhan hak anak ini dibuktikan dengan capaian status kota layak anak yang masih di level Nindya</p>	
	<p>Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan</p>	<p>infrastruktur dan tata kota;</p>	<p>18.pembangunan fisik dan infrastruktur masih belum merata terutama di wilayah selatan</p> <p>19.masih rendahnya fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) public</p> <p>20.fasilitas pedestriannya masih belum memenuhi persyaratan nyaman bagi pejalan kaki</p> <p>21.masih terdapatnya pemukiman kumuh</p> <p>22.angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih cukup tinggi</p> <p>23.masih tingi nya angka rumah tidak layak huni</p> <p>24.kemacetan yang cukup tinggi;</p>	<p>infrastruktur dan tata kota;</p>



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2018 - 2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2021	Isu Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023
			25. belum optimalnya pelayanan angkutan umum massal di Daerah; 26. kurangnya penyediaan parkir dalam memenuhi tingginya bangkitan kegiatan di pusat Daerah; dan 27. belum ramahnya sarana dan prasarana perkotaan untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus	
	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;	1. jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja; 2. kualitas tenaga kerja relatif rendah; 3. dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. 4. masih terdapat pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum; 5. belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja 6. kondisi usaha mikro dan kecil (UMK) belum optimal, dimana belum seluruhnya memiliki legalitas usaha; 7. pengelolaan koperasi pada umumnya belum dilaksanakan secara profesional, dimana sebagian besar dikelola secara paruh waktu, manajemen organisasi kurang berjalan, dan manajemen bisnis belum maksimal;	daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2018 - 2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2021	Isu Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023
			<p>8. pola kemitraan atau kerjasama antara koperasi dan UMK, dengan pengusaha besar belum optimal baik di bidang permodalan maupun pemasaran;</p> <p>9. perlunya peningkatan dukungan pendanaan untuk promosi produk usaha mikro;</p> <p>10. masih adanya kesan yang berkembang di masyarakat bahwa dana bergulir dari pemerintah dianggap hibah, sehingga menghambat laju perguliran dan penguatan struktur permodalan koperasi dan UMK;</p> <p>11. belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi usaha mikro (PIRT, Sertifikasi Halal);</p> <p>12. belum tersedianya sistem database koperasi dan usaha mikro</p> <p>13. masih rendahnya frekuensi dan tingkat promosi produk Usaha Mikro Kecil sehingga sulit menembus pangsa pasar, baik di dalam maupun luar negeri/ekspor;</p> <p>14. pola kemitraan di bidang pemasaran antara pedagang kecil, menengah dengan pengusaha besar belum optimal;</p> <p>15. potensi pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi investasi dan perdagangan terhadap mekanisme pasar, selain potensi positifnya;</p>	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2018 - 2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2021	Isu Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023
			<p>16.perlunya penerapan digitalisasi sistem penerimaan retribusi pedagang pasar dan retribusi layanan metrologi legal</p> <p>17.belum maksimalnya pertumbuhan dan pengembangan Pariwisata Ekonomi Kreatif;</p> <p>18.masih minimnya Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang dimiliki mengakibatkan Daerah hanya menjadi transit wisata;</p> <p>19.masih rendahnya sumber daya manusia pengelola destinasi pariwisata milik Daerah;</p> <p>20.kurangnya promosi pariwisata melalui media sosial;</p> <p>21.Kurangnya sarana prasarana destinasi pariwisata unggulan milik Daerah</p>	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2018 - 2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2021	Isu Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023
	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	kualitas lingkungan hidup;	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 2. menurunnya kualitas lingkungan; 3. belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan sampah; 4. adanya potensi berkurangnya RTH publik sebagai dampak dari pengembangan iklim investasi di Daerah; dan 5. terbatasnya SDM yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di Daerah menjadi kendala dalam penanganan kasus pengaduan pencemaran lingkungan dalam upaya penegakan hukum lingkungan. 6. adanya lahan yang sudah dimiliki investor yang tidak sejalan dengan RTRW sehingga tidak bisa dipergunakan berinvestasi karena tidak sesuai peruntukannya 	kualitas lingkungan hidup;
	Reformasi birokrasi	penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP masih belum optimal 2. Nilai indeks Reformasi Birokrasi masih belum optimal 3. Masih aa instansi pelayanan public yang bernilai kurang baik 4. Belum terdapatnya mekanisme tunjangan kinerja berdasarkan kinerja 5. Pelayanan public masih belum terpusat di satu tempat missal di mall pelayanan public 	penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2018 - 2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2021	Isu Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023
			6. Masih ditemukannya temuan-temuan oleh pemeriksa atau tim audit	
	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	dampak pandemi covid 19	<ol style="list-style-type: none">1. dampak pandemi Covid-19 meyebabkan UMKM mengalami kerugian bahkan ada yang gulung tikar2. dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran3. dengan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan nilai ekonomi secara nasional yang berdampak terhadap Daerah sehingga berpengaruh besar terjadinya penurunan nilai investasi khususnya di Daerah4. dampak pandemi meningkatkan angka kemiskinan	dampak pandemi covid 19

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, kemudian berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, maka sesuai Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023, isu strategis pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

1. kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan sosial kemasyarakatan;
2. infrastruktur dan tata kota;
3. daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
4. kualitas lingkungan hidup;
5. penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
6. dampak pandemi *Covid 19*.

Berdasarkan rumusan 6 (enam) isu strategis di atas, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan yang disusun mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini:



Tabel 4.6

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023

Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera						
MISI 1 : mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1.1	Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berakhlak mulia	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penerapan nilai nilai agama dan wawasan kebangsaan	1	Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan
					2	Meningkatkan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama
					3	Meningkatkan aktivitas keagamaan
					4	Meningkatkan wawasan dan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat
					5	Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda
					6	Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
		1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	1	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
					2	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan dalam rangka penanganan dan pemulihan pandemi covid-19
					3	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan
		1.1.3.	Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata	1	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan
					2	Meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas
					3	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM pendidikan
					4	mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan berkarakter
		1.1.4.	Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Berbudaya	1. Meningkatkan Kolaborasi antar Stakeholders Penta Helix Dalam	1	Meningkatkan penguatan seni dan budaya lokal
					2	Meningkatkan Kreasi masyarakat



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
				Pengembangan Kota Kreatif		
				2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olah raga	3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga
					4	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		1.1.5.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi Gender	1	Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
					2	Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
					3	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Pengembangan Sistem Informasi Gender
		1.1.6.	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial	Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga melalui Penguatan Kebijakan,	1	Menyusun Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan sosial
					2	Optimalisasi ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
				Pengendalian Penduduk dan ketahanan ekonomi keluarga		
				Meningkatkan pemberian pelayanan sosial dengan peran serta dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	3	Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dalam rangka penanggulangan kemiskinan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan/ atau terdampak Covid-19
					4	Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan Sosial melalui pemberdayaan masyarakat
					5	Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang holistik dan berkelanjutan
MISI 2: mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
2.1	Mewujudkan Pembangunan tata ruang dan	2.1.1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan	Mendorong terciptanya pemerataan dan	1	Meningkatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Infrastruktur yang Berkelanjutan				peningkatan kualitas infrastruktur	2	meningkatkan pembangunan infratraktur diwilayah yang tertinggal
					3	meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pembangunan infrastruktur
				Mendorong percepatan legalisasi kebijakan infrastruktur dan penataan ruang	4	Menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan perencanaan tata ruang
					5	Menyusun peraturan-peraturan terkait pembangunan infrastruktur dan penataan ruang
					6	meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang
					2.1.4	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
	2	meningkatkan pembangunan sanitasi dan pengendalian pencemaran				
	3	meningkatkan penyediaan lahan pemerintah untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup				



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
					4	meningkatkan kapasitas sdm sektor lingkungan hidup
		2.1.5	Terwujudnya ketangguhan terhadap bencana	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana	1	meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
					2	menyusun kebijakan dalam peningkatan kapasitas penanganan bencana
					3	Merubah paradigma penanggulangan bencana dari konsep emergency response menjadi preventive response
MISI 3: mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
3.1	Mewujudkan pengembangan ekonomi daerah yang kreatif dan berkelanjutan	3.1.1	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana pelayanan serta dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar	1	Meningkatkan Investasi dan Penanaman Modal di daerah
					2	Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
					3	Meningkatkan informasi bursa tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja
				Memperluas Kesempatan		



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
				Kerja dan Peluang Usaha	4	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi
					5	Mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif
					6	Menciptakan Wirausaha muda Baru
					7	Mengembangkan Inkubator Bisnis khususnya dalam rangka pemulihan dampak pandemi covid-19
					8	Mengembangkan Produk unggulan daerah
		3.1.2	Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	1. Meningkatkan kualitas Data, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan sarana prasarana Perdagangan serta dukungan Teknologi dan Informasi	1	Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
				2. Meningkatkan perdagangan melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	2	Penataan Pedagang kaki Lima (PKL)
		3.1.3	Meningkatnya Sektor pariwisata kreatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	1. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata dan promosi wisata	1	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata
				2. Meningkatkan pariwisata melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	2	Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi
				3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kolaborasi dan Harmonisasi dengan Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas kreatif, Pemerintah dan	3	Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital
					4	Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas ekonomi kreatif
				5	Meningkatkan peran ABCGM (Academic, Business, Community, Government and	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Media dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah.	Media) Bussines dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah
		3.1.4	Meningkatnya pengembangan usaha dan ketersediaan pangan masyarakat	1. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam	1 Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA)
				2. Meningkatkan partisipasi pemilik lahan pertanian untuk bergabung dalam LP2B, Pemberian insentif, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia	2 Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
MISI 4: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau <i>good governance</i> dan inovatif					
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
4.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	4.1.1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1	Perluasan implementasi sistem terintegritas
					2	Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi
					3	Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
					4	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT
		4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi pelayanan	1	meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik khususnya di era pandemi covid-19
					2	penguatan pelayanan terpadu
					3	peningkatan profesionalisme ASN
					4	penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik
		4.1.3	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Peningkatan kualitas tata kelola	1	Meningkatkan Integrasi Penerapan SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan



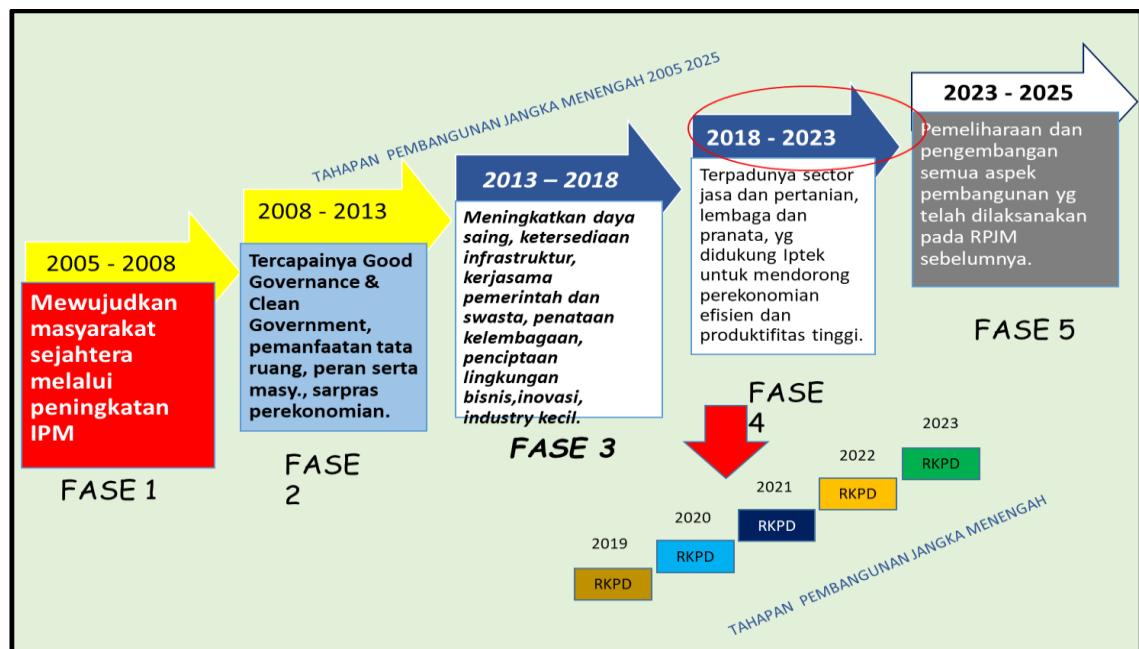
**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
			untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pemerintahan berbasis elektronik	2	Meningkatkan Sumber Daya di Sektor SPBE
					3	Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
					4	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SUPER (Sukabumi Participatory Responder)
4.2	Meningkatkan inovasi daerah	4.2.1	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penguatan ekosistem inovasi guna meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	1	Meningkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan inovasi daerah melalui fasilitasi dan pendampingan
					2	Meningkatkan pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional
					3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi
					4	Implementasi pemanfaatan inovasi

Sumber : perubahan RPJMD Kota Sukabumi 2018 - 2023

4.2.5 Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023

Pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD yang memiliki tema **“Terpadunya sektor jasa dan pertanian, lembaga dan pranata, yang didukung IPTEK untuk mendorong perekonomian efisien dan produktifitas tinggi”**. Tema pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang lebih lanjut akan dijabarkan dalam tema pembangunan setiap tahun dan menjadi pedoman bagi penentuan fokus atau tema pembangunan dalam RKPD. Tema pembangunan lima tahunan dalam setiap periode RPJPD disajikan pada Gambar dibawah ini.

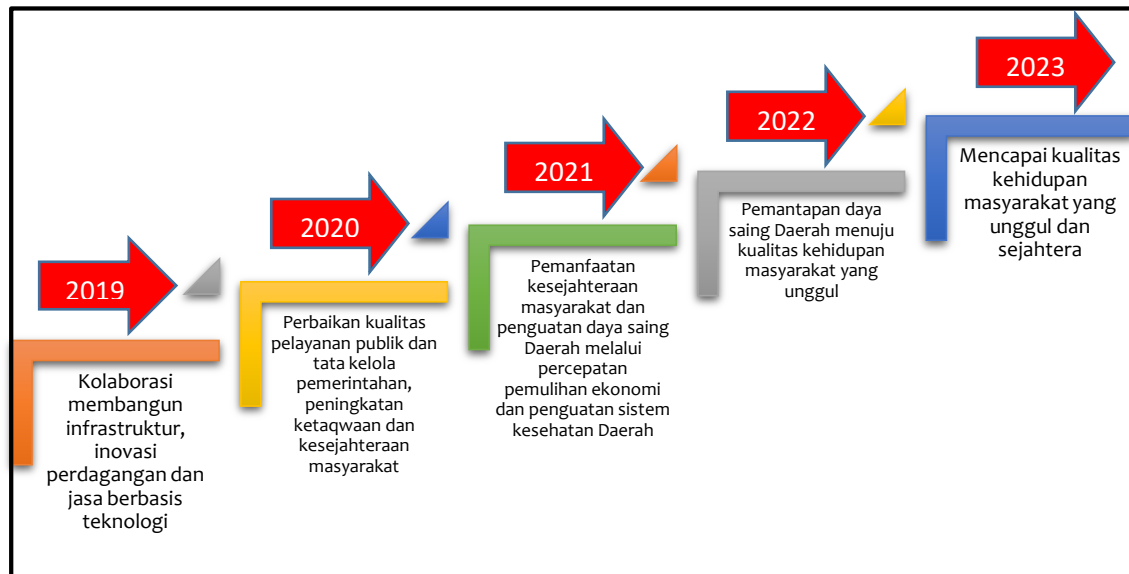


Gambar 4. 4
Tema Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus pembangunan akan menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai periode RPJMD. Penerapan tema atau fokus tersebut memberi arah yang jelas bagi pemerintah Daerah setiap tahun dalam rangka pencapaian target pembangunan di RPJMD. Fokus pembangunan tahunan pemerintah Daerah mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Gambar berikut ini:



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023



Gambar 4.5
Tema atau Fokus Pembangunan Tahunan Periode 2018-2023

Tema atau fokus pembangunan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahunan untuk perwujudan misi pembangunan RPJMD. Tema pembangunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 sebagai tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, yakni:

“Mencapai Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera”

Tema di atas memiliki makna bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan pada Tahun 2023 harus ditujukan bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kota Sukabumi dari berbagai sektor, sehingga terciptanya masyarakat yang unggul sesuai bidangnya serta sejahtera dari berbagai aspek kehidupan. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut tentunya akan dapat dicapai dengan percepatan pembangunan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dari berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, infrastruktur dan bidang lainnya sehingga dapat mendorong pencapaian kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dari segala bidang sehingga dapat mewujudkan Kota Sukabumi yang religius, nyaman dan sejahtera.

Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu **Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat** serta telah selaras juga dengan tema RKP yaitu **Peningkatan Produktivitas Untuk**



Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pada prinsipnya ketiga tema tersebut bertujuan untuk mencapai masyarakat yang mandiri, unggul dan sejahtera terutama melalui pembangunan ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh unsur masyarakat.

Dalam pelaksanaan tema diatas, maka harus disandingkan dengan prioritas pembangunan daerah sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan. Prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 disusun berdasarkan isu strategis dan memperhatikan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terutama melalau program unggulannya, pokok-pokok pikiran tahunan DPRD serta strategi dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Prioritas pembangunan Daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, disajikan berdasarkan sasaran RPJMD. Dengan sifat prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya harus diutamakan.

Berdasarkan hal tersebut, serta mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018–2023, maka prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 ditambahkan 1 (satu) prioritas pembangunan guna mempercepat penanganan dan pemulihan akibat pandemi *Covid-19*, sehingga dari semula terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan menjadi 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia;
2. peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi;
3. peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat;
4. peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan;
5. pengembangan ekonomi yang berkelanjutan; dan
6. penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19.

Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan Kota



Sukabumi Tahun 2023 dengan isu strategis pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 7
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Isu Strategi

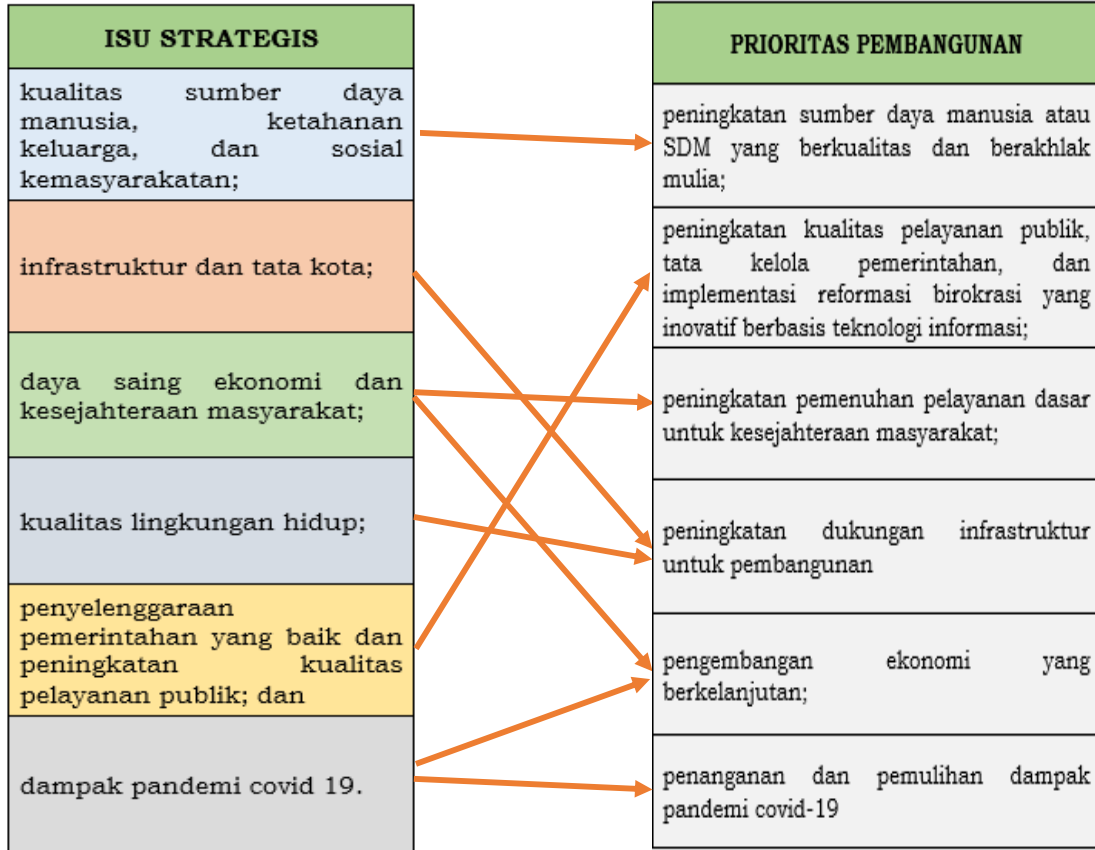
ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	
1	kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan sosial kemasyarakatan;	1	peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia;
2	infrastruktur dan tata kota;	2	peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi;
3	daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;	3	peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat;
4	kualitas lingkungan hidup;	4	peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan
5	penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan	5	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan;
6	dampak pandemi covid 19.	6	penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka apabila kita sandingkan antara isu strategis dengan program prioritas terdapat keterkaitan yang sangat erat. Isu strategis yang telah ditetapkan dapat kita petakan diakomodir pada program prioritas yang mana, sehingga kita dapat memastikan bahwa isu strategis yang bermula dari berbagai permasalahan dan kondisi terkini Kota Sukabumi dapat diselesaikan melalui berbagai program prioritas yang akan dijalankan pada Tahun 2023. Berikut gambar keterkaitan isu strategis dengan program prioritas.



Gambar 4.6
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan
Isu Strategis



Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022



Tabel 4.8
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023 per tahun

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema		
		Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	5	6	7
1	Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan			
2	Meningkatkan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama			
3	Meningkatkan aktivitas keagamaan			
4	Meningkatkan wawasan dan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat			
5	Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda			
6	Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban			



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema		
		Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	5	6	7
7	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan			
8	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan dalam rangka penanganan dan pemulihan pandemi covid-19			
9	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan			
10	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan			
11	Meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas			
12	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM pendidikan			
13	mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan berkarakter			



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema		
		Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	5	6	7
14	Meningkatkan penguatan seni dan budaya lokal			
15	Meningkatkan Kreasi masyarakat			
16	Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga			
17	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			
18	Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak			
19	Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak			
20	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Pengembangan Sistem Informasi Gender			



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema		
		Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	5	6	7
21	Menyusun Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan sosial			
22	Optimalisasi ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga			
23	Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dalam rangka penanggulangan kemiskinan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan/ atau terdampak Covid-19			
24	Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan Sosial melalui pemberdayaan masyarakat			
25	Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang holistik dan berkelanjutan			
26	Meningkatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah			



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema		
		Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	5	6	7
27	meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah yang tertinggal			
28	meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pembangunan infrastruktur			
29	Menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan perencanaan tata ruang			
30	Menyusun peraturan-peraturan terkait pembangunan infrastruktur dan penataan ruang			
31	meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang			
32	meningkatkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan			
33	meningkatkan pembangunan sanitasi dan pengendalian pencemaran			



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema		
		Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	5	6	7
34	meningkatkan penyediaan lahan pemerintah untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup			
35	meningkatkan kapasitas sdm sektor lingkungan hidup			
36	meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana			
37	menyusun kebijakan dalam peningkatan kapasitas penanganan bencana			
38	Merubah paradigma penanggulangan bencana dari konsep emergency response menjadi preventive response			
39	Meningkatkan Investasi dan Penanaman Modal di daerah			
40	Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema		
		Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	5	6	7
41	Meningkatkan informasi bursa tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja			
42	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi			
43	Mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif			
44	Menciptakan Wirausaha muda Baru			
45	Mengembangkan Inkubator Bisnis khususnya dalam rangka pemulihan dampak pandemi Covid-19			
46	Mengembangkan Produk unggulan daerah			
47	Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan			
48	Penataan Pedagang kaki Lima (PKL)			
49	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata			



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema		
		Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	5	6	7
50	Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi			
51	Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital			
52	Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas ekonomi kreatif			
53	Meningkatkan peran ABCGM (Academic, Business, Community, Government and Media) Bussines dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah			
54	Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA)			



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema		
		Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	5	6	7
55	Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan			
56	Perluasan implementasi sistem terintegritas			
57	Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi			
58	Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran			
59	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT			
60	meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik khususnya di era pandemi covid-19			
61	penguatan pelayanan terpadu			
62	peningkatan profesionalisme ASN			



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema		
		Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	5	6	7
63	penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik			
64	Meningkatkan Integrasi Penerapan SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan			
65	Meningkatkan Sumber Daya di Sektor SPBE			
66	Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat			
67	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SUPER (Sukabumi Participatory Responder)			
68	Meningkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan inovasi daerah melalui fasilitasi dan pendampingan			
69	Meningkatkan pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional			



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO.	Arah Kebijakan	Fokus / Tema		
		Pemanfaatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan Daerah	Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul	Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	5	6	7
70	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi			
71	Implementasi pemanfaatan inovasi			



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat terlihat bahwa arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi untuk Tahun 2021 – 2023 ditetapkan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 - 2023. Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijadikan arahan atau *guidance* bagi proses pembangunan Kota Sukabumi setiap tahunnya sesuai dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk Tahun 2022, sesuai tema pembangunannya yaitu “Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera” maka seluruh arah kebijakan yang tertuang dapat dijadikan dasar bagi perencanaan pembangunan Tahun 2023 yang dalam implementasinya disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang sudah ditentukan.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah, maka arah kebijakan dan program prioritas harus bisa disandingkan dan bisa terlihat jelas arah kebijakan mana yang menjadi dasar bagi penentuan prioritas pembangunan tersebut. Berikutnya dalam proses implementasi program prioritas bisa sesuai dengan harapan awal ketika proses penyusunan perencanaan dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian target-target kinerja yang sudah ditetapkan. Pada tabel 4.8 dibawah ini akan digambarkan hubungan antara prioritas pembangunan dengan 71 (tujuh puluh satu) arah kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tabel 4.9
Keterkaitan Priotas pembangunan dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah
Tahun 2019-2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2	
1	peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia	1	Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan
		2	Meningkatkan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama
		3	Meningkatkan aktivitas keagamaan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN			
1		2			
		4	Meningkatkan wawasan dan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat		
		5	mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan berkarakter		
		6	Meningkatkan penguatan seni dan budaya lokal		
		7	Meningkatkan Kreasi masyarakat		
		8	Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga		
		9	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
		10	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Pengembangan Sistem Informasi Gender		
		11	Menyusun Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan sosial		
		12	Optimalisasi ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga		
		13	Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan Sosial melalui pemberdayaan masyarakat		
		14	Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang holistik dan berkelanjutan		
		15	meningkatkan kapasitas sdm sektor lingkungan hidup		
		16	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi		
		17	Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak		
		18	Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak		
		2	peningkatan kualitas pelayanan publik, tata	19	Perluasan implementasi sistem terintegritas



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2	
	kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi	20	Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi
		21	Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
		22	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT
		23	meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik khususnya di era pandemi covid-19
		24	penguatan pelayanan terpadu
		25	peningkatan profesionalisme ASN
		26	penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik
		27	Meningkatkan Integrasi Penerapan SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
		28	Meningkatkan Sumber Daya di Sektor SPBE
		29	Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
		30	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SUPER (Sukabumi Participatory Responder)
		31	Meningkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan inovasi daerah melalui fasilitasi dan pendampingan
		32	Meningkatkan pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional
		33	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi
		34	Implementasi pemanfaatan inovasi
35	Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda		
3	peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat	36	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		37	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2	
		38	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan
		39	Meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas
		40	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM pendidikan
		41	meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
		42	menyusun kebijakan dalam peningkatan kapasitas penanganan bencana
		43	Merubah paradigma penanggulangan bencana dari konsep emergency response menjadi preventive response
		44	Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA)
		45	Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban
4	peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan	46	Meningkatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah
		47	meningkatkan pembangunan infratraktur diwilayah yang tertinggal
		48	meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pembangunan infrastruktur
		49	Menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan perencanaan tata ruang
		50	Menyusun peraturan-peraturan terkait pembangunan infrastruktur dan penataan ruang
		51	meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang
		52	meningkatkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
		53	meningkatkan pembangunan sanitasi dan pengendalian pencemaran



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2	
		54	meningkatkan penyediaan lahan pemerintah untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup
5	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	55	Meningkatkan Investasi dan Penanaman Modal di daerah
		56	Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
		57	Meningkatkan informasi bursa tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja
		58	Mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif
		59	Menciptakan Wirausaha muda Baru
		60	Mengembangkan Produk unggulan daerah
		61	Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan
		62	Penataan Pedagang kaki Lima (PKL)
		63	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata
		64	Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi
		65	Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital
		66	Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas ekonomi kreatif
		67	Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
68	Meningkatkan peran ABCGM (Academic, Business, Community, Government and Media) Bussines dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah		
6	penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19	69	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan dalam rangka penanganan dan pemulihan pandemi covid-19



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

PRIORITAS PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2	
		70	Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dalam rangka penanggulangan kemiskinan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan/ atau terdampak Covid-19
		71	Mengembangkan Inkubator Bisnis khususnya dalam rangka pemulihan dampak pandemi Covid-19

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022

Tabel 4.10
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran sesuai dengan kriteria / Aturan yang berlaku. 2. Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus tepat sasaran sesuai dengan Kriteria / Aturan yang berlaku. 3. Melakukan Bimbingan dan Konsultasi terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Melibatkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). 4. Perlunya ada penambahan Formasi / Pengangkatan Guru Agama baik melalui Seleksi P3K maupun seleksi CPNS . 5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan Tunjangan Kinerja 6. Terselenggaranya pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas PNS 7. Penyelesaian pembayaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bagi warga yang tidak mampu; 8. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan termasuk penambahan ruang kelas baru, penambahan kuota bantuan bagi pelajar SMA/SMK, beasiswa bagi mahasiswa, peningkatan sarana prasarana SLB dan pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
2	peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempermudah regulasi/aturan untuk menarik investor di Kota Sukabumi. 2. Menyediakan Mall pelayanan perijinan 1 (satu) pintu di DPMPSTP. 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata. 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang representative.



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
	berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none">5. Meningkatkan kerukunan hidup beragama.6. Meningkatkan peran lembaga/<i>stake holders</i> dalam rangka mengantisipasi/mengatasi gejolak dalam kehidupan kerukunan umat beragama.7. Menjaga kondisifitas antar partai politik di Kota Sukabumi.8. Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah9. Tersedianya <i>database</i> tentang Produk-produk Hukum baik peraturan daerah dan peraturan wali kota (Perwali)nya.10. Memverifikasi peraturan daerah yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan atau peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.11. Peningkatan kerja sama daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah daerah tujuan transmigrasi yang secara infrastruktur memadai.12. Peningkatan pembekalan Calon Transmigran yang akan dikirim dengan pelatihan yang memadai.13. Meningkatkan peran kelembagaan kelurahan dan kecamatan dalam rangka partisipasi pembangunan.14. Mengusulkan peningkatan anggaran bantuan ke kelurahan dan kecamatan.15. Tersedianya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3	peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara membangun rusunami, Rusunawa, Rumah murah bersubsidi.2. Meningkatkan peran dan fungsi Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) yang ada di setiap RW.3. Menyediakan rumah singgah bagi para Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).4. Memberikan Bantuan Operasional kepada para Petugas Pos Yandu Balita dan Lansia.5. Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, khususnya olahan pangan masyarakat.6. Peningkatan pemantauan harga sembako untuk menjamin tersedianya kebutuhan makanan pokok.7. Menginformasikan setiap ada Lowongan Pekerjaan (Loker) kepada Masyarakat.8. Peningkatan mutu dan layanan air bersih yang layak pakai untuk masyarakat.9. Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		air yang layak bagi masyarakat kota Sukabumi. 10. Menekan tingkat kebocoran air. 11. PDAM diharapkan memberikan kebutuhan air bersih yang maksimal kepada masyarakat Sukabumi.
4	peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan	1. Untuk segera membuat <i>Master plan Drainase</i> sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka menanggulangi banjir. 2. Meningkatkan pemeliharaan jalan kota dan jalan lingkungan secara merata, baik berupa pavingisasi, betonisasi dan pengaspalan. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan yang besumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota harus bersinergi. 4. Meningkatkan dan memfasilitasi pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). 5. Segera merealisasikan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan dengan pola <i>typing fee</i> . 6. Melakukan Pendataan dan Mentertibkan Hak Kepemilikan Tanah yang belum Bersertifikat. 7. Mengamankan aset-aset milik Pemerintah Kota. 8. Kota Sukabumi agar memperhatikan keseimbangan wilayah. Mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah agar dalam perencanaan pembangunan lebih akurat/tidak berubah-ubah, dan dapat terintegrasi antara Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 9. Dalam melakukan perencanaan memperhatikan prinsip partisipasi, kesinambungan dan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. 10. Untuk perencanaan pembangunan 11. Pembangunan sarana prasarana pencegah banjir; 12. Pembangunan jalan baru, perbaikan/perawatan jalan yang ada dan pembangunan jalan untuk lokasi perbatasan yang sulit dijangkau; 13. Peningkatan mutu dan layanan air bersih yang layak pakai untuk masyarakat. 14. Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan air yang layak bagi masyarakat kota Sukabumi. 15. Menekan tingkat kebocoran air. 16. PDAM diharapkan memberikan kebutuhan air bersih yang maksimal kepada masyarakat Sukabumi.



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
5	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM.2. Pengawasan dan pembinaan bagi pelaku koperasi dan UMKM.3. Hubungan kesinambungan antara Dinas Koperasi dan UMKM pasca selesainya pembinaan.4. Dalam rangka melestarikan, Mengelola dan mengembangkan Gedung / Tempat peninggalan Sejarah / Cagar Budaya perlu adanya penambahan Anggaran.5. Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, khususnya olahan pangan masyarakat.6. Peningkatan pemantauan harga sembako untuk menjamin tersedianya kebutuhan makanan pokok.7. Pemberdayaan potensi pariwisata lokal khususnya di kelurahan-kelurahan.8. Meningkatkan kultur pariwisata di masyarakat khususnya pelaku wisata.9. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri.10. Program destinasi wisata khususnya paket wisata unggulan melalui Sukabumi <i>Great sale</i>.11. Promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri12. Pengembangan SDM dan profesionalisme pariwisata.13. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata14. Pemantauan kesehatan hewan yang dikonsumsi masyarakat.15. Peningkatan keanekaragaman industri tanaman pertanian.16. Monitoring peredaran daging di pasar-pasar tradisional secara rutin dan terjadwal.17. Pemantauan higienes dan halal makanan yang berbahan daging di Hotel, Rumah Makan, dan Warung Makan di Kota Sukabumi18. Melaksanakan evaluasi dan monitoring di sektor PAD.19. Kajian potensi riil PAD dan peningkatan implementasi dari hasil kajian tersebut secara transparan yang dilakukan oleh tim independen.20. Sistem Pendapatan dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran diupayakan secara <i>online</i>.21. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi apabila regulasi tentang penghapusan PBB dan BPHTB jadi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.22. Evaluasi dan laporan hasil PAD dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		<p>penggunaan secara periodik (per Triwulan) kepada DPRD.</p> <ol style="list-style-type: none">23. Menumbuhkembangkan minat masyarakat untuk berwirausaha.24. Proteksi terhadap keberadaan industri kecil dan menengah yang ada di Kota Sukabumi serta evaluasi dan memperketat kontrol terhadap produk-produk impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.25. Pembangunan tempat pameran yang memadai untuk usaha-usaha yang ada di Kota Sukabumi maupun di Luar Kota Sukabumi.26. Monitoring dan antisipasi terhadap kenaikan harga, mutu, dan penyediaan sembilan bahan pokok.27. Membuka dan memperluas akses pemasaran baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.28. Peningkatan pengawasan dan pembinaan pasar tradisional.29. Perlindungan bagi pelaku pasar tradisional agar terjaga eksistensinya terhadap persaingan pasar modern.30. Penataan dan penertiban pasar yang beralih fungsi.31. Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar tradisional secara optimal, terutama terkait jaringan instalasi listrik di Pasar-Pasar tradisional secara keseluruhan.32. Mengoptimalkan Pendapatan pasar tradisional.33. Pemantauan perkembangan pasar Kreatif sehingga diharapkan ada dampak yang positif terhadap pasar Tradisional.
6	penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19	1. Penanganan <i>Covid-19</i> termasuk penyediaan APD, tempat tidur, pembangunan sarana prasarana kesehatan dan pengadaan mobil siaga desa;

Pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023. Pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang ada di seluruh perangkat daerah juga melalui program unggulan atau janji tahunan kepala daerah yang keseluruhannya dalam rangka mengimplementasikan 6 (enam) program prioritas pembangunan Tahun 2023 yang pada akhirnya



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023.

Selanjutnya akan digambarkan program pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 pada setiap misi, serta kaitannya dengan prioritas pembangunan daerah dan program unggulan atau janji tahunan kepala daerah sebagaimana yang dimanahkan dalam perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 - 2023.



Tabel 4.11

Keterkaitan Misi, dengan Prioritas Pembangunan, Program Pembangunan dan Program Unggulan /Janji Tahunan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM UNGGULAN KDH	PROGRAM PEMBANGUNAN	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERKAITAN MISI
1	Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia	1 Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, melalui: a) Program peningkatan kualitas lembaga keagamaan b) Program gerakan magrib mengaji c) Program gerakan subuh berjamaah d) Program pembiasaan akhlakul karimah e) Program peningkatan toleransi f) Program family straightening (pelatihan pranikah, pelatihan parenting, konseling keluarga) g) Program promosi kota halal friendly	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra Sekretariat Daerah	Misi 1
		2 Program Peningkatan Literasi	Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Misi 1
		3 Udunan <i>Online</i> di dukung oleh Forum Silih Asih Silih Asuh	Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Misi 1
		4 Program <i>Students Camp</i>	Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Misi 1



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM UNGGULAN KDH		PROGRAM PEMBANGUNAN	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERKAITAN MISI
2	peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi	5	Program <i>Sukabumi Participatory Responder</i> atau <i>SUPER</i>	Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Misi 4
3	Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat	6	Program Optimalisasi Puskesmas: a) Home care b) Ambulans SIGAP c) Penyediaan dokter spesialis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Misi 1
		7	Program Rumah Singgah	Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Misi 1
		8	<i>Kelurahan Sport Center</i>	Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Misi 1
4	Peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan	9	Program Revitalisasi Pedestrian	Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Misi 2
5	Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	10	Program Sukabumi <i>KECE</i>	Pengembangan UMKM	Diskumindag	Misi 3
		11	Program Kredit Anyelir	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil	Diskumindag	Misi 3



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM UNGGULAN KDH		PROGRAM PEMBANGUNAN	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERKAITAN MISI
				dan usaha mikro (UMKM)		
		12	Program <i>Little Sukabumi</i>	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Diskumindag	Misi 3
		13	Program <i>Sukabumi Creative Hub</i>	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda dan Olahraga	Misi 3
		14	Program Pendidikan Vokasi	Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	Misi 1
		15	Program <i>Sukabumi Artist Association</i>	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda dan Olahraga	Misi 3
6	Penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19	1	Sektor Kesehatan		Dinas Kesehatan	Misi 1
		2	Sektor Sosial		Dinas Sosial	Misi 1
		3	Sektor Ekonomi		Diskumindag Dispora	Misi 3

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022



Secara rinci keterkaitan antara program prioritas daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 dengan program unggulan/janji tahunan kepala daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia

a. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

Pencapaian Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk mewujudkan pilar religius dapat dicapai dengan melaksanakan amanah misi pertama yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.

Tujuan misi pertama khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia adalah untuk mewujudkan pemerintahan, masyarakat dan pelaku usaha yang baik dalam melaksanakan kehidupan beragama.

Indikator tujuan dan target yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 yaitu :

- 1) Persentase masyarakat yang mempunyai sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, dengan target 90 %
- 2) Persentase masyarakat yang bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dengan target 100 %
- 3) Persentase masyarakat yang selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain dengan target 100 %.

Untuk merealisasikan pencapaian tujuan misi pertama khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia direncanakan oleh Perangkat Daerah melalui program rutin Perangkat Daerah, program inovasi Perangkat Daerah dan program yang dapat mempercepat pencapaian target yaitu:

a) Program peningkatan kualitas lembaga keagamaan

Dengan kegiatan antara lain : peningkatan kualitas manajemen, peningkatan fasilitas keagamaan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan basis ekonomi



b) Program gerakan magrib mengaji

Adalah program pemerintah dalam meningkatkan syiar keagamaan serta ketaqwaan, yang dahulu sudah menjadi kebiasaan masyarakat namun dikhawatirkan terjadi perubahan pola perilaku dan sikap di tengah masyarakat.

c) Program gerakan subuh berjamaah

Adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sasaran program adalah masyarakat dan Aparatur Sipil Negara untuk dapat hadir setiap Jumat subuh di Mesjid Agung dan Ahad subuh berjamaah di Mesjid Al- Ikhlas di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sukabumi dan di Masjid atau Mushola di lingkungan masyarakat sekitar.

d) Program pembiasaan akhlakul karimah

Akhlak memiliki peranan penting dalam membangun hubungan, akhlak yang baik akan memancarkan energi positif yang bersumber dari yang Maha. Akhlak merupakan hasil dari pengetahuan, sikap dan perilaku yang dilatih terus menerus. Ruang lingkup program ini adalah pembiasaan dalam hubungan manusia dan dirinya, hubungan manusia dengan Tuhan-nya, hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.

e) Program peningkatan toleransi

Setiap masyarakat memiliki kebebasan dan mengamalkan agama yang dianutnya. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam keberagaman merupakan hal penting dalam menjaga modal sosial. Komunikasi yang intens dan berkualitas adalah strategi utama dalam mewujudkan kualitas toleransi. Ruang lingkup toleransi mencakup secara hubungan struktural sosial dan kultural sosial. Kebersamaan dan keberagaman dalam nilai-nilai universal.

f) Program *family straightening* (pelatihan pranikah, pelatihan parenting, konseling keluarga)

Keluarga adalah lingkup sosial terkecil dan awal terbentuknya ikatan sosial, struktur sosial yang paling terbanyak adalah keluarga, keluarga juga menjadi pembangun struktur sosial yang besar, sehingga untuk memiliki struktur sosial yang kuat dan berkarakter, maka keluarga salah satu pintu strategis untuk melakukan perubahan. Keluarga menjadi objek dari program ini dengan ruang lingkup saat akan



mengikat keluarga (pra nikah) dan saat membangun keluarga (pasca menikah). Arah program ini adalah bagaimana sebelum menikah memiliki pengetahuan, sikap dan nilai yang luhur dalam berkeluarga. Saat sudah menikah memiliki sikap dan perilaku membangun “rumah ku, surga ku” sehingga keluarga adalah tempat yang menyenangkan untuk setiap anggota keluarga, dan ketika ada permasalahan keluarga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan akhlak dan nilai yang baik.

g) Program promosi kota halal *friendly*

Kota merupakan arena pertemuan dari semua strata sosial, Kota Sukabumi memiliki koneksi langsung dengan wilayah rural (pedesaan) dan wilayah urban (perkotaan). Arena kota menjadi pertemuan nilai-nilai rural dan urban, dengan kondisi seperti itu maka kota harus menjadi penjaga nilai yang kuat, nilai yang kuat berasal dari nilai Ilah yang diturunkan dalam ranah sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup sandang, pangan dan papan merupakan arena dari program ini.

b. Program Peningkatan Literasi

Program Peningkatan Literasi merupakan program untuk mengembangkan budaya literasi, mengajak warga untuk semakin gemar membaca dengan mengadakan acara-acara menarik di Daerah yang dilaksanakan oleh penggerak perpustakaan keliling.

c. Udunan Online di dukung oleh Forum Silih Asih Silih Asuh

Forum Silih Asih Silih Asuh atau Udunan Online, merupakan program untuk mendorong kesetiakawanan warga kota untuk saling membantu, silih asih silih asuh dalam menyelesaikan

masalah yang ada di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan secara kewenangan maupun secara anggaran sehingga masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi untuk berkontribusi secara langsung.

Pemerintah mendorong secara optimal kepedulian masyarakat serta kesetiakawanan sosial. Hal ini penting dilakukan karena dengan dua prinsip tersebut masyarakat diajak untuk terbiasa dengan model partisipatif dalam bermasyarakat. Partisipasi jelas diperlukan dalam menumbuhkan kembangkan kemajuan kota tempat tinggalnya.



Mekanisme *online* digunakan dalam program ini adalah untuk mendorong prinsip transparansi serta kecepatan dalam pelaksanaannya. Selain itu melalui program ini, masyarakat perkotaan yang telah relatif terbiasa dengan iklim digitalisasi akan mendapatkan kemudahan dalam berpartisipasi serta ikut peduli dengan anggota masyarakat kota lainnya yang tengah dalam kondisi kesulitan.

d. Program *Students Camp*

Program *Students Camp*, merupakan program pendidikan holistik yang bertujuan melakukan pembentukan karakter bagi siswa SMP, SMA dan SMK sederajat. Program ini diharapkan akan melahirkan pelajar-pelajar yang dapat berperan sebagai agen-agen perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungannya. Program ini dirancang untuk memperkaya para peserta dengan pelatihan-pelatihan yang merangsang pertumbuhan jiwa kepemimpinan dan wawasan pengetahuan lingkungan para peserta.

Perlu kiranya diketahui bahwa program ini titik tolaknya ada pada bagaimana melakukan pelatihan pada siswa-siswa pilihan yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyebarkan nilai-nilai yang baik bagi siswa-siswa lainnya dari hasil pelatihan.

Pelatihan ini diharapkan untuk membangun rasa persaudaraan antar para pelajar di Daerah, sehingga diharapkan mampu menekan dan meredusir masalah-masalah kenakalan pelajar serta berbagai perilaku negatif lainnya

2. peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi

Program *Sukabumi Participatory Responder* atau *SUPER*, merupakan sebuah aplikasi resmi milik Pemerintah Daerah yang terintegrasi langsung dengan e-LAPOR yang menawarkan kemudahan bagi warga untuk berinteraksi dengan Pemerintah Daerah baik untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, pengaduan atas pelayanan publik, pertanyaan, dan lain sebagainya.



3. Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat

a. Program Optimalisasi Puskesmas

Program Optimalisasi Puskesmas, merupakan program untuk peningkatan mutu dan layanan Puskesmas di setiap kecamatan dengan menyediakan dokter spesialis, peralatan medis, layanan BPJS nonstop 24 jam, dan ambulan SIGAP. Dengan tambahan satu perawat di setiap kelurahan atau *home care* sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi pelayanan warga yang memerlukan pengobatan, pertolongan medis di setiap kecamatan agar terhindar dari penumpukan pasien di RSUD sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih optimal.

Program ini turut mengimbangi pertumbuhan Daerah yang cukup signifikan. Kebutuhan penduduk perkotaan yang terus bertambah dari sisi kuantitas penduduk menuntut perimbangan dari sisi kualitas dan fasilitas sebuah kota. Khusus di bidang kesehatan, program ini diupayakan pemerintah untuk mendorong perimbangan itu terjadi serta upaya optimalisasi.

Program ini dirancang dengan basis puskesmas di setiap kewilayahan, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan diharapkan dapat mengalami peningkatan. Daerah memiliki harapan bahwa peningkatan ini tidak hanya berdampak bagi peningkatan pelayanan kesehatan saja namun juga berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Daerah secara lebih menyeluruh.

b. Program Rumah Singgah

Pencapaian Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk mewujudkan pilar sejahtera dapat dicapai dengan melaksanakan amanah misi pertama yaitu mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.

Tujuan Misi pertama khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas adalah untuk mewujudkan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan memenuhi kebutuhan menjaga kesehatan secara rutin.

Untuk merealisasikan pencapaian tujuan misi pertama khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan sehat direncanakan



oleh Perangkat Daerah melalui program rutin Perangkat Daerah, program inovasi Perangkat Daerah dan program yang dapat berkontribusi dalam pencapaian target yaitu dengan program unggulan rumah singgah.

Program rumah singgah merupakan program untuk menyediakan rumah singgah dan tenaga administrasinya bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memeriksakan kesehatan, pengobatan dan perawatan medis setelah dirujuk ke Rumah Sakit di sekitar Kota Bandung.

Program ini dirancang dengan tujuan untuk mengurangi beban dan memudahkan masyarakat Daerah ketika harus memenuhi kebutuhan pengobatan ke rumah sakit rujukan di Kota Bandung khususnya RS Hasan Sadikin. Kesulitan-kesulitan yang sering timbul akibat lokasi pengobatan jauh dari tempat tinggalnya dan tidak mampu untuk membiayainya.

Dengan adanya rumah singgah yang disertai tenaga administrasi maka fungsi fasilitas ini tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara saja bagi pasien yang hendak merujuk namun hal-hal yang biasanya menjadi kesulitan khususnya persoalan administratif pada rumah sakit rujukan dapat ditanggulangi dengan baik.

c. *Kelurahan Sport Center,*

Kelurahan Sport Center merupakan program penyediaan ruang terbuka publik dan fasilitas olahraga yang berkualitas di setiap kelurahan.

4. Peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan

a. Program Revitalisasi Pedestrian

Pencapaian Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk mewujudkan pilar nyaman dapat dicapai dengan melaksanakan amanah misi kedua yaitu mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Tujuan misi kedua khususnya dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan adalah untuk mewujudkan kenyamanan bagi pedestrian (orang yang menggunakan fasilitas trotoar). Indikator tujuan dan target yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 yaitu index kenyamanan dengan target 23.5 poin.



Untuk merealisasikan pencaian tujuan misi kedua khususnya dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan direncanakan oleh Perangkat Daerah melalui program rutin Perangkat Daerah, program inovasi Perangkat Daerah dan program yang dapat berkontribusi dalam pencapaian target yaitu dengan program unggulan revitalisasi pedestrian.

Program unggulan revitalisasi pedestrian yaitu merupakan konsep penataan integrasi kawasan lapang merdeka sehingga dapat menjadi ruang terbuka publik yang lebih nyaman serta dapat menjadi salah satu *landmark* kota; selain kawasan terintegrasi lapang merdeka dan alun-alun juga diprioritaskan untuk revitalisasi pedestrian yang dapat merubah wajah Daerah atau dilokasi – lokasi pintuk masuk Daerah.

5. Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan

a. Program Sukabumi KECE

Pencapaian Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk mewujudkan pilar sejahtera dapat dicapai dengan melaksanakan amanah misi ketiga yaitu mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar.

Tujuan misi ketiga khususnya dalam mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor ekonomi kreatif. Indikator tujuan dan target yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 yaitu : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dengan target 4-5 Point.

Untuk merealisasikan pencaian tujuan misi ketiga khususnya dalam mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor ekonomi kreatif, direncanakan oleh Perangkat Daerah melalui program rutin Perangkat Daerah, program inovasi Perangkat Daerah dan program yang dapat berkontribusi dalam pencapaian target yaitu dengan program unggulan Sukabumi Kece.

Program unggulan Sukabumi Kece merupakan program pemberdayaan anak muda melalui pelatihan dan pendampingan wira usaha baru, sehingga terbentuk wira usaha baru dengan jenis bidang usaha yang terbentuk.



b. Program Kredit Anyelir

Program Kredit Anyelir merupakan program bantuan permodalan yang terintegrasi dengan program Sukabumi Kece, diberikan kepada wirausaha baru atau WUB yang telah dinyatakan lulus pelatihan.

c. Program *Little Sukabumi*

Program *Little Sukabumi* merupakan program pusat layanan informasi, promosi, pusat belanja, dan *display* produk unggulan Daerah yang bersinergi dengan daerah lain yang berfungsi sebagai potensi pasar bagi produk unggulan Daerah

d. Program *Sukabumi Creative Hub*

Program *Sukabumi Creative Hub* merupakan program pembangunan ruang kreasi bagi warga dengan menyediakan studio foto, televisi, *fashion*, ruang ICT, galeri seni, serta bioskop mini untuk pemutaran film karya anak bangsa, ruang belajar, kafetaria, radio komunitas anak muda, studio rekaman, dan lain sebagainya.

e. Program Pendidikan Vokasi

Program Pendidikan Vokasi, merupakan program pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan keahlian tertentu atau vokasi yang relevan dengan dunia kerja dan usaha.

Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa salah satu kualifikasi penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia adalah pendidikan vokasi, dimana kualifikasi pendidikan ini menekankan pada penguasaan keahlian terapan tertentu.

Dalam program ini dirancang untuk lebih dapat menyalurkan para calon tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi untuk dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang dipelajarinya di masa sekolah. Titik beratnya ada pada upaya pemerintah untuk mempertemukan para lulusan pendidikan vokasi dengan dunia kerja. Daya serap bagi para lulusan pendidikan vokasi ini didorong dengan mengadakan dan menciptakan ruang komunikasi yang lebih intens berupa kegiatan-kegiatan bursa kerja.

Diharapkan dengan upaya-upaya banyaknya ruang komunikasi yang diciptakan maka para lulusan pendidikan vokasi lebih memiliki peluang untuk menemukan lapangan pekerjaannya. Serta di sisi lain perusahaan-perusahaan di Daerah ataupun di luar itu mendapatkan



kemudahan dalam memenuhi kebutuhan SDM sesuai bidang yang mereka butuhkan.

f. Program Sukabumi Artist Association,

Program *Sukabumi Artist Association* merupakan program yang menjembatani seniman dengan pihak-pihak perusahaan agar karya-karya para seniman di Daerah bisa terpublikasikan, dikenali, dan dinikmati masyarakat yang tidak saja memiliki nilai estetis namun juga memiliki nilai bisnis

6. Penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19

Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Menyikapi kondisi tersebut maka Daerah telah menerbitkan beberapa regulasi dalam rangka penanganan pandemi covid-19 yakni:

- Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/90-BPBD/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease-19* di Kota Sukabumi pada bulan April 2020;



- Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid19 di Wilayah Kota Sukabumi;
- Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid19 di Kota Sukabumi.

Prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023. Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan tersebut dilakukan melalui 25 (dua puluh lima) strategi dan 71 (tujuh puluh satu) arah kebijakan yang tersebar ke dalam 6 (enam) prioritas pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

1. peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia;
Kebijakan peningkatan SDM berkualitas, Ketahanan Keluarga dan Sosial Kemasyarakatan Tahun 2022 diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda dan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial;
2. peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi;
Kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik, Penataan Kelembagaan dan Kinerja Perangkat Daerah diarahkan pada peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola



kependudukan, inovasi perangkat daerah serta Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Sukabumi sesuai peraturan perundang-undangan dan Nomenklatur Program Kegiatan Baru Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Kebijakan yang dilakukan tersebut seluruhnya ditujukan dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi untuk menghasilkan *good governance*.

3. peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat;

Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah kewajiban dari pemerintah untuk memenuhinya, bahkan untuk memastikan pelayanan tersebut pemerintah menjadikannya sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Kebijakan peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat diarahkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan; Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing; pemulihan pariwisata dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

4. peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan;

Kebijakan Penataan Infrastruktur dan Tata Kota diarahkan pada Peningkatan layanan keselamatan dan keamanan pejalan kaki dan akses transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan dan Penataan Trotoar.

Pelaksanaan kebijakan penataan infrastruktur tersebut mempertimbangkan pada kebijakan pemantapan kualitas



lingkungan hidup dan diarahkan pada penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; pengelolaan persampahan: pengelolaan air limbah dan tinja.

5. pengembangan ekonomi yang berkelanjutan;

Kebijakan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan ditujukan untuk penguatan daya saing ekonomi daerah serta diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama juga berkenaan dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi *Covid-19*. Program pengembangan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi dan pariwisata serta mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.

6. penanganan dan pemulihan dampak pandemi *Covid-19*

Dengan memperhatikan penyebaran pandemi Coronavirus-2019 (*Covid-19*) penanggulangan akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu sebagai upaya Pemerintah Daerah yang responsif dan adaptif untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi pasca pandemi *Covid-19*. Untuk itu perlu kiranya memperhatikan beberapa aspek penting bagi terwujudnya percepatan pemulihan sosial dan ekonomi pascapandemi *Covid-19* diantaranya:

- 1) sejalan dengan kebijakan pusat dan provinsi,
- 2) sejalan dengan peraturan perundang-undangan,
- 3) memperhatikan pembagian kewenangan urusan antar pusat, provinsi dan daerah,
- 4) memperhatikan asas kemanfaatan,
- 5) mengedepankan kerjasama multi pihak secara kolaboratif, dan
- 6) memperhatikan efisiensi, efektifitas dan akuntabel penggunaan anggaran.



Dalam melaksanakan program prioritas pembangunan yang telah ditentukan, maka harus dilakukan mapping dengan program pembangunan yang dilaksanakannya serta dikaitkan dengan sasaran, indikator serta strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Kesesuaian sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta pagu anggaran pada perangkat daerah disajikan pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.12

**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pada Prioritas Pembangunan 1, Peningkatan Sumber Daya Manusia atau SDM Yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama, Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	78.02	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penerapan nilai nilai agama dan wawasan kebangsaan	Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Persentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum dan ham serta dokumentasi hukum 3. Persentase kegiatan keagamaan swadaya masyarakat	1. persen 2. persen 3. persen	1. 90 2. 100 3. 80	12,182,124,190	SETDA
							Meningkatkan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase keterlibatan komponen masyarakat dan aparat dalam pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan	persen	100	199,104,500	BAKESBANG POL
							Meningkatkan aktivitas keagamaan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan	persen	100	743,529,000	SATPOL P3K



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Meningkatkan wawasan dan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat						
							Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda						
							Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban						
		Terwujudnya Masyarakat Yang Kreatif Dan Berbudaya	Indeks Kota Kreatif (IKK)	Angka	48.8	1. Meningkatkan Kolaborasi antar Stakeholders Penta Helix Dalam Pengembangan Kota Kreatif	Meningkatkan penguatan seni dan budaya lokal	Persentase Gangguan Kamtrantibmas Yang Dapat Diselesaikan	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1. persen 2. persen	1. 31.26 2. 29.24	1,084,326,898	DISPORAPAR
							Meningkatkan Kreasi masyarakat	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestariannya Cagar Budaya	persen	78	26,451,800	DISDIKBUD



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olah raga	Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga						
							Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Angka	91.25	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi Gender	Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penguatan dan Pengembangan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah dan Penyedia Layanan	persen	40	426,769,700	DP2KBP3A
							Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	persen	100	356,068,300	DP2KBP3A
							Meningkatkan Kapasitas SDM dan Pengembangan Sistem Informasi Gender	Program Perlindungan Khusus Anak	persentase layanan perlindungan khusus anak	persen	85	401,666,500	DP2KBP3A



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	kategori/tingkatan	madya	20,940,000	DP2KBP3A
		Meningkatnya Ketahanan Keluarga Dan Kesejahteraan Sosial	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	67.96	Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga melalui Penguatan Kebijakan, Pengendalian Penduduk dan ketahanan ekonomi keluarga	Menyusun Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Keluarga Sejahtera II	persen	76	2,039,839,500	DP2KBP3A
							Optimalisasi ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1. Meningkatkan Cakupan Kesertaan Ber-KB 2. Usia Nikah Pertama 3. Meningkatkan Cakupan Peserta KB MKJP 4. Cakupan PUS yg Belum Ber KB (Unmetneed)	1. persen 2. tahun 3. persen 4. persen	1. 67,90 2. 21,32 3. 23.55 4. 11,12	2,695,258,975	DP2KBP3A



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

						Meningkatkan pemberian pelayanan sosial dengan peran serta dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dalam rangka penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan/ atau terdampak Covid-19	Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS) 2. PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS) 3. Persentase peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dlm pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial	1. persen 2. persen 3. persen	1. 45 2. 40 3. 20	1,003,877,200	DINSOS
--	--	--	--	--	--	---	---	-----------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------	---------------	--------



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan Sosial melalui pemberdayaan masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial (gepeng/ gelandangan) diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Persentase PMKS lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA) diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1. persen 2. persen	1. 100 2. 100	421,617,500	DINSOS
							Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang holistik dan berkelanjutan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Persentase anak terlantar yang mendapatkan layanan perlindungan sosial 2. Persentase data fakir miskin yang dikelola	1. persen 2. persen	1. 100 2. 100	718,955,000	DINSOS
								Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan penanganan sosial pasca bencana	persen	100	94,656,250	DINSOS
Jumlah												22,415,185,313	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022



Tabel 4.13

**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pada Prioritas Pembangunan 2, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Implementasi Reformasi
Birokrasi yang Inovatif Berbasis Teknologi Informasi**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Skor	79	Implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Perluasan implementasi sistem terintegritas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase layanan keprotokolan 2. Persentase perangkat daerah yang mengikuti penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan memenuhi aspek penilaian 3. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja tepat waktu	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen	1. 100 2. 50 3. 80 4. 100	34,797,826,673	SETDA



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 2. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	1. persen 2. persen	1. 100 2. 100	1,106,059,611	BAPPEDA



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang perekonomian dan sumber daya alam 2. persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang infrastruktur dan kewilayahan 3. persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1. persen 2. persen 3. persen	1. 100 2. 100 3. 100	1,644,377,900	BAPPEDA
								Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti 2. tindak lanjut temuan BPK RI 3. tindak lanjut temuan APIP	1. persen 2. persen 3. persen	1. 70 2.45 3. 45	320,957,000	INSPEKTOR AT



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	6,502,916,469	BKPSDM
			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP		Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan APBD selama satu tahun, ketepatan waktu dalam penyampaian APBD dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	persen	93	11,800,783,928	BKPD
							Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib	persen	90	1,053,301,800	BKPD
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2.91	peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi pelayanan	meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik khususnya di era pandemi covid-19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	378,715,354,725	DINKES
							penguatan pelayanan terpadu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	4,676,868,343	DINSOS



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							peningkatan profesionalisme ASN	Program Pemberdayaan Sosial	PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	1. persen 2. persen 3. persen	1. 45 2. 40 3. 20	1,003,877,200	DINSOS
							penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	90	4,419,569,238	DPMPTSP
								Program Pendaftaran Penduduk	1. Cakupan Kepemilikan KTP-el 2. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga 3. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	1. persen 2. persen 3. persen	1. 100 2. 100 3. 80	34,673,700	DISDUKCA PIL



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Program Pencatatan Sipil	1. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun 2. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian 3. Cakupan Kepemilikan akta Perkawinan 4. Cakupan Kepemilikan akta Perceraian	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100	44,491,200	DISDUKCA PIL
								Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	persen	100	30,250,000	DISDUKCA PIL
								Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Penerbitan Buku Profil Kependudukan	persen	100	9,375,000	DISDUKCA PIL
								Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	angka	59	377,506,000	DISPUSIPDA
								Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	persen	92	16,047,035,075	KECAMATAN



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi Dan Teknologi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	Angka	2.4	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan Integrasi Penerapan SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya transparansi informasi publik dalam rangka penyelenggaraan pembangunan	persen	80	515,563,250	DISKOMINF O
							Meningkatkan Sumber Daya di Sektor SPBE	Program Aplikasi Informatika	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik	persen	90	121,239,700	DISKOMINF O
							Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat						
							Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SUPER (Sukabumi Participatory Responder)						
		Meningkatnya Pendayagunaan Inovasi Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Indeks Daya Saing Daerah	predikat	tinggi	Penguatan ekosistem inovasi guna meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	Meningkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan inovasi daerah melalui fasilitasi dan pendampingan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1. Persentase Inovasi Daerah yang Terfasilitasi 2. Presentase penelitian dan pengkajian dengan melibatkan akademisi	1. persen 2. persen	1.45 2. 70	549,910,500	BAPPEDA



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Meningkatkan pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional						
							Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi						
							Implementasi pemanfaatan inovasi						
Jumlah												463,771,937,312	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022



Tabel 4.14

**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pada Prioritas Pembangunan 3, Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar untuk Kesejahteraan Masyarakat**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.317	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan 2. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular 3. Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna 4. Persentase pemenuhan logistik kesehatan sesuai standar 5. Persentase pencapaian program promotif-preventif kesehatan masyarakat	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen 5. persen	1. 100 2. 100 3. 4. 100 5. 100	53,045,218,438	DINKES



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan dalam rangka penanganan dan pemulihan pandemi covid-19						
							Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan						



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

		Meningkatnya Ketersediaan Layanan Pendidikan Yang Bermutu Dan Merata	Indeks Pendidikan	Angka	69.83	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar 2. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama 3. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 4. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaran 5. Persentase GTK yang berkualifikasi DIV/S1 6. Persentase GTK yang bersertifikasi 7. Jumlah GTK berprestasi	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen 5. persen 6. persen 7. jumlah	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100 5. 6. 91.26 7. 56.33 8. 7.8	82,995,495,700	DISDIKBUD
--	--	--	-------------------	-------	-------	---	---	--------------------------------	---	---	--	----------------	-----------



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas						
							Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM pendidikan						
							mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan berkarakter						
		Terwujudnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	Point	0.53	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana	meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	1. layanan informasi rawan bencana 2. layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1. persen 2. persen 3. persen	1. 94 2. 94 3. 94	365,928,300	BPBD
							menyusun kebijakan dalam peningkatan kapasitas penanganan bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Persentase Pengurangan Resiko Bahaya Kebakaran 2. Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran 3. Persentase Penyelamatan Non Kebakaran	1. persen 2. persen 3. persen	1. 100 2. 100 3. 100	58,470,000	SATPOL P3K



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Merubah paradigma penanggulangan bencana dari konsep emergency response menjadi preventive response						
											Jumlah	136,465,112,438	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022



Tabel 4.15

**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pada Prioritas Pembangunan 4, Peningkatan Dukungan Infrastruktur untuk Pembangunan**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan	Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	80	Mendorong terciptanya pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1. Jalan dengan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai / Persentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan / Jumlah penyediaan kelengkapan jalan 2. Kenaikan jumlah kendaraan yang dapat pelayanan parkir / Jumlah kendaraan yang dapat ditampung pada lahan parkir / Gedung Parkir 3. Kenaikan jumlah kendaraan yang dapat dilayani pada uji keur / Memaksimalkan kualitas kendaraan yang laik operasi / Gedung pkb 4. Kenaikan jumlah penumpang SAUM / Jumlah Penumpang pada SAUM / Persentase pelaksanaan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) 5. Ketersediaan PJU / Jumlah Sarana dan Prasarana PJU dalam kondisi baik/ Jumlah penyediaan dan	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen 5. persen	1. 83.21 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100	3,303,724,800	DISHUB



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU				
							meningkatkan pembangunan infrastruktur diwilayah yang tertinggal	Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase Panjang jalan kota kondisi yang Mantap	persen	83.21	28,818,931,887	DPUTR
							meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pembangunan infrastruktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Terbangun dan terpeliharanya drainase lingkungan permukiman	M	1500	-	DPUTR
			Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	40	Mendorong percepatan legalisasi kebijakan infrastruktur dan penataan ruang	Menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan perencanaan tata ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Jumlah bangunan negara sesuai dengan standar kelayakan bangunan yang terbangun	persen	20	1,628,395,350	DPUTR
							Menyusun peraturan-peraturan terkait pembangunan infrastruktur dan penataan ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1. Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang terbangun dalam kondisi baik 2. Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	1. Jumlah 2. M	1. 9 2. 1500	2,534,876,004	DPUTR



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Persentase Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang 2. Persentase Jumlah Kesesuaian pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	1. persen 2. persen	1. 80 2. 50	318,170,000	DPUTR
								Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	98.9	11,553,197,000	DPUTR
		Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	point	59	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	meningkatkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Persentase pencapaian perencanaan lingkungan hidup 2. Persentase ketersediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	1. persen 2. persen	1. 100 2. 100	167,286,800	DLH
								Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase pengendalian pencemaran air 2. Persentase pengendalian pencemaran udara	1. persen 2. persen	1. 17 2. 80	174,489,900	DLH



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	persen	100	210,479,600	DLH
							meningkatkan pembangunan sanitasi dan pengendalian pencemaran	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 pada sampah spesifik yang terkendali	persen	11	8,745,000	DLH
							meningkatkan penyediaan lahan pemerintah untuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	persen	100	64,167,700	DLH



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							meningkatkan kapasitas sdm sektor lingkungan hidup	Program Pengelolaan Persampahan	1. Persentase penanganan kebersihan 2. Persentase pengurangan sampah kota	1. persen 2. persen	1. 74 2. 27	2,621,242,831	DLH
Jumlah												51,403,706,872	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022



Tabel 4.16

**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pada Prioritas Pembangunan 5, Pengembangan Ekonomi yang Berkelanjutan**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha Dan Investasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	1944	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana pelayanan serta dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar	Meningkatkan Investasi dan Penanaman Modal di daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	1.Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha 2. UMKM Naik Kelas; 3. Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang menerima Penguatan Permodalan; 4. Persentase Dokumen Pemantauan, Dokumen Penyaluran Kredit Anyelir, Dokumen Pelaksanaan Sukabumi Kece yang Tepat Waktu 5. Persentase Wirausaha Muda baru yang memperoleh Penguatan Permodalan; 6. jumlah Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Pameran	1. persen; 2. UMK; 3. UMK; 4. persen: 5. persen 6. produk	1. 100 2. 30 3. 100 4. 100 5. 80 6. 10	2,652,800,500	DISKUMIND AG



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Program Pengembangan Umkm	Jumlah Wirausaha Muda Baru yang terbentuk melalui Program Sukabumi KECE	jumlah	465	500,000,000	DISKUMIND AG
						Memperluas Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha	Meningkatkan informasi bursa tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	milyar	220	369,695,000	DPMPSTP
							Meningkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi	Program Promosi Penanaman Modal	Investor yang Berinvestasi	investor	70	72,741,250	DPMPSTP
							Mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau job fair	persen	90	50,000,000	DISNAKER
							Menciptakan Wirausaha muda Baru	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	persen	80	436,200,000	DISNAKER



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Mengembangkan Inkubator Bisnis khususnya dalam rangka pemulihan dampak pandemi covid-19	Program Hubungan Industrial	Persentase pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	persen	90	68,149,900	DISNAKER
							Mengembangkan Produk unggulan daerah						
		Meningkatnya Peran Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian Melalui Kemitraan Dengan Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, Dan Daerah Sekitar	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	persen	2	Meningkatkan kualitas Data, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan sarana prasarana Perdagangan serta dukungan Teknologi dan Informasi	Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan yang difasilitasi Pemasarannya melalui Pameran di Luar Kota Sukabumi	produk	10	-	DISKUMIND AG



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Meningkatkan perdagangan melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	Penataan Pedagang kaki Lima (PKL)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Jumlah Pengembangan dan Pembangunan Pusat-pusat Perdagangan 2. Persentase Pemanfaatan Profil, Prognosa, Informasi Harga dan Pengawasan Barang Penting/ Strategis 3. Persentase Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	1. unit 2. persen 3. persen	1. 0 1. 100 2. 100	4,263,750	DISKUMIND AG
								Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Jumlah Pengembangan dan Pembangunan Pusat-pusat Perdagangan; 2. Persentase Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita; 3. Jumlah Kawasan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL ;	1. unit; 2. persen; 3.kawasan	1. 0 2. 100 3. 1	1,105,311,250	DISKUMIND AG
		Meningkatnya Sektor Pariwisata Kreatif Melalui Kemitraan Dengan Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, Dan Daerah Sekitar	kontribusi pariwisata terhadap PDRB	persen	1.15-1.29	1. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata dan promosi wisata	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Subsektor ekonomi kreatif yang aktif	Jumlah	3	1,006,328,000	DISPORAPAR



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2. Meningkatkan pariwisata melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar	Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	persen	15	231,902,000	DISPORAPA R
						3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kolaborasi dan Harmonisasi dengan Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas kreatif, Pemerintah dan Media dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah.	Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital						
							Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas ekonomi kreatif						



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Meningkatkan peran ABCGM (Academic, Business, Community, Government and Media) Bussines dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah						
		Meningkatnya Pengembangan Usaha Dan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	persen	79.99	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam	Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Produksi padi 2. Luas panen 3. Persentase lembaga usaha tani yang menerapkan mekanisasi pertanian dengan baik 4. Tingkat pendayagunaan dan pemanfaatan fasilitas pengolahan hasil pertanian 5. Produksi daging 6. Luas lahan pertanian organik yang tersertifikasi 7. Jenis komoditas hortikultura yang didaftarkan registrasi kebun 8. Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha agribisnis di Kota Sukabumi	1. ton GKP 2. ha 3. persen 4. persen 5. ton 6. ha 7. jenis 8. persen	1. 18187 2. 2568 3. 70 4. 75 5. 5902.80 6. 6.15 7. 8 8. 10	195,077,300	DKP3



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Meningkatkan partisipasi pemilik lahan pertanian untuk bergabung dalam LP2B, Pemberian insentif, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia	Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B 2. Persentase ketersediaan data ketahanan pangan /pertanian 3. Persentase prasarana yang digunakan 4. Persentase peningkatan peserta Sekolah Agro di KAC	1. ha 2. persen 3. persen 4. persen	1. 44 2.100 3. 100 4.5	513,385,000	DKP3
								Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Persentase ketersediaan cadangan pangan pokok pemerintah 2. Angka kecukupan energi (kkal/kap/hari) dan Angka kecukupan protein (gram/kap /hari)	1. persen 2. kkal / kap / hari dan gram / kap / hari	1. 40 2.AKE : 2417 AKP : 107,1	799,121,750	DKP3
								Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Persentase penggunaan KTI dalam pembelian pupuk bersubsidi 2. Persentase luas lahan pertanian yang mengikuti AUTP	1. persen 2. persen	1. 90 2. 30	8,662,500	DKP3



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Provititas Budidaya Perikanan	angka	24,95	332,536,250	DKP3
								Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Angka ketersediaan cadangan pangan di masyarakat	ton	10	191,311,125	DKP3
								Program Penanganan Kerawanan Pangan	Ketersediaan data kerawanan pangan	persen	90	11,805,000	DKP3
Total Anggaran												8,549,290,575	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022



Tabel 4.17

**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pada Prioritas Pembangunan 6, Penanganan dan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.317	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan 2. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular 3. Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna 4. Persentase pemenuhan logistik kesehatan sesuai standar 5. Persentase pencapaian program promotif-preventif kesehatan masyarakat	1. persen 2. persen 3. persen 4. persen 5. persen	1. 100 2. 100 3. 4. 100 5. 100	53,045,218,438	DINKES
		Meningkatnya Ketahanan Keluarga Dan Kesejahteraan Sosial	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	67.96	Meningkatkan pemberian pelayanan sosial dengan peran serta dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dalam rangka penanggulangan kemiskinan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan/	Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial (gepeng/gelandangan) diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Persentase PMKS	1. persen 2. persen	1. 100 2. 100	421,617,500	DINSOS



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							atau terdampak Covid-19		lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA) diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				
							Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang holistik dan berkelanjutan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Persentase anak terlantar yang mendapatkan layanan perlindungan sosial 2. Persentase data fakir miskin yang dikelola	1. persen 2. persen	1. 100 2. 100	718,955,000	DINSOS



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha Dan Investasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	1944	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana pelayanan serta dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar	Meningkatkan Investasi dan Penanaman Modal di daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	1.Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha 2. UMKM Naik Kelas; 3. Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang menerima Penguatan Permodalan; 4. Persentase Dokumen Pemantauan, Dokumen Penyaluran Kredit Anyelir, Dokumen Pelaksanaan Sukabumi Kece yang Tepat Waktu 5. Persentase Wirausaha Muda baru yang memperoleh Penguatan Permodalan; 6. jumlah Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Pameran	1. persen; 2.UMK; 3. 100 UMK; 4. 100 persen; 5. persen 6. produk	1. 100 2. 30 3. 100 4. 100 5. 80 6. 10	2,652,800,500	DISKUMINDAG
							Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)						



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Srategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya Sektor Pariwisata Kreatif Melalui Kemitraan Dengan Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, Dan Daerah Sekitar	kontribusi pariwisata terhadap PDRB	persen	1.15-1.29	1. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata dan promosi wisata	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata	Program Pengembangan Umkm	Jumlah Wirausaha Muda Baru yang terbentuk melalui Program Sukabumi KECE	orang	465	500,000,000	DISKUMINDAG
											Jumlah	57,338,591,438	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Prioritas pembangunan Kota Sukabumi selanjutnya diterjemahkan ke dalam program prioritas pembangunan, serta dijabarkan kembali melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4.18
Penjabaran Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Kedalam Program
Prioritas, Kegiatan Pembangunan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.170.000.000	SETDA
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	127.137.500	BAKESBAN GPOL
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	81.748.000	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100.205.000	SATPOL P3K



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	19.999.900	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaa n	Penyadaran , Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaa n Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	68.430.000	DISPORAP AR
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Pemanfaatan Cagar Budaya	52.903.800	DISDIKBUD
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaa n Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	11.280.000	DP2KBP3A
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	162.500.000	
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase peningkatan pelayanan pengaduan perlindungan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	176.702.600	DP2KBP3A



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	70.383.500	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	58.289.600	DP2KBP3A
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.805.200	
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	50.885.000	DP2KBP3A
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.085.000	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	90.697.400	DP2KBP3A
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	161.464.750	DP2KBP3A
		Program Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4.500.000	DINSOS
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	567.300.000	
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	117.631.250	DINSOS



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			772.850.000	DINSOS
		Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	22.875.000	DINSOS
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	7.687.500	
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	45.812.500	
2	peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.940.100	SETDA
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	124.999.500	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	145.900.000	BAPPEDA



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	156.060.000	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	536.941.400	BAPPEDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	206.200.000	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	279.706.200	
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	268.310.000	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20.202.000	INSPEKTORAT
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	51.342.000	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	11.658.000	
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12.712.000	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	220.869.800	BPKPD



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Pelaporan Keuangan Daerah	Pengeluaran Kas Daerah		
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	232.847.400	
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	256.292.000	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	57.250.000	BPKPD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	285.000.000	DINKES
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.500.000	DINSOS
		Program Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4.500.000	DINSOS
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.404.100	DPMPSTP
		Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	16.312.500	DISDUKCAPIL
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90.780.000	
		Program Pencatatan Sipil	Pelaksanaan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	50.362.500	DISDUKCAPIL



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	41.553.675	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	44.112.750	DISDUKCAPIL
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	18.821.250	DISDUKCAPIL
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	52.800.000	DISPUSIPDA
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	159.632.000	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.486.793.800	KECAMATAN
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	30.168.750	DISKOMINFO
		Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	95.325.000	DISKOMINFO
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah			1.074.417.600	BAPPEDA



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
5	peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	1.333.081.944	DINKES
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.709.651.056	
			Meningkatnya pelayanan kesehatan UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	757.569.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	82.940.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	290.364.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	484.455.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	64.353.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	88.190.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	21.400.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	23.075.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	32.409.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	172.935.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	4.184.264.800	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	520.229.000	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	933.093.200	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.157.250.000	DISDIKBU D
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	22.689.160.000	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.657.522.000	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6.445.300.000	
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	14.038.200.000	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	831.338.000	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	395.000.000	
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.854.000.000	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	214.546.400	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.534.620.000	
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.024.500.000	
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	60.382.500	BPBD
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	93.750.000	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			an Terhadap Bencana			
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000	
				Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	82.206.600	
				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	157.537.500	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	262.500.000	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.345.000	SATPOL P3K
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	13.125.000	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	48.358.600	
4	peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	83.743.925	DISHUB
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	83.743.925	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Program Penyelenggaraan Jalan			31.628.989.453	DPUTR
		Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	76.471.000	DPUTR
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4.700.000.000	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	170.000.000	DPUTR
				Normalisasi/Restorasi Sungai	138.305.250	
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.203.781.919	
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	675.664.837	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	35.000.000	DPUTR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	64.860.000	
				Sistem Informasi Penataan Ruang	49.980.000	
		Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	82.450.000	DPUTR
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.269.751.000	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	300.000.000	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	98.587.700	DLH
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	74.817.500	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	125.651.100	DLH
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	81.221.600	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	42.483.000	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	24.233.600	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	201.313.000	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pengelolaan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	17.491.500	DLH
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	114.051.000	DLH



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Kabupaten/ Kota			
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31.812.700	
		Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	339.887.500	DLH
				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	475.877.362	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	1.500.000	
5	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	135.280.650	DISKUMIN DAG
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	85.720.900	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pengembangan Usaha Mikro		
		Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	240.492.900	DISKUMIN DAG
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	76.242.000	DPMPPTSP
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	219.978.000	
		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	20.752.000	DPMPPTSP
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	24.734.000	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	50.000.000	DISNAKER
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	225.000.000	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	32.180.000	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	27.025.000	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	8.527.500	DISKUMIN DAG
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	203.362.500	DISKUMIN DAG
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	581.000.000	
			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	45.000.000	
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	91.260.000	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	500.000.000	DISPORAPAR



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Kreatif Tingkat Dasar			
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	210.640.000	DISPORAPAR
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	83.210.000	DKP3
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	41.945.000	
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	173.851.500	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B	362.130.000	DKP3
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	120.000.000	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	250.000.000	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	4.042.500	DKP3
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	113.400.000	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	17.325.000	DKP3
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	102.210.000	DKP3
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	688.609.950	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	24.499.500	DKP3
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.430.000	DKP3



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Pangan Kecamatan			
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	21.232.200	
6	penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.088.000.000	DINKES
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	916.133.000	
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	117.631.250	DINSOS
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	27.000.000	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rujukan Anak-Anak Terlantar	7.875.000	DINSOS



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	61.500.000	
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	617.425.000	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	135.280.650	DISKUMIN DAG
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	85.720.900	
		Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	240.492.900	DISKUMIN DAG

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022

Selain program pembangunan Daerah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023 mengamanahkan adanya beberapa proyek strategis yang akan dilaksanakan di Daerah yang dibiayai dari berbagai sumber anggaran yang merupakan cerminan dari aspek kolaborasi dalam hal pendanaan dan menunjukkan adanya pertimbangan efisiensi penentuan program sesuai dengan prioritas pembangunan. Proyek strategis tersebut merupakan salah satu yang juga harus



dipertimbangkan dalam hal pelaksanaan program pembangunan daerah pada Tahun 2023.

Proyek Strategis Tahun 2023 di Kota Sukabumi yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19
Proyek Strategis Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Proyek Strategis	Keterangan
1	Fasilitasi RDF (Persampahan)	APBD Provinsi
2	Pembangunan kawasan pusat pemerintahan	APBN
3	Kawasan wisata Cikundul	Bankeu Prov
4	Penataan pedestrian	Bankeu Prov + APBD
5	Pembangunan Kawasan Sungai Cipelang	Bankeu Prov + APBD
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	APBN, DAK, APBD Prov dan APBD
7	Penanganan Kawasan Kumuh	APBD Provinsi + APBD
8	Revitalisasi Pasar Tradisional	Bankeu Prov

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022

4.2.6. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2023

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah serta antar pusat dan daerah, maka isu-isu strategis yang ditetapkan oleh Pusat, Propinsi, dan Kota Sukabumi harus saling berkaitan dan saling mengisi satu dengan lainnya. Oleh karenanya, berikut ini digambarkan keterkaitan antara isu strategis Pemerintah Pusat, Propinsi Jawa Barat, dan isu strategis Kota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.



Tabel 4.20
Sinergitas Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT	ISU STRATEGIS KOTA SUKABUMI
1.	Dampak Ekonomi dan Sosial akibat Pandemi <i>Covid-19</i>	Pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi <i>Covid-19</i>	kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan sosial kemasyarakatan;
2.	Kemiskinan dan kesenjangan serta pandemi <i>Covid-19</i>	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	infrastruktur dan tata kota;
3.	Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
4.	Pemerataan pembangunan kualitas lingkungan hidup dan Perubahan Iklim	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	kualitas lingkungan hidup;
5.	Reformasi Birokrasi	Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial	penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
6.		Reformasi birokrasi	dampak pandemi <i>Covid-19</i> .

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022



**Tabel 4.21
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat
dan Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT
1.	Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan ekonomi yang berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi b. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan c. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup d. Pengembangan Destinasi dan Infrastrukstur Pariwisata
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat • penanganan dan pemulihan dampak pandemi <i>Covid-19</i> 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup b. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan c. Gerakan membangun desa d. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
3.	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia 	<ol style="list-style-type: none"> a. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan b. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia 	<ol style="list-style-type: none"> a. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan b. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah c. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial d. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan 	a. Pengembangan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup b. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
6.	Mengembangkan Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan 	a. Pengembangan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup b. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Resiko Bencana
7	Memperkuat Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi 	a. Reformasi sistem perlindungan sosial b. Inovasi pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022

Keterkaitan sasaran pembangunan Kota Sukabumi dengan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat serta sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.22
Persandingan Keselarasan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 dengan Sasaran Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi Tahun 2023

Sasaran RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	S10	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Sasaran RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023	
	bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S2	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	S11	Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S3	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	S10	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
		S15	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusatpusat perekonomian	S12	Meningkatnya Sektor pariwisata kreatif melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar
S3	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	S6	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	S11	Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar
		S12	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa		
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S11	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	S6	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S5	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S13	Meningkatnya pengembangan usaha dan ketersediaan pangan masyarakat
S6	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	S1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	S2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		S9	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S3	Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata
S7	Meningkatnya kualitas anak,			S5	Meningkatnya pengarusutamaan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Sasaran RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023	
	perempuan, dan pemuda				gender dan perlindungan anak
S8	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S5	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S6	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial
S9	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S9	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S3	Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S18	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S4	Terwujudnya masyarakat yang kreatif dan berbudaya
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S18	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	S4	Terwujudnya masyarakat yang kreatif dan berbudaya
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S13	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S6	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S13	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S13	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S6	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan,	S9	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S4	Terwujudnya masyarakat yang kreatif dan berbudaya



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Sasaran RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023	
	inovatif, dan kreatif				
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S7	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik	S7	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat		
S17	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	S15	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusatpusat perekonomian	S7	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan
S18	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	S15	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusatpusat perekonom	S7	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan
S19	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	S14	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	S8	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
S20	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S16	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
				S17	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

Sasaran RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023	
					pengetahuan dan teknologi
S21	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	S16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S8	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
S22	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	S10	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	S9	Terwujudnya ketangguhan terhadap bencana
		S16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat		
S23	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	S16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S8	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
S24	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	S11	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S16	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
				S17	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Sasaran RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023	
S25	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	S11	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S14	Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel
				S15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022

Apabila dilihat dari keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional, indikator prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan indikator prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.23
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Kota Sukabumi, Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023
Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	Skor Pola Pangan Harapan
Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan (jumlah WPP)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB
Rasio kewirausahaan nasional (%) Pertumbuhan PDB Pertanian (%) Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1(a)) (%)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%) Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin laju pertumbuhan sektor industri (%)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB
Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1*) (%)	laju pertumbuhan sektor industri (%)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB
Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)*) (US\$ Miliar		kontribusi pariwisata terhadap PDRB
Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (%)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	kontribusi pariwisata terhadap PDRB



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023
Pertumbuhan investasi (PMTB) (%) Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	Tingkat Efektivitas Kerja sama Daerah Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Indeks Ketahanan Energi (indeks)	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Produktivitas air (water productivity) (m ³ /kg)	Indeks Penggunaan Air	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) (juta ha)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai) Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin) Skor Pola Pangan Harapan (SPAHH)	Skor Pola Pangan Harapan
Konservasi Kawasan Kelautan (14.5.1*) (juta ha)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Produksi ikan (juta ton)	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Produksi garam (juta ton)	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.10.1(b)*) (%)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Pertumbuhan wirausaha (%)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (%)	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Kontribusi PDB industri pengolahan non migas (%)	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	Indeks Kota Kreatif (IKK)
Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023
Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2*) (%)	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (juta orang)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/ EODB (Peringkat)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Daya Saing Daerah
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	Tingkat Efektivitas Kerja sama Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	Tingkat Efektivitas Kerja sama Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB
Neraca perdagangan (US\$ miliar)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (juta kunjungan)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	kontribusi pariwisata terhadap PDRB
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	kontribusi pariwisata terhadap PDRB
Peringkat travel and tourism competitiveness index (peringkat)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	kontribusi pariwisata terhadap PDRB
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (%)	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin) Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	kontribusi pariwisata terhadap PDRB
Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	kontribusi pariwisata terhadap PDRB



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023
Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM) yang dikembangkan (WM)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	kontribusi pariwisata terhadap PDRB
Perkembangan status pembangunan desa	Indeks Desa Membangun (Poin)	Indeks Kota Kreatif (IKK)
Penurunan angka kemiskinan Desa (persen)	Indeks Desa Membangun (Poin)	Indeks Kota Kreatif (IKK)
Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status	Indeks Desa Membangun (Poin)	Indeks Kota Kreatif (IKK)
Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Indeks Desa Membangun (Poin)	Indeks Kota Kreatif (IKK)
Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Persentase capaian SPM di daerah (persen)	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP
Jumlah hari layanan data center beroperasi (hari)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik
Jumlah kapasitas sistem penyimpanan pendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang dibangun (terabyte)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	Tingkat Efektivitas Kerja sama Daerah	Indeks Daya Saing Daerah



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023
Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (persen)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Daya Saing Daerah
Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP
Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (Ha)	Indeks Reformasi Birokrasi	Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Dengan Rencana Tata Ruang
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan jaminan sosial (%)	Indeks Kebahagiaan	Indeks Keluarga Sehat
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	Indeks Kebahagiaan	Indeks Keluarga Sehat
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Indeks Kebahagiaan	Indeks Ketahanan Keluarga
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023
Persentase merokok penduduk usia 10- 18 tahun (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Nilai rata-rata hasil PISA:	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Matematika (nilai)		
Membaca (nilai)		
Sains Nilai)		
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Harapan lama sekolah (tahun)	Harapan lama sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)	Indeks Pembangunan Gender
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persen)	Indeks Pembangunan Gender
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	Indeks Ketahanan Keluarga
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) (%)	Indeks Kebahagiaan	Indeks Ketahanan Keluarga
Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Indeks Kebahagiaan	Indeks Ketahanan Keluarga
Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023
program penanggulangan kemiskinan (%)		
Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Ketahanan Keluarga
Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	Indeks Kebahagiaan	Indeks Ketahanan Keluarga
Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	Indeks Kebahagiaan	Indeks Ketahanan Keluarga
Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023
persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Persentase puskesmas dengan obat esensial (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Persentase obat memenuhi syarat (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Persentase makanan memenuhi syarat (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Keluarga Sehat
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Tingkat penyelesaian pendidikan (%)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender
Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	Indeks Pembangunan Gender
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender
Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Gender



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (%)	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Gender
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	Indeks Kebahagiaan	Indeks Ketahanan Keluarga
Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses terhadap pengelolaan lahan (%)	Indeks Kebahagiaan	Indeks Ketahanan Keluarga
Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	Indeks Pendidikan
Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	Indeks Pendidikan
Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha (inovasi)	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Indeks Daya Saing Daerah
Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Indeks Daya Saing Daerah
Jumlah paten granted (domestik) (paten) Budaya dan Prestasi Olahraga:	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Indeks Daya Saing Daerah
Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Kota Kreatif (IKK)
Indeks Aktualisasi Pancasila (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Kota Kreatif (IKK)
Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	Indeks Kota Kreatif (IKK)
Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	Indeks Kerukunan Umat Beragama
	Indeks Demokrasi (Poin)	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023
Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	Indeks Kebahagiaan (Poin)	Indeks Ketahanan Keluarga
Nilai Budaya Literasi (nilai)	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	Indeks Pendidikan
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pelayanan Publik
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai SAKIP
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda	
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda	
Nilai Dimensi Mental Kultural (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Nilai Dimensi Kelembagaan Sosial Politik (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda	
Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	Indeks Kota Kreatif (IKK)
Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	Indeks Kota Kreatif (IKK)
Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	Indeks Kota Kreatif (IKK)
Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya (nilai)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	rata-rata lama sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	indeks Resiko bencana (poin)	Indeks Kapasitas Bencana Daerah
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km) (terdapat dalam narasi RPJMN)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Dengan Rencana Tata Ruang



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023
Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Rute pelayaran yang paling terhubung (loop) (%)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Rasio Elektrifikasi (%)	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Indeks Kebahagiaan	Indeks Ketahanan Keluarga
Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	Indeks Penggunaan Air	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan m3/detik)	Indeks Penggunaan Air	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	Indeks Resiko bencana (poin)	Indeks Kapasitas Bencana Daerah
Jumlah Provinsi yang meningkatkan ketahanan terhadap bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan) (Provinsi)	Indeks Resiko bencana (poin)	Indeks Kapasitas Bencana Daerah
Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai)	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (Kumulatif, miliar m3)	Indeks Penggunaan air	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (Kumulatif, unit)	Indeks Penggunaan air	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023
Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
1.20 Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (kumulatif, persen)	Nilai Tukar Petani	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)	Nilai Tukar Petani	Skor Pola Pangan Harapan
Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (Km)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km's)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Jumlah rute jembatan udara (rute)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Jumlah BUMD Air Minum yang menerapkan Smart Grid Water Management (BUMD Air Minum/ PDAM)	Indeks Penggunaan Air (poin)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)	Indeks Penggunaan Air (poin)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023
Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik per Kapita (kWh)	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	indeks kualitas Lingkungan Hidup (poin)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks kualitas Lingkungan Hidup (poin)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Indeks Penggunaan Air (poin)	
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	indeks Resiko bencana (poin)	Indeks Kapasitas Bencana Daerah
Persentase penurunan emisi GRK (%)	indeks kualitas Lingkungan Hidup (poin)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	ndeks kualitas Lingkungan Hidup (poin)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks kualitas Lingkungan Hidup(poin)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		
Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks kualitas Lingkungan Hidup (poin)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	indeks kualitas Lingkungan Hidup (poin)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	indeks Resiko bencana (poin)	Indeks Kapasitas Bencana Daerah
Penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim (%)	indeks Resiko bencana (poin)	Indeks Kapasitas Bencana Daerah
Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	indeks Resiko bencana (poin)	Indeks Kapasitas Bencana Daerah
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2023
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)	Indeks Demokrasi (Poin)	
Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	Nilai SAKIP
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas (%)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori) Tingkat efektivitas kerja sama Daerah (%)	Nilai SAKIP
Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh Wilayah NKRI yang dapat di atasi. (%)	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin)	Indeks Kerukunan Umat Beragama

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022

RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.



Untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan pengarusutamaan di atas, Pemerintah Kota Sukabumi telah mensinkronkan program-program pembangunan daerah Tahun 2023 untuk pencapaian target tersebut. Berikut program-program pembangunan tersebut.

Tabel 4.24
Perbandingan Program Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023
dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming)
Pembangunan Nasional Tahun 2023

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 1 TANPA KEMISKINAN	
<ul style="list-style-type: none"> • Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. • Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. • Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) 5. Program Pengendalian Penduduk 6. Program Pengelolaan Pendidikan 7. Program Pengelolaan Pendidikan 8. Program Pencatatan Sipil
Tujuan 2 TANPA KELAPARAN	
<ul style="list-style-type: none"> • Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. • Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan



Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<p>secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p> <ul style="list-style-type: none">• Target 2.3 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	
<ul style="list-style-type: none">• Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.• Target 3.3. pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.• Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.• Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.• Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.• Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.• Target 3.a.1* Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	<ol style="list-style-type: none">1. Program Rehabilitasi Sosial2. Program Rehabilitasi Sosial3. Program Pemberdayaan Sosial4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)7. Program Pencatatan Sipil



Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none">• Target 3.b.1(a) Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.• Target 3.c.1* Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	
Tujuan 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	
<ul style="list-style-type: none">• Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.• Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.• Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.• Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Global	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengelolaan Pendidikan2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)



Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none">Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	
Tujuan 5 KESETARAAN GENDER	
<ul style="list-style-type: none">Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	<ol style="list-style-type: none">1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Tujuan 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	
<ul style="list-style-type: none">Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semuaTarget 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)



Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none">• Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.• Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.• Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	
<ul style="list-style-type: none">• Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	
<ul style="list-style-type: none">• Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.• Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.• Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.• Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-	



Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<p>laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.• Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	
Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	
<ul style="list-style-type: none">• Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.• Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.• Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	
<ul style="list-style-type: none">• Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.• Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none">Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	
Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	
<ul style="list-style-type: none">Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	<ol style="list-style-type: none">1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)2. Program Penanggulangan Bencana
Tujuan 12 Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	
<ul style="list-style-type: none">Target 12.4 ada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)2. Program Pengelolaan Persampahan
Tujuan 14 Ekosistem Lautan	



Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none">• Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.• Target 14.6 Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	
Tujuan 16 PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	
<ul style="list-style-type: none">• Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.• Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.• Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.• Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.• Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.• Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.• Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.• Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah2. Program Perekonomian Dan Pembangunan3. Program Kepegawaian Daerah4. Program Pencatatan Sipil



Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	
<ul style="list-style-type: none">• Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.• Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.• Target 17.8 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.• Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.• Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.• Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi	1. Program Pengelolaan Profil Kependudukan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022

Prioritas Nasional (PN) pada Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional tersebut, maka telah dilakukan pemetaan pencapaian prioritas nasional berdasarkan program perencanaan pembangunan yang bisa mendukung pencapaiannya. Lebih jelas pemetaan tersebut sebagaimana yang tercantum pada tabel 4.26 dibawah ini:



Tabel 4.25

Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PN.01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan									
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan							
		2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati							
		3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi							
		4. Peningkatan pemenuhan energi domestik							
		5. Pengembangan industri pendukung EBT							
2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung	1. Penyediaan air untuk pertanian	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif	persen	63	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pertumbuhan ekonomi								dan Perdagangan
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1. Jumlah Pengembangan dan Pembangunan Pusat-pusat Perdagangan	1. unit	1. 0	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
				2. Persentase Pemanfaatan Profil, Prognosa, Informasi Harga dan Pengawasan Barang Penting/ Strategis		2. persen	1. 100		
				3. Persentase Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi		3. persen	2. 100		
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1. Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	1. persen	1. 27	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
						2. Persentase Peserta yang mendapatkan Sosialisasi Metrologi Legal	2. persen	2. 100	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Persentase pencapaian perencanaan lingkungan hidup	1. persen	1. 100	Dinas Lingkungan Hidup
		3. Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau				2. Persentase ketersediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	2. persen	2. 100	
		4. Pengembangan waduk multiguna			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase pengendalian pencemaran air	1. persen	1. 14	Dinas Lingkungan Hidup
						2. Persentase pengendalian pencemaran udara	2. persen	2. 80	
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	persen	100



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 pada sampah spesifik yang terkendali	persen	10	Dinas Lingkungan Hidup
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Angka ketersediaan cadangan pangan di masyarakat	ton	10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Ketersediaan data kerawanan pangan	persen	90	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian,			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)	persen	89	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		perikanan dan kepastian pasar							
		4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Persentase ketersediaan cadangan pangan pokok pemerintah	1. persen	1. 40	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional				2. Angka kecukupan energi (kkal/kap/hari) dan Angka kecukupan protein (gram/kap /hari)	2. kkal / kap / hari dan gram / kap / hari	2.AKE : 2419 AKP : 107,1	
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Produksi padi	1. ton GKP	1. 19143	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
						2. Luas panen	2. ha	2. 2703	
						3. Persentase lembaga usaha tani yang menerapkan mekanisasi pertanian dengan baik	3. persen	3. 65	
						4. Tingkat pendayagunaan dan pemanfaatan fasilitas pengolahan hasil pertanian	4. persen	4. 75	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						5. Produksi daging	5. ton	5. 5844.35	
						6. Luas lahan pertanian organik yang tersertifikasi	6. ha	6. 6.1	
						7. Jenis komoditas hortikultura yang didaftarkan registrasi kebun	7. jenis	7. 5	
						8. Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha agribisnis di Kota Sukabumi	8. persen	8. 10	
						1. Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	1. ha	1. 40	
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2. Persentase ketersediaan data ketahanan pangan /pertanian	2. persen	2.1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
						3. Persentase prasarana yang digunakan	3. persen	3. 100	
						4. Persentase peningkatan peserta Sekolah Agro di KAC	4. persen	4.5	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) 2. Presentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	1. persen 2. persen	1. 100 2. 45	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Program Penyuluhan Pertanian	1. Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum 2. Persentase lembaga usaha tani dengan katagori kelas utama	1. persen 2. persen	1. 7 2. 7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	1. Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan 2. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan+C41:C48n skala kecil serta akses terhadap	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Provititas Budidaya Perikanan	angka	24,89	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Angka Konsumsi Ikan (AKI)	1.kg/kap/ tahun	1. 42,31	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		pengelolaan sumber daya								
		3. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan				2. Persentase Keamanan Pangan Produk Perikanan	2. persen	2. 89		
5	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi	1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	1. persen;	1. 100	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	
		2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha					2. UMKM Naik Kelas;	2.UMK;		2. 30
		3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi					3. Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang menerima Penguatan Permodalan;	3. UMK;		3. 100



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4. Peningkatan penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha				4. Persentase Dokumen Pemantauan, Dokumen Penyaluran Kredit Anyelir, Dokumen Pelaksanaan Sukabumi Kece yang Tepat Waktu	4. persen:	4. 100	
		5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial				5. Persentase Wirausaha Muda baru yang memperoleh Penguatan Permodalan;	5. persen	5. 80	
						6. jumlah Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Pameran	6. produk	6. 10	
					Program Pengembangan UMKM	Jumlah Wirausaha Muda Baru yang terbentuk melalui Program Sukabumi KECE	jumlah	600	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi	1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1. Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	1. persen	1. 10	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2. Cakupan bina kelompok pengrajin	2. persen	2. 2.86	
						3. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota.	3. persen	3. 0.50	
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	1. Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	1. persen	1. 0.50	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
						2. Persenatse IKM yang mendapatkan Legalitas Usaha	2. persen	2. 100	
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	buku	1	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
		2. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	persen	14.5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		penguatan rantai pasok							
					Program Pemasaran Pariwisata	event yang diselenggarakan	jumlah	6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi)	Jumlah	350	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		4. Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Subsektor ekonomi kreatif yang aktif	Jumlah	2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		5. Pengembangan industri halal			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau job fair	persen	85	Dinas Tenaga Kerja



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Jumlah Pengembangan dan Pembangunan Pusat-pusat Perdagangan;	1. unit;	1. 0	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
		2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor				2. Persentase Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita;	2. persen;	2. 100	
		3. Pengelolaan impor				3. Jumlah Kawasan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL	3.kawasan	3. 1	
		4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan yang difasilitasi Pemasarannya melalui Pameran di Luar Kota Sukabumi	produk	10	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
		5. Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif	persen	63	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan desinasi branding, dan produk kreatif	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	persen	14.5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1. Peningkatan pendalaman sektor keuangan		pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah	persen	5	BPKPD
		2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Jumlah Pengembangan dan Pembangunan Pusat-pusat Perdagangan;	1. unit;	1.0	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
		3. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga				2. Persentase Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita;	2. persen;	2.100	
						3. Jumlah Kawasan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL	3.kawasan	3.1	
		4. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Subsektor ekonomi kreatif yang aktif	Jumlah	2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pengolahan dan pariwisata							
PN.02 Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan									
1	Pembangunan Wilayah Sumatera	1. Pengembangan Kawasan strategis	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya keunggulan dan kemandirian jumlah pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi	orang	40	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan						
2	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	2. Pengembangan sektor unggulan	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Wirausaha Muda Baru yang terbentuk melalui Program Sukabumi KECE	jumlah	600	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
3	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	3. Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi)	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pembangunan Wilayah Kalimantan	4. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)	Gerakan membangun desa						
			Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup						
5	Pembangunan Wilayah Sulawesi	5. Kelembagaan dan keuangan daerah	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah						
6	Pembangunan Wilayah Maluku								
7	Pengembangan Wilayah Papua								
PN.03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing									
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan		peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan	Program Pendaftaran Penduduk	1. Cakupan Kepemilikan KTP-el	1. persen	1. 100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Integrasi sistem administrasi kependudukan		implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi		2. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	2. persen	2. 100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3. Pendampingan layanan terpadu	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi				3. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	3. persen	
		4. Pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk			Program Pencatatan Sipil	1. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	1. persen	1. 100	
						2. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	2. persen	2. 100	
						3. Cakupan Kepemilikan akta Perkawinan	3. persen	3. 100	
						4. Cakupan Kepemilikan akta Perceraian	4. persen	4. 100	
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	persen	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	1. Sistem jaminan sosial nasional	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	1. persen	1. 40	Dinas Sosial
		2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran				2. PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	2. persen	2. 35	
		3. Perlindungan sosial adaptif				3. Persentase peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dlm pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial	3. persen	3. 15	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4. Kesejahteraan sosial			Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial (gepeng/gelandangan) diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1. persen	1. 100	Dinas Sosial
						2. Persentase PMKS lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA) diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2. persen	2. 100	
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Persentase anak terlantar yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	1. persen	1. 100	Dinas Sosial
						2. Persentase data fakir miskin yang dikelola	2. persen	2. 100	
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	1. persen	1. 100	Dinas Kesehatan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat				2. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	2. persen	2. 100	
		3. Peningkatan pengendalian penyakit				3. Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna	3. persen	3. 11.36	
		4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)		peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia		4. Persentase pemenuhan logistik kesehatan sesuai standar	4. persen	4. 95	
		5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan				5. Persentase pencapaian program promotif-preventif kesehatan masyarakat	5. persen	5. 100	
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	persen	50	Dinas Kesehatan
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Persentase pengawasan legalitas dan keamanan obat dan makanan	1. persen	1. 100	Dinas Kesehatan
						2. Persentase pengawasan tempat pengolahan pangan	2. persen	2. 100	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pelayanan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai standar	persen	100	Dinas Kesehatan
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	1. persen	1. 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun				2. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	2. persen	2. 100	
		3. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan				3. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	3. persen	3. 100	
		4. Penjaminan mutu pendidikan				4. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah yang	4. persen	4. 100	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan			
		5. Peningkatan tata kelola pendidikan				5. Persentase GTK yang berkualifikasi DIV/S1	5. persen	5. 86.91	
						6. Persentase GTK yang bersertifikasi	6. persen	6. 53.65	
						7. Jumlah GTK berprestasi	7. jumlah	7. 6	
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rata-Rata Indeks Pemerataan Guru	indeks	0.175	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	angka	58.4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak		peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penguatan dan Pengembangan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah dan Penyedia Layanan	persen	35	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan			Program Perlindungan Perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	persen	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	persen	85	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	dokumen	5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	kategori/tingkatan	madya	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
					Program Perlindungan Khusus Anak	persentase layanan perlindungan khusus anak	persen	85	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
					Program Pengendalian Penduduk	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan	persen	82	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1. Meningkatnya Cakupan Kesertaan Ber-KB	1. persen	1. 67,89	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
						2. Usia Nikah Pertama	2. tahun	2. 21,32	
						3. Meningkatnya Cakupan Peserta KB MKJP	3. persen	3. 23.56	
						4. Cakupan PUS yg Belum Ber KB (Unmetneed)	4. persen	4. 11,13	
					Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Keluarga Sejahtera II	persen	75.5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
		3. Kualitas pemuda			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1. persen	1. 28.99	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
						2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2. persen	2. 27.11	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pengentasan kemiskinan	1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Wirausaha Muda Baru yang terbentuk melalui Program Sukabumi KECE	jumlah	600	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
		2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial		penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Persentase anak terlantar yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	1. persen	1. 100	Dinas Sosial
						2. Persentase data fakir miskin yang dikelola	2. persen	2. 100	
		3. Reformasi agraria	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	1. ha	1. 40	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		4. Perhutanan sosial	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			2. Persentase ketersediaan data ketahanan pangan /pertanian	2. persen	2.1	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3. Persentase prasarana yang digunakan	3. persen	3. 100	
						4. Persentase peningkatan peserta Sekolah Agro di KAC	4. persen	4.5	
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kualitas dan produktivitas tenaga kerja	persen	80	Dinas Tenaga Kerja
					Program Hubungan Industrial	Persentase pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	persen	90	Dinas Tenaga Kerja
		2. Prestasi olahraga		peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	jumlah	100	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
PN.04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan									



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti		peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase keterlibatan komponen masyarakat dan aparat dalam pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan	persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2. Revolusi mental dalam tata kelola		peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1. angka	1. 3	Inspektorat Daerah
						2. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2. angka	2. 3	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter		peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase unjuk rasa yang disebabkan konflik antar dan inter umat beragama, persentase penanganan konflik antar umat beragama	persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Pengembangan Kebudayaan	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	Jumlah	15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila		pengembangan ekonomi yang berkelanjutan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Perwakilan Kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pendidikan politik	persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5. Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme		peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase keterlibatan komponen masyarakat dan aparat dalam pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan	persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia	Program Pengembangan Kebudayaan	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	Jumlah	15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1. Persentase Komunitas Seni yang berbadan Hukum	1. persen	1. 50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan kesejahteraan rakyat							
		3. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif				2. jumlah Kesenian Daerah yang dilestarikan	2. jumlah	2. 3	
		4. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan				3. persentase komunitas seni berbadan hukum yang mendapatkan hibah	3. persen	3. 13.6	
3	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	1. Peningkatan budaya literasi	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	angka	58.4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra			Program Pengembangan Kebudayaan	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	Jumlah	15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Koleksi budaya etnis dan naskah kuno yang dimiliki	persen	0.117	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Persentase Inovasi Daerah yang Terfasilitasi	1. persen	45	BAPPEDA
						2. Presentase penelitian dan pengkajian dengan melibatkan akademisi	2. persen	70	BAPPEDA
PN.05 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar									
1	Infrastruktur pelayanan dasar	1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Program Pengembangan Permukiman	Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik	persen	47	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Jumlah bangunan negara sesuai dengan standar kelayakan bangunan yang terbangun	persen	20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Program Pengembangan Perumahan	Jumlah RUSUNAWA yang dipelihara	jumlah	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	98.61	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Persentase Jumlah penduduk berakses air minum yang layak	1. persen	1. 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						2. Persentase Jumlah KK Akses Air minum aman	2. persen	2. 37,00	
		3. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1. Jumlah Turap/ Talud/Bronjong yang terbangun dalam kondisi baik	1. Jumlah	1. 9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2. Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	2. M	2. 1500	
		4. Keselamatan dan keamanan transportasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			1. Jalan dengan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai / Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan / Jumlah penyediaan perlengkapan jalan	1. persen	1. 82,85	
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	2. Kenaikan jumlah kendaraan yang dapat pelayanan parkir / Jumlah kendaraan yang dapat ditampung pada lahan parkir / Gedung Parkir	2. persen	2. 100	Dinas Perhubungan
						3. Kenaikan jumlah kendaraan yang dapat dilayani pada uji keur / Memaksimalkan kualitas kendaraan yang laik operasi / Gedung pkb	3. persen	3. 100	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						4. Kenaikan jumlah penumpang SAUM / Jumlah Penumpang pada SAUM / Persentase pelaksanaan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM)	4. persen	4. 100	
						5. Ketersediaan PJU / Jumlah Sarana dan Prasarana PJU dalam kondisi baik/ Jumlah penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU	5. persen	5. 100	
		5. Ketahanan kebencanaan infrastruktur	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya keunggulan dan kemandirian jumlah pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi	orang	40	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan	1. Persentase Pengurangan Resiko Bahaya Kebakaran	1. persen	1. 60	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
						2. Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran	2. persen	2. 90	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyelamatan Non Kebakaran	3. Persentase Penyelamatan Non Kebakaran	3. persen	3. 80	
		6. Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Terbangun dan terpeliharanya drainase lingkungan permukiman	M	1500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Persentase Jumlah Rumah Tinggal Bersanitasi	1. persen	1. 53,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						2. Persentase Jumlah KK lumpur tinja yang terlayani	2. persen	2.35.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Infrastruktur ekonomi	1. Konektivitas jalan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan	Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase Panjang jalan kota kondisi yang Mantap	persen	82.85	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Konektivitas darat	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			1. Jalan dengan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai / Persentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan / Jumlah penyediaan kelengkapan jalan	1. persen	1. 82,85	Dinas Perhubungan
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	2. Kenaikan jumlah kendaraan yang dapat pelayanan parkir / Jumlah kendaraan yang dapat ditampung pada lahan parkir / Gedung Parkir	2. persen	2. 100	
						3. Kenaikan jumlah kendaraan yang dapat dilayani pada uji keur / Memaksimalkan kualitas kendaraan yang laik operasi / Gedung pkb	3. persen	3. 100	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						4. Kenaikan jumlah penumpang SAUM / Jumlah Penumpang pada SAUM / Persentase pelaksanaan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM)	4. persen	4. 100	
						5. Ketersediaan PJU / Jumlah Sarana dan Prasarana PJU dalam kondisi baik/ Jumlah penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU	5. persen	5. 100	
3	Infrastruktur perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)	1. Transportasi perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1. Jalan dengan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai / Persentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan / Jumlah penyediaan kelengkapan jalan	1. persen	1. 82,85	Dinas Perhubungan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2. Kenaikan jumlah kendaraan yang dapat pelayanan parkir / Jumlah kendaraan yang dapat ditampung pada lahan parkir / Gedung Parkir	2. persen	2. 100	
						3. Kenaikan jumlah kendaraan yang dapat dilayani pada uji keur / Memaksimalkan kualitas kendaraan yang laik operasi / Gedung pkb	3. persen	3. 100	
						4. Kenaikan jumlah penumpang SAUM / Jumlah Penumpang pada SAUM / Persentase pelaksanaan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM)	4. persen	4. 100	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						5. Ketersediaan PJU / Jumlah Sarana dan Prasarana PJU dalam kondisi baik/ Jumlah penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU	5. persen	5. 100	
		2. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya transparansi informasi publik dalam rangka penyelenggaraan pembangunan	persen	70	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Aplikasi Informatika	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik	persen	90	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Termanfaatkannya Data dan informasi statistik sektoral pemerintah daerah	persen	60	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Persentase Jumlah penduduk berakses air minum yang layak	1. persen	1. 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2. Persentase Jumlah KK Akses Air minum aman	2. persen	2. 37,00	
		4. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	98.61	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	persen	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Program Pengembangan Perumahan	Jumlah RUSUNAWA yang dipelihara	jumlah	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Transformasi digital	1. Penuntasan infrastruktur TIK	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya transparansi informasi publik dalam rangka penyelenggaraan pembangunan	persen	70	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Pemanfaatan infrastruktur TIK	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan		Program Aplikasi Informatika	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik	persen	90	Dinas Komunikasi dan Informatika



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Fasilitas pendukung transformasi digital	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	inovatif berbasis teknologi informasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Termanfaatkannya Data dan informasi statistik sektoral pemerintah daerah	persen	60	Dinas Komunikasi dan Informatika
PN.06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim									
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Persentase pencapaian perencanaan lingkungan hidup	1. persen	1. 100	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2. Persentase ketersediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	2. persen	2. 100	
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 pada sampah spesifik yang terkendali	persen	10	Dinas Lingkungan Hidup



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase pengendalian pencemaran air	1. persen	1. 14	Dinas Lingkungan Hidup
						2. Persentase pengendalian pencemaran udara	2. persen	2. 80	
		3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Persampahan	1. Persentase penanganan kebersihsn	1. persen	1. 73	Dinas Lingkungan Hidup
						2. Persentase pengurangan sampah kota	2. persen	2. 26	
		4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	persen	100	Dinas Lingkungan Hidup



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	persen	13	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	1. Penanggulangan bencana	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Persentase penggunaan KTI dalam pembelian pupuk bersubsidi	1. persen	1. 80	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
						2. Persentase luas lahan pertanian yang mengikuti AUP	2. persen	2. 25	
						Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan penanganan sosial pasca bencana	persen	100



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Program Penanggulangan Bencana	1. layanan informasi rawan bencana	1. persen	1. 93	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				2. layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		2. persen	2. 93		
				3. layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		3. persen	3. 93		
		2. Peningkatan ketahanan iklim	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 pada sampah spesifik yang terkendali	persen	10	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pembangunan rendah karbon	1. Pembangunan energi berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan	peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	persen	100	Dinas Lingkungan Hidup



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Lingkungan Hidup							
		2. Pemulihan lahan berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
		3. Pengelolaan limbah	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 pada sampah spesifik yang terkendali	persen	10	Dinas Lingkungan Hidup	
		2. Pengembangan industri hijau	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	persen	100	Dinas Lingkungan Hidup	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PN.07 Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik									
1	Konsolidasi Demokrasi	1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Perwakilan Kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pendidikan politik	persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi	persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya transparansi informasi publik dalam rangka penyelenggaraan pembangunan	persen	70	Dinas Komunikasi dan Informatika



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Penguatan Integrasi NKRI dan Perlindungan WNI di luar Negeri							
		2. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional							
		3. Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global							
3	Penegakan Hukum Nasional	1. Penataan Regulasi			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. persen	90	Sekretariat Daerah



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Perbaiki Sistem Hukum dan Perdata				2. Persentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum dan ham serta dokumentasi hukum 3. Persentase kegiatan keagamaan swadaya masyarakat	2. persen 3. persen	100	Sekretariat Daerah
						3. Persentase kegiatan keagamaan swadaya masyarakat	3. persen	80	Sekretariat Daerah
		3. Penguatan Sistem Anti Korupsi			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1. angka	1. 3	Inspektorat Daerah
		4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan				2. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2. angka	2. 3	
4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Meningkatnya Pelayanan ASN	persen	90	BKPSDM



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Transformasi Pelayanan		pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi	Program Penunjang Urusan Pemda	Persentase perangkat daerah yang mengikuti penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan memenuhi aspek penilaian	persen	50	Sekretariat Daerah
		3. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis							
		4. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan							
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan	persen	100	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
		2. Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi <i>Confidence Building Measures (CBM)</i>			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	Persentase Perwakilan Kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pendidikan politik	persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
		3. Penguatan Keamanan Laut			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Akurasi data ormas/OKP/LSM	persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi	persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		5. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber			Program Aplikasi Informatika	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik	persen	90	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022



4.2.7 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan kewilayahan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi Tahun 2022-2042 yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang. Pada dasarnya tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah mewujudkan penataan ruang Daerah yang produktif, aman, nyaman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pada bidang Pendidikan, Kesehatan, pariwisata, perdagangan dan jasa.

4.2.7.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kota

Kebijakan penetapan struktur ruang wilayah Daerah meliputi:

1. perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan kegiatan lainnya secara optimal;
2. peningkatan aksesibilitas dan transportasi; dan
3. peningkatan kualitas

Pusat-pusat Pelayanan yang direncanakan di Daerah meliputi:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK), Pusat pelayanan Daerah ditetapkan di 2 lokasi yaitu pusat kota di Kecamatan Cikole dan Kecamatan Cibereum. Pusat pelayanan kota berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan pusat pemerintahan. Pusat pelayanan kota yang direncanakan sampai dengan tahun 2042 adalah Pusat Pelayanan Pusat Kota Cikole dan Cibereum. Pusat Pelayanan Pusat Kota melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Utara, sedangkan Pusat pelayanan Babakan melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Selatan;
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), Sub pusat pelayanan kota terdiri 5 (lima) sub pusat pelayanan kota yang dikembangkan yaitu:
 - a. SPPK di Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh;
 - b. SPPK di Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang;



- c. SPPK di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong;
 - d. SPPK di Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros; dan
 - e. SPPK di Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu.
3. Pusat Lingkungan (PL), merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.

4.2.7.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Daerah meliputi:

1. pelestarian kawasan lindung terutama di daerah sempadan sungai dan Wilayah utara kota;
2. Perwujudan RTH kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat dari luas wilayah kota;
3. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
4. pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana; dan
5. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

4.2.7.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah Kota

Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi:

1. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
2. Kawasan strategis sosial budaya; dan
3. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kebijakan ini terdiri atas 3 (tiga) kawasan yaitu:

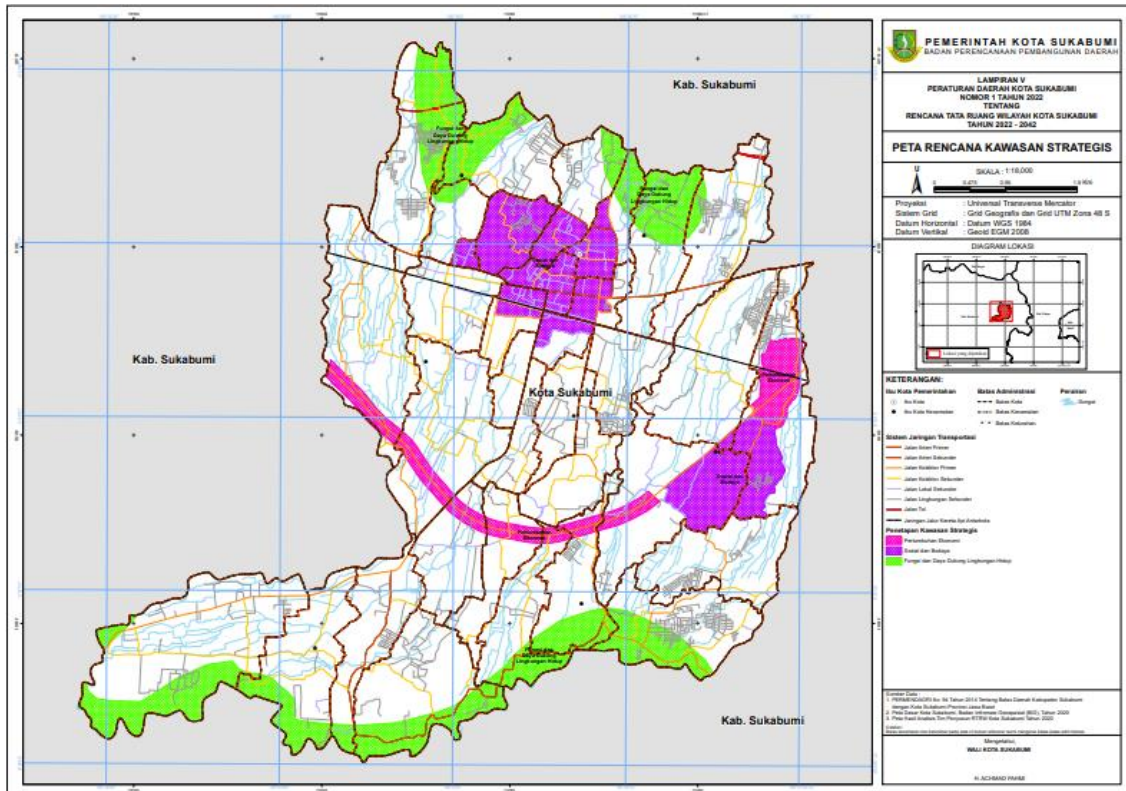
- 1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yang bertujuan untuk:
 - a) mengembangkan Kawasan agrowisata dan Kawasan pariwisata yang terpadu sebagai daya tarik dan obyek wisata;



- b) mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah; dan
 - c) memberikan Insentif dan stimulan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi untuk mempercepat perwujudan Kawasan strategis ekonomi.
- 2) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya, yang bertujuan untuk:
- a) mengembangkan Kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan
 - b) mengembangkan Kawasan pusat perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.
- 3) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk:
- a) mempertahankan fungsi lindung di Kawasan sepanjang Sungai Cimandiri dan hulu Sungai Cipelang yang memiliki fungsi ekologis tinggi; dan
 - b) mengembangkan konsep ekowisata pada Kawasan sepanjang Sungai Cimandiri dan hulu Sungai Cipelang.

Secara rinci penetapan kawasan strategis kota tersebut sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.7
Peta Rencana Kawasan Strategis



Sumber : PERDA RTRW Kota Sukabumi

4.2.8 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Selain program prioritas dan program unggulan yang telah disebutkan sebelumnya, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Secara definisi pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.



Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan pada BAB II, masih ditemukan SPM yang memang masih belum tercapai atau belum optimal dalam implementasinya dilapangan. Hal tersebut disebabkan berbagai hal seperti adanya keterbatasan anggaran yang diakibatkan oleh re-focusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, keterbatasan sarana prasarana pendukung serta tentunya sumber daya manusia yang juga mengalami keterbatasan atau difokuskan pada hal lain yang sangat diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pencapaian target SPM tahun 2023 perlu dilakukan berbagai strategi agar SPM ini bisa terlaksana dengan baik bahkan bisa mencapai target secara keseluruhan. Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) jenis, hal tersebut sebagaimana juga tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.27 berikut.



Tabel 4.26

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 s.d 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2022	2023		
SPM PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah WNI usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
2	Pendidikan Dasar	Jumlah WNI usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah WNI usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2022	2023		
SPM KESEHATAN							
4	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan balita	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2022	2023		
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
13	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2022	2023		
14	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
15	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
SPM PEKERJAAN UMUM							
16	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	100%	100%	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTR
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	DPUTR



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2022	2023		
SPM PERUMAHAN RAKYAT							
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota/ kabupaten	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	Program Pengembangan Perumahan	DPUTR
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	Program Pengembangan Perumahan	DPUTR
SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
20	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	<input type="checkbox"/> Persentase Gangguan Kamtrantibmas yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
		<input type="checkbox"/> Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan					



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2022	2023		
21	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
22	Peayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
23	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana;	BPBD
24	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Kebakaran	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
SPM SOSIAL							
25	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
26	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Presentase Anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2022	2023		
27	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
28	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase tuna sosial terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
29	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023



4.3 Inovasi Daerah

Keberhasilan pembangunan Kota Sukabumi dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi. Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung oleh berbagai inovasi dari segala bidang, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan tahunan daerah, dalam program pembangunan daerah serta proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Kota Sukabumi. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melakukan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana inovasi yang dilakukan merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan.

Dengan di implementasikannya berbagai inovasi di Kota Sukabumi, maka hal tersebut sangat dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sehingga mendukung pula capaian kinerja yang sudah ditetapkan. Selain itu, berbagai inovasi yang telah dilakukan ternyata juga telah mendapat penilaian dari berbagai pihak baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi sehingga terdapat beberapa inovasi yang mendapat penghargaan. Penghargaan tersebut selanjutnya akan mempengaruhi pula pendapatan yang akan diterima Kota Sukabumi dari pemerintah pusat sebagai salah satu bentuk apresiasi kinerja daerah salah satunya melalui anggaran Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan pemerintah pusat setiap tahunnya.

Pada Tahun 2021 terdapat beberapa penghargaan bagi Kota Sukabumi baik yang berupa inovasi ataupun bukan termasuk inovasi baik dari tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Penghargaan tersebut diantaranya adalah:

1. Juara 1 lomba Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan tingkat provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Rumah Sakit Bhayangkara mendapatkan Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2020;
2. Juara 3 lomba Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan tingkat Nasional Tahun 2021 Home Care sebagai 45 Top Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional dari Kementerian Pendayagunaan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Tahun 2020;

3. Juara 1 lomba Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2021;
4. Public Services Award Jawa Barat JUARA 2021, Indonesia Marketeers Festival (MARKLPUS) 2021 JABAR JUARA;
5. Kota Sukabumi sebagai Kota Layak Anak Kategori Nindya;
6. Anugrah Parahita Ekapraya Kategori Utama;
7. Penghargaan Individu Bapak Wali Kota sebagai Manggala Karya Kencana.
8. Penghargaan JDIH Nasional Terbaik I Kategori Kota
9. Penghargaan Kota Sehat katagori Swati Saba Padapa
10. Penghargaan Top Digital Implementation Level Stars dan Top Leader On Digital Implementation dalam ajang Top Digital Award Tahun 2021
11. Penghargaan Smart City Kategori Smart Governance dari Kementrian Komunikasi dan Informatika
12. Penghargaan BKN Award Tahun 2021 sebagai Peringkat I dalam Penilaian Kompetensi dan Peringkat 1 implementasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dan Pemanfaatan CAT (Computer Assisted Test)
13. Penghargaan RKCI dan RTDI Tahun 2021 Kategori Kota Dengan Mobilitas Cerdas dari ITB Bandung
14. Penghargaan 3 Besar Penilaian IDSD dari KEMRISTEK BRIND Tahun 2021

Selain inovasi di atas masih terdapat banyak jenis inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun unit kerja di bawahnya sebagaimana yang akan disampaikan pada tabel 4.28 di bawah ini. Inovasi yang akan ditampilkan tersebut seluruhnya masih dilaksanakan atau berjalan sampai akhir Tahun 2021 ini, hal tersebut didapatkan dari hasil pemetaan dan kunjungan lapangan ke perangkat daerah atau unit kerja yang melaksanakan inovasi tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk pembinaan dari pemerintah daerah sekaligus juga dalam mengumpulkan dokumen



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

pendukung inovasi sebagai langkah dalam memenuhi persyaratan Inovasi Government Award (IGA).

Dalam tabel di bawah ini juga akan dilengkapi penjelasan atau deskripsi dari masing-masing inovasi yang dilakukan serta penambahan keterangan tertentu seperti apabila inovasi tersebut berbasis teknologi informasi. Hasil pendataan tersebut dilakukan pada Inovasi yang masih berjalan yang terbaru yaitu yang di inisiasi pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Secara rinci penjelasan tersebut terdapat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.27
Inovasi Daerah Kota Sukabumi

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
A	Puskesmas Limusnunggal					
1	DARI HATI (Kendalikan Bersama Ibu Hamil Resiko Tinggi)	PKM Limusnunggal Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan public	Non Digital	kesehatan	2019
2	PDKT (Program Dampingi Kasus TB)	PKM Limusnunggal Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan public	Non Digital	kesehatan	2020
3	RASA AMAN (geRAkan Atasi Sampah Aktifkan Jamban)	PKM Limusnunggal Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan public	Non Digital	kesehatan	2020
4	KASEP PIS-AN (Kegiatan Akselerasi, Sinergitas Dan Elaborasi PIS-PK Antar Program)	PKM Limusnunggal Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan public	Digital	kesehatan	2020
5	GELORA CINTA MANIS (Gerakan Olahraga Bersama Atasi Cepat Penyakit Menahun Dan Kronis)	PKM Limusnunggal Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan public	Digital	kesehatan	2019
6	WEDANG JAHE (Wisata Edukasi Tingkatkan Pentingnya Belajar Hidup Sehat Eleminasi Penyakit)	PKM Limusnunggal Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan public	Non Digital	kesehatan	2019



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
7	GEMAR MENGAJI (Gerakan Masyarakat Memperdulikan Kesehatan Dan Gangguan Jiwa)	PKM Limusnunggal Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan public	Non Digital	kesehatan	2020
8	HAI CINTA (Himbauan Aktif Ikut Imunisasi Cermin Peduli Bayi Dan Balita)	PKM Limusnunggal Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan public	Non Digital	kesehatan	2020
9	GUCI EMAS (Gerakan Cukupi Gizi Melalui Edukasi Masyarakat)	PKM Limusnunggal Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan public	Digital	kesehatan	2020
10	KLIK UP (Kelola Layanan Puskesmas Terintegrasi Pada Kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan)	PKM Limusnunggal Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan public	Non Digital	kesehatan	2020
11	MASAGI (Masyarakat sadar Kesehatan Gigi)	PKM Limusnunggal Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan public	Non Digital	kesehatan	2019
B	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi					
12	WAYANG SUKU RAGA Versi ANDROID	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	pendidikan	2019



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
13	SI IBU (Sistem Informasi Kebudayaan dan Promosi Pariwisata)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Teknologi	pendidikan, kebudayaan	2020
15	CAHAYA MUSEUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata, penelitian dan pengembangan	2020
14	POJOK BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kebudayaan, pariwisata	2020
16	SIRAKSA (Sistem Informasi Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	pendidikan	2020



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
17	REVITALISASI GOTONG SISIG	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kebudayaan, pariwisata	2020
18	SMALL CITY MUSEUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kebudayaan, pariwisata	2020
C	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi					
19	LAYANAN KAMBOJA SARI (Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2019
20	Layanan KITA CERDAS (Layanan Kartu Identitas Anak-Cepat Secara Daring Dan Sempel)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2020
21	LAYANAN PATEPANG SONO (Pelayanan Terpadu Administrasi Pindah Datang Secara Online - Pasti On Time)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2021



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
22	LAYANAN ANANDA SEHAT (Layanan Akta Kelahiran Anda Melalui Daring, Segera – Mudah dan Cepat)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2020
23	LAYANAN KADO TERINDAH (Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik - Terintegrasi Dan Mudah)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2021
24	Layanan KAMI HEBAT (Layanan Kartu Keluarga Sukabumi-Mudah, Online, Tanpa Biaya dan Cepat)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2021
D	PKM Cibeureumhilir Kota Sukabumi					
25	REUSEUP (Remaja Urang Sehat Jeung Pinter)	PKM Cibeureumhilir Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan	2020



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
26	GEGEBER (Gelora Gerakan Bebersih)	PKM Cibeureumhilir Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	kesehatan	2020
27	SEMUT (Selasa Minum Jamu Sehat)	PKM Cibeureumhilir Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial	2020
28	KONSULTAN (Konsultasi Dan Penyuluhan Kesehatan)	PKM Cibeureumhilir Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan	2020
29	CIBER (Cibeureum Beraksil)	PKM Cibeureumhilir Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	kesehatan	2019
E	PKM Cipelang Kota Sukabumi					
30	LEGIT (Lansia Energic dan Produktif)	PKM Cipelang Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa	2019
31	KRIWIL (KuRiling WILayah)	PKM Cipelang Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan	2020



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
32	CEKAL PAPA (Cegah Tangkal Penyakit Paru)	PKM Cipelang Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan	2020
33	RUTAN BESI (Rumah Tangga Bebas Polusi)	PKM Cipelang Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan	2020
F	PKM Selabatu Kota Sukabumi					
34	STEAMBOOT (Strategi Peningkatan Imunisasi Booster)	PKM Selabatu Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2019
35	DILAN MILEA (Peduli Kesehatan Milenial Kita)	PKM Selabatu Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2019
36	SI ENDOLITA (Aksi Cegah Deteksi dan Kendalikan Hipertensi)	PKM Selabatu Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa	2019
37	TOSS - TB (Temukan Obati Sampai Sembuh penderita TBC)	PKM Selabatu Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa	2020



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
G	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi					
38	SIBANGDUKEP (Sinegritas Pembangunan Terpadu Kepemudaan Berbasis e-Youth)	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	kepemudaan dan olah raga	2020
39	PPLPD (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah)	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	kepemudaan dan olah raga	2020
40	POWER (Promosi Online Pariwisata Tersebar Berkelanjutan)	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	pariwisata	2020



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
41	SCH (Sukabumi Creative Hub)	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	pariwisata	2020
H	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi					
42	STRATEGI ONE ROOF (One Region, One Offtaker)	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	pangan, pertanian	2020
43	SORGUM Sebagai Alternatif Pengganti Pangan Pokok Di Kota Sukabumi	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Non Digital	pangan	2020



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
			kewenangan Daerah			
44	SIMPEL KESRAWAN (Sistem Informasi Pelayanan kesehatan Dan keajahteraan Hewan)	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2019
I	Kelurahan Jayamekar Kota Sukabumi					
45	LAYANAN SI MEKAR	Kelurahan Jayamekar Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2020
46	BEAS PERELEK	Kelurahan Jayamekar Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan	Non Digital	sosial	2020



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
			yang menjadi kewenangan Daerah			
47	KORAN JAYAMEKAR (Kotak Saran Kelurahan Jaya mekar)	Kelurahan Jayamekar Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2020
J	PKM Benteng Kota Sukabumi					
48	SIKAP SEHAT (Sistem Informasi Kepuasan Pasien dan Sistem Edukasi Kesehatan)	PKM Benteng Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	pendidikan, kesehatan	2019
49	SIKASEP (Aksi Keluarga Sehat Enyahkan Penyakit)	PKM Benteng Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa	2019
50	SAJAGI (Satu Jam Bersama Gizi)	PKM Benteng Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa	2019
K	Bappeda Kota Sukabumi					



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
51	SIGENKO (Sistem Informasi Geografis Kota Sukabumi)	Bappeda Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2020
52	MOCIMI (Map Information City Of Sukabumi)	Bappeda Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	pariwisata	2020
53	SIBASI (Sistem Basis Data Inovasi)	Bappeda Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Teknologi	penelitian dan pengembangan	2021
L	Dinas Perhubungan Kota Sukabumi					
54	PANON PENDEKAR (Pembayaran Non Tunai Pengujian Kendaraan Bermotor)	Dinas Perhubungan Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	perhubungan	2020



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
55	RAOS (Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Online)	Dinas Perhubungan Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	perhubungan	2020
M	PKM Nanggaleng Kota Sukabumi					
56	LOVE MOM Bersama Puskesmas Nanggaleng	PKM Nanggaleng Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan	2020
57	Klinik Konseling Terpadu Puskesmas Nanggaleng	PKM Nanggaleng Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan	2020
N	Diskominfo Kota Sukabumi					
58	WEBSITE COVID 19 Pemerintah Kota Sukabumi	Diskominfo Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	komunikasi dan informatika	2020
59	SUPER (Sukabumi Participatory Responden)	Diskominfo Kota Sukabumi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	komunikasi dan informatika	2020
O	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi					
60	Perencanaan pengembangan aplikasi Digital SUKABUMI KECE untuk UMKM Kota Sukabumi, terdiri dari aplikasi Mobile Apps (Android) dan Web Portal yang dilengkapi dengan Dashboard Manajemen System	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	koperasi, usaha kecil, dan menengah	2020



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
61	CINDERAMATA.COM	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Teknologi	perindustrian	2020
P	PKM Sukakarya Kota Sukabumi					
62	ELING (Edukasi Keliling)	PKM Sukakarya Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan	2019
63	TERAS TETANGGA (Terapi Sehat dan Taman Edukasi Tanaman Obat Keluarga)	PKM Sukakarya Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan	2019
Q	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
64	POS MAMAH (Posyandu Mapay Imah)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan desa	2020



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
		Perlindungan Anak				
65	JAPATI KENCANA (Jaringan Akses Pelayanan Terintegrasi Keluarga Berencana)	DP2KB Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2020
R	RSUD Syamsudi, SH					
66	RIJARI (Periksa Jantung Sendiri)	RSUD Syamsudi, SH	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	kesehatan	2020
67	PATAS (Pelayanan Tanpa Menunggu Kelengkapan Persyaratan Administrasi)	RSUD Syamsudi, SH Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan	2019
S	PKM Lembursitu Kota Sukabumi					
68	JELITA (JEJARING LINTAS KOTA	PKM Lembursitu Kota Sukabumi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	kesehatan	2020
69	SIMANIS (akSI MAsyarakat ciNta hIdup Sehat)	PKM Lembursitu Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan	2019
T	PDAM Kota Sukabumi					



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
70	PAH (Teknologi Pemanfaatan Air Hujan Skala Rumah Tangga)	PDAM Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Non Digital	penelitian dan pengembangan	2020
U	SatPol PP Kota Sukabumi					
71	PASIGIT (Pengawasan Sistem Digital)	SATPOL PP Kota Sukabumi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	2020
V	Dinas Perpustakaan Kota Sukabumi					
72	CENDOL (Cerita Dongeng Online)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	pendidikan	2020
W	Dinas Kesehatan Kota Sukabumi					
73	e-MOETAN (Elektronik Monitoring Pelaksanaan Kegiatan)	Dinas Kesehatan Kota Sukabumi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	kesehatan	2020
X	Kecamatan Baros Kota Sukabumi					



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
74	SISKAMLINK (Sistem Informasi Dan Surat Keterangan melalui Link)	Kecamatan Baros Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2020
Y	Puskesmas Sukabumi					
75	MOCIDAKU (MOdal Cinta TiDAk CUkup)	PKM Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan	2019
Z	Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi					
76	PETI KEMAS (Pelayanan Teknologi Informasi Keluar Masuk Surat)	Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Teknologi	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2019
	Dinas Tenaga Kerja					
77	MONALISA (Mobil Naker Keliling Seputar Kota)	Dinas Tenaga Kerja	Inovasi pelayanan publik	Digital	tenaga kerja	2020
	Ismi Yanti					



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
78	IMAH KURING	Ismi Yanti	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, keuangan	2019
DLH Kota Sukabumi						
79	SIMPELDONG (Sistem Informasi Pelayanan Dan Pelaporan Dokumen Lingkungan)	DLH Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	lingkungan hidup	2020
Sekretariat Daerah						
80	E-PERFORMANCE	Sekretariat Daerah	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2020
BPBD Kota Sukabumi						



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
81	SIEDAN (Sisten Informasi Elektronik Data Bencana)	BPBD Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2020
Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi						
82	SWALAYAN (Sistem Whatsapp Pelayanan Administrasi)	Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	komunikasi dan informatika, fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2020
PKM Tipar Kota Sukabumi						
83	SICEPOT (Sistem Cepat Penanganan ODGJ Terpadu)	PKM Tipar Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial	2019
Dinas PUPR Kota Sukabumi						



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
84	AVATAR (Analisis Volume Air Tanpa Rekayasa)	Dinas PUPR Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	pekerjaan umum dan penataan ruang	2019
Kelurahan Cikundul Kota Sukabumi						
85	INFAK TABAROK (Tabungan Barokah)	Kelurahan Cikundul Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	sosial	2019
PKM Gedongpanjang Kota Sukabumi						
86	DEWA ULAR (Deteksi Awal Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular)	PKM Gedongpanjang Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan	2020
Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi						
87	SI PINTAR (Sistem Pelayanan Siap Antar)	Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2020
Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi						



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
88	SIKALEM (Sistem Kotak Layanan Mandiri)	Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2019
Kecamatan Cikole Kota Sukabumi						
89	PENDAKK DI KELURAHAN	Kecamatan Cikole Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2020
Dinsos Kota Sukabumi						
90	UDUNAN ONLINE	Dinsos Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,	2019



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
					sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa	
BKPSDM Kota Sukabumi						
91	cDNA (Competency Development Need AnalysisA	BKPSDM Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	pendidikan dan pelatihan	2019
PKM Cikundul Kota Sukabumi						
92	MEPELING (Metode Penyuluhan Keliling)	PKM Cikundul Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan	2019
Kelurahan Baros Kota Sukabumi						
93	APEL MANIS (Aplikasi Pelayanan Masyarakat Humanis)	Kelurahan Baros Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	pemberdayaan masyarakat dan desa	2021
PKM Baros Kota Sukabumi						



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
94	SABTU UTS (setiap sabtu minggu ke-4 tim UKM To School)	PKM Baros Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan	2019
Kenza						
95	CATUR CERDAS CERMAT	Kenza	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	pendidikan, kepemudaan dan olah raga	2019
DPMPTSP Kota Sukabumi						
96	SIJIMAT (Siap Jemput Perizinan Masyarakat)	DPMPTSP Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	penanaman modal	2020
Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi						
97	SI BEO (Sistem Informasi Layanan Berbasis Elektronik)	Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	komunikasi dan informatika	2020
Setwan Kota Sukabumi						
98	SIMLEG (sistem informasi legislasi)	Setwan Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2021



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN PEMERINTAH	TAHUN
			kewenangan Daerah			
Kelurahan Jayaraksa						
99	MELATI GAMBIR	Kelurahan Jayaraksa	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, statistik, kearsipan	2021



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023

Rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2023 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah Tahun 2021 dan 2022 untuk penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Kota. Musrenbang menjadi media/sarana untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kota Sukabumi.

Di Kota Sukabumi, penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018- 2023 pada tahun berkenaan dengan memperhatikan hasil penyesuaian proyeksi pendapatan dan belanja daerah khususnya yang berasal dari dana transfer yang difokuskan untuk penanganan pemulihan ekonomi akibat pandemi *Covid-19*, serta memperhatikan keterkaitannya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

5.1 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2023 dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 merupakan tahun kedua implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif. Program dan kegiatan hasil pemetaan ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 berbasis rincian objek belanja. Seluruh perangkat daerah mengusulkan rencana kerja pada SIPD dengan melakukan entri rincian objek sehingga dari awal proses perencanaan sudah dapat diketahui apa tujuan, siapa sasaran dan bagaimana pelaksanaan kegiatannya sehingga nanti dapat dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian dengan indikator kinerja yang akan dicapainya sebagaimana dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis perangkat daerah dan perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023.

Dalam proses pengusulan pagu anggaran Tahun 2023, perangkat daerah diarahkan untuk mengacu pada dokumen perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023. Namun demikian setelah usulan di input pada SIPD, maka dilakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan organisasi serta yang paling utama adalah disesuaikan dengan estimasi pendapatan Tahun 2023.

Rekapitulasi usulan pagu anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana yang sudah tertuang dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Pagu Perangkat Daerah Berdasarkan APBD
dan Proyeksi RPJMD Tahun 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	USULAN PAGU 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275,369,371,591
2	Dinas Kesehatan	435,961,923,488
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	73,332,792,746
4	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	11,943,985,037
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,499,825,476
6	Dinas Sosial	6,596,089,918
7	Dinas Tenaga Kerja	4,091,876,820
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	12,811,308,710
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	12,086,505,855



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	USULAN PAGU 2023
10	Dinas Lingkungan Hidup	26,466,232,077
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,022,424,105
12	Dinas Perhubungan	16,860,278,095
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,919,584,209
14	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	14,486,740,345
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,672,769,488
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11,375,909,634
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,110,548,605
18	Sekretariat Daerah	48,044,747,763
19	Sekretariat DPRD	52,433,541,346
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13,896,413,845
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	50,524,003,411
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,197,821,469
23	Inspektorat Daerah	7,931,521,678
24	Kecamatan Cikole	13,046,567,841
25	Kecamatan Gunung Puyuh	9,830,553,022
26	Kecamatan Citamiang	10,439,728,621
27	Kecamatan Warudoyong	11,242,699,782
28	Kecamatan Baros	8,503,646,197
29	Kecamatan Lembur Situ	10,271,910,721
30	Kecamatan Cibeureum	9,169,032,536
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7,376,626,040
JUMLAH TOTAL USULAN RKPD		1,188,516,980,471

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Apabila dilihat dari urusannya, dan dikaitkan dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam melakukan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka akan terlihat sebagaimana tabel dibawah ini.



Tabel 5.2
Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Anggaran
Per Urusan Pada RKPD Tahun 2023

No	Bidang	Prog ram	Kegia tan	Sub Kegia tan	Pagu Anggaran
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	3	11	82	275,166,970,291
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	21	97	435,961,923,488
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11	20	57	66,436,746,151
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4	5	7	6,896,046,595
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5	22	77	15,443,810,513
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7	18	89	6,596,089,918
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	5	14	39	4,058,876,820
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5	10	16	1,630,679,600
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	5	13	29	11,111,171,530
10	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	10	20	57	26,466,232,077
11	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	15	37	6,022,424,105
12	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5	14	51	11,180,629,110



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Bidang	Prog ram	Kegia tan	Sub Kegia tan	Pagu Anggaran
13	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	15	45	16,860,278,095
14	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	11	52	5,864,884,759
15	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	7	14	33	12,663,541,970
16	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	7	12	29	5,672,769,488
17	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4	12	38	9,933,896,634
18	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	6	29,658,000
19	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	2	5	25,041,450
20	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	5	7	19	202,401,300
21	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	8	28	4,997,345,805
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1	3	6	113,202,800
23	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	2	4	7	236,419,225
24	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	4	4	6	1,442,013,000
25	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	5	9	15	738,915,100
26	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	5	6	12	1,208,844,775
27	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	3	6	614,353,600
28	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	2	2	2	33,000,000
29	Sekretariat Daerah	3	19	65	48,044,747,763
30	Sekretariat DPRD	2	17	103	52,433,541,346
31	Perencanaan	3	15	75	13,346,503,345
32	Keuangan	4	13	70	50,524,003,411



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Bidang	Prog ram	Kegia tan	Sub Kegia tan	Pagu Anggaran
33	Kepegawaian	2	10	33	6,874,449,469
34	Pendidikan Dan Pelatihan	1	2	6	1,323,372,000
35	Penelitian Dan Pengembangan	1	4	8	549,910,500
36	Inspektorat Daerah	3	11	45	7,931,521,678
37	Kecamatan	6	16	46	72,504,138,720
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	43	7,376,626,040
Jumlah					1,188,516,980,471

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Penyusunan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2023 sangat mempertimbangkan prioritas pembangunan yang sudah disampaikan pada perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023. Dari hasil analisis yang dilakukan, maka didapatkan data bahwa pagu anggaran RKPD Tahun 2023 yang mendukung pencapaian enam prioritas pembangunan dan indikator kinerja utama kepala daerah adalah sebesar Rp. 739.943.823.948,- atau sekitar 62,26 % dari total belanja RKPD yang tersebar di berbagai perangkat daerah pengampu. Lebih jelasnya rincian pagu anggaran tersebut seperti tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3
Rekapitulasi Anggaran Pada RKPD Tahun 2023
Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Pencapaian IKU Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
1	Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia		22,415,185,313	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12,182,124,190	SETDA
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	199,104,500	BAKESBANGPOL
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	743,529,000	SATPOL PP dan DAMKAR



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,084,326,898	DISPORAPAR
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	26,451,800	DISDIKBUD
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	426,769,700	DP2KBP3A
		Program Perlindungan Perempuan	356,068,300	DP2KBP3A
		Program Perlindungan Khusus Anak	401,666,500	DP2KBP3A
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	20,940,000	DP2KBP3A
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2,039,839,500	DP2KBP3A
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2,695,258,975	DP2KBP3A
		Program Pemberdayaan Sosial	1,003,877,200	DINSOS
		Program Rehabilitasi Sosial	421,617,500	DINSOS
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	718,955,000	DINSOS
		Program Penanganan Bencana	94,656,250	DINSOS
2	Peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi		463,771,937,312	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34,797,826,673	SETDA
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,106,059,611	BAPPEDA
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,644,377,900	BAPPEDA



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	320,957,000	INSPEKTORAT
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,502,916,469	BKPSDM
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	11,800,783,928	BPKPD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,053,301,800	BPKPD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	378,715,354,725	DINKES
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,676,868,343	DINSOS
		Program Pemberdayaan Sosial	1,003,877,200	DINSOS
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,419,569,238	DPMPSTP
		Program Pendaftaran Penduduk	34,673,700	DISDUKCAPIL
		Program Pencatatan Sipil	44,491,200	DISDUKCAPIL
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30,250,000	DISDUKCAPIL
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	9,375,000	DISDUKCAPIL
		Program Pembinaan Perpustakaan	377,506,000	DISPUSIPDA
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	16,047,035,075	KECAMATAN
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	515,563,250	DISKOMINFO
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	121,239,700	DISKOMINFO
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	549,910,500	BAPPEDA
3	Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat		136,465,112,438	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	53,045,218,438	DINKES



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Pendidikan	82,995,495,700	DISDIKBUD
		Program Penanggulangan Bencana Daerah	365,928,300	BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	58,470,000	SATPOL P3K
4	Peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan		51,403,706,872	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	3,303,724,800	DISHUB
		Program Penyelenggaraan Jalan	28,818,931,887	DPUTR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	-	DPUTR
		Program Penataan Bangunan Gedung	1,628,395,350	DPUTR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	2,534,876,004	DPUTR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	318,170,000	DPUTR
		Program Kawasan Permukiman	11,553,197,000	DPUTR
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	167,286,800	DLH
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	174,489,900	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	210,479,600	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	8,745,000	DLH
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	64,167,700	DLH
		Program Pengelolaan Persampahan	2,621,242,831	DLH



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
4	Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan		8,549,290,575	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	2,652,800,500	DISKUMINDAG
		Program Pengembangan Umkm	500,000,000	DISKUMINDAG
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	369,695,000	DPMPSTP
		Program Promosi Penanaman Modal	72,741,250	DPMPSTP
		Program Penempatan Tenaga Kerja	50,000,000	DISNAKER
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	436,200,000	DISNAKER
		Program Hubungan Industrial	68,149,900	DISNAKER
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	DISKUMINDAG
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	4,263,750	DISKUMINDAG
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,105,311,250	DISKUMINDAG
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1,006,328,000	DISPORAPAR
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	231,902,000	DISPORAPAR
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	195,077,300	DKP3
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	513,385,000	DKP3
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	799,121,750	DKP3
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	8,662,500	DKP3
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	332,536,250	DKP3
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	191,311,125	DKP3



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	11,805,000	DKP3
6	Penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19		57,338,591,438	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	53,045,218,438	DINKES
		Program Rehabilitasi Sosial	421,617,500	DINSOS
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	718,955,000	DINSOS
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	2,652,800,500	DISKUMINDAG
		Program Pengembangan Umkm	500,000,000	DISKUMINDAG
Jumlah			739,943,823,948	

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa proses perencanaan harus mengakomodir harus mengakomodir kebutuhan atau usulan masyarakat melalui Musrenbang serta pokok-pokok pikiran DPRD. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, usulan masyarakat serta pokok pikiran DPRD yang seluruhnya sudah diakomodir oleh perangkat daerah pengampu sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.4
Rekapitulasi Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang
Yang Diakomodir Perangkat Daerah

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
1	Bantuan / Pelatihan Pemulasaraan Jenazah	6
2	Bantuan Sarana Prasarana Perangkat Komputer + Printer	1
3	Biaya Operasional Kegiatan	1
4	Bimtek Kepemudaan	1
5	Bimtek Linmas Tanggap Bencana	1
6	Bimtek Peningkatan Kapasitas Kader Poktan Holistik Integratif	1



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
7	Bimtek Penurunan Stunting	2
8	Insentif Kader Posyandu	1
9	Jalan Pemukiman / Rehab / Pengaspalan/	6
10	Kampung Tematik	1
11	Pelatihan Anggota Remaja Masjid Dalam Program Unggulan Tp. Pkk	1
12	Pelatihan Bengkel Dan Las	1
13	Pelatihan Budidaya Ikan	3
14	Pelatihan Budidaya Jangkrik	1
15	Pelatihan Hidroponik	2
16	Pelatihan Kader Posyandu	1
17	Pelatihan Kemasan	1
18	Pelatihan Kepemimpinan	1
19	Pelatihan Keterampilan / Pelatihan Kerja (Tata Boga, Las Pelatihan Sablon Dstnya)	9
20	Pelatihan Keterampilan / Pelatihan Kerja (Tata Boga, Las Pelatihan Sablon Dstnya)	10
21	Pelatihan Kewirausahaan	7
22	Pelatihan Komputer	3
23	Pelatihan Menjahit	2
24	Pelatihan Peningkatan Ekonomi Berbasis Rumah Tangga	1
25	Pelatihan Pkk / Kader Posyandu/ Dasa Wisma	2
26	Pelatihan Posyandu Remaja	1
27	Pelatihan Teknis Pertanian	1
28	Pelatihan Umkm Pemuda	3
29	Pembangunan Gorong-Gorong/Drainase	9
30	Pembangunan Jalan Pemukiman	2
31	Pembangunan Jembatan Di Pemukiman	3
32	Pembangunan Pintu Air Dan Sodetan	1
33	Pembangunan Talud/ Irigasi / Embung/ Bendungan Dan Penampungan Air	17
34	Pembuatan Mushola Kelurahan	1
35	Pembuatan Septic Tank Komunal	7
36	Pemeliharaan/Rehab Talud/ Irigasi / Normalisasi Sungai/Embung/ Bendungan Dan Penampungan Air	5
37	Penerangan Jalan Umum (Pju)	2
38	Pengadaan Alat Olahraga	1
39	Pengadaan Alat Seni Tradisional	1
40	Pengadaan Benih Padi, Pupuk Dan Obat Hama	1
41	Pengadaan Cermin Cembung (Glass Reflector)	1
42	Pengadaan Roda Sampah	1



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
43	Pengadaan Sarana Air Bersih	9
44	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	4
45	Pengadaan Seragam Kader Posyandu	2
46	Pengembangan Percontohan Bibit Tanaman Toga, Sayuran Dan Buah Buahan	1
47	Pengerukan/Pendalaman Dan Perbaikan Selokan	2
48	Peninggian Halaman Masjid Al-Mustofa Darussalam	1
49	Perbaikan Jembatan	2
50	Rehab/ Peningkatan Jalan Kota	1
51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gorong-Gorong / Drainase	6
52	Revitalisasi Posyandu	2
53	Rumah Tidak Layak Huni	2
54	Santunan Bantuan Untuk Yatim, Dhuafa, Dan Jompo	1
55	Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Kesehatan	2
Jumlah		158

Tabel 5.5
Rekapitulasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Yang diakomodir Perangkat Daerah

No	Uraian usulan	Perangkat Daerah	Jumlah Usulan
1	Bantuan Sosial untuk Petani	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	16
2	Bantuan Permodalan UMKM	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	143
3	Pembangunan Drainase/ Gorong - Gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1
4	Pembangunan Jalan Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3
5	Pembangunan/ Rehabilitasi Pos Ronda, Pos Yandu, Dll	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6
6	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	19
7	Rehabilitasi Drainase/ Gorong - Gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3



No	Uraian usulan	Perangkat Daerah	Jumlah Usulan
8	Rehabilitasi Jalan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4
9	Sarana dan Prasarana Tempat Peribadatan	Sekretariat Daerah	11

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Secara umum program prioritas terkait erat dengan upaya pencapaian sasaran daerah, dimana sasaran daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran dijabarkan ke dalam indikator sasaran, yang dijabarkan kembali melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Dengan demikian, maka diharapkan sasaran daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai dari akumulasi output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

Daftar kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan dalam bentuk Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) menurut kelompok Perangkat Daerah pada Dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 atau **Buku II**, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023.



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memajukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan indikator kinerja suatu keluaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa kinerja tersebut diukur dengan indikator yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketercapaian indikator menjadi parameter keberhasilan Kepala Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang disajikan dalam tabel lampiran ini. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja *outcomes* atau *impact* yang dirumuskan berdasarkan analisis



pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran. Selain itu, ditetapkan juga target pencapaiannya sebagai patokan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023. Terdapat perubahan indikator makro pada Perubahan RPJMD tersebut dimana sebelumnya indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan menjadi Pendapatan Per Kapita. Selanjutnya indikator yang lain masih tetap sama tetapi terdapat pengurangan jumlah indikator.

Target Indikator Makro Pembangunan sudah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Sukabumi, dimana penentuan target tersebut berdasarkan hasil analisis, kajian dan atas hasil koordinasi dan persetujuan dari Provinsi Jawa Barat. Namun demikian setelah di implementasikan pada Tahun 2021, ternyata realisasi dari target tersebut masih banyak yang jauh dari harapan yang dikarenakan berbagai faktor seperti kondisi Pandemi Covid-19, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat seperti PPKM serta kondisi lainnya yang sangat mempengaruhi pencapaian Indikator Makro Pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Kota Sukabumi melakukan revisi target indikator makro tersebut yang disesuaikan dengan kondisi yang ada serta kemampuan dari pemerintah daerah.

Adapun target perubahan RPJMD serta Revisi Target di RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang akan dijabarkan pada tabel 6.1 di bawah ini.



Tabel 6.1
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Sukabumi
Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Target RPJMD 2023	Target RKPD 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,60	74,75	74,75
2	Pendapatan per kapita	Rupiah (Juta)	25,230	28,430	27,132
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,25	7,50	8,20
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,78	9,59	9,90
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,71	5,54	4,20
6	Indeks Gini / Gini Rasio	Angka	0,436	0,400	0,421

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023 serta hasil analisis BAPPEDA

Selanjutnya Kota Sukabumi telah menentukan Indikator Pembangunan Daerah yang merupakan indikator antara bagi pencapaian Indikator Makro sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 6.1 diatas. Indikator tersebut kemudian disusun target pencapaiannya yang mengacu pada realisasi pada tahun sebelumnya serta kondisi terkini pencapaian indikator. Indikator Pembangunan Daerah tersebut sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2
Proyeksi Indikator Pembangunan Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target RKPD 2023
1	Inflasi (%)	%	2,5
2	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Juta Orang	26,6
3	PDRB Perkapita (ADHK) (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	41,189



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target RKPD 2023
4	PDRB Perkapita (ADHB) (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	27,132
5	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	Ribu Rupiah/ Orang/Tahun	11,350
6	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Tahun	72,25
7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	Tahun	10,89
8	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	Tahun	13,49

Sumber: Hasil analisis BAPPEDA

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terkait dengan indikator nasional. Target capaian kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Sukabumi
Tahun 2021-2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	Target			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	74,08	78,02	80,09	Bagian Kesra
2	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.287	0.317	0.367	Dinas Kesehatan
3	Indeks Pendidikan	Angka	69,82	69,83	69,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Indeks Kota Kreatif (IKK)	Angka	27,2	48,8	63,6	BAPPEDA



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	Target			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
5	Indeks pembangunan gender	Angka	91,19	91,25	91,31	DP2KBP3A
6	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	67,91	67,96	68,01	DP2KBP3A
7	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Angka	78	80	82	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	35	40	45	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	point	58.21	59.00	59.78	Dinas Lingkungan Hidup
10	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	point	0,51	0,53	0,55	BPBD
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	1.851,46	1.944,04	2.041,24	Dinas Penanaman Modal PTSP
12	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	persen	1	2	3	Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan
13	kontribusi pariwisata terhadap PDRB	persen	1 – 1,14	1,15-1,29	1,30 – 1,44	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
14	Skor Pola Pangan Harapan	persen	79.50	79.99	80.30	DKP3
15	Nilai SAKIP	Skor	78,00	79,00	80,00	Bagian Tapem



NO	INDIKATOR	SATUAN	Target			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
16	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	BPKPD
17	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,81	2,91	3,01	Bagian Organisasi
18	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2.3	2.4	2,50	Dinas Komunikasi dan Informatik
19	Indeks Daya Saing Daerah	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	BAPPEDA

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023

6.2 Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. IKK Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 – 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari capaian pembangunan jangka menengah sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.



Tabel 6.4

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tahun 2021-2023**

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATU AN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	
	1) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
	a) Pendidikan					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	81	83	85	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	100	100	100	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100	100	100	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	87	90	93	
	b) Kesehatan					Dinas Kesehatan
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Angka	0.38	0.39	0.40	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2023

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATU AN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	
6	Cakupan pelayanan kehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	
8	Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	
	c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					Dinas Pekerjaan Umum
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	Persen	25.93	25.93	25.93	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATU AN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
	pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota					
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	19.3	19.3	19.3	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	100	100	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Persen	51	53	55	
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	80	82	85	
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	82.52	82.85	83.21	
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	10	10	10	
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	
	d) Perumahan Rakyat					Dinas Pekerjaan Umum
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	10	10	10	
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	94	96	98	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	98.32	98.61	98.9	
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	
NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
	e) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	4.5	5.5	6.5	
3	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	
4	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	
5	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	60	75	90	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	
	f) Sosial					Dinas Sosial
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATU AN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	
	2) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
	a) Tenaga Kerja					Dinas Tenaga Kerja
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	70	75	80	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	70	75	80	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	66	67	68	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	77	78	79	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	70	75	80	
	b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Dinas DaldukKBP3A
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	20	23	25	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0.000 5	0.000 5	0.000 5	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATU AN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
	c) Pangan					Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	110	109	108.5	
	d) Pertanahan					Dinas Penanaman Modal PTSP dan Dinas PUTR
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	80	82	85	
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	100	100	100	
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	100	100	100	
	e) Lingkungan Hidup					Dinas Lingkungan Hidup
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	62.64	63.5	64.36	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kot	Persen	74	73	72	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	17	20	25	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATU AN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
	f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	100	100	100	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	40	60	80	
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100	100	100	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100	100	100	
	g) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Dinas DaldukKBP3A
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2.3	2.3	2,29	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	23.55	23.56	23.57	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11.15	11.13	11.12	
	h) Perhubungan					Dinas Perhubungan
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	angka	2000	2200	2420	
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	angka	0.57	0.61	0.63	
	i) Komunikasi dan Informatika					Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	Persen	35	35	35	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATU AN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
	disediakan oleh Dinas Kominfo					
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	35	35	35	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	62	63	65	
	j) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	15	17	19	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	100	100	100	
	k) Penanaman Modal					Dinas Penanaman Modal PTSP
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	75	75	75	
	l) Kepemudaan dan Olahraga					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	26.88	28.99	31.26	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	25.14	27.11	29.24	
3	Peningkatan prestasi olahraga	jenis	50	100	75	
	m) Statistik					Dinas Komunikasi



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATU AN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
						dan Informatika
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	50	50	50	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	50	50	50	
	n) Persandian					Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	50	60.77	60.77	
	o) Kebudayaan					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1	Terlestariannya Cagar Budaya	Persen	77	77	78	
	p) Perpustakaan					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	58	58.4	59	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	55.25	55.5	55.75	
	q) Kearsipan					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	72.5	83.75	90	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	73	82	92	
3) Urusan Pilihan						
	a) Kelautan dan Perikanan					Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	jumlah	1365.65	1368.95	1372.25	
	b) Pariwisata					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	3	3.5	4	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	13	14.5	15	
3	Tingkat hunian akomodasi	hari	26500	30000	33000	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	1 – 1,14	1,15- 1,29	1,30 – 1,44	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	21,541,807,315	23,695,988,046	26,065,586,850	
	c) Pertanian					Dinas Ketahanan Pangan,



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATU AN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
						Pertanian dan Perikanan
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton	6.41	6.54	6.6	
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	20	20	20	
	d) Perdagangan					Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	1	1	1	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	90	90	90	
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	25	27	29	
	e) Perindustrian					Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	0.40	0.50	0.60	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	10	10	10	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang	Persen	50	50	50	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
	dikeluarkan oleh instansi terkait					
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	20	20	20	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Buku	1	1	1	
	4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
	a) Perencanaan dan Keuangan					BPKPD
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	59.01	59.01	59.01	
2	Rasio PAD	Persen	25.3	25.3	25.3	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	3	3	
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	3	3	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	94.00	94.00	94.00	
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	
	b) Pengadaan					Bagian Pengadaan Barang/Jasa
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	2	3	4	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sukabumi Tahun 2023**

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATU AN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SESUDAH PERUBAHAN			PERANGKAT DAERAH
			2021	2022	2023	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	1.2	1.3	1.4	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	76	77	78	
	c) Kepegawaian					BKPSDM
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	215	220	226	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	4	5	5	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	84	86	87	
	d) Manajemen Keuangan					BPKPD
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	1	1	1	
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	1	1	1	
3	Manajemen Aset	Persen	90	90	90	
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	7	7	7	
	e) Transparansi dan Partisipasi Publik					BPKAD
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	100	100	100	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023



BAB VII PENUTUP

RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Revisi RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dengan tema pembangunan **“Mencapai Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera”**. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2023 disusun dengan orientasi pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat.

Perencanaan pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 yang dijabarkan melalui RKPD Tahun 2023 ini disusun dengan tetap memperhatikan point-point sebagai berikut:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 6 (enam) prioritas pembangunan daerah dengan 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas serta sasaran prioritas pembangunan Kota Sukabumi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow output priority programs*) serta program prioritas dan unggulan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan dan melibatkan peran aktif seluruh stakeholder baik dari pemerintah maupun diluar pemerintah.

Selanjutnya RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 ini akan dijadikan :

1. Dasar bagi penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 terutama bagi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.



2. Merupakan pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan APBD Tahun 2023, yang nantinya akan dibahas bersama DPRD Kota Sukabumi.

Akhirnya semoga perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Semoga seluruh pihak yang terkait dapat berkontribusi aktif dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan pemantapan daya saing daerah menuju peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang unggul.

Sukabumi, Juli 2022
WALI KOTA SUKABUMI,

ACHMAD FAHMI